



**DINDIKBUD
KAB. DEMAK**

LKJIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN ANGGARAN 2025



**"Menguatkan Partisipasi Semesta Mewujudkan
Pendidikan Bermutu untuk Semua"**



0291 – 685242

**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN DEMAK**



dindikbud.demakkab.go.id



Jalan Sultan Trenggono No. 89 Demak

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan Karunianya, kami dapat menyelesaikan penyusunan LKJIP Tahun 2025 oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2025, dengan baik, lancar dan tepat waktu. Laporan Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pelaksanaan program dan kegiatan dan penggunaan anggaran dalam rangka mewujudkan kualitas, akses dan tata kelola pendidikan yang berkualitas, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

LKjIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Tujuan penyusunan LKJIP adalah untuk memberikan gambaran penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKJIP juga dapat dijadikan gambaran penerapan prinsip-prinsip **good governance**, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Demikian LKJIP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.



Demak, 05 Mei 2026

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Demak

Haris Wahyudi Ridwan, AP, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 197606061995011001

RINGKASAN IKHTISAR EKSEKUTIF (EXECUTIVE SUMMARY)

Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa Perjanjian Kinerja. Berdasarkan hal tersebut maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025.

LKjIP Tahun 2025 ini merupakan laporan kinerja tahunan atas pelaksanaan rencana strategis (Renstra) Tahun 2023-2026 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak. Laporan akuntabilitas kinerja ini melaporkan tingkat pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang telah diperjanjikan.

Berdasarkan telaah visi, dan misi dan program Bupati Demak, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak berdasarkan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan berkewajiban upaya pencapaian 2 (dua) misi yaitu:

1. MISI 3 : “Meningkatkan kedaulatan pangan dan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal serta mengurangi tingkat pengangguran”;
2. MISI 5 : “Meningkatkan kualitas Pendidikan dan kesehatan sesuai standar serta perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan”. dan;
3. MISI ke 7 : “Mengembangkan kapasitas pemuda, olahraga, seni-budaya, meningkatkan keberdayaan perempuan, perlindungan anak dan mengendalikan pertumbuhan penduduk”.

Kedua misi tersebut dijabarkan dalam tujuan dan sasaran strategis. Masing-masing sasaran strategis yang ditetapkan mempunyai indikator kinerja sebagai alat untuk mengukur tingkat ketercapaiannya. Setiap tahun indikator kinerja diukur tingkat ketercapaiannya. Uraian lebih terinci mengenai target dan tingkat ketercapaian indikator kinerja dapat dilihat pada Bab III Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak.

Pendidikan yang dikembangkan juga tidak terlepas dari kearifan lokal di Kabupaten Demak, sehingga akan diberikan sebuah materi tambahan berupa pendidikan budi

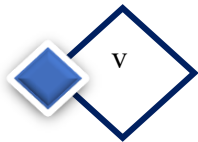
pekerti, pendidikan budaya jawa, dan pendidikan lain yang mengacu pada kearifan lokal yang ada. Adapun agenda Prioritas Bidang Pendidikan:

1. Peningkatan kinerja pelayanan publik;
2. Peningkatan akuntabilitas kinerja;
3. Peningkatan layanan pendidikan berkualitas;
4. Peningkatan kualitas hasil belajar;
5. Peningkatan profesionalisme Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
6. Peningkatan Pengelolaan Warisan Budaya;
7. Peningkatan Pengelolaan Warisan Budaya Tak Benda; dan

Berdasarkan pengukuran kinerja outcome, rata-rata capaian Indikator Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak Tahun 2025 adalah sebesar 97,61% meningkat dibandingkan dengan tahun lalu sebesar 95,29%. Dari 9 Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak pada Tahun 2025, Pencapaian sasaran strategis dalam Penetapan Kinerja Tahun 2025 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak dengan rincian sebanyak 8 Indikator Kinerja (88,89%) capaian kinerjanya sangat tinggi, 1 Indikator Kinerja (11,11%) capaian kinerjanya tinggi, Indikator Kinerja sedang, Indikator Kinerja baik, dan tidak ada indikator kinerjanya kurang, Berikut tabel rekapitulasi tingkat pencapaian Indikator Kinerja selama Tahun 2025 :

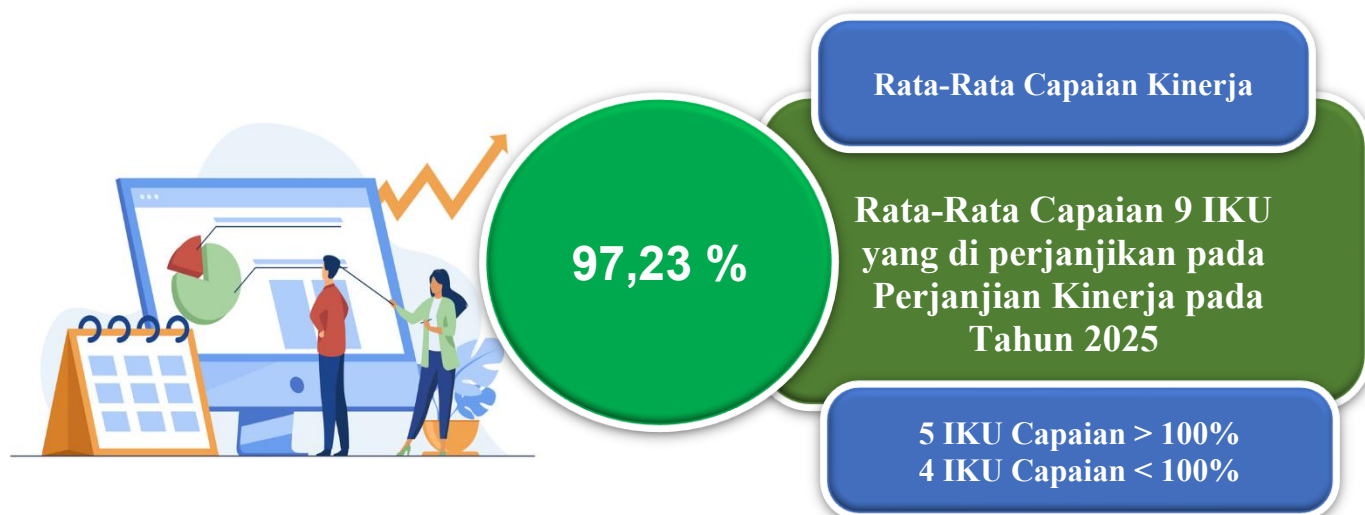
No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Jumlah IKU	Persentase %
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi	8	88,89
2	76% ≤ 90%	Tinggi	0	0,00
3	66% ≤ 75%	Sedang	1	11,11
4	51% ≤ 65%	Rendah	0	0,00
5	≤ 50%	Sangat Rendah	0	0,00

Berdasarkan pengukuran kinerja keuangan, rata-rata capaian kinerja keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak Tahun 2025 adalah sebesar 95,50% menurun dibandingkan dengan tahun 2025 yang tercapai sebesar 97,84% meningkat dibandingkan tahun lalu 95,29%. dari sebanyak 7 program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, pada tahun ini capaian kinerja keuangannya sangat tinggi sebanyak 4 Program (66,67%), program capaian kinerja keuangannya tinggi

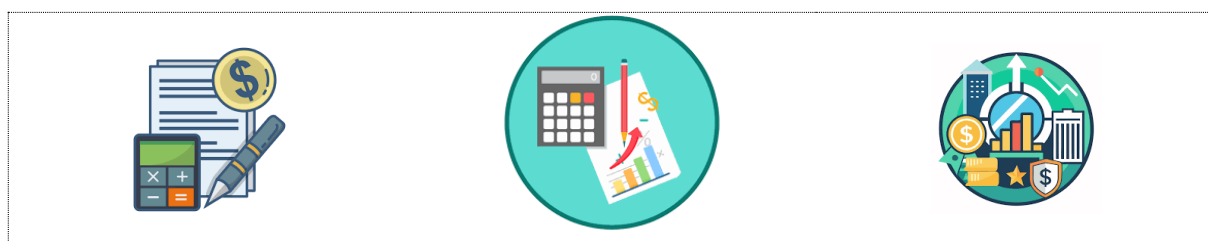


tercapai sebanyak 2 Program (33,33%), sedangkan capaian kinerja kategori capaian sangat rendah 1 Program (14,29%) dan rendah tidak ada, capaian kinerja belum terlaksana secara maksimal di sebabkan oleh DAK Bidang Pendidikan dan Bidang Kebudayaan karena tidak bisa dilaksanakan karena perubahan juknis sudah tidak relevan dilaksanakan. Persentase Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak Tahun 2025.

Capaian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak yang dicapai Tahun 2025, dalam mewujudkan Tujuan Strategis (TS) dan Sasaran Strategis (SS) dapat digambarkan sebagai berikut :



Kinerja Anggaran 2025



Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Penyerapan Anggaran
832.956.428.835	795.507.258.382	95,50%

TS.1 *Meningkatnya kinerja pelayanan publik*

Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	90,00	92,83	103,14
Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	%	100	100	100

TS.2 *Meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur*

Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Nilai SAKIP Dindikbud	Angka	83,69	81,80	97,74
Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target	%	83,69	80,00	95,59

TS.3 *Meningkatnya Kualitas Pendidikan*

Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Pendidikan	Indeks	0,667	0,648	97,15

SS.1 *Meningkatkan partisipasi pendidikan pada jenjang PAUD, Pendidikan dasar, dan pendidikan non formal*

Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Angka Harapan Lama Sekolah (AHRSL)	Tahun	14,00	13,37	95,50
Angka Rata-rata Lama Sekolah (ARLS)	Tahun	8,40	8,29	98,69
Persentase Sekolah yang Terakreditasi minimal B	%	83,50	84,14	100,77



TS.4 Meningkatkan pelestarian Warisan Budaya

Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Peningkatan pelestarian warisan budaya	Persentase	5,47	5,47	100
Persentase pelestarian warisan budaya	%	80,00	80,00	100

Permasalahan Umum

Meskipun telah banyak kinerja dihasilkan selama Tahun 2025, namun masih banyak permasalahan dalam bidang pendidikan, dan Kebudayaan yang perlu segera diselesaikan, seperti pengimplementasian kurikulum Merdeka, Sekolah Penggerak, Guru Penggerak, Platform Merdeka Mengajar, Akreditasi sekolah, peningkatan akses jenjang pendidikan anak usia dini sampai jenjang pendidikan sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama, peningkatan mutu pendidikan, peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan, pengelolaan ujian sekolah (US/USBN) Jenjang SD/MI Sederajat, Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) Jenjang SD/MI Sederajat dan SMP/MTs Sederajat, Pendataan Kebudayaan, Pengelolaan Warisan Budaya, Pengelolaan Warisan Budaya tak Benda, pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, penyediaan sarana dan prasanana pendidikan, penyebaran guru yang belum merata.

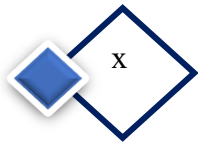
Evaluasi terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut diatas terhadap permasalahan atau tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak kedepan, sebagai berikut:

1. Rata-rata tingkat pendidikan penduduk usia 25 tahun keatas di Kabupaten Demak masih pada jenjang SMP (kelas 1 semester 2);
2. Penduduk usia 25 tahun Penduduk usia 25 tahun ke atas yang belum tuntas wajib belajar 12 tahun bertempat tinggal diluar Kabupaten Demak (bekerja diluar domisili);
3. Masih terdapat Kartu Keluarga penduduk Kabupaten Demak pada katagori jenjang pendidikan belum disesuaikan dengan ijazah terakhir, sehingga data tidak terekam dalam perhitungan BPS;
4. Masih ada warga negara (masyarakat Kabupaten Demak) usia 7-15 Tahun yang tidak mengikuti Pendidikan Dasar tercatat sebagai Anak Tidak Sekolah (ATS) dengan penjelasan :
 - a. Anak tidak sekolah (belum bersekolah),
 - b. Anak Drop Out dari tingkat Pendidikan Dasar (SD, SMP),
 - c. Anak tidak melanjutkan dari pendidikan Sekolah Dasar ke jenjang pendidikan SMP (pendidikan Nonformal/ Kesetaraan paket b ke paket c)

- d. Bersekolah/mengikuti pendidikan di luar Kabupaten Demak, sehingga tidak mensport Data Pokok Pendidikan Kabupaten Demak;
5. Survei kepuasan Masyarakat, berupa skor Indek Kepuasan Masyarakat (IKM), sejalan dengan Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dijelaskan bahwa penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) secara berkala minimal 1 kali dalam 1 tahun. Skor Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2025 menurun menjadi 92,83 dibanding Skor Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2024.yaitu 93,57.
6. Terdapat data calon siswa miskin penerima hibah bantuan sosial untuk pendidikan dan penunjang pendidikan belum termuat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek).

Melihat permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut beberapa program atau kebijakan yang dijalankan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak antara lain program rehabilitasi ruang kelas rusak berat, bantuan siswa miskin, beasiswa kepada siswa berbakat dan berprestasi, Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) untuk Jenjang PAUD, Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (BOP Pendidikan Kesetaraan) untuk Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan SKB (Sanggar Kegiatan Belajar), Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk semua jenjang Pendidikan Dasar, program pendidikan universal, pemberian tunjangan kepada pendidik dan tenaga kependidikan, serta peningkatan kompetensi dan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan, optimalisasi pendataan di Bidang Kebudayaan, Peningkatan Pengelolaan Warisan Budaya dan Peningkatan Pengelolaan Warisan Budaya Tak Benda.

Berdasarkan evaluasi kinerja tahun 2025, secara keseluruhan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak telah mencapai sasaran strategis yang ditetapkan, meskipun terdapat beberapa indikator yang masih memerlukan perbaikan. Hasil ini akan menjadi bahan evaluasi dan perumusan kebijakan untuk perencanaan program di tahun mendatang agar kinerja sektor pendidikan semakin meningkat. Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini sangat penting dipergunakan



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Demak Tahun 2025

sebagai dasar, pijakan bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2025 menunjukkan hasil yang positif.

Evaluasi ini menjadi acuan untuk memaksimalkan pelayanan pendidikan dan kebudayaan di dalam perbaikan kinerja ditahun yang akan datang. Demikian ikhtisar ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demak, 05 Mei 2026

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Demak



Haris Wahyudi Ridwan, AP, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 197606061995011001

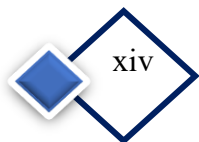
DAFTAR TABEL

Tabel	Uraian	Halaman
Tabel 1.1	Jumlah Guru Menurut Status Kepegawaian Kabupaten Demak Tahun 2025	14
Tabel 1.2	Jumlah Guru Menurut Kualifikasi Sertifikasi Kabupaten Demak Tahun 2025	14
Tabel 1.3	Jumlah Guru Menurut Kualifikasi S1 Kabupaten Demak Tahun 2025	15
Tabel 1.5	Jumlah Satuan Pendidikan TK /RA	27
Tabel 1.6	Jumlah Satuan Pendidikan KB/TPA/SPS	33
Tabel 1.7	Jumlah Akreditasi Sekolah Jenjang PAUD Tahun 2025	35
Tabel 1.8	Jumlah PKBM/SKB Kabupaten Demak Tahun 2025	40
Tabel 1.9	Jumlah Akreditasi Sekolah Jenjang PNF Tahun 2025	40
Tabel 1.10	Kondisi Ruang Kelas PAUD Tahun 2025	41
Tabel 1.11	Jumlah Kondisi Ruang Kelas PNF Tahun 2025	42
Tabel 1.12	Jumlah Sekolah Dasar (SD /MI)	44
Tabel 1.13	Hasil Akreditasi Sekolah Jenjang SD/MI Kabupaten Demak Tahun 2025	48
Tabel 1.14	Jumlah SMP/MTs Kabupaten Demak Tahun 2025	53
Tabel 1.15	Hasil Akreditasi Sekolah Jenjang SD/MI Kabupaten Demak Tahun 2025	55
Tabel 1.16	Kondisi Ruang Kelas SD/MI dan SMP/MTs Kabupaten Demak	60
Tabel 1.17	Kondisi Ruang Perpustakaan SD/MI dan SMP/MTs Kabupaten Demak	61
Tabel 1.18	Kondisi Ruang Toilet/WC SD/MI dan SMP/MTs Per-Kecamatan Kabupaten Demak	62
Tabel 1.19	Kondisi Ruang Guru SD/MI dan SMP/MTs Kabupaten Demak	63
Tabel 1.20	Jumlah Cagar Budaya dan Museum	67
Tabel 1.21	Target Pendapat Anggaran Murni dan Perubahan Tahun 2025	68
Tabel 2.1	Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025	80
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan BUPATI Demak	83

Tabel	Uraian	Halaman
Tabel 2.3	Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan BUPATI Demak	84
Tabel 2.4	Dukungan Program dan Anggaran Indikator Kinerja Utama	86
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	90
Tabel 3.2	Pencapaian IKU Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025	91
Tabel 3.3	Rekapitulasi Pencapaian IKU Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025	94
Tabel 3.4	Pencapaian IKU Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Per Triwulan Tahun 2025	95
Tabel 3.5	Pencapaian IKU Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun ini dan Tahun Lalu	99
Tabel 3.6	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025	101
Tabel 3.7	Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2025	182
Tabel 3.8	Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Per Program Tahun 2025	183
Tabel 3.9	Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Fisik dan Keuangan Program dan Kegiatan Urusan setiap OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	182
Tabel 3.10	Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak Tahun 2025	187
Tabel 3.11	Realisasi Anggaran Realisasi Fisik dan Keuangan Program dan Kegiatan Bidang Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	187
Tabel 3.12	Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak Tahun 2025	197
Tabel 3.13	Realisasi Anggaran Realisasi Fisik dan Keuangan Program dan Kegiatan Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak Per 31 Desember 2025	198
Tabel 3.14	Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran Urusan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak Tahun 2025	200

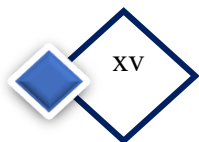
DAFTAR GAMBAR

Gambar	Uraian	Halaman
Gambar 1.1 :	Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	6
Gambar 1.2 :	Guru Sertifikasi Jenjang SD/MI Tahun 2025	20
Gambar 1.3 :	Guru Sertifikasi Jenjang SMP/MTs Tahun 2025	25
Gambar 1.4 :	Akreditasi Jenjang SD/MI Tahun 2025	47
Gambar 1.5 :	Akreditasi Jenjang SMP/MTs Tahun 2025	55
Gambar 3.1 :	Persentase Pencapaian IKU Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025	94
Gambar 3.2 :	Grafik Rata-rata lama sekolah	107
Gambar 3.3 :	Grafik Angka Harapan Lama Sekolah	108
Gambar 3.4 :	Grafik APK PAUD usia 3-6 tahun	111
Gambar 3.5 :	Grafik % PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) sesuai standar	113
Gambar 3.6 :	Grafik APS Pendidikan Dasar	116
Gambar 3.7 :	Grafik APK SD/MI/Paket A	117
Gambar 3.8 :	Grafik APK SMP/MTs/Paket B	118
Gambar 3.9 :	Grafik APM SD/MI /Paket A	118
Gambar 3.10 :	Grafik APM SMP/MTs /Paket B	119
Gambar 3.11 :	Grafik Angka Putus Sekolah SD/MI	120
Gambar 3.12 :	Grafik Angka Putus Sekolah SMP/MTs	121
Gambar 3.13 :	Grafik Angka Kelulusan SD/MI	122
Gambar 3.14 :	Grafik Angka Kelulusan SMP/MTs	123
Gambar 3.15 :	Grafik Guru PAUD berkualifikasi sertifikasi	126
Gambar 3.16 :	Grafik Guru SD berkualifikasi sertifikasi	127
Gambar 3.17 :	Grafik Guru SMP berkualifikasi sertifikasi	128
Gambar 3.18 :	Grafik Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs	130
Gambar 3.19 :	Grafik Angka Melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	131
Gambar 3.20 :	Grafik Capaian Kinerja dan Keuangan Tahun 2025	201

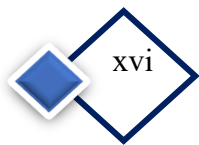


DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
(EXECUTIVE SUMMARY)	iii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. LANDASAN HUKUM	1
C. MAKSUD DAN TUJUAN	2
D. TUGAS POKOK DAN FUNGSI	4
1. Kepala Dinas	7
2. Sekretariat	8
3. Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan	13
4. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Nonformal (PNF)	34
5. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	44
6. Bidang Pembinaan Kebudayaan	55
7. UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) Museum	66
8. Satuan Pendidikan	70
9. Kelompok Jabatan Fungsional	70
E. SISTEMATIKA PENULISAN	70
Bab I Pendahuluan	70
Bab II Perencanaan Kinerja	70
Bab III Akuntabilitas Kinerja	71
Bab IV Penutup	71
Lampiran-Lampiran.....	71



BAB II	72
PERENCANAAN KINERJA	72
A. RINGKASAN/IKHTISAR PERJANJIAN KINERJA	72
1. Visi Kabupaten Demak	73
2. Misi Kabupaten Demak	74
3. Tujuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak	75
4. Sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak	75
5. Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	77
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	79
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025	83
BAB III	83
AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2025	83
A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA ORGANISASI	83
1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025	84
2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun ini dan Tahun yang Lalu dan beberapa tahun terakhir	87
3. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah	88
4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional ..	90
5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan /Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan	90
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	134
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	136
B. REALISASI ANGGARAN (AKUNTABILITAS KEUANGAN)	147
1. Target Pendapatan	147
2. Pelaksanaan APBD Tahun 2025	150
BAB IV	162
PENUTUP	162
A. SIMPULAN	162



B. LANGKAH-LANGKAH YANG AKAN DATANG 164

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- Perjanjian Kinerja Tahun 2025;
- Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025;
- Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2025;
- Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025;
- Hasil Pengukuran Kinerja Urusan Pendidikan Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2023- 2026;
- Prestasi dan Penghargaan Tahun 2025;
- Pelaksanaan APBD Tahun 2025;
- Rencana Aksi Tahun 2025;
- Pohon Kinerja;
- Matriks Tindak Lanjut Evaluasi LHE SAKIP Tahun 2025;
- Profil Data Pendidikan Tahun 2025;



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, memberikan kewenangan kepada daerah provinsi/kab./kota untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, dan pemberdayaan peran serta masyarakat

Dalam pelayanan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak berdasarkan peraturan perundangan yang menjadi acuan bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah dirinci berdasarkan UU, PP, Perda, Kepmen).

Agar berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dimasa mendatang dapat berhasil dengan baik, maka harus disusun dalam suatu perencanaan yang matang. Perencanaan yang disusun tentunya harus mempertimbangkan keadaan yang ada dan memprediksikan keadaan yang akan datang dengan berbagai dukungan dan hambatan yang akan timbul.

B. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak Tahun 2025 dilandasi dengan dasar hukum sebagai berikut :

Akuntabilitas adalah salah satu tonggak penting era reformasi. UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme menyatakan Akuntabilitas sebagai salah satu asas umum dalam penyelenggaraan negara.

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 17/2003 menegaskan bahwa salah satu asas best practices dalam pengelolaan keuangan negara adalah akuntabilitas berorientasi pada hasil atau dengan kata lain manajemen pemerintahan kita telah memasuki era performance-based management.



3. Undang-Undang Nomor! 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara menegaskan bahwa kinerja instansi pemerintah tidak dapat dipisahkan dari kinerja individu.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Laporan Keuangan dan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa Perjanjian Kinerja.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2025 adalah:

Untuk mengetahui pencapaian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak kinerja sasaran Perangkat Daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah;

1. Meningkatkan akuntabilitas. Hal ini juga akan memberi pengaruh terhadap kredibilitas Perangkat Daerah yang bersangkutan; semakin akuntabel LKJIP Perangkat Daerah maka semakin kredibel Perangkat Daerah tersebut.



2. Umpan balik untuk meningkatkan kinerja Perangkat Daerah yang bersangkutan, yang dapat dilakukan melalui perbaikan penerapan fungsi-fungsi manajemen, mulai dari perencanaan kinerja hingga ada evaluasi kinerja, serta pengembangan nilai-nilai akuntabilitas pada lingkungan kerja Perangkat Daerah.
3. Mengetahui dan menilai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diemban;
4. Sebagai acuan untuk perencanaan kegiatan di tahun mendatang , khususnya dalam perencanaan kinerja di tahun mendatang;
5. Sebagai bukti akuntabilitas kepada Publik atas penggunaan sumber daya dalam rentang waktu satu tahun.

Media Akuntabilitas, merupakan bentuk perwujudan kewajiban pertanggungjawaban yang disampaikan kepada pemberi wewenang atas penggunaan anggaran dalam berbagai program/kegiatan yang telah dilaksanakan. Media evaluasi dalam kaitannya dengan fokus perbaikan kinerja secara berkesinambungan yang harus dilakukan pada masa yang akan datang.

Sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka disusunlah LKJIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025.



D. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak melaksanakan merupakan Unsur Pelaksana Otonomi daerah di bidang Pendidikan dan Kebudayaan, melaksanakan 1 (satu) urusan wajib dan 1 (satu) Urusan Pilihan yaitu ;

1. Urusan Pendidikan; dan
2. Kebudayaan.

Dalam Pelaksanaannya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak Berpedoman pada visi dan Misi Kabupaten Demak yaitu :

Visi Kabupaten Demak
“Demak bermartabat, maju dan sejahtera”

Untuk mencapai visi tersebut, telah ditetapkan 3 misi sebagai berikut :

1. Memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, serta kehidupan bermasyarakat yang agamis, kondusif dan berbudaya.
2. Meningkatkan sumber daya manusia, sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkualitas dan berdaya saing.
3. Mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal, membuka lapangan kerja, mengurangi kemiskinan dan pengangguran.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak sebagai unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan yang menjadi kewenangan Daerah mengampu pada misi 1,2, dan 3.

Dalam rangka mencapai visi dan misi tersebut di atas, Bupati terpilih telah menetapkan 9 Program unggulan sebagai berikut :

1. Peningkatan harmonisasi dan fasilitasi kehidupan beragama;
2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city;
3. Peningkatan kebersihan dan keindahan wilayah;
4. Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan Kesehatan;
5. Pengembangan inovasi daerah;
6. Perluasan kawasan perkotaan;
7. Percepatan pembangunan infrastruktur, terutama di kawasan pesisir, pertanian, dan pusat pertumbuhan / pusat produksi;
8. Percepatan pemulihan ekonomi masyarakat;
9. Peningkatan keberdayaan, perlindungan dan rehabilitasi sosial;



Dari 9 Program unggulan Bupati Terpilih, yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak adalah Program unggulan yang ke-2 dan ke-4 dengan kegiatan prioritas sebagai berikut :

1. Integrasi e-government (Integrasi Aplikasi Kluster Pendidikan)
2. Ajang/lomba kreativitas guru dan siswa;
3. Beasiswa miskin;
4. Literasi berbasis inklusi sosial;

Misi ke 1 (*satu*) : “Memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, serta kehidupan bermasyarakat yang agamis, kondusif dan berbudaya;”

Tujuan 1 : Meningkatkan pelayanan publik.

Sasaran 1 : Meningkatnya kinerja pelayanan publik;

Indikator : • Indeks Kepuasan Masyarakat;

- Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti

Tujuan 2 : Meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur.

Sasaran 1 : Meningkatnya capaian sasaran strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

Indikator : • Nilai SAKIP Dindikbud;

- Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target;

Misi ke 2 (*dua*) “Meningkatkan sumber daya manusia, sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkualitas dan berdaya saing”

Tujuan 3 : Meningkatkan partisipasi pendidikan pada jenjang PAUD, Pendidikan dasar, dan pendidikan non formal.

Sasaran 1 : Meningkatnya layanan pendidikan jenjang PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan Non Formal;

Indikator : • Harapan Lama Sekolah;;

- Rata-rata lama sekolah;
- Persentase TK/RA, SD/MI, SMP/MTs berakreditasi minimal B;

Misi ke 3 (*tiga*) “3. Mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal, membuka lapangan kerja, mengurangi kemiskinan dan pengangguran”

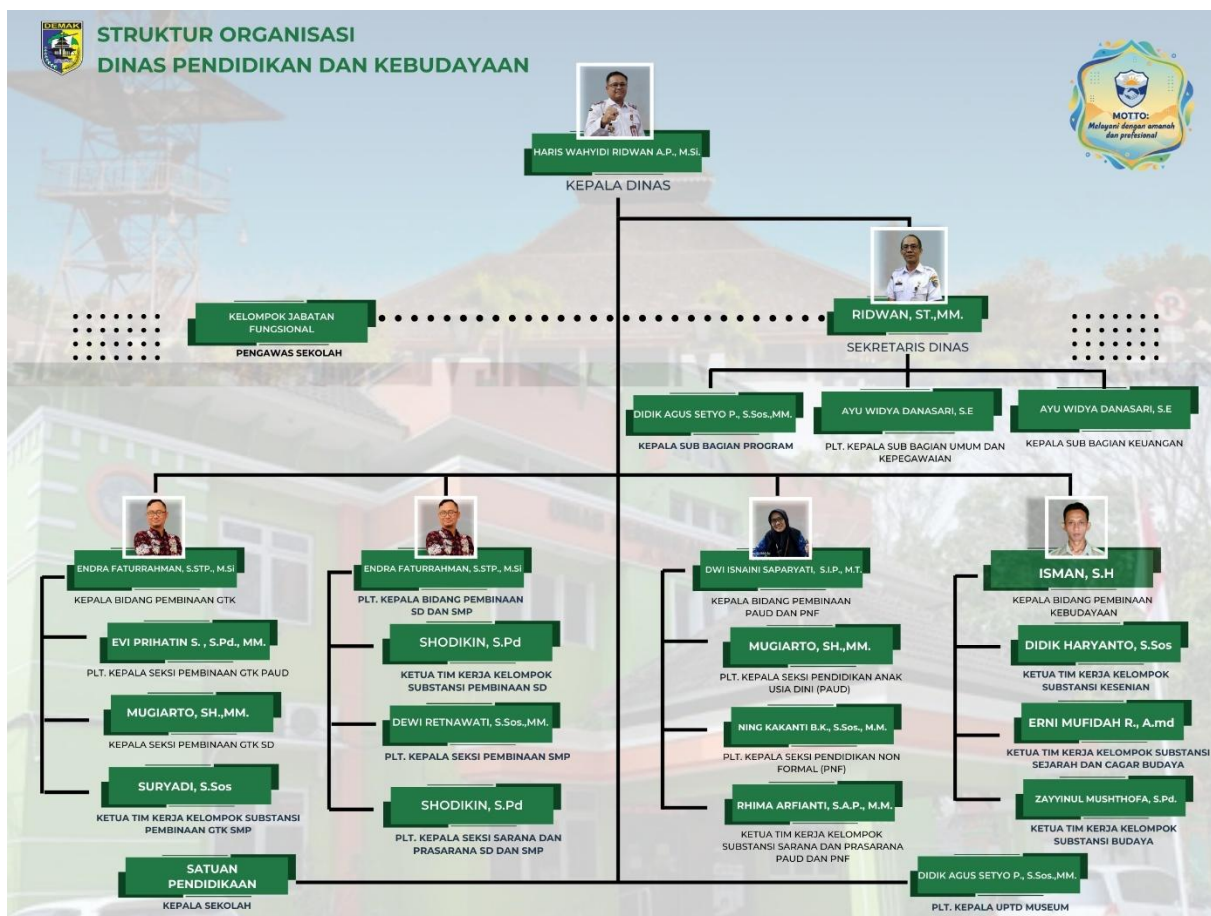
Tujuan 4 : Meningkatkan pelestarian Warisan Budaya;

Sasaran 1 : Meningkatnya pelestarian Warisan Budaya;

Indikator : • Persentase Peningkatan pelestarian warisan budaya;

- Persentase Peningkatan pelestarian warisan budaya;

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2025



Gambar.1.1. : Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Tabel I. 1
Data Pejabat Struktural /Sub Koordinator Tahun 2025

No	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Nama	Keterangan			
			Kualifikasi Pendidikan	Pangkat Golongan	Pejabat Struktural /Ketua TIM Kerja Kelompok	Pejabat Fungsional umum
1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)
1	Kepala Dinas	HARIS WAHYUDI RIDWAN, A.P., M.Si	S2	IV / c	✓	
2	Sekretaris Dinas	RIDWAN, ST., MM	S2	IV / b	✓	
3	Kepala Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan	ENDRA FATURRAHMAN, S.STP. M.Si	S2	IV / a	✓	
4	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan NonFormal (PNF)	DWI ISNAINI SAPARYATI, S.I.P, M.T.	S2	IV / a	✓	



No	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Nama	Keterangan			
			Kualifikasi Pendidikan	Pangkat Golongan	Pejabat Struktural /Ketua TIM Kerja Kelompok	Pejabat Fungsional umum
1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)
5	Plt. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	ENDRA FATURAHMAN, S.STP. M.Si	S2	IV / a	✓	
6	Kepala Bidang Pembinaan Kebudayaan	ISMAN, S.H.	S1	IV/a	✓	
7	Plt Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	AYU WIDYA DANASARI, S.E.	S2	III / d	✓	
8	Kepala Sub Bagian Program	DIDIK AGUS SETYO P., S.Sos., MM	S2	III / c	✓	
9	Kepala Sub Bagian Keuangan	AYU WIDYA DANASARI, S.E.	S2	III / d	✓	
10	Ketua Tim Kerja Kelompok Substansi Pembinaan SD	SHODIKIN, S.Pd.	S1	III / d	✓	
11	Ketua Tim Kerja Kelompok Substansi Pembinaan SMP	DEWI RETNAWATI, S.Sos., M.M.	S1	III/b	✓	
12	Ketua Tim Kerja Kelompok Substansi Sarana dan Prasarana	SHODIKIN, S.Pd.	S1	III / d	✓	
13	Kepala Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar	MUGIARTO, SH, M.M.	S2	IV / a	✓	
14	Plt. Kasi Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD	EVI PRIHATIN SURYONO, S.Pd, MM.	S2	IV/ a	✓	
15	Ketua Tim Kerja Kelompok Substansi Pembinaan SMP	SURYADI, S.Sos	S1	III/b	✓	
16	Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	MUGIARTO, SH, M.M.	S2	IV / a	✓	
17	Plt. Kasi Pendidikan Non Formal (PNF)	NING KAKANTI BIRU KUSUMASTUTI, S.Sos., M.M	S2	III / c	✓	
18	Ketua Tim Kerja Kelompok Substansi Sarana dan Prasarana PAUD dan PNF	RHIMA ARFIANTI, S.A.P., M.M.	S2	III/b	✓	
19	Ketua Tim Kerja Kelompok Substansi Kesenian	DIDIK HARYANTO, S.Sos	S1	III/b	✓	
20	Ketua Tim Kerja Kelompok Substansi Sejarah dan Cagar Budaya	ERNI MUFIDAH RAHMAWATI, A.Md.	D-III	III/b	✓	
21	Ketua Tim Kerja Kelompok Substansi Budaya	ZAYYINUL MUSHTHOFA, S.Pd.	S1	III/b	✓	
22	Plt. Kepala UTPD Museum	DIDIK AGUS SETYO P., S.Sos., MM	S2	III / c	✓	

Sumber Data: Dindikbud Kabupaten Demak, 2025



- **Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Bupati Demak Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak, tugas pokok, fungsi, dan tata kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak, dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai fungsi:

1. Merumuskan dan menetapkan program dan rencana kerja serta rencana kegiatan fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang Pendidikan dan Kebudayaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Membina, mengarahkan, dan memberi petunjuk kebijakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang Pendidikan dan Kebudayaan
4. Menyelenggarakan koordinasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horisontal;
5. Merumuskan kebijakan teknis urusan Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan petunjuk teknis dan ketentuan yang berlaku;
6. Mengkoordinasikan pelaksanaan program fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang Pendidikan dan Kebudayaan secara berkala sesuai dengan bidang permasalahan;
7. Menyelenggarakan kegiatan fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan petunjuk teknis dan ketentuan yang berlaku;
8. Menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang Pendidikan dan Kebudayaan sinkronisasi pelaksanaan tugas;
9. Menyelenggarakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan ketentuan secara berkala sebagai bahan kebijakan lebih lanjut;
10. Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan program kesekretariatan, bidang pengadaan dan jabatan, bidang diklat, mutasi, dan dokumentasi, serta



bidang kepangkatan, pembinaan, dan pemberhentian sesuai ketentuan yang berlaku;

11. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan;
12. Melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang Pendidikan dan Kebudayaan baik secara lisan maupun tertulis kepada Bupati ;
13. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
14. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Demak. Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Demak membawahi dan dibantu oleh :

- a. Sekretariat terdiri dari :
 - 1) Sub. Bagian Program;
 - 2) Sub. Bagian Keuangan;
 - 3) Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian; dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- b. Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan
 - 1) Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
 - 2) Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar; dan
 - 3) Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- c. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Nonformal (PNF).
 - 1) Seksi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 - 2) Seksi Pendidikan Nonformal (PNF); dan
 - 3) Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama
 - 1) Seksi Pembinaan Sekolah Menengah Pertama;
 - 2) Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama; dan

- 3) Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Bidang Pembinaan Kebudayaan
 - 1) Sub Koordinator Budaya;
 - 2) Sub Koordinator Kesenian; dan
 - 3) Sub Koordinator Sejarah dan Cagar Budaya;
 dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
 - 1) UPTD Museum;
- g. Satuan Pendidikan;
 - 1) SPNF SKB, PKBM dan LKP (DIKMAS);
 - 2) TK/KB/TPA dan SPS (PAUD); dan
 - 3) SD/SMP (DIKDAS);

2. Sekretariat

Tugas pokok Sekretariat adalah Sekretaris yang mempunyai tugas pokok menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan program, keuangan, umum dan kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat dan organisasi serta pengoordinasian perencanaan dan pelaporan dinas di lingkungan Dinas, Sekretariat memiliki Tugas dan fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang program, keuangan, umum dan kepegawaian;
- b. Pengelolaan dan pelayanan program, keuangan dan administrasi umum, serta hukum, hubungan masyarakat dan organisasi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi badan;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan badan;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya
- e. Merumuskan program dan rencana kerja serta rencana kegiatan dibidang kesekretariatan;
- f. Mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis bidang kesekretariatan;
- g. Memberi petunjuk, arahan serta membagi tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- h. Menyelenggarakan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- i. Merumuskan bahan kebijakan teknis kesekretariatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di atasnya sebagai bahan kajian pimpinan;
- j. Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan program, keuangan, umum dan kepegawaian berdasarkan data yang masuk dan pemantauan lapangan;
- k. Mengoordinasikan perencanaan program antar bidang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- l. Mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- m. mengoordinasikan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, serta pelayanan terkait hukum, hubungan masyarakat dan organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- n. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan;
- o. melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan bidang kesekretariatan;
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis;

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat membawahi 1) Sub Bagian Program, 2) Sub Bagian Keuangan; dan 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Dalam rangka peningkatan penyelenggaraan layanan pendidikan yang lebih baik, perlu adanya perubahan yang mendasar dalam pengelolaan pendidikan, baik di tingkat sekolah/madrasah maupun di tingkat Kabupaten. Manajemen pelayanan pendidikan berorientasi pada upaya peningkatan layanan pendidikan yang lebih baik kepada pengguna layanan (*client*) dengan menerapkan prinsip-prinsip tata layanan yang baik (*good governance*).

Dengan dasar itu, maka penyelenggaraan layanan pendidikan perlu dilaksanakan secara transparan dan dapat dipertanggung-jawabkan (akuntabel, *accountable*). Penyelenggaraan layanan pendidikan yang transparan dan dapat dipertanggung-jawabkan ini harus terjadi baik di tingkat lembaga/institusi/satuan penyelenggara pendidikan, yaitu sekolah/madrasah

atau lembaga pendidikan, maupun di tingkat pengelola layanan pendidikan, yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Di samping penyelenggaraan layanan pendidikan secara transparan dan akuntabel, pelayanan yang berorientasi pada pengguna layanan (client) adalah pelayanan yang responsif (tanggap) terhadap kebutuhan dan kepentingan pengguna layanan dengan tidak membedakan perlakuan antar kelompok, berarti menerapkan prinsip kebersamaan. Dan juga memfasilitasi adanya kesempatan yang cukup bagi terciptanya partisipasi semua pemangku kepentingan pendidikan sesuai dengan tingkatan layanannya.

Secara khusus, manajemen pelayanan pendidikan di tingkat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengacu pada hasil kajian Rencana Pengembangan Kapasitas (*Capacity Development Plan*) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak. Berdasarkan kajian Rencana Pengembangan Kapasitas tersebut, berikut ini adalah kondisi eksisting yang perlu dibenahi untuk setiap fungsi manajemen dan Perencanaan:

a. Manajemen dan Perencanaan

Mendukung peningkatan kemampuan sekolah dan Dinas, mengembangkan perencanaan pendidikan secara partisipatif, transparan dan berbasis data terkini dan valid :

- Partisipasi pemangku kepentingan dalam perencanaan. Pemangku Kepentingan terlibat dalam perencanaan berbasis data dengan menggunakan dan memanfaatkan **Rapor Pendidikan** melalui mekanisme penyusunan RKA, DPA, RKS, RKT dan RKAS, Musrenbang Tingkat Satuan Pendidikan, Musrenbang Tingkat Kecamatan serta Musrenbang tingkat Kabupaten, dengan menyelenggarakan Forum OPD (Organisasi Perangkat Daerah);
- Tata Organisasi. Perlunya penataan organisasi agar lebih efektif untuk mengoptimalkan fungsi manajemen perencanaan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- Belum optimalnya koordinasi pemangku kebijakan yang lebih efektif dan efisien melalui terbangunnya jaringan komunikasi.
- Belum terbangunnya transparansi kebijakan melalui situs atau web sebagai media informasi yang dapat diakses publik secara mudah, serta



pemanfaatan IT di Jenjang PAUD (TK/RA/BA, KB, TPA, SPS), Jenjang DIKDAS (SD/MI dan SMP/MTs) dan Jenjang DIKMAS (LKP, PKBM)

- Inventarisasi kekayaan maupun sumber data melalui pengisian instrumen pendataan sekolah yang belum valid serta penyusunan Profil Pendidikan yang representatif untuk kegiatan penyusunan perencanaan dan kegiatan pendidikan.

b. Tata Layanan Pendidikan

- 1) Perencanaan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan yang selama ini dilakukan belum menerapkan prinsip partisipatif secara optimal;
- 2) Meningkatkan kapasitas Komite Sekolah dalam memberikan masukan, mendukung, memantau, dan membina hubungan baik dengan sekolah dan pihak terkait lainnya;
 - Mengembangkan kapasitas Komite Sekolah mendukung pengembangan dan pelaksanaan rencana sekolah
 - Mengembangkan kapasitas Komite Sekolah memantau kinerja sekolah dan mendukung transparansi manajemen sekolah
 - Mengembangkan kapasitas Komite Sekolah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan
 - Mendukung adanya perwakilan pemangku kepentingan yang tepat dalam Komite Sekolah
- 3) Meningkatkan kapasitas Dewan Pendidikan untuk berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan;
 - Mengembangkan kapasitas Dewan Pendidikan dalam memantau kinerja sekolah dan kabupaten/kota;
 - Mengembangkan kapasitas Dewan Pendidikan dalam mendukung keterlibatan berbagai pemangku kepentingan termasuk Komite Sekolah;
 - Mendukung adanya perwakilan pemangku kepentingan yang tepat dalam Dewan Pendidikan;
- 4) Meningkatkan kapasitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam menyiapkan, memprioritaskan, dan memonitor upaya perkembangan sektor pendidikan;



c. Anggaran dan Keuangan

Mendukung sekolah dan Dinas menggunakan secara baik dan mempertanggungjawabkan dana yang berasal dari berbagai sumber;

- 1) Riviui belanja pendidikan nasional dan daerah;
- 2) Mengembangkan dan melaksanakan analisis keuangan pendidikan kabupaten/kota;
- 3) Mengembangkan rencana kerja sekolah yang memiliki rencana anggaran yang berasal dari berbagai sumber dan mencakup lebih dari satu tahun;
- 4) Mengembangkan dan menganalisis biaya operasional satuan pendidikan;
- 5) Menghitung dan menganalisis biaya pencapaian standar dan akses pendidikan;

d. Hotspot Pendidikan

- 1) Mengembangkan pendekatan yang terintegrasi untuk menggunakan ICT sebagai perangkat dalam meningkatkan manajemen dan tata layanan pendidikan;
- 2) Hotspot pendidikan untuk masyarakat luas;

e. Pelatihan

- 1) Lokakarya dan pelatihan untuk pemangku kepentingan (wakil sekolah dan kabupaten/kota);
- 2) Pelatihan pengembangan staff atau pelaksana;

f. Kemitraan

- 1) Mengembangkan kapasitas pemangku kepentingan di tingkat sekolah dan kabupaten/kota untuk mendukung pengembangan sekolah melalui kemitraan;

g. Monitoring dan Evaluasi

Mengembangkan dan melaksanakan Sistem Evaluasi dan Monitoring Kinerja :

- 1) Menghasilkan rencana monitoring kinerja dan kerangka kerja untuk hasil-hasil yang ada;
- 2) Monitoring dan evaluasi rutin yang dilakukan setiap Triwulan sekali.

3. Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK)

Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai dan melaksanakan melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal, Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar, serta Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama dan melaksanakan fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
- b. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar;
- c. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi tersebut Kepala Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan di bantu oleh 1) Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal 1) Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar 3) Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambaran Umum GTK Kabupaten Demak Tahun 2025 Untuk menghasilkan pendidikan yang berkualitas dibutuhkan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dalam jumlah yang cukup, baik dari segi kuantitas maupun kualitas.

a. Guru Menurut Status Kepegawain

Berdasarkan status kepegawaian guru di Indonesia yang diatur dalam UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, UU No. 20 Tahun 2023 tentang ASN (menggantikan UU No. 5 Tahun 2014), dan PP Nomor 74 Tahun 2008 yang diubah dengan PP Nomor 19 Tahun 2017. Guru berstatus ASN

(PNS/PPPK) atau non-ASN, dengan aturan turunan terkait jabatan fungsional, hak, dan kewajiban.

Gambaran Umum GTK Kabupaten Demak Tahun 2025, dapat diketahui jumlah tenaga pendidik di Kabupaten Demak **11.493** orang. Dilihat dari status kepegawaian, tenaga pendidik di Kabupaten Demak terdiri dari **3.488** guru PNS, **2.384** PPPK dan **5.621** guru Non PNS.

Tabel I. 2 : Jumlah Guru Menurut Status Kepegawaian Tahun 2025

NO.	JENJANG PENDIDIKAN	GURU MENURUT STATUS KEPEGAWAIAN				PERSENTASE		
		TOTAL	PNS	P3K	NON PNS	PNS	P3K	NON PNS
	KAB. DEMAK	11.493	3.488	2.384	5.621	30,35	20,74	48,91
1	TK	1.477	78	0	1.399	5,28	0,00	0,00
2	RA	549	7	4	538	1,28	0,73	98,00
	Jumlah	2.026	85	4	1.937	4,20	0,20	95,61
3	SD	4.489	2.024	1.885	580	45,09	41,99	12,92
4	MI	1.440	346	31	1.063	24,03	2,15	73,82
	Jumlah	5.929	2.370	1.916	1.643	39,97	32,32	27,71
5	SMP	1.470	619	378	473	42,11	25,71	32,18
6	MTs	2.068	414	86	1.568	20,02	4,16	75,82
	Jumlah	3.538	1.033	464	2.041	29,20	13,11	57,69
	TOTAL	11.493	3.488	2.384	5.621	30,35	20,74	48,91
	%	100,00	30,35	20,74	48,91			

Sumber : Profil Pendidikan Kab. Demak

Berdasarkan data diatas guru berdasarkan Status Kepegawaian, pada Tahun 2025 sebanyak 30,35% menurun dibandingkan tahun hal ini disebabkan banyaknya guru yang sudah purna tugas karena memasuki usia pensiun, sedangkan Guru PPPK sebanyak 20,74% meningkat dibandingkan tahun lalu karena terdapat penambah Guru yang beralih status dari Honorer menjadi PPPK pada Formasi 2024 dan 2025 sedangkan Non PNS sebanyak 48,91% masih cukup banyak karena sekolah di kelola oleh masyarakat yang bestatus swasta berstatus kepegawaian GTY (Guru Tetap Yayasan).

b. Guru Menurut Kualifikasi Sertifikasi

Berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yang mewajibkan pendidik memiliki sertifikat profesi. Pelaksanaan sertifikasi saat ini diatur melalui Pendidikan Profesi Guru (PPG), berdasarkan PP No. 74 Tahun 2008 (diubah dengan PP No. 19 Tahun 2017) dan peraturan teknis terbaru seperti Permendikbudristek No. 19 Tahun 2024. Salah satu

aspek yang mendukung peningkatan mutu pendidikan adalah mutu pendidik dan tenaga kependidikan. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi Murid pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, dan pasal 2 berbunyi bahwa Guru wajib memiliki Kualifikasi Akademik, kompetensi, Sertifikat Pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Berikut adalah rekapitulasi peserta sertifikasi guru di jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak Tahun 2025.

Tabel I. 3 : Jumlah Guru Menurut Kualifikasi Sertifikasi Tahun 2025

NO.	JENJANG PENDIDIKAN	GURU KUALIFIKASI SERTIFIKASI			Persentase	
		JUMLAH	Belum Sertifikasi	Sudah Sertifikasi	Belum Sertifikasi	Sudah Sertifikasi
	KAB. DEMAK	11.493	2.538	8.955	22,08	77,92
1	TK	1.477	429	1.048	29,05	70,95
2	RA	549	319	230	58,11	41,89
	Jumlah	2.026	748	1.278	36,92	63,08
3	SD	4.489	284	4.205	6,33	93,67
4	MI	1.440	491	949	34,10	65,90
	Jumlah	5.929	775	5.154	13,07	86,93
5	SMP	1.470	272	1.198	18,50	81,50
6	MTs	2.068	743	1.325	35,93	64,07
	Jumlah	3.538	1.015	2.523	28,69	71,31
	TOTAL	11.493	2.538	8.955	22,08	77,92

Sumber : Profil Pendidikan Kab. Demak

Berdasarkan data diatas guru berkualifikasi sertifikasi pada Tahun 2025 sebanyak 77,92% meningkat dibandingkan 2024 sebanyak 67,78% meningkat dibandingkan tahun 2023 sebanyak 56,83% dibandingkan dengan tahun 2022 sebanyak 50,41% meskipun lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebanyak 64,12% meningkat dibandingkan tahun sebelumnya 2020 sebesar 50,29% dan di bandingkan tahun 2019 sebesar 51,54%.

Peningkatan banyaknya guru yang sudah sertifikasi ditahun 2025 di sebabkan peningkatan kualitas data pokok pendidikan, sehingga banyak guru yang mengikuti PPG Tahun 2025 sudah lulus dan bersertifikat pendidik.

c. Guru Menurut Kualifikasi Kualifikasi S1

Dari data yang ada, ternyata pada Tahun 2025 masih ada guru di Kabupaten Demak yang memiliki kualifikasi akademik Jenjang Pendidikan Dasar dibawah S1/D4, meskipun jumlahnya relatif sedikit. Jumlah guru yang belum S1 adalah Tahun 2025 sebanyak 1.108 meningkat dibandingkan tahun 2024 sebanyak 556 menurun dibandingkan tahun 635 orang dan yang sudah S1 /D4 atau lebih tinggi 10.385 orang. Secara lebih rinci tingkat pendidikan guru di Kabupaten Demak dapat ditunjukkan tabel dibawah ini :

Tabel- I. 4. Jumlah Guru Menurut Kualifikasi S1 Tahun 2025

NO.	JENJANG PENDIDIKAN	GURU KUALIFIKASI SARJANA			Persentase	
		TOTAL	Belum Sarjana	Sudah Sarjana	Belum Sarjana	Sudah Sarjana
	KAB. DEMAK	11.493	1.108	10.385	9,64	90,36
1	TK	1.477	160	1.317	10,83	89,17
2	RA	549	118	431	21,49	78,51
	Jumlah	2.026	278	1.748	13,72	86,28
3	SD	4.489	94	4.395	2,09	97,91
4	MI	1.440	276	1.164	19,17	80,83
	Jumlah	5.929	370	5.559	6,24	93,76
5	SMP	1.470	48	1.422	3,27	96,73
6	MTs	2.068	412	1.656	19,92	80,08
	Jumlah	3.538	460	3.078	13,00	87,00
	TOTAL	11.493	1.108	10.385	9,64	90,36
	%	100,00	9,64	90,36		

Sumber : Profil Pendidikan Kab. Demak

Berdasarkan data diatas jumlah guru yang belum S1 pada Tahun 2025 sebanyak 1.108 orang (9,64%) meningkat dibandingkan 2024 Sebanyak 556 orang (4,48%) menurun di bandingkan Tahun 2023 sebanyak 635 orang (5,00%) menurun dibandingkan dengan tahun 2022 sebanyak 726 orang (5,93%) menurun di bandingkan dengan tahun 2021 sebanyak 976 orang (7,57%) dan Tahun 2024 yang sudah S1 /D4 atau lebih sebanyak 11.863 orang (95,52%).

4. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Nonformal (PNF)

Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal dipimpin oleh Kepala Bidang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan

perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Nonformal (PNF), serta Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Nonformal (PNF) dan melaksanakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- b. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pendidikan Nonformal (PNF);
- c. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Nonformal (PNF); dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi tersebut Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat di bantu oleh 1) Seksi Pendidikan Anak Usia Dini, 2) Kepala Seksi Pendidikan Nonformal; dan 3) Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional. Berikut gambaran umum PAUD dan PNF di kabupaten Demak.

a. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

1) Perluasan Akses Pendidikan Jenjang PAUD

a) TK/RA (PAUD FORMAL Kelompok Usia 4-6 Tahun).

Jumlah lembaga PAUD FORMAL Kelompok umur 4 – 6 Tahun atau lembaga TK/RA di Kabupaten Demak pada Tahun 2025 : **TK Negeri 6 sekolah, TK Swasta 463 sekolah, sementara RA swasta sebanyak 161 madrasah.**

Tabel I. 5 Jumlah Satuan Pendidikan TK dan RA Tahun 2025

Jenjang	Data	Negeri	Swasta	Grand Total
TK	Jumlah Sekolah	6	463	469
	Jumlah siswa	591	21.569	22.160
RA	Jumlah Madrasah	0	161	161
	Jumlah siswa	0	10.842	10.842
Jumlah Sekolah / Madrasah		6	624	630
Jumlah Siswa		591	32.411	33.002

Sumber : *Profil Pendidikan Kab. Demak*

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa rata-rata jumlah siswa tiap sekolah di Kabupaten Demak adalah jumlah seluruh siswa (33.002) dibagi dengan jumlah satuan pendidikan (**630**) sama dengan 52,38 siswa per sekolah.

b) KB/TPA/SPS (PAUD Nonformal Kelompok Usia 0 s.d. 4 Tahun)

Jumlah lembaga PAUD Kelompok umur 0 - 4 Tahun atau satuan pendidikan KB/TPA/SPS di Kabupaten Demak pada Tahun 2025 : **KB Negeri 0 sekolah, KB Swasta 350 sekolah, TPA swasta sebanyak 31 sekolah dan SPS swasta sebanyak 96 sekolah.**

Tabel I. 6 Jumlah PAUD (KB/TPA/SPS) Tahun 2025

JENJANG	DATA	NEGERI	SWASTA	GRAND TOTAL
KB	Jumlah Sekolah	0	350	350
	Jumlah siswa	0	11.274	11.274
TPA	Jumlah Sekolah	0	31	31
	Jumlah siswa	0	665	665
SPS	Jumlah Sekolah	0	96	96
	Jumlah siswa	0	3.169	3.169
Jumlah sekolah		0	446	446
Jumlah siswa		0	14.443	14.443

Sumber : *Profil Pendidikan Kab. Demak*

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa rata-rata jumlah siswa tiap sekolah di Kabupaten Demak adalah jumlah seluruh siswa Jenjang PAUD Kelompok usia 0-4 tahun sejumlah (**14.443**) dibagi dengan jumlah lembaga (**446**) sama dengan **32,38** siswa rata-rata per sekolah.

2) Mutu Pendidikan Jenjang PAUD

a) Akreditasi Sekolah Jenjang PAUD

Berdasarkan BNSP/BNSM dalam penerapan standar mutu Pendidikan Sekolah terakreditasi, berdasarkan Akreditasi Sekolah yang sudah memiliki akreditasi adalah sejumlah 642 Sekolah/madrasah, sedangkan sisanya sejumlah 480 Sekolah/madrasah belum memiliki akreditasi. Sekolah yang memiliki akreditasi A di Kabupaten Demak sejumlah 76, sedangkan yang memiliki akreditasi B sejumlah 471 dan

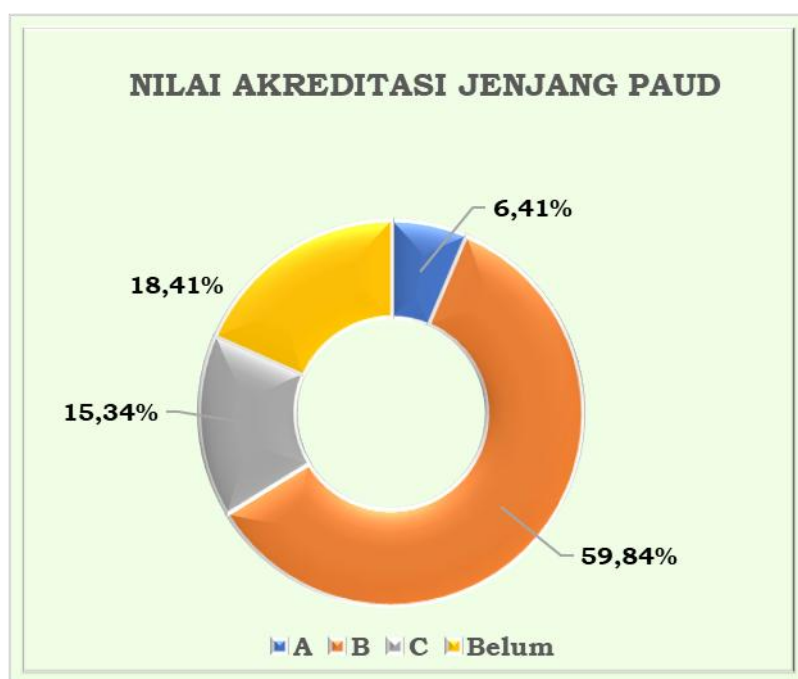
terakreditasi C sejumlah 95 Sekolah. Secara rinci hasil Akreditasi Sekolah Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dilihat di Tabel berikut:

Tabel I. 7 Jumlah Akreditasi Sekolah Jenjang PAUD Tahun 2025

NO.	JENJANG PENDIDIKAN	NILAI AKREDITASI JENJANG PAUD					Persentase	
		TOTAL	A	B	C	Belum	Nilai Minimal B	Nilai C /Belum
	KAB. DEMAK	1.108	71	663	170	204	66,25	33,75
1	TK	470	44	338	78	10	81,28	18,72
2	KB	350	18	205	42	85	63,71	36,29
3	TPA	31	4	18	4	5	70,97	29,03
4	SPS	96	3	55	29	9	60,42	39,58
5	RA	161	2	47	17	95	30,43	69,57
	Jumlah	1.108	71	663	170	204	66,25	33,75
	%	100	6,41	59,84	15,34	18,41		

Sumber : *Profil Pendidikan Kab. Demak*

Berdasarkan data diatas pada Tahun 2025 terakreditasi A sebanyak 6,77%, terakreditasi B sebanyak 48,76%, terakreditasi C sebanyak 8,47% dan yang belum terakreditasi sebanyak 42,78%. Gambaran presentase hasil akreditasi jenjang PAUD dapat di lihat digambar dibawah ini :



Gambar.1.2. : Akreditasi Jenjang PAUD Tahun 2025

b) Kurikulum Sekolah Jenjang PAUD

Pada Tahun 2025 sekolah jenjang pendidikan usia dini di Kabupaten Demak pada tahun ajaran 2025/2026 masih menggunakan transisi antara Kurikulum Merdeka dan Kurikulum 2013 (K13), dengan

fokus penguatan pada metode deep learning (pembelajaran mendalam) dan integrasi teknologi. Meskipun Kurikulum Merdeka ditetapkan sebagai kurikulum nasional, sebagian sekolah masih menerapkan K13.

b. Seksi Pendidikan Nonformal (PNF);

Pendidikan non Formal bertujuan memberikan alternatif layanan pendidikan kepada semua lapisan masyarakat agar memiliki kemampuan untuk mengembangkan potensi diri dengan penekanan pada penguasaan kemampuan, ketrampilan, pengembangan sikap profesional. Untuk mencapai tujuan itu PNF mengembangkan beberapa pogram yaitu :

- Pendidikan Kesetaraan yang diarahkan sebagai katub pengaman penuntasan wajar Dikdas 9 tahun dan suksesnya wajar 12 tahun.
- Pendidikan Keaksaraan Fungsional yang ditunjukkan untuk menurunkan angka buta aksara pada usia 15 – 44 tahun.
- Pendidikan Kursus untuk meningkatkan Kualitas Tenaga Ahli dan Ketrampilan sesuai bidang keahlian dan Ketrampilan (LKP)

Keseluruhan program PNF harus mengacu pada 3 Pilar Pendidikan yang meliputi :

- Pemerataan dan Perluasan Akses
- Peningkatan Mutu, Relevansi dan daya saing.
- Penguatan Tata kelola dan Pencitraan Publik

Hasil pelaksanaan program PNF selama ini dapat di sajikan dibawah ini :

1) Pemerataan dan Perluasan Pendidikan

Pada tahun 2025, jumlah satuan pendidikan nonformal sebanyak 25 satuan pendidikan terdiri dari PKBM Swasta sebanyak 24 Sekolah dan SPNF SKB Negeri sebanyak 1 Sekolah.

Tabel I. 8 Jumlah PKBM/SKB Kabupaten Demak Tahun 2025

Jenis Sekolah	Data	Negeri	Swasta	Grand Total
PKBM	Jumlah Sekolah	0	24	24
	Jumlah siswa	0	5.399	5.399
SKB	Jumlah Sekolah	1	0	1
	Jumlah siswa	312	0	312
Total Jumlah sekolah		1	24	25

Jenis Sekolah	Data	Negeri	Swasta	Grand Total
Total Jumlah siswa		312	5.399	5.711

Sumber : *Profil Pendidikan Kab. Demak*

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa rata-rata jumlah siswa tiap sekolah di Kabupaten Demak adalah jumlah seluruh siswa Jenjang Pendidikan nonformal sejumlah **(5.711)** dibagi dengan jumlah lembaga **(25)** sama dengan **228** siswa rata-rata per sekolah.

2) Mutu Pendidikan Nonformal (PNF)

Peningkatan pendidikan, relevansi dan daya saing dapat ditinjau dari beberapa indikator antara lain: a) Akreditasi Sekolah b) Kurikulum c) Kompetensi Lulusan.

a) Akreditasi Sekolah Jenjang PKBM dan SKB

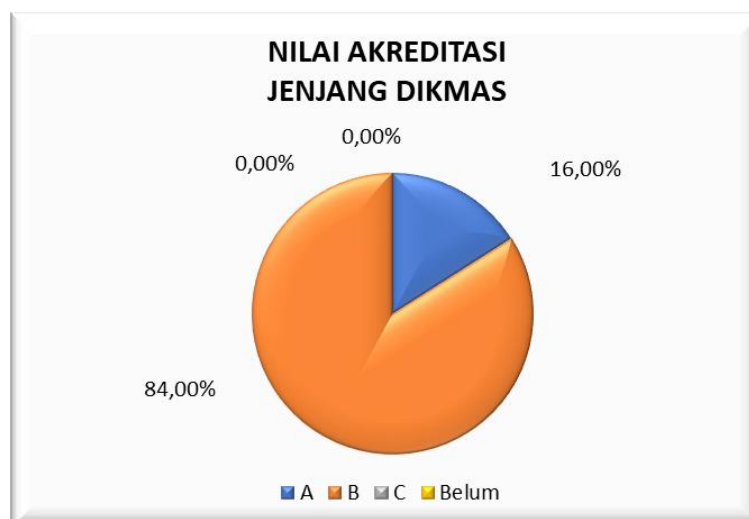
Berdasarkan BNSP/BNSM dalam penerapan standar mutu Pendidikan Sekolah terakreditasi, berikut adalah hasil Akreditasi Sekolah dan Kurikulum Jenjang PKBM dan SKB di Kabupaten Demak. Secara rinci hasil Akreditasi Sekolah Jenjang Pendidikan Nonformal dapat dilihat di Tabel berikut :

Tabel I. 9 Jumlah Jumlah Akreditasi Sekolah Jenjang PNF Tahun 2025

NO.	JENJANG PENDIDIKAN	NILAI AKREDITASI					Persentase	
		TOTAL	A	B	C	Belum	Nilai Minimal B	Nilai C /Belum
	KAB. DEMAK	25	4	21	0	0	100,00	0,00
1	PKBM	24	3	21	0	0	100,00	0,00
2	SKB	1	1	0	0	0	100,00	0,00
	Jumlah	25	4	21	0	0	100,00	0,00
	%	100	16,00	84,00	0,00	0,00		

Sumber : *Profil Pendidikan Kab. Demak*

Berdasarkan data diatas terakreditasi sekolah yang sudah terakreditasi sebanyak 14 sekolah dari sebanyak 25 sekolah, dengan jumlah terakreditasi A sebanyak 4,00%, terakreditasi B sebanyak 52,00%, terakreditasi C tidak ada dan yang belum terakreditasi sebanyak 44,00%. Gambaran presentase hasil akreditasi jenjang PNF dapat di lihat digambar dibawah ini :



Gambar.1.3. : Akreditasi Jenjang PNF Tahun 2025

b) Kurikulum Sekolah Jenjang PNF

Pada Tahun 2025 semua sekolah jenjang pendidikan nonformal di Kabupaten Demak semuanya sudah menggunakan Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka.

c. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Nonformal (PNF).

1) Kondisi Ruang Kelas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Secara proporsi, prosentase kerusakan Ruang Kelas Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Demak menunjukkan angka Baik sebesar 2.886 Ruang, Rusak Ringan 108 Ruang, Rusak Sedang 19 ruang, dan Rusak Berat 1 Ruang, Rusak Total 0 Ruang ada Secara rinci dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel I. 10 Kondisi Ruang Kelas PAUD Tahun 2025

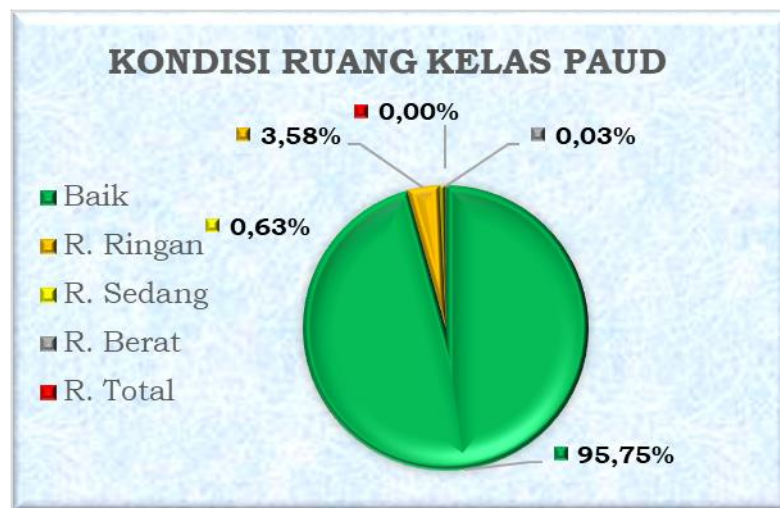
No	Satuan Pendidikan	Jumlah PAUD	KONDISI RUANG KELAS PER JENJANG PENDIDIKAN					Jumlah
			Baik	R. Ringan	R. Sedang	R. Berat	R. Total	
	KAB. DEMAK	1.122	2.886	108	19	1	0	3.014
A	TK	474	1.335	37	0	0	0	1.372
	TK Negeri	6	35	2	0	0	0	37
	TK Swasta	468	1.300	35	0	0	0	1.335
B	KB	359	851	24	0	0	0	875
	KB Negeri	0	0	0	0	0	0	0
	KB Swasta	359	851	24	0	0	0	875
C	TPA	33	66	0	0	0	0	66
	TPA Negeri	0	0	0	0	0	0	0

No	Satuan Pendidikan	Jumlah PAUD	KONDISI RUANG KELAS PER JENJANG PENDIDIKAN					
			Baik	R. Ringan	R. Sedang	R. Berat	R. Total	Jumlah
	KAB. DEMAK	1.122	2.886	108	19	1	0	3.014
	TPA Swasta	33	66	0	0	0	0	66
D	SPS	95	171	1	0	0	0	172
	SPS Negeri	0	0	0	0	0	0	0
	SPS Swasta	95	171	1	0	0	0	172
E	RA	161	463	46	19	1	0	529
	RA Negeri	0	0	0	0	0	0	0
	RA Swasta	161	463	46	19	1	0	529
	TOTAL	1.122	2.886	108	19	1	0	3.014
	%		95,75	3,58	0,63	0,03	0,00	100

Sumber: Profil Pendidikan Kab. Demak

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat kondisi sarana dan prasana jenjang Paud dalam Kondisi baik sebanyak 95,75%, Kondisi Rusak Ringan 3,58%, Kondisi Rusak Sedang 0,63%, Rusak Berat 0,03%, dan Rusak Total 0,00%.,

Gambaran Prosentase Kondisi Sarana dan Prasana Pendidikan Anak Usia Dini dapat dilihat sebagai berikut :



Gambar.1.4. : Sarana dan Prasana Jenjang PAUD Tahun 2024

2) Kondisi Ruang Kelas Pendidikan Non Formal (PNF)

Secara proporsi, prosentase kerusakan Ruang Kelas Jenjang Pendidikan Non Formal (PNF) yang terdiri dari 29 PKBM dan 1 SKB di Kabupaten Demak menunjukkan angka Baik sebesar 184 Ruang; Rusak Ringan 2 Ruang, Rusak Sedang 0, dan Rusak Berat 0, Secara rinci dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel I. 11 Jumlah Kondisi Ruang Kelas PNF Tahun 2025

No	Satuan Pendidikan	Jumlah PNF	KONDISI RUANG KELAS PNF					Jumlah
			Baik	R. Ringan	R. Sedang	R. Berat	R. Total	
A	KAB. DEMAK	29	184	2	0	0	0	186
	PKBM	28	170	2	0	0	0	172
	PKBM Negeri	0	0	0	0	0	0	0
	PKBM Swasta	28	170	2	0	0	0	172
B	SKB	1	14	0	0	0	0	14
	SKB Negeri	1	14	0	0	0	0	14
	SKB Swasta	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah PNF		29	184	2	0	0	0	186
%		-	98,92	1,08	0,00	0,00	0,00	100,00

Sumber: Profil Pendidikan Kab. Demak

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat kondisi sarana dan prasana jenjang PNF pada tahun 2023 dalam Kondisi baik sebanyak 99,92% meningkat dibandingkan tahun 2022 sebesar 98,34%, Kondisi Rusak Ringan 1,08%, Kondisi Rusak Sedang 0%, Rusak Berat 0%, dan Rusak Total 0%. Gambaran Prosentase Kondisi Sarana dan Prasana Pendidikan Nonformal dapat dilihat sebagai berikut :



Gambar.1.5. : Sarana dan Prasana Jenjang PNF Tahun 2024

5. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama
Bidang Pembinaan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan

kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan, pengendalian, pengoordinasian dan pengelolaan kegiatan Bidang Pembinaan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama serta sarana dan prasarana SD dan SMP, Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama mempunyai fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pembinaan Sekolah Dasar;
- b. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama;
- c. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- d. dan pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi tersebut kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di bantu oleh 1) Seksi Pembinaan Sekolah Menengah Peratama dan 2) Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama dan 3) Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional. Berikut Gambaran Umum Pendidikan Dasar :

a. Seksi Pembinaan Sekolah Dasar (SD)

1) Perluasan Akses Pendidikan Jenjang SD/MI

Pada Tahun 2025, Jumlah sekolah dasar mengalami penurunan karena ada sekolah yang di merger yang semula 488 sekolah menjadi 489 sekolah, sedangkan untuk jenjang MI mengalami penurunan dari semula 141 Madrasah menjadi 140 Madrasah, dengan ada penambahan SD Swasta dan penutupan Madrasah ini dengan harapan tingkat layanan pemerintah dan peran masyarakat dalam penyediaan satuan pendidikan Sekolah Dasar di Kabupaten Demak semakin lebih baik dan memadai. Secara keseluruhan sebaran lembaga pendidikan dan jumlah siswa satuan pendidikan tingkat SD/MI di Kabupaten Demak dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel I. 12 Jumlah SD/MI Tahun 2025

Jenis Sekolah	Data	Negeri	Swasta	Grand Total
SD	Jumlah sekolah	466	23	489
	Jumlah siswa	86.265	5.642	91.907
MI	Jumlah madrasah	7	135	142
	Jumlah siswa	2.956	25.915	28.871
Jumlah sekolah		473	158	631
Jumlah siswa		89.221	31.557	120.778

Sumber : Profil Pendidikan Kab. Demak

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa rata-rata jumlah siswa tiap sekolah di Kabupaten Demak adalah jumlah seluruh siswa (**120.778**) dibagi dengan jumlah satuan pendidikan (**631**) sama dengan **192** siswa rata-rata per-sekolah.

Berdasarkan Sebaran sekolah untuk jenjang Sekolah Dasar terdiri **631** Sekolah yang terdiri dari **SD sebanyak 489 Sekolah dan 142 Madrasah** yang tersebar di 14 Kecamatan.

2) Mutu Pendidikan Jenjang Sekolah Dasar

a) Akreditasi Sekolah Jenjang SD/MI

Berdasarkan BNSP/BNSM dalam penerapan standar mutu Pendidikan Sekolah terakreditasi, berikut adalah hasil Akreditasi Sekolah dan Kurikulum Jenjang SD/MI di Kabupaten Demak :

Tabel I. 13 Akreditasi Sekolah Bentuk Pendidikan SD/MI Tahun 2025

NO.	JENJANG PENDIDIKAN	NILAI AKREDITASI					Persentase	
		TOTAL	A	B	C	Belum	Nilai Minimal B	Nilai C /Belum
	KAB. DEMAK	630	291	325	7	7	97,78	2,22
1	SD	488	240	245	2	1	99,39	0,61
2	MI	142	51	80	5	6	92,25	7,75
	Jumlah	630	291	325	7	7	97,78	2,22
	%	100	46,19	51,59	1,11	1,11	-	-

Sumber : *Profil Pendidikan Kab. Demak*

Berdasarkan proporsi, Sekolah berakreditasi A yaitu sejumlah 327 sekolah (51,90%). Kemudian berurutan untuk Akreditasi B sebanyak 285 sekolah (45,24%), Akreditasi C sebanyak 5 sekolah (0,79%). dan Sekolah yang belum terakreditasi sejumlah 13 sekolah (2,06%). secara graphic dapat dilihat bawah ini :



Gambar.1.6. : Akreditasi SD/MI Tahun 2025

b) Kurikulum Sekolah Jenjang SD/MI

Pada Tahun 2025 semua sekolah jenjang pendidikan SD/MI di Kabupaten Demak semuanya sudah menggunakan Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka.

b. **Seksi Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (SMP)**

1) **Perluasan Akses Pendidikan Jenjang SMP/MTs**

Pada Tahun 2025, Jumlah Sekolah/Madrasah Jejang Pendidikan SMP/MTs sebanyak 222 sekolah/madrasah meningkat dibandingkan tahun 2022 sebanyak 220 sekolah/madrasah meningkat dibandingkan tahun sebelumnya tahun 2021 sebanyak 216 Sekolah dan tahun 2020 sebanyak 219 sekolah/madrasah di Kabupaten Demak.

Pada tahun pelajaran 2022/2023 yang terdiri dari Jumlah 88 SMP terdiri 38 SMP Negeri dan 50 SMP Swasta, sementara Jumlah 134 Madrasah terdiri dari 6 MTs Negeri dan 128 MTs swasta.

Tabel I. 14 Jumlah SMP/MTs Kabupaten Demak Tahun 2025

Jenis Sekolah	Data	Negeri	Swasta	Grand Total
SMP	Jumlah Sekolah	38	50	88
	Jumlah siswa	20.476	7.532	28.008
MTs	Jumlah Madrasah	6	128	134
	Jumlah siswa	4.326	23.508	27.834
Total Jumlah sekolah		44	178	222
Total Jumlah siswa		24.802	31.040	55.842

Sumber : Profil Pendidikan Kab. Demak

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa rata-rata jumlah siswa tiap sekolah di Kabupaten Demak adalah jumlah seluruh siswa (**55.842**) dibagi dengan jumlah satuan pendidikan (**222**) sama dengan **252** siswa rata-rata per sekolah/madrasah.

Berdasarkan Sebaran sekolah untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama terdiri 222 Sekolah yang terdiri dari SMP sebanyak 88 Sekolah dan 134 Madrasah yang tersebar di 14 Kecamatan.

2) **Mutu Pendidikan Jenjang SMP/MTs**

a) **Akreditasi Sekolah Jenjang SMP/MTs**

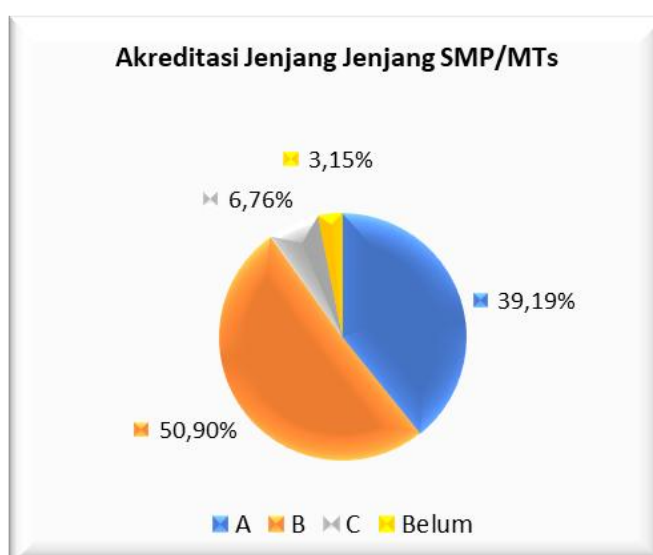
Berdasarkan BNSP/BNSM dalam penerapan standar mutu Pendidikan Sekolah terakreditasi, berikut adalah hasil Akreditasi Sekolah dan Kurikulum Jenjang SMP/MTs di Kabupaten Demak :

Tabel I. 15 Akreditasi Sekolah Jenjang SMP/MTs Tahun 2025

NO.	JENJANG PENDIDIKAN	NILAI AKREDITASI					Persentase	
		TOTAL	A	B	C	Belum	Nilai Minimal B	Nilai C /Belum
	KAB. DEMAK	222	87	113	15	7	90,09	9,91
1	SMP	88	39	37	6	6	86,36	13,64
2	MTs	134	48	76	9	1	92,54	7,46
	Jumlah	222	87	113	15	7	90,09	9,91
	%	100	39,19	50,90	6,76	3,15	-	-

Sumber : *Profil Pendidikan Kab. Demak*

Secara proporsional, prosentase sekolah terakreditasi Jenjang SD/MI yang berakreditasi A sebanyak 37,56%, berakreditasi B sebanyak 49,32%, berakreditasi C sebanyak, 6,79% dan belum terakreditasi sebanyak 6,33%, secara graphic dapat dilihat bawah ini :



Gambar.1.7. : Akreditasi Jenjang SMP/MTs Tahun 2025

b) Kurikulum Sekolah Jenjang SMP/MTs

Pada Tahun 2025 semua sekolah jenjang pendidikan SMP/MTs di Kabupaten Demak semuanya sudah menggunakan Kurikulum 2013 dan Kurikulum merdeka.

c. Seksi Sarana dan Prasarana SD dan SMP

1) Kondisi Ruang Kelas Pendidikan Dasar

Secara proporsi, kerusakan Ruang Kelas Pendidikan Dasar SD/MI di Kabupaten Demak menunjukkan angka Baik sebesar 7.039 Ruang, Rusak Ringan 603 Ruang, Rusak Sedang 160 ruang, dan Rusak Berat 46 Ruang, Rusak Total 7 ruang, Secara rinci dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel I. 16 Kondisi Ruang Kelas SD/MI dan SMP/MTs Kabupaten Demak

No	Satuan Pendidikan	Jumlah SD/MI dan SMP/MTs	KONDISI RUANG KELAS SD /MI dan SMP/MTs					
			Baik	R. Ringan	R. Sedang	R. Berat	R. Total	Jumlah
	KAB. DEMAK	851	7.039	603	160	46	7	7.855
A	SD	489	3.876	218	1	3	0	4.098
	SD Negeri	466	3.638	218	1	3	0	3.860
	SD Swasta	23	238	0	0	0	0	238
B	MI	140	989	190	86	34	7	1.306
	MI Negeri	7	96	8	5	5	0	114
	MI Swasta	133	893	182	81	29	7	1.192
C	SMP	88	1124	63	0	0	0	1.187
	SMP Negeri	38	796	49	0	0	0	845
	SMP Swasta	50	328	14	0	0	0	342
D	MTs	134	1050	132	73	9	0	1.264
	MTs Negeri	6	126	7	3	6	0	142
	MTs Swasta	128	924	125	70	3	0	1.122
	Jumlah SD/MI; SMP/MTs	851	7.039	603	160	46	7	7.855
	%	%	89,61	7,68	2,04	0,59	0,09	100

Sumber : Profil Pendidikan Kab. Demak

Secara proporsi, prosentase kerusakan Ruang Kelas Pendidikan Dasar di Kabupaten Demak menunjukkan angka Baik sebesar 89,61%; Rusak Ringan 7,68%, Rusak Sedang 2,04%, Rusak Berat 0,59%, dan Rusak Total (RT) 0,09%.

2) Kondisi Ruang Perpustakaan Pendidikan Dasar

Secara proporsi, kerusakan Perpustakaan Pendidikan Dasar SD/MI di Kabupaten Demak menunjukkan angka Baik sebesar 571 Ruang, Rusak Ringan 70 Ruang, Rusak Sedang 46 ruang, dan Rusak Berat 92 Ruang, Rusak Total 5 Ruang Secara rinci dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel I. 17 Kondisi Ruang Perpustakaan SD/MI dan SMP/MTs Kabupaten Demak

No	Satuan Pendidikan	Jumlah SD/MI dan SMP/MTs	KONDISI RUANG PERPUSTAKAAN SD/MI dan SMP/MTs					
			Baik	R. Ringan	R. Sedang	R. Berat	R. Total	Jumlah
	KAB. DEMAK	851	571	70	46	92	5	784
A	SD	489	424	37	1	4	0	466
	SD Negeri	466	407	37	1	4	0	449
	SD Swasta	23	17	0	0	0	0	17
B	MI	140	39	20	38	15	4	116
	MI Negeri	7	3	3	1	0	0	7
	MI Swasta	133	36	17	37	15	4	109
C	SMP	88	87	4	0	0	0	91
	SMP Negeri	38	42	3	0	0	0	45
	SMP Swasta	50	45	1	0	0	0	46
D	MTs	134	21	9	7	73	1	111
	MTs Negeri	6	2	1	0	1	0	4
	MTs Swasta	128	19	8	7	72	1	107
	Jumlah SD/MI; SMP/MTs	851	571	70	46	92	5	784
	%		72,83	8,93	5,87	11,73	0,64	100,00

Sumber : Profil Pendidikan Kab. Demak

Secara proporsi, prosentase kerusakan Ruang Perpustakaan Pendidikan Dasar di Kabupaten Demak menunjukkan angka Baik sebesar 72,83%; Rusak Ringan 8,93%, Rusak Sedang 5,87%, Rusak Berat 11,73% dan Rusak Total (RT) 0,64%.

3) Kondisi Ruang Toilet/WC Pendidikan Dasar

Kondisi Toilet/WC Pendidikan dasar sebanyak 3.808 Ruang WC, dilaporkan sebagian besar berada pada Kondisi Baik (B), Ringan (RR) dengan jumlah ruang kelas 542, Rusak Sedang (RS) 149, Rusak Berat (RB) 41 dan Rusak Total (RT) 13. Rincian kondisi ruang kelas dapat terlihat dari tabel berikut ini :

Tabel I. 18 Kondisi Ruang Toilet/WC SD/MI dan SMP/MTs Kabupaten Demak

No	Satuan Pendidikan	Jumlah SD/MI; SMP/MTs	KONDISI RUANG WC/TOILET SEKOLAH					Jumlah
			Baik	R. Ringan	R. Sedang	R. Berat	R. Total	
	KAB. DEMAK	851	3.063	542	149	41	13	3.808
A	SD	489	1.837	139	0	0	0	1.976
	SD Negeri	466	1.721	139	0	0	0	1.860
	SD Swasta	23	116	0	0	0	0	116
B	MI	140	458	169	96	30	9	762
	MI Negeri	7	58	12	10	6	3	89
	MI Swasta	133	400	157	86	24	6	673
C	SMP	88	568	33	0	0	0	601
	SMP Negeri	38	382	33	0	0	0	415
	SMP Swasta	50	186	0	0	0	0	186
D	MTs	134	200	201	53	11	4	469
	MTs Negeri	6	11	8	1	0	0	20
	MTs Swasta	128	189	193	52	11	4	449
	Jumlah SD/MI; SMP/MTs	851	3.063	542	149	41	13	3.808
	%	-	80,44	14,23	3,91	1,08	0,34	100,00

Sumber : Profil Pendidikan Kab. Demak

Secara proporsi, prosentase kerusakan Ruang WC jenjang Pendidikan dasar di Kabupaten Demak tahun 2023 menunjukkan angka Baik sebesar 80,44% meningkat dibandingkan tahun 2022 sebesar 79,76%; Rusak Ringan 14,23%, Rusak Sedang 3,91%, Rusak Berat 1,08% dan Rusak Total (RT) 0,34%.

4) Kondisi Ruang Guru Pendidikan Dasar

Kondisi Ruang Guru Pendidikan dasar sebanyak 815 Ruang Guru dilaporkan sebagian besar berada pada Kondisi Baik (B) 739, Ringan (RR) dengan jumlah ruang kelas 50, Rusak Sedang (RS) 22, Rusak Berat (RB) 3 dan Rusak Total (RT) 1. Rincian kondisi Ruang Guru dapat terlihat dari tabel berikut ini :

Tabel I. 19 Kondisi Ruang Guru SD/MI dan SMP/MTs Kabupaten Demak

No	Satuan Pendidikan	Jumlah SD/MI; SMP/MTs	KONDISI RUANG GURU					Jumlah
			Baik	R. Ringan	R. Sedang	R. Berat	R. Total	
	KAB. DEMAK	851	739	50	22	3	1	815
A	SD	489	472	16	0	0	0	488
	SD Negeri	466	450	16	0	0	0	466
	SD Swasta	23	22	0	0	0	0	22
B	MI	140	86	18	18	3	1	126
	MI Negeri	7	3	2	1	0	0	6
	MI Swasta	133	83	16	17	3	1	120
C	SMP	88	85	2	0	0	0	87
	SMP Negeri	38	38	1	0	0	0	39
	SMP Swasta	50	47	1	0	0	0	48
D	MTs	134	96	14	4	0	0	114
	MTs Negeri	6	4	0	0	0	0	4
	MTs Swasta	128	92	14	4	0	0	110
	Jumlah SD/MI; SMP/MTs	851	739	50	22	3	1	815
	%		90,67	6,13	2,70	0,37	0,12	100,00

Sumber: Profil Pendidikan Kab. Demak

Secara proporsi, prosentase kerusakan Ruang Guru di Kabupaten Demak menunjukkan angka Baik sebesar 90,67%; Rusak Ringan 6,13%, Rusak Sedang 2,70%, Rusak Berat 0,37% dan Rusak Total (RT) 0,12%.

6. Bidang Pembinaan Kebudayaan

Bidang Pembinaan Kebudayaan mempunyai tugas tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Budaya, Kesenian, serta Sejarah dan Cagar Budaya. Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Bidang Pembinaan Kebudayaan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Budaya;
- b. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Kesenian;
- c. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Sejarah dan Cagar Budaya; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi tersebut Bidang Pembinaan Kebudayaan di bantu oleh Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.

a. Seksi Budaya;

Untuk mendukung pemajuan kebudayaan sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017, Dinas Pendidikan dan Kabupaten Demak pada tahun 2018 sudah berhasil membuat Dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD). Proses inventarisasi karya budaya sudah dituangkan dalam dokumen tersebut, dan diharapkan ke depan revitalisasi karya budaya yang sudah diinventarisir dapat berjalan optimal, berikut kebudayaan di Kabupaten Demak yang sudah dilestarikan diantaranya :

1) Tradisi Grebeg Besar Demak

Grebeg Besar masuk dalam domain Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan yang tercatat dalam Daftar Warisan Budaya Tak Benda Kebudayaan Per Prov. Jawa Tengah dengan kode pengelolaan AA000247, kegiatan ini diselenggarakan tiap tahun sekali dalam rangkaian Hari Raya Idul Adha (Qurban), dimaksudkan sebagai tradisi penghormatan dan rasa syukur atas perjuangan para leluhur, khususnya sehubungan kegiatan syi'ar Islam yang dilaksanakan walisongo terutama Sunan Kalijaga.

Acara Grebeg Besar diawali dengan saling bersilaturahmi antara pihak Kasepuhan Kadilangu dan Bupati Demak. Diawali kunjungan Bupati ke Sasono Renggo Kadilangu. Selanjutnya Sesepuh Kadilangu dan keluarga kasepuhan bersilaturahmi menemui Bupati dan biasanya mereka diterima di ruang tamu Bupati.

2) Tradisi Syawalan

Kabupaten Demak merupakan daerah pesisir yang memiliki kebudayaan pesisiran yaitu Pesta Sedekah Laut yang sering disebut Syawalan. Tradisi syawalan diadakan tiap tahun sekali, tepatnya seminggu setelah Hari Raya Idul Fitri.

3) Tradisi Megengan

Tradisi Megengan merupakan tradisi menyambut bulan Ramadhan. Sejumlah acara kesenian rakyat ditampilkan untuk memeriahkan tradisi Megengan, dalam acara megengan juga digelar aneka kuliner tradisional. Kuliner tersebut berjejer di sepanjang Simpang Enam hingga kawasan Pecinan Demak.

4) Tradisi Kliwonan

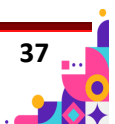
Tradisi kliwonan merupakan kegiatan Ziarah ke makam sunan kali jaga yang berada di Kadilangu demak, yang bertujuan untuk mendoakan dan ngalap barokah kepada para sesepuh dan tokoh ulama' Demak khususnya Sunan Kalijogo. Kliwonan biasanya dilaksanakan pada malam Jum'at Kliwon, dari mulai sore biasanya masyarakat sudah mulai ramai mengunjungi Makam di Kadilangu.

b. Seksi Kesenian;

Kabupaten Demak merupakan kabupaten dengan peninggalan sejarah budaya yang termasyhur di Nusantara. Sebagai pusat penyebaran Agama Islam pada masanya, Kabupaten Demak yang dahulu merupakan wilayah Kerajaan Demak memiliki warisan seni dan budaya. Berikut ini merupakan data penyelenggaraan pertunjukan seni dan budaya di Kabupaten Demak.

Pada Tahun 2025 jumlah penyelenggaraan pertunjukan seni dan budaya di Kabupaten Demak mengalami peningkatan berikut kegiatan yang dilaksanakan :

Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya :



1. Pentas Wayang Kulit dalam rangka Hari Wayang Nasional;
2. Pekan Kebudayaan Daerah;
3. Festival Kali Tuntang;
4. dst

Berikut Kesenian yang menjadi ciri khas di Kabupaten Demak diantaranya :

1) Kesenian Barong Demakan bercorak pesisiran

Pada dasarnya kesenian ini adalah adaptasi dari kesenian reog Ponorogo serta barongsai dari tionghoa. Sama halnya dengan kuda kepang, acara kesenian budaya ini diperankan oleh barongan dan kuda kepang yang menari-nari. tak lupa juga beberapa atraksi ditunjukkan dalam acara ini seperti kekuatan fisik debus. Yang terpenting adalah inti dari tarian ini yaitu menceritakan kerajaan Demak dan Wali Songo. Biasanya barongan Demak ini ditanggap / dimainkan saat terdapat acara di Demak baik ulang tahun kota, pernikahan, kitanan, dan lainnya.

2) Kesenian Kentrung Demakan

Seni kentrung ini biasanya dimainkan pada hari-hari besar Islam, tanggapan khitanan, kawinan, dan hari-hari besar lainnya. Permainan ini menggunakan alat musik seperti rebana, gendang, ketipung, jidur. Kesenian ini menceritakan kisah para nabi, wali, serta lagu-lagu Islam.

3) Kesenian Zippin Pesisir Demak

Keunikan khas dengan menggunakan rebana yang dimainkan untuk menyambut para tamu didalam suatu acara. Kesenian ini mulai dilakukan sejak tahun 1940 an.

c. Seksi Cagar Budaya dan Sejarah;

Pengelolaan cagar budaya secara terpadu di Kabupaten Demak belum berjalan optimal. Di Kabupaten Demak cagar budaya yang sudah ditetapkan baik tingkat nasional maupun kabupaten ada 5 (lima) yaitu :

- Masjid Agung Demak dan Makam Sultan Fatah
- Komplek Makam Sunan Kalijaga dan Rumah Notobratan Kadilangu
- Situs Batu Balai di Desa Batusari Kecamatan Mranggen
- Bangunan Kantor Dinas Pariwisata (Museum Glagah Wangi Kab. Demak)
- Situs Dudukan Desa Blerong Kecamatan Guntur

Sedang cagar budaya yang sudah di kaji dan pada tahun 2023 akan ditetapkan ada 2 (dua) yaitu :

- Makam Wali Depok Desa Kramat Kecamatan Dempet
- Bangunan Rumah Pelayanan Sosial (Eks Kawedanan Demak) DinsosP2PA.

Berikut diantaranya cagar budaya di kabupaten Demak yang sudah tercatat dalam Registrasi cagar budaya :

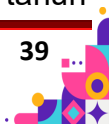
1) Masjid Agung Demak

Salah satu Situs Cagar Budaya di Kabupaten Demak adalah Masjid Agung Demak yang tercatat dalam Kategori Bangunan dengan kode KB000335 yang terletak di Jalan Sultan Fatah, Kelurahan Bintoro/Kauman, Kecamatan Demak, Kota Demak, Provinsi Jawa tengah. Masjid dibangun diatas lahan seluas 12.752,74 m² dengan luas bangunan utamanya yaitu 537,5 m² dan luas serambinya 497 m². Masjid Agung Demak berkaitan erat dengan keberadaan Kerajaan Demak yang muncul pada akhir kejayaan Kerajaan Majapahit. Raja pertama kerajaan tersebut adalah Raden Patah yang diangkat oleh wali songo. Disamping sebagai pusat pemerintahan, Demak sekaligus menjadi pusat penyebaran agama Islam di pulau Jawa. Bukti peninggalan sejarah yang masih berdiri dengan kokoh sampai sekarang yaitu Masjid Agung Demak.



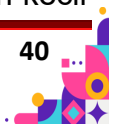
Gambar.1.8. : Masjid Agung Demak

Berita-berita tahun pembangunan masjid Agung Demak dapat dikaitkan dengan pengangkatan Raden Patah sebagai Adipati Demak pada tahun 1462 dan pengangkatannya sebagai sultan Demak Bintara tahun



1478 M. Kala itu Majapahit jatuh di tangan Prabu Girindrawardhana dari Kediri. Khafid Kasri menyebutkan bahwa Raden Patah menanggukkan penyerangan yang kedua dan melanjutkan mendirikan masjid Kadipaten Demak bersama para walisongo yang sudah dimulai pada tahun 1477 M/ 1399 S. Dikabarkan bahwa Raden Patah menyesali kekhilafannya karena terburu hawa nafsu mengadakan penyerangan kepada pasukan Girindrawadana tanpa mengukur kekuatan pasukan musuh terlebih dahulu. Akibatnya banyak korban yang gugur di pihak pasukan Bintaro. Setelah penyerangan tersebut, para wali menyarankan Raden Patah untuk melanjutkan pembangunan masjid Agung Kadipaten yang belum selesai sambil menjajagi kekuatan musuh. Raden Patah menerima saran tersebut kemudian melanjutkan pembangunan masjid Kadipaten Demak dan menunda merebut tahta Majapahit yang dikuasai Prabu Girindrawardana, tetapi dengan syarat mustaka masjid yang akan dibuat nanti bentuknya runcing mirip angka satu arab (ahad). Persyaratan itu sebagai lambang kejantanan bahwa Demak berani menghadapi pasukan Majapahit.

Pembangunan Masjid Agung Kadipaten Bintoro yang telah dimulai sejak tahun 1477 M dapat diselesaikan pada tahun 1479 M/1401 S. Hal ini ditandai dengan adanya sengkala mamet berupa gambar berbentuk bulus, “krata Basa bulus” dengan arti “yen mlebu kudu alus”. Sengkala memet bulus juga mengandung makna bahwa Raden Patah sedang prihatin karena kerajaan ayahnya direbut Girindrawadana. Masjid Agung Demak dibangun dengan gaya khas Majapahit, yang membawa corak kebudayaan Bali. Gaya ini berpadu harmonis dengan langgam rumah tradisional Jawa Tengah. Persinggungan arsitektur Masjid Agung Demak dengan bangunan Majapahit bisa dilihat dari bentuk atapnya. Meski demikian, kubah melengkung yang identik dengan ciri masjid sebagai bangunan Islam justru tidak nampak dalam bangunan. Sebaliknya, yang terlihat justru adaptasi dari bangunan peribadatan agama Hindu. Bentuk ini diyakini merupakan bentuk akulturasi dan toleransi masjid sebagai sarana penyebaran agama Islam di tengah masyarakat Hindu, kecuali bagian mustoko yang berhias asma Allah serta menara masjid yang sudah mengadopsi gaya menara masjid Melayu. Dengan bentuk atap berupa tajuk tumpang tiga berbentuk segi empat, atap Masjid Agung Demak lebih mirip dengan bangunan suci umat Hindu. Bagian tajuk paling bawah menaungi ruangan ibadah, tajuk kedua yang lebih kecil



bentuknya memiliki kemiringan lebih tegak dibanding atap di bawahnya, dan tajuk tertinggi berbentuk limas dengan sisi kemiringan lebih runcing.

Masjid Agung Demak pada dasarnya berdiri pada empat tiang pokok atau disebut soko guru. Fungsi tiang-tiang ini adalah sebagai penyangga bangunan. Di antara empat tiang itu ada satu tiang yang sangat unik, dikenal sebagai tiang tatal yang letaknya di sebelah timur laut. Disebut dengan tiang tatal (serutan-serutan kayu) karena dibuat dari serpihan kayu yang ditata dan dipadatkan, kemudian diikat sehingga membentuk tiang yang rapi. Pada tiang-tiang penyangga masjid, termasuk soko guru, terdapat ukiran yang masih menampilkan corak ukiran gaya Hindu yang indah bentuknya. Selain ukiran pada tiang, terdapat pula ukiran-ukiran kayu yang ditempel pada dinding masjid yang berfungsi sebagai hiasan. Di dalam bangunan utama terdapat ruang utama, mihrab, dan serambi. Ruang utama yang berfungsi sebagai tempat shalat jamaah, letaknya di bagian tengah bangunan. Sedangkan, mihrab atau bangunan pengimaman yang berada di depan ruang utama, berbentuk sebuah ruang kecil dan mengarah ke arah kiblat (Makkah). Di bagian belakang ruang utama terdapat serambi berukuran 31 x 15 meter yang memiliki tiang-tiang penyangga yang disebut Soko Majapahit berjumlah delapan buah dan diperkirakan berasal dari kerajaan Majapahit.

Atap Masjid Agung Demak bertingkat tiga (atap tumpang tiga), menggunakan sirap (atap yang terbuat dari kayu) dan berpuncak mustaka. Dinding masjid terbuat dari batu dan kapur. Pintu masuk masjid diberi lukisan bercorak klasik. Seperti masjid-masjid yang lain, Masjid Agung Demak dilengkapi dengan sebuah bedug. Di masjid ini juga terdapat Pintu Bledag, bertuliskan Condro Sengkolo, yang berbunyi Nogo Mulat Saliro Wani, dengan makna tahun 1388 Saka atau 1466 M, atau 887 H. Pawestren merupakan bangunan yang khusus dibuat untuk shalat jama'ah wanita yang dibangun menggunakan konstruksi kayu jati, dengan bentuk atap limasan berupa sirap (genteng dari kayu) kayu jati. Bangunan ini ditopang 8 tiang penyangga, 4 di antaranya berhias ukiran motif Majapahit. Luas lantai yang membujur ke kiblat berukuran 15 x 7,30 m. Pawestren ini dibuat pada zaman K.R.M.A. Arya Purbaningrat, tercermin dari bentuk dan motif ukiran maksurah atau khalwat yang bertarikh tahun 1866 M. Masjid Agung Demak saat ini menjadi salah satu tempat tujuan wisata ziarah utama di Pulau Jawa.

Beberapa bangunan baru didirikan berdampingan dengan bangunan lama, namun demikian konsep penataan bangunan baru tetap diselaraskan dengan model bangunan lama.

2) Pendopo Notobraton Kadilangu - Demak

Bangunan Pendopo Notobraton Kadilangu yang tercatat dalam Kategori Bangunan dengan kode KB000405 dibangun pada tahun 1885 oleh Noto Broto salah satu keturunan Sunan Kalijaga semasa beliau menjabat kepala Perdikan Kadilangu. Pendopo Notobraton Merupakan bangunan berciri arsitektur rumah adat Jawa. Ciri arsitektur rumah adat Jawa terlihat dari kompleks bangunan yang mempunyai komponen lengkap dengan dua bangunan pendopo, ndalem ageng, dan pungkuran. Selain itu juga dilengkapi bangunan lumbung dan langgar dengan konstruksi bangunan panggung.

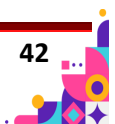
Pendopo Notobraton Kadilangu terletak di desa Kadilangu, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak Propinsi Jawa Tengah. Lokasi ini tepatnya terletak pada UTM 110°38'55,1" BT 06°54'00.9"LS. Bangunan menempati luas lahan seluas 4 hektar.



Gambar.1.9. : Pendopo Notobraton Kadilangu – Demak

Adapun batas-batas Pendopo Notobraton Kadilangu :

- Utara : Jl. R. Sahid
- Selatan : Gg. Nglorong



- Timur : Pekarangan
- Barat : Gg. Nglorong

Sampai saat ini Pendopo Notobraton Kadilangu masih digunakan untuk berbagai even budaya. Bahkan even-even ini diselenggarakan secara rutin.

3) Kompleks Makam Astana Gedhong Kenep, Glagah Wangi;

Situs Cagar Budaya di Kabupaten Demak adalah 3) Kompleks Makam Astana Gedhong Kenep, Glagah Wangi yang tercatat dalam Kategori Situs dengan kode KB000387 yang terletak di Glagahwangi, Kelurahan Mangunjiwan, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa tengah.

Kompleks Makam Astana Gedhong Kenep di Glagah Wangi, Demak, adalah situs cagar budaya nasional yang ditetapkan pada tahun 2010. Tempat ini diyakini sebagai makam para Bupati Demak abad ke-17, yang menyimpan jejak sejarah Mataram Islam. Lokasi ini sering dikunjungi peziarah dan berpotensi menjadi destinasi wisata sejarah.

Kompleks Makam Kenep, yang terletak di kawasan Keraton Glagah Wangi Dhimak, menyimpan jejak penting sejarah Mataram Islam. Di area ini terdapat deretan makam kuno yang diyakini sebagai makam para Bupati Demak pada abad ke-17. Nilai historisnya yang tinggi menjadikan kawasan ini bukan hanya situs pemakaman, tetapi juga bagian dari perjalanan panjang pemerintahan dan budaya Demak pada masa lalu.

Hingga kini, kompleks makam tersebut banyak dikunjungi peziarah dari berbagai daerah. Selain sebagai tujuan ziarah, tempat ini juga memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata religi sekaligus wisata sejarah. Keberadaannya dapat menjadi magnet baru bagi wisatawan yang ingin mengenal lebih dalam warisan leluhur Demak.

Dengan pengelolaan yang tepat, Makam Bupati Demak di Kampung Kenep diharapkan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar serta meningkatkan perekonomian daerah, khususnya di sektor pariwisata. Kawasan ini berpotensi menjadi salah

satu ikon wisata bersejarah yang memperkuat identitas Demak sebagai kota yang kaya nilai spiritual dan budaya.



Gambar.1.10. : Keraton Glagah Wangi Demak



Berikut adalah jumlah cagar budaya dan museum yang terdapat di Kabupaten Demak :

Tabel I. 20 Jumlah Cagar Budaya dan Museum

NO	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Cagar Budaya	5	
2.	Desa Adat	0	
3.	Museum	2	
4.	Rumah Budaya Nusantara	0	
5.	Sanggar dan Komunitas	0	
TOTAL		6	

7. UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas)

Unit Pelaksana Teknis Daerah untuk melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis tertentu Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan.

d. UPTD Museum Kabupaten Demak

Museum Glagah Wangi adalah museum negara yang berada di Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Museum Glagah Wangi menjadi museum penyimpanan peninggalan masa lampau manusia dan etnografi. Koleksi museum terdiri dari benda-benda etnografi antara lain peralatan dan perlengkapan hidup, kesenian, keagamaan, bahasa tulisan, dan lainnya yang mencerminkan kehidupan dan perkembangan kebudayaan Kabupaten Demak di masa lampau.

Gedung Museum Glagah Wangi Demak

Museum Glagah Wangi merupakan museum umum yang dikukuhkan dengan keluarnya Surat Keputusan (SK) Bupati Demak Nomor 556/83/2007. Museum menempati gedung bekas Dinas Pendapatan Daerah yang pada awalnya diperuntukkan untuk penempatan benda Cagar Budaya dari Masjid Agung Demak. Namun, terdapat pendapat bahwa benda yang berasal dari Masjid Agung Demak tidak diperbolehkan untuk disimpan di luar masjid. Akhirnya, gedung bekas Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Demak tersebut berubah fungsi untuk menyimpan hasil koleksi Cagar Budaya yang berasal dari masyarakat. Nama Glagah Wangi berasal dari pemukiman yang didirikan di daerah barat, dan terdapat pepohonan

yang mengeluarkan aroma wangi, sehingga disebut Glagah Wangi. Jenis koleksi yang ditampilkan di museum terdiri dari historika dan arkeologika. Beberapa koleksi unggulan museum ini adalah filter air batu, piring Aryo Penangsang, dan wayang Bethara Guru. Museum ini dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Pendidikan dan kebudayaan kabupaten Demak. Hadirnya Museum Glagah Wangi diharapkan dapat memberikan informasi mengenai sejarah dan perkembangan Demak kepada masyarakat.

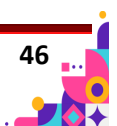
Museum Glagah Wangi Demak adalah sebuah museum yang terletak di dalam kompleks Gedung Pariwisata Demak dalam lingkungan alun-alun kota Demak. Museum ini buka tiap hari dari Senin hingga Minggu pada jam kerja. Museum ini menyimpan berbagai barang peninggalan bersejarah di Demak.

Berbagai koleksi bersejarah terkait Museum Glagah Wangi Demak serta Kesultanan Demak ada dalam museum. Seperti benda-benda peninggalan Wali Songo, Sultan, yang bisa dibilang koleksi utama dalam museum.



Gambar.1.11. : Museum Museum Glagah Wangi Demak

Koleksi lainnya yang tak kalah menarik adalah Saringan Air Jaman Kasultanan Demak,





Gambar.1.12. : Koleksi Museum Glagah Wangi

4) Gedung Museum Masjid Agung Demak

Museum Masjid Agung Demak adalah sebuah museum yang terletak di dalam kompleks Masjid Agung Demak dalam lingkungan alun-alun kota Demak. Museum ini buka tiap hari dari Senin hingga Minggu pada jam kerja. Museum ini menyimpan berbagai barang peninggalan Masjid Agung Demak.

Berbagai koleksi bersejarah terkait Masjid Agung Demak serta Kesultanan Demak ada dalam museum. Seperti benda-benda peninggalan Wali Songo yang bisa dibilang koleksi utama dalam museum.

Peninggalan Wali Songo yang begitu populer di museum adalah bagian-bagian dari soko guru yang asli. Soko guru sendiri merupakan tiang utama Masjid Agung Demak dari empat Wali Songo, yaitu Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Gunung Jati dan Sunan Kalijaga dengan soko tatalnya.



Gambar.1.1. : Museum Masjid Agung Demak

Koleksi lainnya yang tak kalah menarik adalah pintu bledeg atau pintu petir yang asli buatan Ki Ageng Selo. Dulu, pintu bledeg menjadi salah satu pintu di Masjid Agung Demak. Dinamakan beledog karena konon pembuat pintu itu bisa menangkal petir, dan pintu kayu jati ini pun dapat berfungsi sebagai penangkal petir. Sama seperti soko guru, pintu bledeg juga diberi pelindung kaca di bagian depannya.



Gambar.1.2. : Benda Koleksi Museum Masjid Agung Demak

8. Satuan Pendidikan

Selain unit pelaksana teknis dinas (UPTD), pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak terdapat unit pelaksana teknis dinas di bidang pendidikan berupa Satuan Pendidikan. Satuan Pendidikan sebagaimana tersebut berbentuk Satuan Pendidikan Formal Dan Nonformal. Satuan pendidikan dijabat oleh jabatan fungsional guru atau pamong belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, daftar satuan pendidikan terlampir.

9. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Dinas ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai Jabatan Fungsional masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah atau Kepala Subbagian yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Pejabat Fungsional jenjang keterampilan dan/atau jenjang keahlian. Jumlah, jenis dan jenjang Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja. Tugas, pembinaan dan pengembangan Jabatan Fungsional diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Isu Strategis Bidang Pendidikan dan Kebudayaan

Isu strategis pendidikan di Kabupaten Demak tahun 2025 mencakup beberapa aspek, antara lain:

- a. **Pemerataan Akses Pendidikan:** Masih ada kesenjangan dalam akses pendidikan, terutama bagi keluar miskin dan rentas miskin.
- b. **Kualitas Pendidikan:** Kualitas pendidikan masih menjadi perhatian utama, termasuk kualitas guru, kurikulum, dan infrastruktur pendidikan.
- c. **Pengembangan Karakter:** Pengembangan karakter Murid menjadi fokus utama dalam pendidikan di Kabupaten Demak, sejalan dengan visi pembangunan daerah yang berkelanjutan.
- d. **Peningkatan Mutu Pendidikan:** Peningkatan mutu pendidikan melalui peningkatan kualitas guru, pengembangan kurikulum, dan peningkatan infrastruktur pendidikan.



11. Anggaran Bidang Pendidikan dan Kebudayaan

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak, pada tahun anggaran 2025 mendapatkan alokasi anggaran Murni dalam penetapan dokumen pelaksanaan anggaran Tahun 2025 sebesar Rp. 807.299.057.137,00 dan dalam rangka evaluasi, efisiensi anggaran berjalan serta pengambilan kebijakan terhadap rencana strategis tahun 2025, ditambah dengan perubahan usulan Aspirasi, dalam pertengahan anggaran Tahun 2025 terdapat perubahan anggaran menjadi sebesar Rp. 817.575.374.470,00 bertambah Rp. 10.276.317.333,00 (bertambah 1,27%) yang dapat dilihat seperti tabel dibawah ini :

Tabel I. 21 Target Pendapat Anggaran Murni dan Perubahan Tahun 2025

No	Nama Program / Kegiatan	JUMLAH		BERTAMBAH/BERKURANG	
		Anggaran Murni	Anggaran Perubahan	Rupiah	Prosentase
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
▶	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	812.673.780.088	832.956.428.835	20.282.648.747	2,50
	▶ URUSAN SETIAP OPD	605.884.369.964	625.596.609.871	19.712.239.907	3,25
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	605.884.369.964	625.596.609.871	19.712.239.907	3,25
	▶ URUSAN PENDIDIKAN	204.661.410.124	205.255.748.964	594.338.840	0,29
2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	203.516.410.124	203.569.730.060	53.319.936	0,03
3	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	160.000.000	160.000.000	0	0,00
4	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	985.000.000	1.526.018.904	541.018.904	54,93
	▶ URUSAN KEBUDAYAAN	2.128.000.000	2.104.070.000	-23.930.000	-1,12
5	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	1.310.000.000	1.259.730.000	-50.270.000	-3,84
6	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	200.000.000	181.380.000	-18.620.000	-9,31

No	Nama Program / Kegiatan	JUMLAH		BERTAMBAH/BERKURANG	
		Anggaran Murni	Anggaran Perubahan	Rupiah	Prosentase
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
7	PROGRAM PENGELOLAAN MUSEUM KABUPATEN/KOTA	618.000.000	662.960.000	44.960.000	7,28
	JUMLAH TOTAL	812.673.780.088	832.956.428.835	20.282.648.747	2,50

Sumber : DPPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja (LKjIP) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak Tahun 2025 adalah :

Bab I Pendahuluan

Pada Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada Bab ini berisi ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub Bab ini menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
5. Analisis penyebab keberhasilan /kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

B. Realisasi Anggaran

Pada sub Bab ini menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

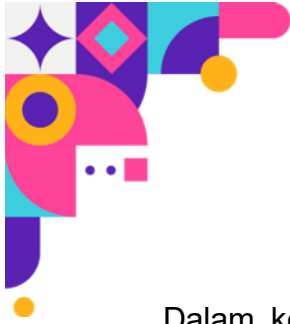


Bab IV Penutup

Pada Bab ini menginformasikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran-Lampiran





BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dalam konteks Otonomi daerah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Demak khususnya pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak berpedoman penyelenggaraan Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) diantaranya azas kepastian hukum, azas tertib penyelenggara negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsional, azas profesionalitas, azas akuntabilitas, azas efisiensi dan azas efektivitas.

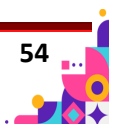
Pada tahun 2025 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak memfokuskan pencapaian sasaran utama yaitu :

- Meningkatkan Layanan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang merata, terjangkau dan berkualitas;
- Meningkatkan Layanan penyelenggaraan Pendidikan Non Formal (PNF) yang merata, terjangkau dan berkualitas;
- Meningkatkan Layanan Pendidikan yang merata, terjangkau dan berkualitas jenjang Pendidikan Dasar (DIKDAS);
- Mewujudkan optimalnya kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
- Meningkatkan Pelestarian peninggalan kepurbakalaan dan sejarah;
- Mengembangkan kesenian dan budaya daerah;

Sasaran-sasaran dimaksud perlu diprioritaskan dalam rangka untuk mendukung tercapainya visi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak Terwujudnya pendidikan dan Kebudayaan yang berkualitas, agamis dan demokratis. Guna mencapai sasaran dimaksud maka pada tahun 2024 telah menetapkan 6 program/kegiatan.

A. Ringkasan Ikhtisar Perjanjian Kinerja

Rencana strategik adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, tantangan dan hambatan yang timbul. Rencana strategik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak Tahun 2022 s.d 2026 merupakan bagian integral dari kebijakan dan Program Pemerintah Kabupaten Demak dan merupakan landasan dan



pedoman bagi seluruh aparat dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintah dan Pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu sejak 2022 s.d 2026.

Untuk itu Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak mengacu pada visi dan misi Kabupaten Demak yaitu :

Visi Kabupaten Demak

❖ Telaah Visi, Misi, dan Program Kabupaten Demak

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Demak Tahun 2022-2026 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2021, Visi Kabupaten Demak adalah :

**“Visi Kabupaten Demak
“Demak bermartabat, maju dan sejahtera””**

Visi ini menekankan bagaimana tiga unsur (*elemen*) yang menjadi tugas dari organisasi yaitu Pendidikan dan Kebudayaan dapat berjalan secara sinergi tanpa membedakan satu unsur dengan unsur yang lain dengan penjabaran sebagai berikut :

- a. Pendidikan yang bermartabat, maju dan sejahtera :
 - **Pendidikan yang bermartabat** adalah suasana pendidikan yang mampu mewujudkan rasa dan perlakuan yang humanis pada seluruh warga sekolah, baik siswa maupun guru.
 - **Pendidikan yang maju** adalah sebuah bangsa dapat dikatakan maju apabila memiliki kualitas sumber daya manusia (SDM) yang unggul. UNESCO menyertakan empat pilar pendidikan yang harus dikuasi lembaga pendidikan formal: 1) Belajar untuk mengetahui, 2) Belajar untuk melakukan sesuatu, 3) Belajar untuk menjadi sesuatu; 4) Belajar untuk hidup bersama.
 - **Pendidikan yang sejahtera** adalah berbagai upaya untuk mengadakan usaha pembelajaran atau pendidikan secara umum dengan tujuan memberikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk agar suatu keluarga dapat sejahtera.

b. Kebudayaan yang bermartabat, maju dan sejahtera :

- **Kebudayaan yang bermartabat** adalah Terwujudnya perlindungan warisan budaya yang memperkaya kebudayaan nasional.
- **Kebudayaan yang maju** adalah Terwujudnya peningkatan mutu tata kelola kebudayaan.
- **Kebudayaan yang sejahtera** adalah Terwujudnya pengelolaan kekayaan budaya yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Misi Kabupaten Demak

❖ Misi Kabupaten Demak

Untuk mencapai visi tersebut, telah ditetapkan 3 (tiga) misi yang harus dilaksanakan sebagai arah dan batasan proses pencapaian tujuan, yaitu :

- 1) Memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, serta kehidupan bermasyarakat yang agamis, kondusif dan berbudaya;
- 2) Meningkatkan sumber daya manusia, sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkualitas dan berdaya saing;
- 3) Mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal, membuka lapangan kerja, mengurangi kemiskinan dan pengangguran.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak sebagai unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan yang menjadi kewenangan Daerah mengampu pada misi 1,2, dan 3.

Dalam rangka mencapai visi dan misi tersebut di atas, Bupati terpilih telah menetapkan 9 Program unggulan sebagai berikut :

- 1) Peningkatan harmonisasi dan fasilitasi kehidupan beragama;
- 2) Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city;
- 3) Peningkatan kebersihan dan keindahan wilayah;
- 4) Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan Kesehatan;
- 5) Pengembangan inovasi daerah;
- 6) Perluasan kawasan perkotaan;
- 7) Percepatan pembangunan infrastruktur, terutama di kawasan pesisir, pertanian, dan pusat pertumbuhan / pusat produksi;
- 8) Percepatan pemulihan ekonomi masyarakat;

- 9) Peningkatan keberdayaan, perlindungan dan rehabilitasi sosial;

Dari 9 Program unggulan Bupati Terpilih, yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak adalah Program unggulan yang ke-2 dan ke-4 dengan kegiatan prioritas sebagai berikut :

- 1) Integrasi e-government (Integrasi Aplikasi Kluster Pendidikan)
- 2) Ajang / lomba kreativitas guru dan siswa;
- 3) Beasiswa miskin;
- 4) Literasi berbasis inklusi sosial

Tujuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak. Tujuan yang dilengkapi dengan rencana sasaran yang hendak dicapai akan berfungsi sebagai panduan dalam mengukur dan menilai pencapaian visi dan misi tersebut.

Tujuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak dirumuskan sebagai berikut:

a. Meningkatkan kinerja pelayanan publik.

Indikator Tujuan :

- 1) Indeks Kepuasan Masyarakat;

b. Meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur.

Indikator Tujuan :

- 1) Nilai SAKIP Dindikbud;

c. Meningkatkan partisipasi pendidikan pada jenjang PAUD, Pendidikan dasar, dan pendidikan non formal.

Indikator Tujuan :

- 1) Meningkatnya Angka Rata-rata Lama Sekolah (ARLS);
- 2) Meningkatnya Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS);

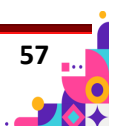
d. Meningkatkan pelestarian Warisan Budaya.

Indikator Tujuan :

- 1) Persentase Peningkatan pelestarian warisan budaya;

Sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak

Sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak adalah :



a. Meningkatnya kinerja pelayanan public.

Indikator Sasaran :

- 1) Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti.

b. Meningkatnya akuntabilitas kinerja aparatur.

Indikator Sasaran :

- 1) Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target.

c. Meningkatnya layanan pendidikan jenjang PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan Non Formal.

Indikator Sasaran :

- 1) Persentase TK/RA, SD/MI, SMP/MTs berakreditasi minimal B.

d. Meningkatkan pelestarian Warisan Budaya.

Indikator Sasaran :

- 1) Persentase Peningkatan pelestarian warisan budaya;

Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Adapun strategi dan kebijakan yang akan dijalankan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Demak dalam mencapai tujuan dan sasaran dengan strategi sebagai berikut :

a. Peningkatan kinerja pelayanan publik;

Kebijakan :

- 1) Peningkatan kualitas kinerja pelayanan publik

b. Peningkatan akuntabilitas kinerja;

Kebijakan :

- 1) Peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah;
- 2) Peningkatan kinerja pengelolaan keuangan dan aset Perangkat Daerah;
- 3) Peningkatan kualitas sumber daya ASN Perangkat Daerah.

c. Peningkatan layanan pendidikan berkualitas;

Kebijakan :

- 1) Kebijakan Peningkatan kualitas sarana dan prasarana Pendidikan
- 2) Pemberian Beasiswa Miskin kepada Anak dari Keluarga Tidak Mampu;
- 3) Peningkatan tata kelola satuan Pendidikan;
- 4) Peningkatan peran serta orang tua, masyarakat dan mitra Dindikbud dalam Pendidikan. :

d. Peningkatan kualitas hasil belajar;

Kebijakan :

- 1) Peningkatan kualitas proses dan evaluasi pembelajaran pada jenjang PAUD, Pendidikan dasar dan Pendidikan non formal;
- 2) Peningkatan Pendidikan Karakter;
- 3) Peningkatan budaya literasi;
- 4) Peningkatan Minat, bakat dan kreatifitas siswa.

e. Peningkatan profesionalisme Pendidik dan Tenaga Kependidikan;

Kebijakan :

- 1) Peningkatan kualifikasi Pendidikan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- 2) Peningkatan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- 3) Pemetaan dan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan secara merata.

f. Peningkatan Pengelolaan Warisan Budaya;

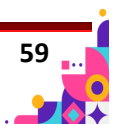
Kebijakan :

- 1) Peningkatan SDM Pengelola dan Masyarakat Peduli Warisan Budaya Benda;
- 2) Penetapan Tim Ahli Cagar Budaya (TACB Kab. Demak);
- 3) Peningkatan Kajian Warisan Budaya Benda;
- 4) Penetapan warisan budaya benda yang dilingungi (dicatat) dengan SK Bupati;
- 5) Peningkatan Pengelolaan Sarpras Museum;
- 6) Pelestarian Warisan Budaya Benda;

g. Peningkatan Pengelolaan Warisan Budaya Tak Benda;

Kebijakan :

- 1) Peningkatan Kajian Warisan Budaya Tak Benda;
- 2) Penetapan Warisan Budaya Tak Benda yang dilingungi (dicatat) dengan SK Bupati;
- 3) Pelestarian Warisan Budaya Tak Benda;
- 4) Peningkatan Sarpras berekspresi seniman.



B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU (*Key Performance Indicator*) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama yaitu :

- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan Dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
- b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Berikut ini adalah Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025 :

1. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama

Tabel 2.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan pelayanan publik Dindikbud	Indeks Kepuasan Masyarakat	87,87
1.1.	Meningkatnya kinerja pelayanan publik	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	100
2	Meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur	Nilai AKIP Nilai SAKIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak	83,69
2.1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja aparatur	Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target	100
3	Meningkatkan partisipasi pendidikan pada jenjang PAUD, Pendidikan dasar, dan pendidikan non formal.	Harapan Lama Sekolah	14
		Rata-rata lama sekolah	8,06
3.1.	Meningkatnya layanan pendidikan jenjang PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan Non Formal	Persentase Sekolah yang Terakreditasi minimal B	61,21

No.	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
4	Meningkatkan pelestarian Warisan Budaya	Persentase peningkatan pelestarian warisan budaya	5,47
4.1.	Meningkatnya pelestarian Warisan Budaya	Persentase Peningkatan pelestarian warisan budaya	80,00

No.	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
3.1.	Meningkatnya layanan pendidikan jenjang PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan Non Formal	Persentase Sekolah yang Terakreditasi minimal B	61,21
		Persentase Sekolah yang Terakreditasi minimal B pada Bentuk Pendidikan TK&RA	
		Persentase Sekolah yang Terakreditasi minimal B pada Bentuk Pendidikan SD & MI	
		Persentase Sekolah yang Terakreditasi minimal B pada Bentuk Pendidikan SMP & MTs	

2. Definisi Operasional Indikator Kinerja Utama

Tabel 2.2. Definisi Operasional Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN /SASARAN (IKU)	ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	FORMULASI PENGHITUNGAN	Sumber Data
1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)
1	Meningkatkan pelayanan publik Dindikbud		Indeks Kepuasan Masyarakat	Dengan diukurinya indeks kepuasan masyarakat (nilai SKM) dapat ditemukan tingkat kepuasan terhadap layanan Bidang Pendidikan	Hasil pengukuran survey kepuasan pengguna layanan terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan berpedoman pada PermenPAN RB Nomor 14 Tahun 2017	Angka	Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 dilakukan dengan merata-rata nilai jawaban kuesioner dari unsur pelayanan (9 unsur), mengalikannya dengan bobot, dan mengonversinya dengan nilai dasar 25. Rumusnya: Total NRR per Unsur x 25 , menghasilkan nilai 25-100 dengan kategori Mutu A-D	DINDIKBUD
		Meningkatnya kinerja pelayanan publik	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	Keluhan masyarakat yang masuk dan telah ditindaklanjuti merupakan salah satu indikator terwujudnya pelayanan publik yang responsif.	Persentase jumlah keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti dibanding dengan jumlah keluhan masyarakat yang masuk	%	jumlah keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti dibanding dengan jumlah keluhan masyarakat yang masuk	DINDIKBUD
2	Meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur		Nilai SAKIP Dindikbud	Nilai SAKIP merupakan salah satu indikator untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Skor hasil evaluasi Kementerian PANRB atas implementasi sistem manajemen kinerja, meliputi perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja yang berorientasi hasil (results-oriented) untuk memastikan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.	Nilai	lima komponen utama dengan bobot tertentu, yaitu: 30% Perencanaan Kinerja, 25% Pengukuran Kinerja, 15% Pelaporan Kinerja, 10% Evaluasi Internal, dan 20% Capaian Kinerja	Inspektorat

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN /SASARAN (IKU)	ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	FORMULASI PENGHITUNGAN	Sumber Data
1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja aparatur	Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target	Persentase indikator kinerja sasaran strategis merupakan salah satu indikator untuk mengukur meningkatnya capaian strategis Pendidikan dan Kebudayaan	Persentase Jumlah IKU yang tercapai targetnya dibagi Jumlah total IKU	%	Jumlah IKU yang tercapai targetnya dibagi Jumlah total IKU	DINDIKBUD
3	Meningkatkan partisipasi pendidikan pada jenjang PAUD, Pendidikan dasar, dan pendidikan non formal.		1) Harapan Lama Sekolah;	Indikator ini mencerminkan sejauh mana kesempatan atau akses yang dimiliki masyarakat untuk mendapatkan pendidikan formal hingga jenjang tertinggi	Jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal.	Tahun	Rumus Utama] Harapan Lama Sekolah (HLS): Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah indikator yang perhitungannya menjadi tanggungjawab Badan Pusat Statistik (BPS). Formulasi perhitungannya adalah sebagai berikut: $HLS_a = FK \times \sum_{i=a}^n \left(\frac{E_i}{P_i} \right)$ Keterangan Variabel: HLS_a : Harapan Lama Sekolah pada usia a di tahun t, ($tahun$) yang diharapkan dirasakan anak usia 7 tahun ke atas di masa mendatang; E_i : Jumlah penduduk usia i yang bersekolah di tahun t; P_i : Jumlah penduduk usia i pada tahun t; i : Kelompok usia penduduk (mulai dari usia 7 tahun $a, a+1, \dots, n$) FK : Penyesuaian untuk penduduk yang bersekolah di rumah tangga khusus/pesantren.	BPS

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN /SASARAN (IKU)	ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	FORMULASI PENGHITUNGAN	Sumber Data
1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)
			2) Rata-rata lama sekolah	RLS mengukur rata-rata lamanya pendidikan formal yang telah ditempuh oleh penduduk berusia 25 tahun ke atas. Ini memberikan gambaran riil mengenai pencapaian tingkat pendidikan masyarakat.	Lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.	Tahun	Rumus Utama Rata-rata Lama Sekolah (RLS): (RLS) BPS adalah jumlah tahun rata-rata yang dihabiskan penduduk berusia 25 tahun ke atas untuk menempuh pendidikan formal. Rumusnya adalah total tahun sekolah dibagi jumlah penduduk kelompok umur tersebut, dirumuskan: dirumuskan: $RLS = \frac{\sum x_i}{n}$ di mana x_i adalah lama sekolah individu dan n adalah total penduduk. Rumus Utama Rata-rata Lama Sekolah (RLS): $RLS = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$ • RLS : Rata-rata Lama Sekolah (dalam tahun). • $\sum x_i$: Jumlah total tahun sekolah yang telah diselesaikan oleh seluruh penduduk kelompok umur 25 tahun ke atas; • n : Jumlah total penduduk berusia 25 tahun ke atas	BPS

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN /SASARAN (IKU)	ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	FORMULASI PENGHITUNGAN	Sumber Data
1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)
		Meningkatnya layanan pendidikan jenjang PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan Non Formal	Persentase Sekolah yang Terakreditasi minimal B	Jaminan Mutu Pendidikan (Baik/Sangat Baik): Akreditasi B menandakan bahwa sekolah telah memenuhi standar nasional pendidikan dengan baik (nilai 71-85), atau sangat baik (akreditasi A). Ini merupakan indikator kinerja untuk menjamin bahwa sekolah telah layak menyelenggarakan layanan pendidikan	Persentase jumlah sekolah jenjang TK/RA, jenjang SD/MI dan jenjang SMP/ MTs yang terakreditasi minimal B dibanding dengan jumlah total sekolah jenjang TK/RA, jenjang SD/MI dan jenjang SMP/ MTs	%	Jumlah sekolah jenjang TK/RA, jenjang SD/MI dan jenjang SMP/ MTs yang terakreditasi minimal B dibanding dengan jumlah total sekolah jenjang TK/RA, jenjang SD/MI dan jenjang SMP/ MTs	DINDIKBUD
4	Meningkatkan pelestarian Warisan Budaya		Persentase Peningkatan pelestarian warisan budaya	Memastikan benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan cagar budaya terinventarisasi dengan baik agar tidak punah akibat pengaruh gaya hidup modern atau kurangnya kesadaran.	Persentase Peningkatan Pelestarian Warisan Budaya adalah ukuran yang menunjukkan kenaikan jumlah objek warisan budaya (baik benda/cagar budaya maupun tak benda) yang telah berhasil didata, dikelola, dilindungi, dan ditetapkan secara hukum oleh pemerintah/lembaga terkait dalam satu periode waktu tertentu, dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan.	%	Formulasi Peningkatan (Kenaikan dari Tahun Sebelumnya) Rumus ini mengukur seberapa besar peningkatan cakupan pelestarian dibandingkan periode sebelumnya: $\left(\frac{\text{Klp. Binaan Berjalan} - \text{Klp. Binaan Sebelumnya}}{\text{Jumlah Kelompok Binaan Sebelumnya}} \right)$	DINDIKBUD
		Meningkatnya pelestarian Warisan Budaya	Persentase Peningkatan pelestarian warisan budaya	Indikator ini memberikan angka pasti (persentase) mengenai seberapa banyak cagar budaya atau warisan budaya takbenda yang berhasil diregistrasi, dilindungi, atau dikonservasi	Persentase peningkatan jumlah warisan budaya yang dilestarikan dari jumlah awal yang didata	%	Digunakan oleh Badan Pusat Statistik untuk mengukur peningkatan jumlah cagar budaya yang berhasil ditetapkan dan dilindungi secara hukum.	DINDIKBUD

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN /SASARAN (IKU)	ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	SATUA N	FORMULASI PENGHITUNGAN	Sumber Data
1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)
				dibandingkan dengan total potensi yang ada			$\left(\frac{\text{Jumlah CB + WBTB yang Ditetapkan}}{\text{Target Penetapan 5 Tahun}} \right)$ (CB = Cagar Budaya, WBTB = Warisan Budaya Tak Benda)	

Sumber : Renstra Dindikbud 2022 s.d. 2026



C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dokumen Perjanjian kinerja merupakan dokumen pernyataan /kesepakatan/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Dengan mengacu pada rencana strategis Tahun 2022 s.d. 2026 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak dan sumber daya anggaran yang ada, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah menyusun perjanjian kinerja Tahun 2023. Perjanjian Kinerja berisi sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Setiap sasaran strategis dalam perjanjian kinerja tersebut diukur tingkat keberhasilan /kegagalannya pada akhir periode.

Perjanjian Kinerja (PK) Murni Tahun 2025

Untuk mendukung ketercapaian sasaran strategis sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2025 tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak mengalokasikan total pagu anggaran sebesar Rp. 812.673.780.088 yang terbagi dalam 7 (*program*) program yang dilaksanakan oleh 4 (*empat*) bidang utama di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan BUPATI Demak

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN DEMAK

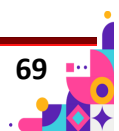
No.	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan pelayanan publik Dindikbud	Indeks Kepuasan Masyarakat	87,87
1.1.	Meningkatnya kinerja pelayanan publik	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	100
2	Meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur	Nilai AKIP Nilai SAKIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak	83,69
2.1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja aparatur	Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target	100

No.	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
3	Meningkatkan partisipasi pendidikan pada jenjang PAUD, Pendidikan dasar, dan pendidikan non formal.	Harapan Lama Sekolah	14
		Rata-rata lama sekolah	8,06
3.1.	Meningkatnya layanan pendidikan jenjang PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan Non Formal	Persentase Sekolah yang Terakreditasi minimal B	61,21
4	Meningkatkan pelestarian Warisan Budaya	Persentase peningkatan pelestarian warisan budaya	5,47
4.1.	Meningkatnya pelestarian Warisan Budaya	Persentase Peningkatan pelestarian warisan budaya	80,00

No.	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
3.1.	Meningkatnya layanan pendidikan jenjang PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan Non Formal	Persentase Sekolah yang Terakreditasi minimal B	61,21
		Persentase Sekolah yang Terakreditasi minimal B pada Bentuk Pendidikan TK&RA	
		Persentase Sekolah yang Terakreditasi minimal B pada Bentuk Pendidikan SD & MI	
		Persentase Sekolah yang Terakreditasi minimal B pada Bentuk Pendidikan SMP & MTs	

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Rp. 605.884.369.964	Sumber Anggaran dari APBD Kab, APBD Provinsi
2.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rp. 203.516.410.124	Sumber Anggaran dari APBD Kab. dan APBN
3.	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Rp. 160.000.000	Sumber Anggaran dari APBD
4.	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Rp. 985.000.000	Sumber Anggaran dari APBD Kab.

5.	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Rp.	1.310.000.00	Sumber Anggaran dari APBD Kab.
6.	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Rp.	200.000.000	Sumber Anggaran dari APBD Kab.
7.	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Rp.	618.000.00	Sumber Anggaran dari APBD Kab. dan APBN



Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak
dengan Bupati Tahun 2025



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Sultan Trenggono Nomor 89 Demak Kode Pos 59516
Telp. (0291) 685242 Fax. (0291) 685364
Laman : <http://dindikbud.demakkab.go.id> – Pos-el : dindikbud@demakkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Haris Wahyudi Ridwan, AP, M.Si.
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Demak
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : dr. Hj. Eisti'annah, S.E.
Jabatan : Bupati Demak
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, 15 Januari 2025

Pihak Kedua,



dr. Hj. Eisti'annah, S.E.

Pihak Pertama,



Haris Wahyudi Ridwan, AP, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP 197606061995011001



LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN DEMAK

No.	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan pelayanan publik Dindikbud	Indeks Kepuasan Masyarakat	90
1.1.	Meningkatnya kinerja pelayanan publik	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	100
2.	Meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur	Nilai AKIP Nilai SAKIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak	83,69
2.1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja aparatur	Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target	100
3.	Meningkatkan partisipasi pendidikan pada jenjang PAUD, Pendidikan dasar, dan pendidikan non formal.	Harapan Lama Sekolah	14
		Rata-rata lama sekolah	8,4
3.1.	Meningkatnya layanan pendidikan jenjang PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan Non Formal	Persentase Sekolah yang Terakreditasi minimal B	83,50
4.	Meningkatkan pelestarian Warisan Budaya	Persentase peningkatan pelestarian warisan budaya	5,47
4.1.	Meningkatnya pelestarian Warisan Budaya	Persentase Peningkatan pelestarian warisan budaya	80,00

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 605.884.369.964,00	APBD, APBD Provinsi
2.	Program Pengelolaan Pendidikan	Rp. 203.516.410.124,00	APBD, APBN
3.	Program Pengembangan Kurikulum	Rp. 160.000.000,00	APBD
4.	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rp. 985.000.000,00	APBD



5. Program Pengembangan Kebudayaan	Rp.	1.310.000.000,00	APBD
6. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Rp.	200.000.000,00	APBD
7. Program Pengelolaan Permuseuman	Rp.	618.000.000,00	APBD, APBN

Demak, 15 Januari 2025



Bupati Demak,



Mdr Hj. Eisti'annah, S.E.



Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Demak,



Haris Wahyudi Ridwan, AP, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP 197606061995011001



Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2025

Setelah melalui berbagai tahapan, dengan mempertimbangkan berbagai aspek, ternyata rencana kinerja tahunan Tahun 2025, mengalami perubahan.

Adapun perubahan dimaksud sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) yang telah disepakati antara kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan Bupati Demak Tahun 2025, yaitu sebagai berikut :

Dalam rangka evaluasi, efisiensi anggaran berjalan serta pengambilan kebijakan terhadap rencana strategis tahun 2025, terdapat adanya perubahan usulan Aspirasi, maka dalam pertengahan anggaran tahun 2025 terdapat perubahan/pergeseran anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak telah melakukan perubahan anggaran pada Tahun 2025. Pada APBD 2025, mendapatkan anggaran sebesar Rp. 812.673.780.088, dan di perubahan APBD 2025 menjadi Rp. 832.956.428.835, sehingga terdapat penambahan sebesar Rp. 20.282.648.747,00 atau sebesar 2,5%. Penambahan terdapat pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupate/Kota pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Program Pengelolaan Pendidikan dan Program Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota. seperti dalam tabel perjanjian kinerja perubahan sebagai berikut :

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN DEMAK**

No.	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan pelayanan publik Dindikbud	Indeks Kepuasan Masyarakat	87,87
1.1.	Meningkatnya kinerja pelayanan publik	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	100
2	Meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur	Nilai AKIP Nilai SAKIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak	83,69
2.1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja aparatur	Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target	100
3	Meningkatkan partisipasi pendidikan pada jenjang PAUD, Pendidikan dasar, dan pedidikan non formal.	Harapan Lama Sekolah	14
		Rata-rata lama sekolah	8,06
3.1.	Meningkatnya layanan pendidikan jenjang PAUD,	Persentase Sekolah yang Terakreditasi minimal B	82,81

No.	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	pendidikan dasar, dan pendidikan Non Formal		
4	Meningkatkan pelestarian Warisan Budaya	Persentase peningkatan pelestarian warisan budaya	5,47
4.1.	Meningkatnya pelestarian Warisan Budaya	Persentase Peningkatan pelestarian warisan budaya	80,00



No.	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
3.1.	Meningkatnya layanan pendidikan jenjang PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan Non Formal	Persentase Sekolah yang Terakreditasi minimal B	82,21
		Persentase Sekolah yang Terakreditasi minimal B pada Bentuk Pendidikan TK&RA	80,20
		Persentase Sekolah yang Terakreditasi minimal B pada Bentuk Pendidikan SD & MI	82,71
		Persentase Sekolah yang Terakreditasi minimal B pada Bentuk Pendidikan SMP & MTs	83,71

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Rp. 625.596.609.871	Sumber Anggaran dari APBD Kab, APBD Provinsi
2.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rp. 203.139.730.060	Sumber Anggaran dari APBD Kab. dan APBN
3.	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Rp. 160.000.000	Sumber Anggaran dari APBD
4.	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Rp. 1.526.018.904	Sumber Anggaran dari APBD Kab.
5.	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Rp. 1.259.730.000	Sumber Anggaran dari APBD Kab.
6.	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Rp. 181.380.000	Sumber Anggaran dari APBD Kab.
7.	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Rp. 662.960.000	Sumber Anggaran dari APBD Kab. dan APBN

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Sultan Trenggono Nomor 89, Demak, Jawa Tengah 59516,
Telepon (0291) 685242, Faksimile (0291) 685364,
Laman dindikbud.demakkab.go.id, Pos-el dindikbud@demakkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Haris Wahyudi Ridwan, AP, M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Demak

Selanjutnya disebut pihak *Pertama*

Nama : dr. Hj. Eisti'anah, S.E.
Jabatan : Bupati Demak

Selanjutnya disebut pihak *Kedua*

Pihak pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak *Pertama*.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, 13 Oktober 2025

Pihak Pertama,

Haris Wahyudi Ridwan, AP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 197606061995011001

Pihak Kedua,



dr. Hj. Eisti'anah, S.E.



LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN DEMAK

No.	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan pelayanan publik Dindikbud	Indeks Kepuasan Masyarakat	94,47
1.1.	Meningkatnya kinerja pelayanan publik	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	100
2	Meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur	Nilai SAKIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak	83,69
2.1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja aparatur	Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target	100
3	Meningkatkan partisipasi pendidikan pada jenjang PAUD, Pendidikan dasar, dan pendidikan non formal.	Harapan Lama Sekolah	14
		Rata-rata lama sekolah	8,34
3.1.	Meningkatnya layanan pendidikan jenjang PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan Non Formal	Persentase Sekolah yang Terakreditasi minimal B	83,5
4	Meningkatkan pelestarian Warisan Budaya	Persentase peningkatan pelestarian warisan budaya	5,47
4.1.	Meningkatnya pelestarian Warisan Budaya	Persentase Peningkatan pelestarian warisan budaya	80,00



	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 625.596.609.871	Sumber Anggaran dari APBDP Kab, APBDP Provinsi
2.	Program Pengelolaan Pendidikan	Rp. 203.139.730.060	Sumber Anggaran dari APBDP Kab. dan APBN
3.	Program Pengembangan Kurikulum	Rp. 160.000.000	Sumber Anggaran dari APBDP
4.	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Rp. 1.526.018.904	Sumber Anggaran dari APBDP Kab.
5.	Program Pengembangan Kebudayaan	Rp. 1.259.730.000	Sumber Anggaran dari APBDP Kab.
6.	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Rp. 181.380.000	Sumber Anggaran dari APBDP Kab.
7.	Program Pengelolaan Permuseuman	Rp. 662.960.000	Sumber Anggaran dari APBDP Kab. dan APBN

Demak, 13 Oktober 2025

Pihak Pertama,

Pihak Kedua,

 dr. H. Eistilannah, S.E.


 Haris Wahyudi Ridwan, AP, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP 197606061995011001

Perubahan Perjanjian Kinerja (PK) yang disusun berdasarkan alasan penyesuaian anggaran akibat adanya pegawai PPPK Paruh Waktu dan komponen Tunjangan Profesi Guru/Dosen.

1. Latar Belakang

Perubahan Perjanjian Kinerja ini dilakukan didasarkan pada adanya kebijakan baru terkait manajemen SDM aparatur dan penyesuaian alokasi anggaran, yaitu:

- **Akomodasi Pegawai PPPK Paruh Waktu:** Adanya pengangkatan/penempatan pegawai PPPK paruh waktu yang disesuaikan dengan pola kerja dan struktur penganggaran yang baru. Hal ini berdampak pada perubahan belanja pegawai pada komponen sasaran kinerja terkait.
- **Penyelarasan Tunjangan Profesi:** Penyesuaian pemenuhan kewajiban pembayaran Tunjangan Profesi bagi guru/dosen di lingkungan unit kerja yang berimplikasi pada pergeseran pagu anggaran untuk memastikan akurasi pencapaian target kinerja keuangan dan fisik.

2. Aspek Perubahan

Perubahan mencakup penyesuaian pada komponen berikut:

- **Sasaran Kegiatan/Output:** Penyesuaian indikator kinerja individu dan tim yang melibatkan PPPK paruh waktu.
- **Anggaran:** Pergeseran pagu anggaran (perubahan rincian belanja pegawai) untuk memfasilitasi tunjangan profesi dan honorarium PPPK paruh waktu tanpa mengurangi target sasaran strategis instansi.

3. Dampak Terhadap Target Kinerja

Dengan adanya perubahan ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak memastikan:

- Target kinerja Akses Pendidikan dan Peningkatan Kualitas Pendidikan tetap tercapai atau meningkat dengan efisiensi anggaran.
- Pemenuhan hak-hak pegawai (PPPK Paruh Waktu dan Tunjangan Profesi) terpenuhi sesuai regulasi yang berlaku.

4. Kesimpulan

Perubahan Perjanjian Kinerja ini merupakan langkah penyesuaian teknis penganggaran agar lebih akurat (*proportional*) dan akuntabel, tanpa mengubah visi dan misi utama yang tertuang dalam dokumen perencanaan jangka menengah.

Dukungan Program dan Anggaran Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja Utama Pendidikan dicapai melalui dukungan pelaksanaan program sebagaimana pada tabel berikut ini :

Tabel 2.4.

Dukungan Program dan Anggaran Indikator Kinerja Utama

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN /SASARAN (IKU)	PROGRAM	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatkan pelayanan publik Dindikbud	Meningkatn ya kinerja pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	602.780.694.771	621.518.117.356

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN /SASARAN (IKU)	PROGRAM	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7
2	Meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur		Nilai SAKIP Dindikbud	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	3.103.675.193	4.078.492.515
		Meningkatn ya akuntabilit as kinerja aparatur	Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target			
3	Meningkatkan partisipasi pendidikan pada jenjang PAUD, Pendidikan dasar, dan pedidikan non formal.		1) Harapan Lama Sekolah;	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM PROGRAM PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	203.516.410.124	203.569.730.060
					160.000.000	160.000.000
		Meningkatn ya layanan pendidikan jenjang PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan Non Formal	2) Rata-rata lama sekolah		985.000.000	1.526.018.904
			Persentase Sekolah yang Terakreditasi minimal B			
4	Meningkatkan pelestarian Warisan Budaya		Persentase Peningkatan pelestarian warisan budaya	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	1.310.000.000	1.259.730.000
				PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	200.000.000	181.380.000
		Meningkatn ya pelestarian Warisan Budaya	Persentase Peningkatan pelestarian warisan budaya	PROGRAM PENGELOLAAN MUSEUM KABUPATEN/KOTA	618.000.000	662.960.000

Sumber : Dindikbud Kab. Demak, 2025, Data diolah

Dari tabel di atas indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan didukung oleh 7 (tujuh) program dengan jumlah anggaran murni sebesar Rp. 812.673.780.088 dan perubahan Anggaran menjadi Rp. 832.956.428.835 bertambah sebanyak 2,5%.





BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2025

Akuntabilitas kinerja dapat diartikan sebagai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian visi dan melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, yang telah ditetapkan dalam Visi dan Misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak. Pengukuran dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran dan hasil.

Penilaian dimaksud tidak terlepas dari kegiatan mengolah dan masukan untuk diproses menjadi keluaran penting dan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran. Pada pembahasan akuntabilitas kinerja Tahun 2025 ada 3 (tiga) aspek yang akan dibahas, yaitu :

- Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS);
- Akuntabilitas Keuangan;
- Evaluasi dan Analisis Kinerja.

Bab ini menyajikan uraian pengukuran kinerja, dan analisis pencapaian kinerja tujuan dan sasaran. Analisis pencapaian kinerja menjelaskan cara menghitung, capaian kinerja, membandingkan realisasi dengan target, capaian tahun lalu, serta capaian kinerja provinsi dan pemerintah pusat sepanjang datanya tersedia. Kemudian dijelaskan program yang mendukung per sasaran, realisasi anggaran per sasaran, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian sasaran, serta prestasi yang terkait sasaran/indikator kinerja. Sedangkan untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, menggunakan pijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut:

Untuk memudahkan interpretasi atas pencapaian kinerja sasaran dipergunakan interval nilai sebagai berikut :

Tabel 3.1. Pengelompokan nilai dan predikat kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi	
2	76% ≤ 90%	Tinggi	
3	66% ≤ 75%	Sedang	
4	51% ≤ 65%	Rendah	
5	≤ 50%	Sangat Rendah	

Sumber : *Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 86 Tahun 2017*

Penghitungan persentase pencapaian target kinerja menggunakan dua cara, yaitu :

a. Pada **indikator positif**, semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus:

$$\% \text{ pencapaian kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

b. Pada **indikator negatif**, semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus:

$$\% \text{ pencapaian kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Pengukuran terhadap kinerja meliputi capaian kinerja serta efisiensi dan efektivitas sumber daya. **Efisiensi** diukur dengan **selisih capaian realisasi kinerja dengan realisasi anggaran**. Sedangkan **efektivitas** adalah dengan mengukur capaian kinerja dibagi capaian anggaran dikali 100%.

A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan kewajiban bagi Instansi Pemerintah, baik itu berupa dinas, badan, kantor ataupun bagian. Laporan tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kewajiban yang dipercayakan berdasarkan RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2022-2026 yang telah dirumuskan sebelumnya. Berdasarkan RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2022-2026 tersebut telah ditetapkan sembilan belas sasaran utama pembangunan di Kabupaten Demak.

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2. Pencapaian IKU Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025

No.	Tujuan /Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024 (%)	TAHUN 2025			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s.d. 2025 terhadap Renstra (2026)	Kriteria Penilaian
				Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A	URUSAN SEMUA OPD								
1	Meningkatkan pelayanan publik Dindikbud	1 Indeks Kepuasan Masyarakat	93,57	90,00	92,83	103,14	89,37	103,87	Sangat Tinggi
1.1	Meningkatnya kinerja pelayanan publik	2 Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi
2	Meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur	1 Nilai SAKIP Dindikbud	80,60	81,80	81,80	100,00	83,89	97,51	Sangat Tinggi
2.1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja aparatur	2 Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target	71,43	83,69	80,00	95,59	100,00	80,00	Sangat Tinggi
B	URUSAN PENDIDIKAN								
3	Meningkatkan partisipasi pendidikan pada jenjang PAUD, Pendidikan dasar, dan pendidikan non formal.	1 Harapan Lama Sekolah;	13,36	14,00	13,37	95,50	14,17	94,35	Sangat Tinggi
		2 Rata-rata lama sekolah	8,28	8,40	8,29	98,69	8,11	102,22	Sangat Tinggi
3.1	Meningkatnya layanan pendidikan jenjang PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan Non Formal	1 Persentase Sekolah yang Terakreditasi minimal B	77,91	83,50	84,14	100,77	61,71	136,35	Sangat Tinggi
C	URUSAN KEBUDAYAAN								

No.	Tujuan /Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024 (%)	TAHUN 2025			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s.d. 2025 terhadap Renstra (2026)	Kriteria Penilaian
				Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Meningkatkan pelestarian Warisan Budaya	1 Persentase Peningkatan pelestarian warisan budaya	4,48	5,47	5,47	100	6,47	84,54	Sangat Tinggi
4.1	Meningkatnya pelestarian Warisan Budaya	2 Persentase Peningkatan pelestarian warisan budaya	55,56	80,00	80,00	100	100	80,00	Sangat Tinggi

Dari 9 Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak pada Tahun 2025, Pencapaian sasaran strategis dalam Penetapan Kinerja Tahun 2025 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak dengan rincian sebanyak 8 Indikator Kinerja (88,89%) capaian kinerjanya sangat tinggi, 1 Indikator Kinerja (11,11%) capaian kinerjanya tinggi, Indikator Kinerja sedang, Indikator Kinerja sedang, dan tidak ada indikator kinerjanya sangat rendah, Berikut tabel rekapitulasi tingkat pencapaian Indikator Kinerja selama Tahun 2025:

Tabel 3.3. Rekapitulasi Nilai Capaian Kinerja IKU Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025

Urutan	Rentang Capaian	Predikat Kerja	Jumlah IKU	Persetase
I	Lebih >= 91%	Sangat Tinggi	8	88,89
II	75% sampai < 90%	Tinggi	1	11,11
III	66% sampai 75%	Sedang	0	0,00
IV	51% sampai 65	Rendah	0	0,00
V	Kurang 50%	Sangat Rendah	0	0,00



Gambar 3.1.
 Persentase Pencapaian IKU Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025

Sementara bila dilihat dalam kerangka triwulan, perbandingan antara rencana dan realisasi kinerja untuk seluruh sasaran Terlampir

Tabel 3.4. Pencapaian IKU Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Per Triwulan Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target Tahun 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025 (%)
1	2	3		4	5	6	7	8	9
A	URUSAN SEMUA OPD								
1	Meningkatkan pelayanan publik Dindikbud	1	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	90,00	Triwulan 4	90,00	92,83	103,14
						Triwulan 3	90,00	94,97	105,52
						Triwulan 2	90,00	93,57	103,97
						Triwulan 1	90,00	93,57	103,97
1.1	Meningkatnya kinerja pelayanan publik	2	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	%	100,00	Triwulan 4	100,00	100,00	100,00
						Triwulan 3	100,00	100,00	100,00
						Triwulan 2	100,00	100,00	100,00
						Triwulan 1	100,00	100,00	100,00
2	Meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur	3	Nilai SAKIP Dindikbud	%	100,00	Triwulan 4	81,80	81,80	100,00
						Triwulan 3	81,80	80,60	98,53
						Triwulan 2	80,60	80,60	100,00
						Triwulan 1	80,60	80,60	100,00
2.1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja aparatur	4	Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target	%	83,69	Triwulan 4	83,69	80,00	95,59
						Triwulan 3	80,00	70,43	88,04
						Triwulan 2	71,43	71,43	100,00
						Triwulan 1	71,43	71,43	100,00
B	URUSAN PENDIDIKAN								
3	Meningkatkan partisipasi pendidikan pada jenjang PAUD, Pendidikan dasar, dan pendidikan non formal.	1	Harapan Lama Sekolah;	%	14,00	Triwulan 4	14,00	13,37	95,50
						Triwulan 3	14,00	13,36	95,43
						Triwulan 2	13,36	13,36	100,00
						Triwulan 1	13,36	13,36	100,00
		2	Rata-rata lama sekolah	%	8,40	Triwulan 4	8,40	8,29	98,69
						Triwulan 3	8,40	8,28	98,57
						Triwulan 2	8,28	8,28	100,00
						Triwulan 1	8,28	8,28	100,00
3.1	Meningkatnya layanan pendidikan jenjang PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan Non Formal	1	Persentase Sekolah yang Terakreditasi minimal B	%	83,50	Triwulan 4	83,50	84,14	100,77
						Triwulan 3	83,50	80,00	95,81
						Triwulan 2	77,91	77,91	100,00
						Triwulan 1	77,91	77,91	100,00
C	URUSAN KEBUDAYAAN								
4	Meningkatkan pelestarian Warisan Budaya	1	Persentase Peningkatan pelestarian warisan budaya	%	5,47	Triwulan 4	5,47	5,47	100,00
						Triwulan 3	5,47	5,47	100,00
						Triwulan 2	4,48	4,48	100,00
						Triwulan 1	4,48	4,48	100,00
4.1		2		%	80,00	Triwulan 4	80,00	80,00	100,00

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target Tahun 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Meningkatnya pelestarian Warisan Budaya	Persentase Peningkatan pelestarian warisan budaya			Triwulan 3	70,00	55,56	79,37
					Triwulan 2	55,56	55,56	100,00
					Triwulan 1	55,56	55,56	100,00

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun ini dan Tahun yang Lalu

Dari hasil Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dan 2024 berdasarkan Tujuan dan Sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pengukuran kinerja Sasaran, Indikator kinerja, target, dan realisasinya tercermin pada table sebagai berikut :

Tabel 3.5. Pencapaian Indikator Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun ini dan Tahun Lalu

No	Indikator Kinerja	2024			2025		
		Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1	2	4	5	6	7	8	9
➤	PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN						
A	URUSAN SETIAP OPD						
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	88,26	93,57	106,02	90,00	92,83	103,14
2	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Nilai SAKIP Dindikbud	83,49	80,60	96,54	81,80	81,80	100,00
4	Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target	100,00	71,43	71,43	83,69	80,00	95,59
B	URUSAN PENDIDIKAN						
1	Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS)	13,83	13,36	96,60	14,00	13,37	95,50
2	Rata-rata lama sekolah (RLS)	8,30	8,28	99,76	8,40	8,29	98,69
3	Persentase Sekolah yang Terakreditasi minimal B	82,31	77,91	94,65	83,50	84,14	100,77
C	URUSAN KEBUDAYAAN						
1	Persentase Peningkatan pelestarian warisan budaya	4,48	4,48	100,00	5,47	5,47	100,00
2	Persentase Peningkatan pelestarian warisan budaya	60,00	55,56	92,60	80,00	80,00	100,00
	Rata-rata Capaian Sasaran	56,55	56,13	95,29	65,36	68,22	100,81

3. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah

Hingga pada akhir Tahun 2025, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Pelaksanaan Program dan Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka untuk mencapai tahapan sasaran rencana yang telah ditetapkan baik pada RPJMD maupun Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Demak. Dengan mengacu pada Peraturan Bupati Demak Nomor 40 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Demak dan Peraturan Bupati Demak Nomor 1 Tahun 2023 Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Demak, Adapun seluruh capaian tujuan yang diuraikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025, dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.6.
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini
dengan Target Jangka Menengah
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025

NO	Aspek/Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Akhir RENSTRA	Target 2025		Realisasi	Capaian sampai dengan Triwulan IV 2025	Status Capaian	Tingkat Capaian sampai dengan kondisi akhir Renstra
				RENSTRA	RKPD- P 2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A.	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT								
1	Indeks Pendidikan	Angka	0,664	0,658	0,667	0,648	97,15	■	97,59
2	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,17	14,00	14,00	13,37	95,50	■	94,35
3	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,11	8,06	8,40	8,29	98,69	■	102,22
B.	ASPEK PELAYANAN UMUM								
B.1	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar								
	PENDIDIKAN								
1	Persentase Sekolah yang Terakreditasi minimal B	%	61,71	61,21	83,50	84,14	100,77	▲	136,35
	KEBUDAYAAN								
1	Persentase peningkatan pelestarian warisan budaya	%	100	80	55,56	80,00	143,99	▲	80,00

Sumber : RKPD Kab. Demak

	Kategori	Simbol	Rentang Capaian
1	Tercapai	▲	≥100%
2	Akan Tercapai	■	60% < 99%
3	Perlu Upaya Keras	▼	<60%
4	Data Belum Tersedia	N/A	N/A

Berdasarkan diatas Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025 yang terdiri 2 aspek yaitu Aspek Kesejahteraan Masyarakat dan Aspek Pelayanan Umum sebanyak 5 Indikator yang sudah tercapai sebanyak 2 Indikator (40%), dan akan tercapai sebanyak 3 Indikator (60%).



Analisis Kinerja Tujuan Sasaran 3 : “Meningkatnya Kualitas Pendidikan”.

Sasaran Strategis : Meningkatkan partisipasi pendidikan pada jenjang PAUD, Pendidikan dasar, dan pendidikan non formal.

Indeks Pendidikan adalah salah satu pembentuk Indeks Pembangunan Manusia yang merupakan rata-rata dari Indeks Harapan Lama Sekolah dan Indeks Rata-rata Lama Sekolah. Harapan lama sekolah merupakan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan dapat dirasakan oleh anak umur tertentu di masa mendatang. Rata-rata lama sekolah merupakan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Indeks Pendidikan BPS adalah komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dihitung sebagai rata-rata geometrik dari Indeks Harapan Lama Sekolah (EHLS) dan Indeks Rata-rata Lama Sekolah (ERLS), Rumusnya adalah $\sqrt{EHLS \times ERLS}$, dengan nilai berkisar antara 0 hingga 100, mencerminkan akses dan partisipasi pendidikan penduduk. Berikut adalah komponen detail rumus Indeks Pendidikan BPS:

1. Rumus Indeks Pendidikan (IPed)

$$I_{pendidikan} = \sqrt{EHLS \times ERLS} \times 100$$

- **Harapan Lama Sekolah (HLS) (Expected Years of Schooling):** Lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak-anak pada umur tertentu (usia 7 tahun ke atas) di masa mendatang.
- **Rata-rata Lama Sekolah (RLS) (Mean Years of Schooling):** Jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk berusia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal.

2. Rumus Indeks Masing-masing (EHLS dan ERLS)

Sebelum dikalikan, HLS dan RLS dinormalisasi menggunakan batas maksimum dan minimum:

$$Indeks = \frac{X - X_{min}}{X_{max} - X_{min}}$$

- **EHLS (Indeks HLS):** $X_{max} = 18$ tahun (setara Kuliah), $X_{min} = 0$ tahun
- **ERLS (Indeks RLS):** $X_{max} = 15$ tahun (setara Perguruan Tinggi), $X_{min} = 0$ tahun

Keterangan :

HLS = Harapan Lama Sekolah

HLS Maks = 18, HLS Min = 0

RLS = Rata-rata Lama Sekolah

RLS Maks = 15, RLS Min = 0

Sumber : Badan Pusat Statistik

Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Indikator ini dipilih untuk mengetahui seberapa lama kesempatan anak usia sekolah dalam mendapatkan pelayanan pendidikan. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah

perjumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Rumus Harapan Lama Sekolah (HLS) dari BPS adalah penjumlahan angka partisipasi sekolah penduduk umur 7 tahun ke atas, yang disesuaikan dengan faktor koreksi pesantren.

Harapan Lama Sekolah (HLS_a)

Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah indikator yang perhitungannya menjadi tanggungjawab Badan Pusat Statistik (BPS). Formulasi perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$HLS_a = FK \times \sum_{i=a}^n \left(\frac{E_i}{P_i} \right)$$

Keterangan Variabel :

- HLS_a = Harapan Lama Sekolah pada usia a di tahun t , (*tahun*) yang diharapkan dirasakan anak usia 7 tahun ke atas di masa mendatang;
- E_i = Jumlah penduduk usia i yang bersekolah di tahun t ;
- P_i = Jumlah penduduk usia i pada tahun t ;
- i = Kelompok usia penduduk (mulai dari usia 7 tahun a , $a+1$, ..., n)
- FK = Penyesuaian untuk penduduk yang bersekolah di rumah tangga khusus/pesantren.

Sumber Data: Badan Pusat Statistik

Indikator ini dipilih untuk mengetahui seberapa lama kesempatan anak usia sekolah dalam mendapatkan pelayanan Pendidikan dan digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Harapan Lama Sekolah adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.

Rata-rata Lama Sekolah (RLS)/ Mean Years School (MYS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Indikator ini digunakan untuk mengetahui kualitas pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah. Rata-rata lama sekolah merupakan rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan yang pernah dijalani. Untuk mereka yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 9 tahun, tamat SMA diperhitungkan lama sekolah selama 12 tahun tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak.

Rata-rata lama sekolah menggambarkan tingkat pencapaian setiap penduduk dalam kegiatan bersekolah. Semakin tinggi angka lamanya bersekolah semakin tinggi jenjang pendidikan yang telah dicapai penduduk, sehingga indikator ini sangat penting karena dapat menunjukkan kualitas sumber daya manusia. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)



2. Menghitung Indeks RLS I_{RLS}

$$I_{RLS} = \frac{RLS_{real} - RLS_{min}}{RLS_{max} - RLS_{min}} = \frac{8,29 - 0}{15 - 0} = \frac{8,29}{15} \approx 0,5527$$

• $ERLS = \frac{8,29-0}{15-0} = 0,553$

3. Menghitung Indeks Pendidikan :

Indeks Pendidikan adalah rata-rata geometrik dari I_{HLS} dan I_{RLS}

$$\text{Indeks Pendidikan} = \sqrt{I_{HLS} \times I_{RLS}} = \sqrt{0,7428 \times 0,5527}$$

$$\text{Indeks Pendidikan} = \sqrt{0,4105} \approx 0,6407$$

Jadi, berdasarkan data tersebut, indeks pendidikannya adalah sekitar 0,641 atau 64,07 (dalam skala 0-100).

Indeks ini menggambarkan tingkat capaian pendidikan penduduk di Kabupaten Demak Tahun ini dalam upaya pembangunan manusia.

Hasil pengukuran capaian kinerja Sasaran “Meningkatnya Kualitas Pendidikan” dengan Indikator Indeks Pendidikan mencapai 99,40 persen dan termasuk predikat “Sangat Tinggi” sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.7.

Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Meningkatkan Kualitas Pendidikan

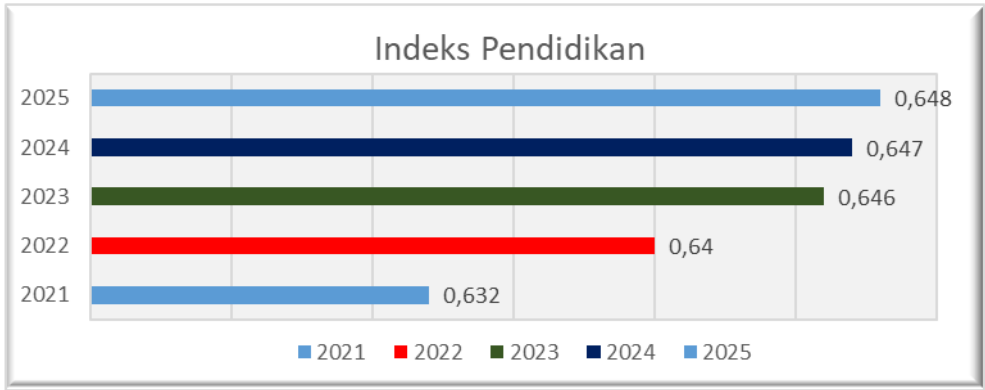
No	Indikator Kinerja	Realisasi			2025			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s.d 2025 thd 2026
		2022	2023	2024	Target	Realisasi	Capaian		
1	Indeks Pendidikan	0,640	0,646	0,6471	0,667	0,648	97,15	0,664	97,59

Sumber : BPS Kabupaten Demak 2025, Data diolah

Berdasarkan tabel di atas capaian indikator Indeks Pendidikan tahun Tahun 2025 mencapai 0,648 persen meningkat dibandingkan tahun 2024 mencapai 99,40 persen termasuk kategori Sangat Tinggi. Apabila dibandingkan dengan Indeks Pendidikan tahun 2023 sebesar 0,646 maka mengalami kenaikan sebesar 0,001 poin atau 0,138 persen. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD, capaian realisasi kinerja Indeks Pendidikan pada tahun 2025 mencapai 97,59 persen dari target yang ditetapkan sebesar 0,667.

Realisasi Indeks Pendidikan Kabupaten Demak dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan sebagaimana di perlihatkan dalam infografis berikut ini.



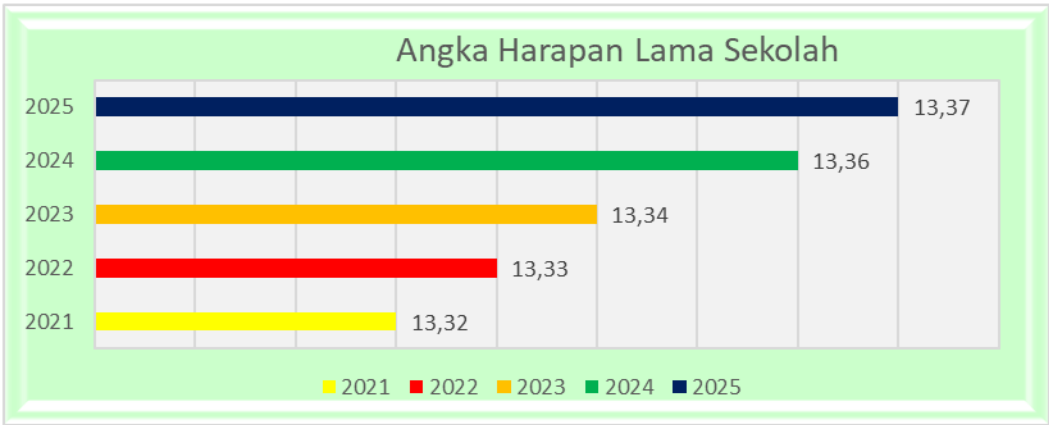


Grafik 4 Index Pendidikan dari Tahun 2021 s.d. 2025

Tabel 3.8.
Indek Pendidikan Kabupaten Demak

Tahun	2021	2022	2023	2024	2025
Indek Pendidikan Kabupaten Demak	0,632	0,640	0,646	0,647	0,648

Sumber : BPS Kabupaten Demak 2025, Data diolah

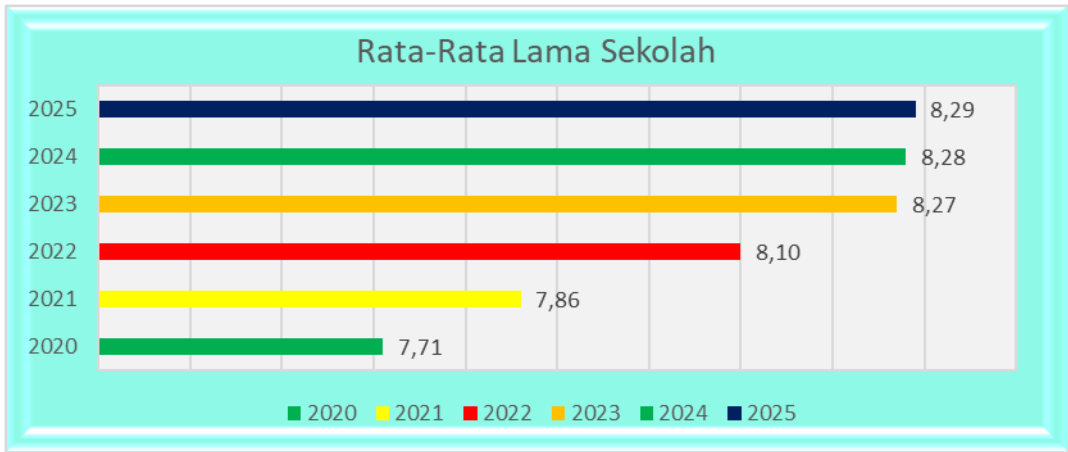


Grafik 1 : Harapan Lama Sekolah (HLS)

Tabel 3.9.
Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Angka Harapan Lama Sekolah

Tahun	2021	2022	2023	2024	2025
Harapan Lama Sekolah (HLS)	13,32	13,33	13,34	13,36	13,37

Sumber : BPS Kabupaten Demak 2025



Grafik 3.2 : Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Tabel 3.10.

Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Tahun	2021	2022	2023	2024	2025
Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	7,86	8,10	8,27	8,28	8,29

Sumber : BPS Kabupaten Demak 2025

Dimensi pendidikan ditopang oleh 2 pilar utama yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Perbedaan antara HLS dan RLS dipengaruhi oleh usia penduduk yang menjadi sasarannya, jika HLS merefleksikan penduduk yang berusia 7 – 24 tahun (rentang sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi) maka RLS dipengaruhi oleh penduduk dewasa berusia ≥ 25 tahun ke atas.

Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Demak pada tahun 2025 sebesar 13,37 meningkat dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar 13,36 tahun, ini berarti harapan seorang anak untuk bersekolah di Kabupaten Demak baru mencapai tingkat SLTA. Sementara itu indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Kabupaten Demak pada tahun 2024 baru mencapai 8,28 tahun atau setara dengan rata-rata tingkat pendidikan kelas 2-3 SMP. Ini berarti rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Demak usia 25 tahun ke atas masih cukup jauh dibandingkan target wajib belajar.

Berdasarkan tabel di atas Perkembangan Indeks Pendidikan Kabupaten Demak dalam kurun waktu 2022–2025 menunjukkan kecenderungan peningkatan yang stabil, meskipun dengan laju yang relatif moderat. Pada tahun 2022, nilai Indeks Pendidikan berada pada angka 0,640. Nilai ini meningkat menjadi 0,646 pada tahun 2023, atau terjadi kenaikan sebesar 0,006 poin (setara 0,94%). Tren positif berlanjut pada tahun 2024 dengan capaian 0,647, pada tahun 2025 dengan capaian 0,641 menurun 0,006 poin atau sekitar 0,15% dibanding tahun sebelumnya.

Pemerintah Kabupaten Demak tahun 2025 menetapkan target Indeks Pendidikan sebesar 0,667. Realisasi tahun 2025 mencapai 0,641, mengalami penurunan 0,006 poin (0,16%) dari realisasi 2024. Bila dibandingkan dengan target tahun 2025, capaian tersebut mencapai 97,11%, menunjukkan bahwa meskipun peningkatan terus terjadi, upaya akselerasi perlu ditingkatkan agar kesenjangan target tahunan dapat ditutup sepenuhnya.

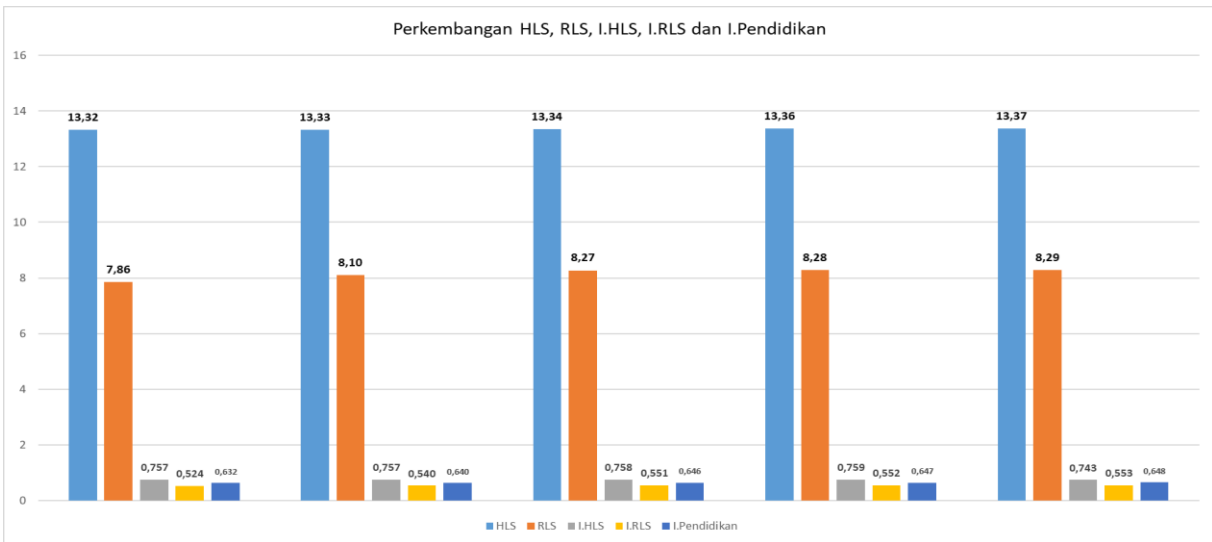
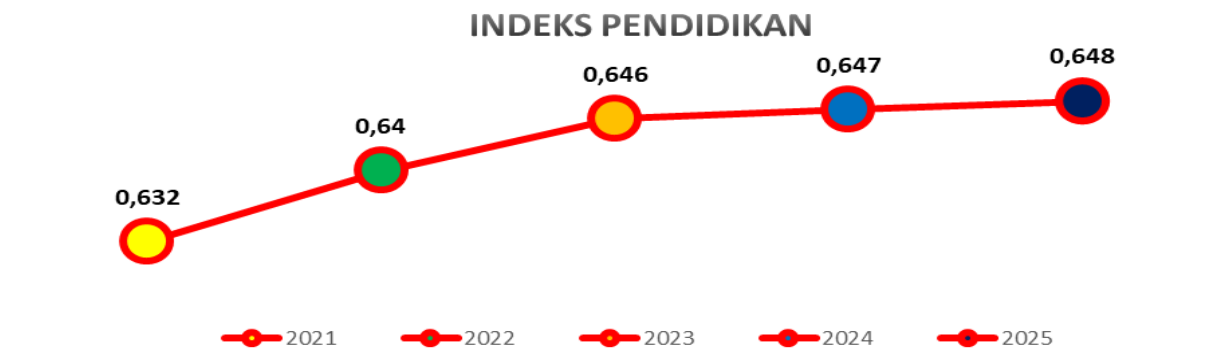


Jika diukur terhadap target akhir RPJMD Tahun 2026, yaitu 0,664, capaian hingga 2025 telah mencapai 94,35% dari target jangka menengah tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Demak berada pada jalur yang tepat untuk mencapai target RPJMD, dan hanya memerlukan tambahan kenaikan sekitar 0,016 poin pada tahun 2026. Dengan mempertimbangkan tren pertumbuhan indikator pada tahun-tahun sebelumnya, target RPJMD sangat berpotensi tercapai apabila intervensi strategis dalam peningkatan layanan pendidikan terus diperkuat.



Perkembangan HLS, RLS, dan Indeks Pendidikan Pemerintah Kabupaten Demak Tahun 2021 – 2025 dapat dilihat di grafik dibawah ini :

Grafik 3.1 : HLS, RLS, IHLS, IRLS dan IPendidikan Kabupaten Demak Tahun 2021 - 2025



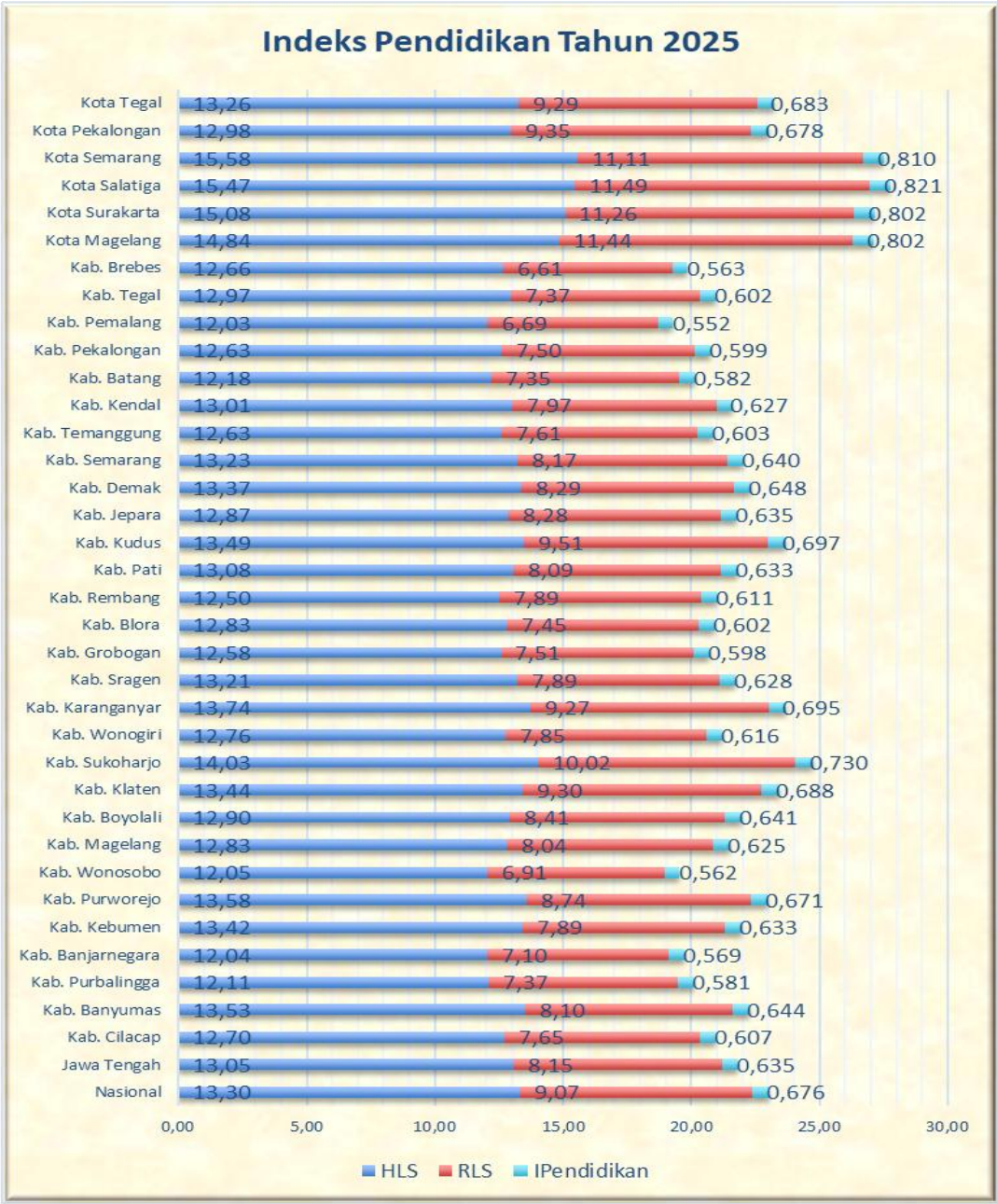
Sumber Data: BPS Kabupaten Demak, 2021-2025

Jika dilihat dari tren peningkatan/kemajuan pencapaian periode 2021-2025, Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan Indeks Pendidikan. HLS mengalami kenaikan bertahap dari 13,32 tahun pada tahun 2021 menjadi 13,37 tahun pada tahun 2025. Kenaikan sebesar 0,05 tahun atau 0,38 persen selama lima tahun ini mencerminkan peningkatan peluang bagi anak-anak di Kabupaten Demak untuk mengakses pendidikan lebih lama, meskipun laju pertumbuhannya masih relatif moderat. Di sisi lain, RLS menunjukkan peningkatan yang lebih signifikan, dari 7,86 tahun pada 2021 menjadi 8,29 tahun pada 2025, atau meningkat sebesar 0,43 tahun (5,47 persen).

Sejalan dengan peningkatan HLS dan RLS, nilai Indeks Pendidikan Kabupaten Demak juga menunjukkan perkembangan positif. Indeks ini meningkat dari 0,632 pada tahun 2021 menjadi 0,648 pada tahun 2025, atau naik sebesar 0,016 poin (2,53 persen) dalam lima tahun. Meskipun kenaikan tahunan cenderung melambat pada 2024 dan 2025, tren keseluruhan mengindikasikan adanya kemajuan berkelanjutan dalam pembangunan pendidikan daerah.

Indeks Pendidikan Kabupaten Demak Jika dibandingkan dengan Indeks Pendidikan tingkat Propinsi Jawa Tengah dan Nasional, maka posisi Indeks Pendidikan Kabupaten Demak berada dibawah Nasional dan diatas Propinsi Jawa Tengah seperti tampak dalam grafik berikut :





Grafik 3.5 Perbandingan IPM dengan daerah sekitar
Sumber : Badan Pusat Statistik 2025, Data diolah



Tabel 3.11.

Perbandingan Indeks Pendidikan Kabupaten Demak, Kab/Kota sekitarnya,
Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2025

	Indikator Pendidikan	HLS	RLS	IHLS	IRLS	IPendidikan
	Nasional	13,30	9,07	0,756	0,605	0,676
	Jawa Tengah	13,05	8,15	0,741	0,543	0,635
1	Kab. Cilacap	12,70	7,65	0,722	0,510	0,607
2	Kab. Banyumas	13,53	8,10	0,769	0,540	0,644
3	Kab. Purbalingga	12,11	7,37	0,688	0,491	0,581
4	Kab. Banjarnegara	12,04	7,10	0,684	0,473	0,569
5	Kab. Kebumen	13,42	7,89	0,763	0,526	0,633
6	Kab. Purworejo	13,58	8,74	0,772	0,583	0,671
7	Kab. Wonosobo	12,05	6,91	0,685	0,461	0,562
8	Kab. Magelang	12,83	8,04	0,729	0,536	0,625
9	Kab. Boyolali	12,90	8,41	0,733	0,561	0,641
10	Kab. Klaten	13,44	9,30	0,764	0,620	0,688
11	Kab. Sukoharjo	14,03	10,02	0,797	0,668	0,730
12	Kab. Wonogiri	12,76	7,85	0,725	0,523	0,616
13	Kab. Karanganyar	13,74	9,27	0,781	0,618	0,695
14	Kab. Sragen	13,21	7,89	0,751	0,526	0,628
15	Kab. Grobogan	12,58	7,51	0,715	0,501	0,598
16	Kab. Blora	12,83	7,45	0,729	0,497	0,602
17	Kab. Rembang	12,50	7,89	0,710	0,526	0,611
18	Kab. Pati	13,08	8,09	0,743	0,539	0,633
19	Kab. Kudus	13,49	9,51	0,766	0,634	0,697
20	Kab. Jepara	12,87	8,28	0,731	0,552	0,635
21	Kab. Demak	13,37	8,29	0,760	0,553	0,648
22	Kab. Semarang	13,23	8,17	0,752	0,545	0,640
23	Kab. Temanggung	12,63	7,61	0,718	0,507	0,603
24	Kab. Kendal	13,01	7,97	0,739	0,531	0,627
25	Kab. Batang	12,18	7,35	0,692	0,490	0,582
26	Kab. Pekalongan	12,63	7,50	0,718	0,500	0,599
27	Kab. Pemalang	12,03	6,69	0,684	0,446	0,552
28	Kab. Tegal	12,97	7,37	0,737	0,491	0,602
29	Kab. Brebes	12,66	6,61	0,719	0,441	0,563
30	Kota Magelang	14,84	11,44	0,843	0,763	0,802
31	Kota Surakarta	15,08	11,26	0,857	0,751	0,802
32	Kota Salatiga	15,47	11,49	0,879	0,766	0,821
33	Kota Semarang	15,58	11,11	0,885	0,741	0,810
34	Kota Pekalongan	12,98	9,35	0,738	0,623	0,678
35	Kota Tegal	13,26	9,29	0,753	0,619	0,683

Pada dimensi HLS Kabupaten Demak 13,37 masih diatas HLS nasional 13,30 dan Propinsi Jawa Tengah 13,05. Pada dimensi RLS Kabupaten Demak 8,29 masih diatas RLS Propinsi Jawa Tengah 8,15 namun masih dibawah RLS Nasional 9,07.

Berdasarkan grafik di atas terlihat bahwa capaian Indeks Pendidikan Kabupaten Demak pada tahun 2025 berada pada angka 0,648. Angka ini menunjukkan tingkat kinerja yang berada pada kategori cukup baik, meskipun belum mencapai level optimal jika dibandingkan dengan nasional. Dibandingkan dengan capaian Provinsi Jawa Tengah sebesar 0,634, kinerja Kabupaten Demak berada 0,014 poin lebih tinggi. Sementara itu, jika dibandingkan dengan capaian nasional sebesar 0,672, selisihnya mencapai 0,024 poin. Perbedaan ini mengindikasikan bahwa kualitas pendidikan di Kabupaten Demak perlu terus ditingkatkan agar mampu bersaing dengan capaian nasional dan mendekati target-target pembangunan sumber daya manusia.

Dalam konteks regional, posisi Kabupaten Demak berada pada kelompok menengah, di atas beberapa kabupaten seperti Rembang (0,610), Blora (0,605), dan Grobogan (0,600), Pati (0,633), Semarang (0,640) dan Jepara (0,634) namun masih tertinggal dari kabupaten dengan kinerja tinggi seperti Kudus (0,692). Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun indikator pendidikan Kabupaten Demak telah menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, percepatan peningkatan kinerja masih perlu ditingkatkan agar kesenjangan dengan daerah benchmark dapat semakin dipersempit.

Ditinjau dari komponen pembentuknya, Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Demak yang mencapai 13,37 tahun telah berada pada level yang cukup baik dan sedikit lebih tinggi dibandingkan rata-rata provinsi. Namun, pada indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS), capaian sebesar 8,29 tahun masih lebih rendah dibandingkan daerah-daerah yang memiliki Indeks Pendidikan lebih tinggi, sehingga berdampak terhadap nilai indeks secara keseluruhan. Hal ini menegaskan bahwa tantangan utama dalam peningkatan Indeks Pendidikan terletak pada peningkatan partisipasi dan penyelesaian pendidikan penduduk, terutama pada jenjang pendidikan menengah.

a) Faktor-faktor yang mendukung peningkatan Indeks Pendidikan.

Faktor-faktor pendukung capaian peningkatan Indeks Pendidikan adalah sebagai berikut:

1) Faktor Pendukung melalui Harapan Lama Sekolah (HLS)

HLS di Kabupaten Demak pada tahun 2025 mencapai 13,37 tahun, yang berarti anak-anak di Kabupaten Demak memiliki harapan untuk menempuh pendidikan hingga tingkat SLTA/Diploma I, keberhasilan ini didorong oleh beberapa faktor strategis:

- a) Aksesibilitas Luas dan Pendidikan Gratis; Pemerintah memberikan layanan pendidikan bermutu dengan kebijakan sekolah gratis untuk tingkat Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajar Dikdas) 9 tahun.
- b) Stimulus Keuangan bagi Siswa; Pemberian bantuan operasional, BAUSKM (Bantuan Anak Usia Sekolah Keluarga Miskin) atau BASIMDA (Bantuan Siswa Miskin Daerah), serta beasiswa bagi siswa berprestasi sangat membantu menjaga keberlanjutan sekolah anak-anak dari berbagai lapisan ekonomi menengah ke bawah.
- c) Penerapan Pendidikan Inklusif; Strategi ini memastikan seluruh siswa, tanpa memandang latar belakang sosial-ekonomi atau kondisi tertentu, memiliki kesempatan yang sama untuk belajar.

- d) Pencegahan Dini Anak Putus Sekolah; Upaya aktif untuk mengidentifikasi dan menangani siswa yang rentan putus sekolah membantu mempertahankan Angka Partisipasi Sekolah (APS) dengan program Ayo Sekolah di Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- e) Peningkatan Partisipasi Jenjang Awal; Program Pengelolaan Pendidikan berhasil mendorong tingkat partisipasi warga usia 7-12 tahun hingga mencapai 99,67% dan usia 13-15 tahun sebesar 99,20%.

2) Faktor Pendukung melalui Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

RLS Kabupaten Demak tahun 2025 berada pada angka 8,29 tahun, yang setara dengan tingkat pendidikan kelas 2 atau 3 SMP. Meskipun masih menghadapi tantangan pada penduduk usia dewasa, terdapat faktor pendukung yang mendorong tren peningkatan indikator ini:

- a. Peningkatan Literasi Masyarakat; Melalui program pembinaan perpustakaan, masyarakat didorong untuk lebih berpendidikan, yang secara jangka panjang berkontribusi pada kualitas SDM.
- b. Pendidikan Kesetaraan (Paket A, B, dan C); Program pendidikan nonformal menjadi solusi utama untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah bagi penduduk usia produktif (25 tahun ke atas) yang di masa lalu memiliki akses terbatas ke pendidikan formal.
- c. Relevansi Kurikulum; Penerapan muatan lokal di sekolah membantu pendidikan menjadi lebih relevan dengan kebutuhan daerah, sehingga memotivasi penduduk untuk menyelesaikan jenjang pendidikannya.

3) Dukungan Faktor Sistemik dan Kualitas Pendidikan

Selain faktor spesifik di atas, keberhasilan Indeks Pendidikan secara keseluruhan didukung oleh peningkatan kualitas sistemik:

- a) Kualitas Tenaga Pendidik; sertifikasi guru melalui program pelatihan memastikan proses pembelajaran berjalan secara berkualitas.
- b) Pembentukan Karakter dan Disiplin; Melalui program keolahragaan, siswa tidak hanya belajar secara akademis tetapi juga disiplin dan kerja sama tim, yang mendukung motivasi mereka untuk tetap bersekolah.
- c) Pemanfaatan Sumber Daya Referensi; Publikasi koleksi naskah kuno dan koleksi nasional. Hambatan dalam meningkatkan angka ini meliputi:
- d) Kesenjangan Geografis dan Ekonomi; Akses ke perpustakaan memperkaya referensi pembelajaran bagi siswa dan tenaga pendidik.

b) Faktor-faktor penyebab kegagalan pencapaian target indeks pendidikan.

Beberapa hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target indeks pendidikan diantaranya:

1) Hambatan pada Capaian Harapan Lama Sekolah (HLS)

- a) HLS yang mencapai 13,37 tahun menunjukkan bahwa harapan pendidikan anak-anak di Demak baru mencapai tingkat SLTA/Diploma I, jenjang pendidikan tinggi

masih terbatas bagi sebagian masyarakat karena faktor ekonomi, letak geografis yang sulit, atau keterbatasan infrastruktur pendukung.

- b) Disparitas Wilayah; Adanya perbedaan kualitas pendidikan yang cukup mencolok antara daerah perkotaan dan pedesaan menghambat peningkatan HLS secara merata di seluruh Kabupaten Demak.
- c) Masalah Motivasi dan Relevansi; Kurangnya motivasi dan keterlibatan siswa seringkali disebabkan oleh kurikulum yang dinilai kurang menarik, metode pengajaran yang tidak interaktif, serta materi pembelajaran yang dirasa tidak relevan dengan kebutuhan siswa.

2) Hambatan pada Capaian Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

RLS menjadi tantangan utama karena capaian 8,29 tahun (setara kelas 2-3 SMP) masih jauh dari target wajib belajar dan lebih rendah dibandingkan daerah dengan Indeks Pendidikan yang lebih tinggi. Faktor penghambatnya antara lain:

- a) Beban Historis Pendidikan; Angka RLS sangat dipengaruhi oleh penduduk usia dewasa (25 tahun ke atas) yang mencerminkan terbatasnya akses pendidikan di masa lalu.
- b) Prioritas Ekonomi Keluarga; Penduduk usia produktif di Kabupaten Demak cenderung lebih fokus pada bekerja untuk mencari nafkah daripada melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
- c) Rendahnya Partisipasi Pendidikan Kesetaraan; Capaian kinerja untuk penduduk usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah untuk berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan baru mencapai 16,78%.

3) Hambatan Sistemik dan Sumber Daya

Kegagalan dalam mencapai target indeks pendidikan juga dipengaruhi oleh kendala struktural dalam sistem pendidikan:

- a) Keterbatasan Finansial; Banyak lembaga pendidikan menghadapi kendala anggaran yang menghambat investasi pada infrastruktur, peralatan pembelajaran, serta pengembangan kurikulum.
- b) Kualitas dan Kuantitas Tenaga Pendidik; Pemerintah daerah masih menghadapi tantangan berupa kekurangan jumlah guru yang memadai serta adanya guru yang belum memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan.
- c) Budaya Inovasi dan Evaluasi; Belum kuatnya budaya pembelajaran yang merangsang inovasi serta kurangnya sistem evaluasi dan pengukuran kinerja yang komprehensif menyulitkan identifikasi masalah dan perumusan solusi yang efektif.

c) Rekomendasi perbaikan capaian indeks pendidikan.

Rekomendasi untuk meningkatkan capaian Indeks Pendidikan di Kabupaten Demak melalui penguatan indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah:

1) Strategi Peningkatan Rata-rata Lama Sekolah (RLS)



RLS dipengaruhi oleh penduduk dewasa berusia 25 tahun ke atas. Mengingat indikator ini mencerminkan capaian masa lalu, rekomendasi utamanya adalah:

- a) Akselerasi Pendidikan Kesetaraan; Dalam jangka pendek, solusi yang paling memungkinkan untuk meningkatkan RLS penduduk usia produktif (≥ 25 tahun) adalah dengan menggalakkan kembali Program Penyetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C.
- b) Prioritas Lokus Wilayah; Fokuskan intervensi pada wilayah-wilayah yang secara data memiliki angka RLS rendah dengan menyesuaikan karakteristik permasalahan di wilayah tersebut.

2) Strategi Peningkatan Harapan Lama Sekolah (HLS)

HLS merefleksikan peluang pendidikan bagi penduduk usia 7–24 tahun. Untuk meningkatkan angka ini, langkah-langkah yang direkomendasikan adalah:

- a) Keberlanjutan Program Sekolah Gratis; Memastikan program sekolah gratis berjalan efektif, khususnya bagi siswa dari keluarga miskin, guna menjamin tidak ada siswa yang putus sekolah karena kendala biaya.
- b) Alokasi Anggaran Khusus; Mengalokasikan anggaran secara spesifik untuk meningkatkan kualitas pendidikan di wilayah-wilayah yang memiliki angka HLS rendah.
- c) Pemberian Penghargaan; Memberikan penghargaan kepada tenaga pendidik yang mampu menjadi agen perubahan pendidikan di lingkungannya.

3) Perbaikan Sistemik dan Kualitas Layanan Pendidikan

Peningkatan kedua indikator tersebut juga memerlukan dukungan dari sisi manajerial dan kualitas proses belajar-mengajar:

- a. Pembangunan Basis Data Terpadu; Membangun sistem data terintegrasi yang mencakup data Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK), siswa, serta sarana dan prasarana pendidikan yang selalu diperbaharui.
- b. Peningkatan Kompetensi Guru; Melanjutkan dan memperkuat program sertifikasi tenaga pendidik untuk menjamin kualitas pengajaran.
- c. Inovasi dan Relevansi Kurikulum; Mengembangkan budaya inovasi pembelajaran agar proses sekolah lebih menarik bagi siswa. Meningkatkan relevansi pendidikan melalui integrasi muatan lokal yang sesuai dengan kebutuhan daerah.
- d. Penguatan Literasi dan Karakter; Terus mendorong kunjungan perpustakaan untuk menciptakan masyarakat yang lebih berpendidikan, serta memperkuat program keolahragaan untuk membentuk disiplin dan motivasi siswa.

d) Program/Kegiatan yang mendukung keberhasilan peningkatan Indeks Pendidikan 2025.

Meningkatnya Kualitas Pendidikan dengan indikator kinerja Indeks Pendidikan dicapai melalui dukungan pelaksanaan program/kegiatan sebagaimana pada tabel berikut ini :

- 1. Program Ayo Sekolah Kembali; Kegiatan ini bertujuan menuntaskan penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) dan anak berisiko putus sekolah dengan pemberian beasiswa berdasarkan jenjang: PAUD (Rp. 750 ribu), SD (Rp. 1 juta), SMP (Rp. 1,5 juta), dan SMA (Rp. 2 juta) per-orang.

**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak
Ungkap Alasan Hadirkan Beasiswa "Ayo Sekolah Kembali"**



- 2. Pendidikan Kesetaraan (Paket A, B, dan C); Program ini menjadi strategi utama untuk meningkatkan angka RLS bagi penduduk usia produktif (≥ 25 tahun) yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah.

DIBUKA PENDAFTARAN
PKBM PUTRA BANGSA
SEKOLAH KESETERAAN PAKET A, B DAN C

VISI
TERLAKUKANNYA MAJALAKAT YANG BERKUALITAS DAN BERKARAKTER

MISI
1. MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN
2. MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN
3. MENINGKATKAN KUALITAS SARANA DAN PRASARANA
4. MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA
5. MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN
6. MENINGKATKAN KUALITAS KESELAMATAN

PERSYARATAN
1. FOTOCOPI SURAT 3 LEMBAR
2. FOTOCOPI SURAT 2 LEMBAR
3. FOTOCOPI AKTA 3 LEMBAR
4. FOTOCOPI KK 3 LEMBAR
5. FOTOCOPI KTP 3 LEMBAR
6. FOTO 3x4 3 LEMBAR

AKREDITASI B

DIBUKA PENDAFTARAN
SEKOLAH KESETERAAN
PAKET A, B DAN C
PKBM PUTRA BANGSA DEMAK

Persyaratan
1. Fotocopy surat 3 lembar
2. Fotocopy SKHUN 3 lembar
3. Fotocopy akta 3 lembar
4. Fotocopy KK 3 lembar
5. Fotocopy KTP 3 lembar
6. Foto 3x4 3 lembar (Hitam Putih)

Kesetaraan
Paket A (umur 15-17)
Paket B (umur 18-24)
Paket C (umur 25-35)

AKREDITASI B

Sukseskan TKA Jenjang Paket A Dan B Tahun Ajaran 2025/ 2026 Di Kabupaten Demak, Dindikbud Dorong SKB Dan PKBM Optimalkan Keikutsertaan Peserta Didiknya

3. Beasiswa BASIMDA (Bantuan Siswa Miskin Daerah) untuk Anak Usia Sekolah dari Mulai Jenjang TK, SD, SMP dan Pendidikan Kesetaraan, adapun untuk Jenjang PAUD (Rp. 750 ribu), SD (Rp. 1 juta), SMP (Rp. 1,5 juta), dan Paket C (Rp. 2 juta) per-orang.
4. BAZNAS Pemberian Bantuan Anak Usia Sekolah Keluarga Miskin (BAUSKM) untuk jenjang pendidikan dasar serta beasiswa sarjana dari BAZNAS Demak bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan ekonomi.

Seleksi Beasiswa Santri Tahfidz BAZNAS Demak

1447 H / 2025 M

PROSEDUR PENDAFTARAN

Menyerahkan formulir pendaftaran di kantor BAZNAS DEMAK.

Jl. Pemuda No. 56 Binoto Kabupaten Demak

Melampirkan berkas pendaftaran sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Santri atau Surat Keterangan sebagai Siswa dari Pesantren terkait.
2. Fotokopi KTP dan KK.
3. Surat Keterangan telah hafal 15 Juz dari Pengasuh Pesantren dan belum khilaf.
4. Surat Pernyataan sanggup untuk mengutamakan hafalan sampai 30 Juz bermaterai 10rb dari yang bersangkutan.
5. Surat Pernyataan tidak menerima bantuan dari lembaga lain dari sekolah bermaterai 10rb.
6. Pas foto terbaru berwarna 3x4 (2 Lembar).
7. Surat Keterangan tidak mampu dari Lurah / Kades & diketahui Kecamatan diteruskan kei Babu tanggal 29 Oktober 2025 Setelah dinyatakan LOLOS
8. SATU PESANTREN TAHFIDZ SATU PENDAFTAR.

WAKTU DAN TEMPAT PENDAFTARAN

Waktu : 13 - 15 Oktober 2025

Pukul : 09.00 - 14.00 WIB (Senin - Kamis) 09.00 - 10.30 WIB (Jumat)

Tempat : Kantor BAZNAS Kabupaten Demak

Jl. Pemuda No. 56 Binoto, Demak

62 899-0296-0295

@baznas_kabdemak

kabdemak.baznas.go.id

PERSYARATAN

1. Warga Kabupaten Demak
2. Masuk dalam 8 ashraf Mustahik Zakat
3. Berkomitmen untuk menghafal Al-Qur'an sampai 30 Juz
4. Minimal telah Hafal 15 Juz dan belum khilaf
5. Usia Maksimal 22 Tahun saat mendaftar

WAKTU PELAKSANAAN SELEKSI

- A. SELEKSI ADMINISTRASI
TANGGAL : 16 Oktober 2025
- B. PENGUMUMAN SELEKSI
TANGGAL : 17 Oktober 2025
- C. SELEKSI KOMPETENSI TAHFIDZ
TANGGAL : 22 Oktober 2025
PUKUL : 09.00 WIB - SELESAI
TEMPAT : Kantor BAZNAS Kabupaten Demak
- D. PENGUMUMAN LOLOS
24 Oktober 2025
(AKAN DIUMUMKANKAN KEMBALI)

BAZNAS Kabupaten Demak Salurkan Bantuan Kesejahteraan untuk Tenaga Pendidik Non ASN dan Beasiswa Sarjana Produktif 2025-2026



5. Layanan Sekolah Gratis; Pemberian layanan pendidikan bermutu tanpa biaya untuk tingkat Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajar Dikdas) 9 tahun,.
6. Pengembangan Sekolah Unggulan : Merencanakan pengembangan sekolah unggulan di setiap kecamatan untuk pemeratakan kualitas akses pendidikan sebagai contoh sekolah kelas olahraga, kelas kesenian, kelas Kelas tahfidz dan lainnya, sesuai dengan kearifan lokal.
7. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan; Kegiatan nyata meliputi sertifikasi guru (target 51,12% pada 2025) serta pelatihan kompetensi rutin bagi ASN tenaga pendidik melalui sistem seperti ELSA (e-Learning System for ASN).

ELSA

E-Learning System For ASN

Presented by :

BerAKHLAK

(Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif)

#bangga melayani bangsa



Kenalkan Budaya Lokal Sejak Dini, Dindikbud Kab. Demak Terapkan Mulok SSJ untuk Jenjang PAUD

8. Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal; Mengintegrasikan muatan lokal daerah ke dalam kurikulum di sekolah-sekolah untuk meningkatkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan dan potensi daerah.
9. Ajang dan Lomba Kreativitas; Penyelenggaraan lomba bagi guru dan siswa untuk memotivasi prestasi dan inovasi dalam proses pembelajaran.





Siswa BSC-Riset MAN Demak Borong Juara di Dua Ajang Bergengsi Kabupaten



10. Rehabilitasi Infrastruktur: Pembangunan dan perbaikan ruang kelas, ruang guru, laboratorium TIK, serta sarana sanitasi sekolah yang layak.





11. Program Pembinaan Perpustakaan; Pengembangan Taman Baca Integratif, penambahan armada perpustakaan keliling, serta aplikasi iDemak untuk meningkatkan minat baca dan literasi masyarakat



Bulan Kunjung Perpustakaan di Demak: Dorong Masyarakat Literat, Kreatif, dan Berdaya Saing



12. Pengembangan Kapasitas Keolahragaan; Pembangunan Sport Center dan pembinaan prestasi olahraga untuk membentuk karakter, disiplin, dan motivasi belajar peserta didik.



Pemkab Demak Serahkan Penghargaan dan Uang Pembinaan, Prestasi Atlet Pelajar Terus Meningkat



e) Efisiensi dan efektifitas capaian kinerja Indeks Pendidikan 2025.

1. Analisis Efisiensi Indeks Pendidikan.

Indikator kinerja Indeks Pendidikan dicapai melalui dukungan pelaksanaan program sebagaimana pada tabel berikut ini :

Tabel 3.12.

Dukungan Program dan Anggaran indikator kinerja Indeks Pendidikan

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN %
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	203.569.730.060	198.637.364.063	97,58
2	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	160.000.000	77.665.000	48,54
3	PROGRAM PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	1.526.018.904	1.201.945.875	78,76
4	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	538.685.700	502.089.596	93,21
5	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	1.227.455.500	1.128.106.898	91,91
6	ROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	88.584.500	72.251.500	81,56
JUMLAH		207.110.474.664	201.619.422.932	97,35

Sumber : Dindikbud Kab. Demak, Dinperpusar Kab. Demak, Dinpora Kab. Demak, 2025, Data diolah

Dari tabel di atas indikator Indeks Pendidikan didukung oleh 6 (lima) program dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 207.110.474.664,- dari pagu anggaran Rp. 201.619.422.932,- dengan capaian realisasi anggaran 97,36%.

Analisis keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian kinerja dan solusi perbaikan yang dapat dilakukan dapat diperlihatkan pada tabel berikut :

1) Program Pengelolaan Pendidikan yang diampu oleh Dindikbud.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses dan partisipasi masyarakat dalam berbagai jenjang pendidikan formal maupun nonformal. Dengan indikator seperti tingkat partisipasi di PAUD, pendidikan dasar, menengah pertama, dan pendidikan kesetaraan, program ini mendukung upaya peningkatan Indeks Pendidikan melalui peningkatan angka partisipasi sekolah (APS) serta pengurangan angka putus sekolah. Program ini memiliki indikator Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD, Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar, Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama, Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan dengan capaian kinerja 97,58%.

2) Program Pengembangan Kurikulum yang diampu oleh Dindikbud. Pengembangan Kurikulum dilakukan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP) untuk mewujudkan pendidikan nasional, Standar yang diacu dalam pengembangan kurikulum adalah standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses, dan Standar Penilaian. Program ini Fokus pada mengintegrasikan muatan lokal ke dalam kurikulum pendidikan formal, dengan indikator persentase sekolah yang menerapkan muatan lokal daerah. Hal ini mendukung relevansi pendidikan dengan kebutuhan lokal, yang berkontribusi pada pengembangan kompetensi siswa dan peningkatan Indeks Pendidikan. Program ini memiliki indikator Persentase sekolah yang menerapkan muatan lokal daerah dengan capaian kinerja **100%**.

3) Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang diampu oleh Dindikbud. Program ini fokus pada peningkatan kualitas tenaga pendidik melalui sertifikasi dan pelatihan. Dengan indikator persentase tenaga pendidik yang tersertifikasi, program ini berkontribusi pada perbaikan kualitas proses pembelajaran, yang menjadi salah satu faktor penentu dalam peningkatan Indeks Pendidikan. Program ini memiliki indikator persentase tenaga pendidik yang tersertifikasi dengan capaian kinerja 71,36%.

4) Program Pembinaan Perpustakaan yang diampu oleh Dinperpusar.

Program ini mendorong literasi masyarakat melalui pengelolaan perpustakaan yang lebih baik, dengan indikator persentase kunjungan perpustakaan. Peningkatan literasi berperan dalam menciptakan masyarakat yang lebih berpendidikan, mendukung capaian Indeks Pendidikan. Program ini memiliki indikator Persentase kunjungan perpustakaan dengan capaian kinerja **100%**

5) Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang diampu oleh Dinperpusar.

Program ini bertujuan melestarikan warisan budaya dan pengetahuan melalui publikasi koleksi nasional dan naskah kuno. Dengan indikator persentase peningkatan koleksi yang dipublikasikan, program ini memperkaya sumber daya pendidikan yang

dapat digunakan sebagai referensi dalam pembelajaran (muatan lokal). Program ini memiliki indikator persentase peningkatan koleksi nasional dan naskah kuno yang dipublikasikan dengan capaian kinerja **100%**

6) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan yang diampu oleh Dinpora.

Program ini mendukung pendidikan melalui pengembangan kemampuan olahraga, dengan indikator jumlah prestasi olahraga. Kegiatan ini berkontribusi pada pembentukan karakter, disiplin, dan kerja sama tim, yang secara tidak langsung mendukung peningkatan kualitas pendidikan. Program ini memiliki indikator Jumlah prestasi olah raga dengan capaian kinerja **100%**.

Analisis keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian kinerja dan solusi perbaikan yang dapat dilakukan dapat diperlihatkan pada tabel berikut :

Tabel 3.13.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi yang dilakukan pada indikator penunjang

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Analisis Keberhasilan /Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)
1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Indeks Pendidikan	Angka	0,667	0,648	97,15	Keberhasilan : 1) Memberikan aksesibilitas yang seluas-luasnya tentang layanan pendidikan yang bermutu kepada masyarakat , peningkatan angka partisipasi sekolah (APS) serta pengurangan angka putus sekolah; 2) Memberikan aksesibilitas dalam meningkatkan literasi masyarakat, hal ini berperan dalam menciptakan masyarakat yang lebih berpendidikan; 3) Menerapkan strategi pendidikan inklusif; 4) Pemberian stimulus bantuan operasional sekolah, BASIMDA (Bantuan Siswa Miskin Daerah), maupun pemberian beasiswa berprestasi; 5) Pembentukan karakter dan disiplin peserta didik yang dapat memotivasi kompetensi siswa. Kegagalan : 1) Akses ke pendidikan tinggi mungkin masih terbatas karena faktor geografis, ekonomi, atau infrastruktur. 2) Perbedaan kualitas pendidikan di daerah perkotaan dan pedesaan dapat menghambat peningkatan HLS secara signifikan.	1) Dalam jangka pendek, untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah terutama dengan sasaran penduduk produktif usia ≥ 25 tahun,maka menggalakkan kembali pendidikan penyetaraan seperti Paket A, B, dan C menjadi hal yang paling memungkinkan; 2) Program sekolah gratis khususnya bagi siswa yang berasal dari keluarga miskin, memastikan bahwa tidak ada siswa yang putus sekolah atau tidak bisa melanjutkan sekolah karena tidak ada biaya; 3) Membangun basis data terpadu yang dapat merangkum data pendidik dan tenaga kependidikan (PTK), siswa maupun sarana dan prasarana pendidikan yang terintegrasi, diperbaharui; 4) Secara lokus memprioritaskan wilayah yang memiliki HLS dan RLS yang rendah sesuai dengan karakteristik permasalahan di wilayah tersebut; 5) Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik dengan



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Analisis Keberhasilan /Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)
							3) Penduduk usia dewasa (25 tahun ke atas) cenderung mencerminkan capaian pendidikan di masa lalu yang mungkin dipengaruhi oleh akses pendidikan yang terbatas. 4) Penduduk usia produktif mungkin lebih fokus pada pekerjaan daripada melanjutkan pendidikan. 5) Keterbatasan Sumber Daya Finansial 6) Ketidaksetaraan Akses Pendidikan 7) Kualifikasi dan Kualitas Guru 8) Kurangnya Motivasi dan Keterlibatan Siswa (Inklusif) 9) Budaya Pembelajaran yang Tidak Merangsang Inovasi; 10) Kurangnya Pengukuran Kinerja dan Evaluasi Sistem Pendidikan	program sertifikasi Tenaga Pendidik; 6) Pengembangan budaya inovasi pembelajaran; 7) Alokasikan anggaran untuk meningkatkan kualitas pendidikan pada lokus wilayah yang memiliki HLS dan RLS yang rendah; 8) Pemberian Penghargaan kepada tenaga pendidik yang menjadi agen perubahan pendidikan;

Sumber : Dindikbud Kab. Demak, Dinperpusar Kab. Demak, Dinpora Kab. Demak, 2025, Data diolah

Adapun Program yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.14.
 Analisis Program Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Menunjang/Tidak Menunjang
1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)
1.	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Indek Pendidikan	97,15	Program Pengelolaan Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	80,19	Menunjang Meningkatkan akses dan partisipasi masyarakat dalam berbagai jenjang pendidikan formal maupun nonformal; Peningkatan angka partisipasi sekolah (APS) serta pengurangan angka putus sekolah.
					Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	99,98	
					Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	98,24	
					Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah	18,77	



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Menunjang/Tidak Menunjang
1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)
					yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan		
				Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase tenaga pendidik yang tersertifikasi	71,36	Menunjang : Peningkatan kualitas tenaga pendidik melalui sertifikasi dan pelatihan;
				Program Pengembangan Kurikulum	Persentase sekolah yang menerapkan muatan lokal daerah	100%	Menunjang : Mendukung relevansi pendidikan dengan kebutuhan lokal, yang berkontribusi pada pengembangan kompetensi siswa;
				Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase kunjungan perpustakaan	100%	Menunjang : Peningkatan literasi berperan dalam menciptakan masyarakat yang lebih berpendidikan;
				Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Persentase peningkatan koleksi nasional dan naskah kuno yang dipublikasikan	100%	Menunjang : Program ini memperkaya sumber daya pendidikan yang dapat digunakan sebagai referensi dalam pembelajaran (muatan lokal);
				Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Jumlah prestasi olah raga	100%	Menunjang : Berkontribusi pada pembentukan karakter, disiplin, dan kerja sama tim, yang secara tidak langsung mendukung peningkatan kualitas pendidikan.

Sumber : Dindikbud Kab. Demak, Dinperpusar Kab. Demak, Dinpora Kab. Demak, 2025, Data diolah

Adapun tingkat efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya atas Indikator Indeks Pendidikan dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.15.
Tingkat Efektifitas dan efisiensi Indikator Indeks Pendidikan

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KINERJA			NO	PROGRAM	KEUANGAN		
				Target	Realisasi	(%)			Pagu	Realisasi	%
1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Indeks Pendidikan	Angka	0,667	0,648	97,15	1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	203.569.730.060	198.637.364.063	97,58
							2	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	160.000.000	77.665.000	48,54
							3	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	1.526.018.904	1.201.945.875	78,76
							4	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	538.685.700	502.089.596	93,21
							5	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	1.227.455.500	1.128.106.898	91,91
							6	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	88.584.500	72.251.500	81,56
			CAPAIAN			97,15		JUMLAH	207.110.474.664	201.619.422.932	97,35
TINGKAT <u>EFISIENSI</u> : 0,20											
TINGKAT <u>EFEKTIFITAS</u> : 99,79 %											

Sumber : Dindikbud Kab. Demak, 2025

Berdasarkan tabel di atas Sasaran Meningkatnya Kualitas Pendidikan dengan indikator Indeks Pendidikan memiliki tingkat efisiensi sebesar 0,20 yang didapat dari selisih capaian kinerja dengan capaian realisasi anggaran (97,35-97,15) dan tingkat efektivitas sebesar 99,80% yang didapat dari capaian kinerja dibagi capaian realisasi anggaran dikali 100, (97,15/97,35x100) hasilnya 99,797 dibulatkan menjadi 99,80.

4. Capaian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025

Bagian ini akan menguraikan evaluasi dan analisis capaian kinerja yang menjelaskan capaian kinerja secara umum sebagaimana sudah diuraikan dalam sub bab sebelumnya. Penyajian untuk sub bab ini akan disajikan per sasaran strategis. Catatan Keber

❖ **URUSAN SETIAP OPD**

MISI 1 : “Memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, serta kehidupan bermasyarakat yang agamis, kondusif dan berbudaya”.

TUJUAN 1 : “Meningkatkan pelayanan publik Dindikbud”.

Untuk mengukur pencapaian Tujuan 1, telah ditetapkan 1 Indikator Tujuan yaitu:

Indikator Tujuan :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat;

Sasaran 1 : “Meningkatnya kinerja pelayanan publik”.

Indikator Sasaran :

1. Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti).

a. Indeks Kepuasan Masyarakat;

Indeks Kepuasan Masyarakat merupakan hasil pengukuran survei kepuasan pengguna layanan terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) diperoleh dari Survei Kepuasan Masyarakat pada 234 (dua ratus tiga puluh empat) Orang Rensponden dan 500 (lima ratus) Sekolah di Kabupaten Demak. Hasil survei IKM Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak tahun 2025 mengalami kenaikan jika dibandingkan survei IKM tahun-tahun sebelumnya. Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25 – 100 maka hasil penilaian tersebut dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut :

$$SKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$



Nilai Persepsi Per unsur:

- Persyaratan
- Sistem, Mekanisme & Prosedur
- Waktu Penyelesaian
- Biaya / Tarif
- Produk Spesifikasi
- Jenis Pelayanan
- Kompetensi pelaksana
- Perilaku pelaksana
- Sarana dan Prasarana
- Penanganan pengaduan, saran dan masukan

Sumber Data: Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017

Hasil survei SKM kemudian diterjemahkan ke dalam Metrik Nilai persepsi, nilai interval, konversi mutu pelayanan sebagai berikut:

Tabel 3.16.

Nilai persepsi, nilai interval, konversi mutu pelayanan dan unit kinerja pelayanan

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL (N)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN (X)	NILAI KINERJA (Y)
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik

Sumber Data: Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017

Berikut Capaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat dapat di lihat dibawah ini:

Tabel 3.17.

Capaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat

No.	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Realisasi Tahun 2024 (%)	TAHUN 2025			Kriteria Penilaian	Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s.d. 2025 terhadap Renstra (2026)
				Target (%)	Realisasi (%)	Capaian %			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B	URUSAN PENDIDIKAN								
1	Meningkatkan pelayanan publik Dindikbud	1 Indeks Kepuasan Masyarakat	93,57	90,00	92,83	103,14	Sangat Tinggi	89,37	103,87

Sumber data : Dindikbud Kab. Demak, 2025

Berdasarkan tabel di atas, realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada tahun 2025 berhasil menyentuh angka 92,83 melampaui target yang ditetapkan sebesar 90,00. Capaian ini menghasilkan persentase capaian sebesar 103,87%. Angka ini mengindikasikan bahwa intervensi program, inovasi layanan, dan perbaikan standar pelayanan publik yang dijalankan sepanjang tahun 2025 berjalan sangat efektif. Eksekusi program tidak hanya mampu memenuhi standar kualitas yang dijanjikan kepada masyarakat, tetapi berhasil melampaui ekspektasi tersebut. Jika dibandingkan dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya (2022-2024) terlihat adanya tren pertumbuhan yang sangat konsisten dan berkesinambungan. Realisasi IKM bergerak naik secara persisten dari 85,93 (2022), meningkat ke 87,23 (2023), kemudian 88,48 (2024), hingga mencapai puncaknya di 89,11 pada tahun 2025. Peningkatan yang stabil tanpa fluktuasi negatif ini merupakan bukti empiris yang kuat bahwa tata kelola pelayanan publik dan reformasi birokrasi di instansi tidak bersifat insidental.

Kinerja IKM 2025 manakala disandingkan dengan target akhir RENSTRA tahun 2026 (sebesar 89,37) memperlihatkan sebuah lompatan capaian strategis yang luar biasa. Dengan rasio capaian terhadap target akhir RENSTRA di angka 103,49%, Pemerintah Kabupaten Demak telah berhasil merealisasikan bahkan melampaui perencanaan, satu tahun lebih awal dari periode akhir RENSTRA.

Dari hasil Survey Kepuasan Masyarakat tahun 2025 yang diselenggarakan 2 kali dalam setahun (per semester) (sebagaimana Table 3.22.) IKM Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Demak tahun 2025 adalah 92,49 dengan predikat kinerja pelayanan sangat baik atau kategori (A) dengan rincian sebagai berikut:

Instrumen yang digunakan dalam Survey Kepuasan Masyarakat ini adalah kuesioner. Adapun Unsur yang disurvei adalah :

NO	UNSUR PELAYANAN
1	Bagaimana pendapat saudara tentang kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanan kami?
2	Bagaimana pemahaman Saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan?
3	Bagaimana pendapat saudara tentang kecepatan waktu dalam memberikan layanan?
4	Bagaimana pendapat saudara tentang kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan?
5	Bagaimana pendapat saudara tentang kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan?
6	Bagaimana pendapat saudara tentang kompetensi/kemampuan petugas dalam pelayanan?

NO	UNSUR PELAYANAN
7	Bagaimana pendapat saudara perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan?
8	Bagaimana pendapat Saudara tentang penanganan pengaduan penggunalayanan?
9	Bagaimana pendapat Saudara tentang kualitas sarana dan prasarana?

Berdasarkan hasil survei IKM yang di dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak sebanyak 234 orang responden, dari pelaksanaan pengumpulan data, pengolahan data indeks, penyusunan dan pelaporan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.18.
Hasil Survey Unsur Pelayanan Tahun 2025

No. Unsur	Unsur Pelayanan	Total Nilai Seluruh Responden	Jumlah Responden	NRR per Unsur (Total Nilai /Responden)	Bobot Nilai Tertimbang	NRR Tertimbang (NRR x Bobot)
U1	Persyaratan pelayanan	548	150	3,65	0,111	0,406
U2	Kemudahan Prosedur	570	150	3,80	0,111	0,422
U3	Ketepatan Pelaksanaan	563	150	3,75	0,111	0,417
U4	Kesesuaian Biaya	525	150	3,50	0,111	0,389
U5	Kepastian Produk	585	150	3,90	0,111	0,433
U6	Kemampuan Petugas	555	150	3,70	0,111	0,411
U7	Kesopanan dan Keramahan	578	150	3,85	0,111	0,428
U8	Penanganan Pengaduan	540	150	3,60	0,111	0,400
U9	Kualitas Sarana dan Prasaran	550	150	3,67	0,111	0,407
	JUMLAH					3,710

Sumber : Laporan IKM Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Demak

Cara menghitung NRR (Nilai Rata-Rata) per unsur didapat dengan membagi Total Nilai Skor pada unsur tersebut dengan Jumlah Responden yang mengisi kuesioner.

Misalkan Anda menguji unsur **U1 (Persyaratan)** kepada **150 responden**. Setiap responden memberikan nilai/persepsi dengan skala 1 sampai 4 (1 = Tidak Baik, 4 = Sangat Baik).

1. **Kumpulkan Total Nilai Skor (U1):**

- Responden yang menjawab skor **4** ada 110 orang → 110 x 4=440
- Responden yang menjawab skor **3** ada 28 orang → 28 x 3 =84

- Responden yang menjawab skor **2** ada 12 orang → 12 x 2=24
- Responden yang menjawab skor **1** ada 0 orang → 0 x 1=0
- **Total Nilai Skor U1 = (440 + 84 + 24 + 0 = 548)**

2. Masukkan ke Rumus NRR:

$$NRR\ U1 = \frac{548\ (Total\ Nilai)}{150\ (Jumlah\ Responden)} = 3,653$$

Angka 3,653 inilah yang menjadi nilai NRR untuk unsur Persyaratan sebelum dikalikan bobot tertimbang. Langkah ini diulangi dengan cara yang sama untuk unsur U2 sampai U9.

Langkah Perhitungan Akhir:

1. **Jumlahkan Nilai NRR Tertimbang:** 3,710
2. **Konversi ke Nilai SKM (Skala 25 - 100):**

Nilai SKM Akhir : 3,710 x 25 = 92,83

3. **Kesimpulan Mutu Pelayanan:**

Nilai akhir **92,83** berada pada interval (88,31 - 100,00), sehingga kinerja unit pelayanan ini mendapatkan predikat **Mutu Pelayanan: A (Sangat Baik)**

Nilai IKM setelah dikonversi diperoleh **angka 92,83**, sehingga jika disandingkan dengan Tabel Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan (Kepmenpan No. 14 Tahun 2017), maka diperoleh kesimpulan

Tabel 3.19.
Rincian setiap unsur IKM Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kab. Demak Tahun 2025

Periode	IKM Per U1	IKM Per U2	IKM Per U3	IKM Per U4	IKM Per U5	IKM Per U6	IKM Per U7	IKM Per U8	IKM Per U9	IKM Dindikbud Demak
Semester 1	91,85	93,31	91,60	100,00	92,17	93,93	100,00	100,00	93,57	95,16
Semester 2	89,07	88,48	85,24	96,46	89,07	89,37	90,94	95,28	90,65	90,51
Tahun 2025	90,46	90,90	88,42	98,23	90,62	91,65	95,47	97,64	92,11	92,83

Sumber Data: Dindikbud Kab. Demak 2025

Keterangan :

- U1 = Persyaratan

U2 = Prosedur

U3 = Waktu Pelayanan

U4 = Biaya/ Tarif

U5 = Produk layanan
- U6 = Kompetensi Pelaksana

U7 = Perilaku Pelaksana

U8 = Penanganan Pengaduan, Saran & Masukan Pelayanan

U9 = Sarana Prasarana

Hasil survei ini didapatkan dari survei yang dilakukan terhadap 41 (Empat Puluh Satu) Responden dan 100 (seratus) sekolah di Kabupaten Demak sebagai berikut:

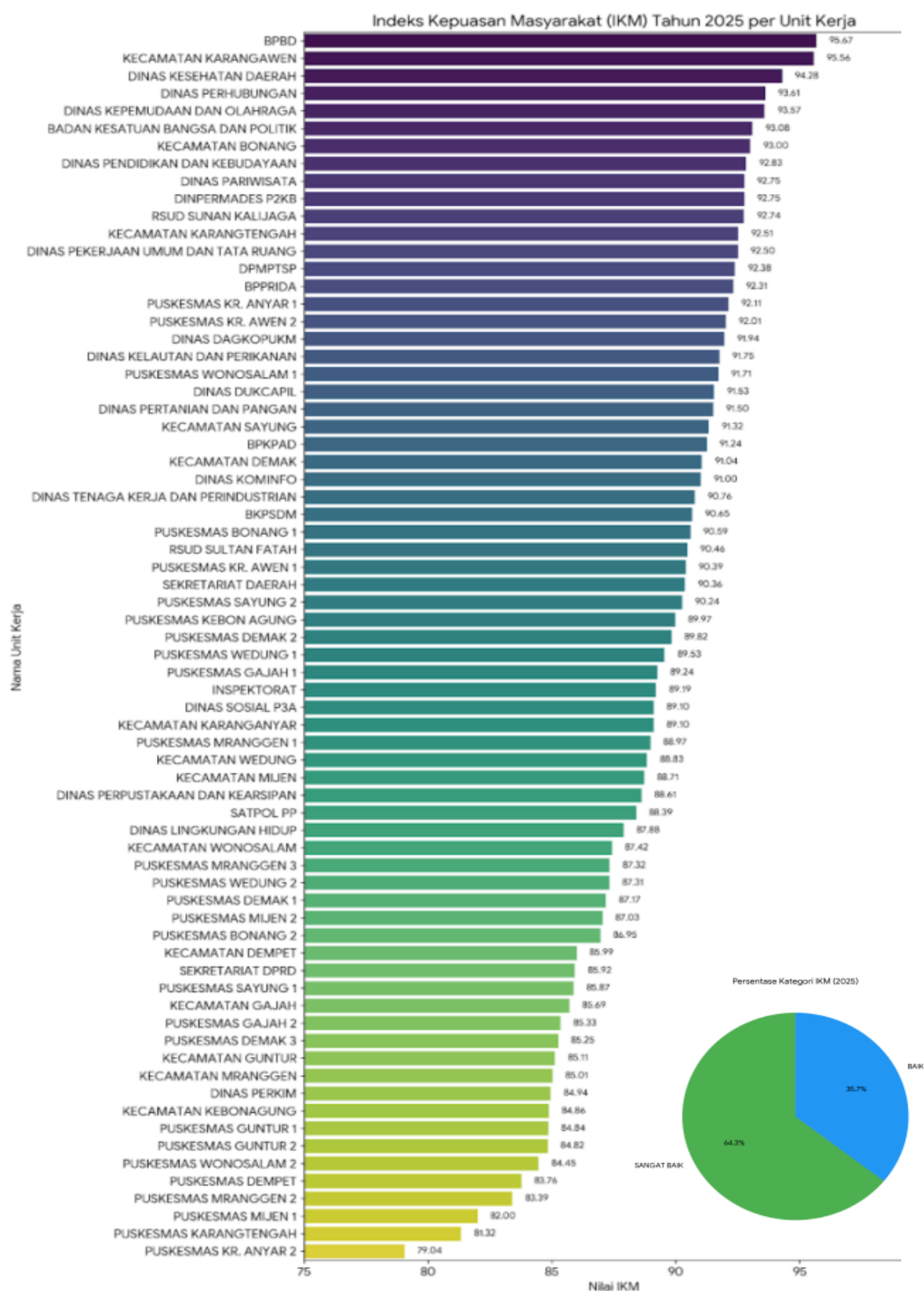
Hasil survey tersebut dapat kami sampaikan bahwa Jumlah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak setelah dikonversi hasilnya adalah 92,83 dengan peringkat nilai mutu pelayanan “A” kategori “SANGAT BAIK”.

Perbandingan Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak, manakala dibandingkan dengan Organisasi Perangkat Daerah Lainnya Kabupaten/kota sekitar dapat dilihat pada grafik berikut:



Grafik 3.5 Perbandingan IKM dengan OPD Kab. Demak

Perbandingan IKM Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak, dengan Organisasi Perangkat Daerah Lainnya di Kabupaten Demak Tahun 2025.



Sumber Data: Bag. Organisasi Setda, 2025

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak tahun 2025, capaiannya berada di angka 92,83 menempatkan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak pada posisi yang cukup solid, unggul masuk dalam 10 besar di atas Kabupaten Demak yang mencatatkan skor 92,83. Meskipun secara internal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak telah sukses melampaui target kinerjanya sendiri dengan capaian 103,14%, tinjauan komparatif regional ini memotret realitas bahwa dinamika pelayanan di perangkat daerah sekitar berjalan dengan sangat kompetitif. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak. Peta kompetisi ini menegaskan bahwa langkah-langkah penguatan akuntabilitas, pembenahan Zona Integritas, serta optimalisasi alokasi anggaran yang telah berjalan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak perlu terus ditingkatkan daya ungkitnya.

- a) Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan kinerja IKM Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak.

Faktor faktor yang berpengaruh dalam keberhasilan kinerja IKM meliputi :

- 1) Unsur pelayanan U4 (biaya tarif), yaitu tidak ada ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan; mendorong para responden memberikan nilai tinggi dalam setiap survey yang dilaksanakan,
- 2) Unsur pelayanan U8 (sarana dan prasarana), yaitu Sarana dan Prasarana yang tersedia , yang modern penuh dengan fasilitas yang mendukung layanan dan masih dalam kondisi baik, ternyata menjadi pilihan kedua terbanyak yang disukai pengguna layanan
- 3) Unsur pelayanan U7 (perilaku pelaksana), yaitu sikap, perilaku, dan etika pelaksana layanan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Unsur ini penting untuk menciptakan hubungan yang baik antara pemberi layanan dan penerima layanan Ternyata layanan yang ramah dan sopan dan perilaku petugas yang baik serta pelayanan dilakukan dengan profesional, ramah, sopan, dan sesuai dengan norma yang berlaku, menjadikan unsur nilai layanan ini menduduki nilai tinggi ketiga pilihan para pengguna layanan.

- b) Faktor-faktor yang menjadi permasalahan dan hambatan kinerja IKM Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten Demak.

- 1) Unsur pelayanan U3 (waktu penyelesaian), yaitu jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan yang melewati batas waktu berdasarkan ketentuan disebabkan tidak lengkapnya dokumen ajuan dari pemohon;
- 2) Unsur pelayanan U2 (Sistem Mekanisme dan Prosedur), yaitu sistem mengatur struktur dan elemen, mekanisme menjelaskan cara atau metode kerja, dan prosedur mengarahkan tahapan atau langkah yang harus diikuti dalam pelaksanaan kegiatan atau proses tersebut.

c) Rekomendasi untuk meningkatkan kinerja IKM Kabupaten Demak.

1) Unsur Pelayanan U3 (waktu penyelesaian)

- a) Evaluasi dan Penetapan Batas Waktu yang Realistis: Tinjau kembali batas waktu yang ditetapkan untuk setiap jenis layanan dan pastikan bahwa waktu penyelesaian yang ditentukan dapat dicapai dengan sumber daya yang ada. Lakukan penyesuaian jika diperlukan
- b) Optimalkan Proses Internal: Identifikasi langkah-langkah yang memakan waktu dalam proses pelayanan dan lakukan perbaikan.
- c) Penggunaan Teknologi Informasi: Implementasi sistem otomatisasi dan digitalisasi untuk mempercepat alur kerja, seperti penggunaan sistem manajemen antrian online atau platform yang memungkinkan pemantauan status layanan secara real-time.
- d) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM): Berikan pelatihan dan penguatan keterampilan kepada pegawai agar mereka dapat bekerja lebih efisien dalam melaksanakan tugas yang berkaitan dengan waktu penyelesaian.

2) Unsur Pelayanan U2 (Sistem, Mekanisme, dan Prosedur)

- a) Penyederhanaan dan Standarisasi Prosedur: Evaluasi dan sederhanakan prosedur pelayanan yang ada, dengan mengurangi birokrasi atau langkah yang tidak perlu. Standarisasi prosedur yang jelas akan mempermudah implementasi dan mengurangi waktu yang terbuang.
- b) Peningkatan Sosialisasi dan Pelatihan: Pastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam pelayanan memahami dengan baik sistem, mekanisme, dan prosedur yang telah ditetapkan. Berikan pelatihan rutin kepada staf untuk mempercepat pemahaman dan implementasi prosedur.
- c) Digitalisasi Sistem dan Prosedur: Manfaatkan teknologi untuk mendigitalkan sistem dan prosedur, seperti penggunaan aplikasi untuk mempermudah akses terhadap informasi dan proses administratif. Ini juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
- d) Pemantauan dan Pengendalian Prosedur: Terapkan mekanisme pemantauan secara berkala untuk memastikan bahwa prosedur yang ada dijalankan sesuai dengan ketentuan. Lakukan perbaikan jika ada ketidaksesuaian atau hambatan dalam pelaksanaan prosedur.

d) Program/Kegiatan yang mendukung keberhasilan IKM Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2025.

Program/Kegiatan mendukung kinerja IKM Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak tahun 2025.

1. Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Daring.

Laporan Inovasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak

Grafik 3.5 Laman SPMB Daring Dindikbud Demak



Alamat : <https://spmb.demakkab.go.id/>

Nama SKPD	: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
/Kelompok	
Nama Inovasi	: SPMB Daring Jenjang SD Negeri dan SMP Negeri Kabupaten Demak (Digitalisasi Sistem Penerimaan Murid Baru)
Tahapan Inovasi	: Penerapan
Inisiator InovasiDaerah	: Tim Dapodik Kabupaten Demak
Jenis Inovasi	: Digital
Bentuk Inovasi	: Pelayanan Publik
Tematik	: Digitalisasi Layanan Pemerintahan
Urusan Utama	Pendidikan (Urusan Wajib Pelayanan Dasar)
Urusan Yang	: Pendidikan
Beririsan	
Waktu Penerapan	: 05 May 2025 s.d. 10 June 2025
Inovasi Daerah	

Rancang Bangun : Dasar hukum utama digitalisasi sistem penerimaan murid baru (SPMB) adalah Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) Nomor 3 Tahun 2025. Peraturan ini mengatur mengenai sistem penerimaan murid baru dan bertujuan untuk meningkatkan transparansi, keadilan, serta efektivitas dalam proses penerimaan. Selain itu digitalisasi SPMB juga didukung oleh regulasi lain seperti Permendikbudristek Nomor 47 Tahun 2023 tentang standar pengelolaan pendidikan dan keputusan Kepala BSKAP Nomor 071/H/M/2024 tentang teknis rombongan belajar.

Tujuan Inovasi/Daerah : Tujuan utama digitalisasi sistem penerimaan murid baru adalah meningkatkan efisiensi, transparansi dan akuntabilitas dalam proses penerimaan, serta memberikan kemudahan akses bagi calon siswa dan orang tua.

Rincian Tujuan :

1. Meningkatkan Efisiensi : Mempercepat proses pendaftaran, mengurangi penggunaan kertas dan biaya administrasi, memudahkan pengelolaan data calon siswa
2. Mewujudkan Transparansi : Menyediakan informasi dan mencegah praktik kecurangan dan diskriminasi
3. Meningkatkan Akuntabilitas : Memastikan proses penerimaan berjalan sesuai aturan dan prosedur dan memudahkan pelacakan dan verifikasi data
4. Memudahkan Akses : Memudahkan calon siswa dan orang tua untuk mendaftar dari mana saja dan kapan saja, mengurangi hambatan geografis dan waktu
5. Meningkatkan kualitas data : Memudahkan pengelolaan data calon siswa secara terpusat dan sistematis, Membantu dalam analisis dan pengambilan keputusan terkait penerimaan;
6. Mendukung Personalisasi Pembelajaran : Memungkinkan sekolah untuk lebih memahami

profil calon peserta, Membantu dalam merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing siswa

Manfaat Yang Diperoleh : Manfaat yang diperoleh dari digitalisasi sistem penerimaan murid baru :Bagi Sekolah

Bagi Sekolah :

- Peningkatan Efisiensi
- Pengelolaan Data Lebih Baik
- Transparansi dan Akuntabilitas
- Keamanan Data Terjamin
- Peningkatan Citra Sekolah

Bagi Orang Tua :

- Kemudahan Akses Informasi
- Proses Pendaftaran yang lebih sederhana
- Mengurangi biaya dan waktu
- Keterlibatan lebih aktif

Bagi Murid :

- Akses yang lebih mudah
- Partisipasi Aktif
- Pengalaman Digital yang Positif
- Peningkatan Literasi Digital

Hasil Inovasi : Digitalisasi penerimaan murid baru telah membawa sejumlah inovasi yang signifikan, mulai dari kemudahan akses informasi hingga proses pendaftaran yang lebih efisiensi dan transparan. Beberapa hasil inovasi digitalisasi dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB)

Kemudahan Akses Informasi

- Situs web dan Aplikasi khusus
- Platform media sosial

Proses Pendaftaran Online

- Pendaftaran daring
- Unggah dokumen secara digital

Transparansi dan Akuntabilitas

- Sistem informasi terpadu
- Pengumuman hasil seleksi secara online

- Efisiensi dan Efektivitas
- Pengurangan antrian dan biaya
 - Proses lebih cepat

- Peningkatan Partisipasi
- Akses lebih luas
 - Peningkatan partisipasi

- Dampak positif lain
- Pengurangan Penggunaan Kertas
 - Pelestarian lingkungan
 - Efisiensi pengelolaan data

Anggaran : N/A

Profil Bisnis : Ada

Isian Indikator :

No.	Indikator	Keterangan	Parameter	Bobot	Bukti Dukung
1	Regulasi Inovasi Daerah	Regulasi yang menetapkan nama-nama-nama inovasi daerah yang menjadi landasan operasional penerapan Inovasi Daerah		-	N/A
2	Ketersediaan SDM terhadap inovasi daerah	Jumlah SDM yang mengelola suatu inovasi		-	N/A
3	Dukungan Anggaran	Anggaran inovasi daerah dalam APBD dengan tahapan penerapan (penyediaan sarana prasarana, sumber daya manusia dan layanan, bimtek urusan jenis layanan). penerapan inovasi yang dilakukan sudah menjadi bagian anggaran pelayanan.		-	N/A
4	Bimtek Inovasi	Peningkatan kapasitas dan kompetensi pelaksana inovasi daerah baik sebagai penyedia atau penerima bimtek		-	N/A



No.	Indikator	Keterangan	Parameter	Bobot	Bukti Dukung
5	Integrasi Program dan kegiatan inovasi dalam RKPD	Inovasi Perangkat Daerah telah dituangkan dalam program pembangunan daerah		-	N/A
6	Keterlibatan aktor inovasi	Keikutsertaan unsur stakeholder dalam pelaksanaan inovasi daerah (T-1 dan T-2)		-	N/A
7	Pelaksana inovasi daerah	Penetapan tim pelaksana inovasi daerah		-	N/A
8	Jejaring Inovasi	Jumlah Perangkat Daerah yang terlibat dalam penerapan inovasi (dalam 2 tahun terakhir)		-	N/A
9	Sosialisasi Inovasi Daerah	Penyebarluasan informasi kebijakan inovasi daerah		-	N/A
10	Pedoman Teknis	Ketentuan dasar penggunaan inovasi daerah berupa buku petunjuk/manual book		-	N/A
11	Kemudahan informasi Layanan	Kemudahan mendapatkan Informasi layanan		-	N/A
12	Kecepatan Penciptaan Inovasi	Satuan waktu yang digunakan untuk menciptakan inovasi daerah yang kompleks		-	N/A
13	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Indikator ini ditujukan untuk mengukur kecepatan layanan inovasi yang diperoleh oleh pengguna.		-	N/A
14	Penyelesaian layanan pengaduan	Rasio penyelesaian pengaduan yang tertangani dalam tahun terakhir, meliputi keluhan, kritik, konstruktif, saran, dan pengaduan lainnya terkait layanan inovasi		-	N/A
15	Layanan Integrasi	perangkat jaringan prosedur yang dibuat secara digital atau non digital		-	N/A

No.	Indikator	Keterangan	Parameter	Bobot	Bukti Dukung
16	Replikasi	Inovasi Daerah telah direplikasi oleh daerah lain		-	N/A
17	Alat Kerja (Penggunaan IT)	Alat kerja yang digunakan dalam pelaksanaan inovasi yang mudah diakses oleh pengguna misalnya pemanfaatan platform digital untuk media sosialisasi, pemberian layanan inovasi, dan perolehan data/informasi dan lain-lain		-	N/A
18	Kemanfaatan Inovasi	Jumlah pengguna atau penerima manfaat inovasi daerah		-	N/A
19	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Kepuasan pelaksanaan penggunaan inovasi daerah		-	N/A
20	Kualitas Inovasi Daerah	Kualitas inovasi daerah dapat dibuktikan dengan video penerapan inovasi daerah, dan aplasi program SPMB.		-	N/A
21	Jumlah Inovasi Daerah	Jumlah Inovasi yang dilaporkan		-	N/A

2. Rekomendasi Mutasi Siswa Online

REMASON (Rekomendasi Mutasi Siswa Online) adalah inovasi layanan publik berbasis digital untuk mempermudah proses rekomendasi mutasi siswa. Dengan sistem ini, orang tua/wali siswa tidak perlu lagi datang ke sekolah atau dinas, cukup ajukan secara online.

Grafik 3.6 Layanan Remason Dindikbud Demak



Sumber Data: Dindikbud Kab. Demak, 2025

3. Komitmen Layanan 24 Jam Non-Stop

Pada akhir tahun 2025, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak secara terbuka merilis komitmen untuk mengawal aduan publik melalui SP4N-LAPOR! selama 24 jam penuh. Ekosistem pengaduan masyarakat ini didesain sangat inklusif dan multi-kanal (*Omnichannel*), meliputi:

- a. Aplikasi gawai (Hallo Demak via Play Store/App Store)
 - b. Situs web terintegrasi (hallodemak.lapor.go.id)
 - c. Saluran instan Pelayanan Pengaduan WhatsApp di nomor: **6285701334266**.
 - d. Media Sosial (Instagram/Facebook/Twitter)
4. SIPADU-KKP (sistem informasi pengajuan terpadu kkn,pkl,magang dan penelitian);

SIPADU-KKP (Sistem Informasi Pengajuan Terpadu KKN, PKL, Magang dan Penelitian) adalah layanan publik berbasis digital untuk mempermudah proses pengajuan izin KKN/PKL/Magang/Penelitian. Dengan sistem ini, anda tidak perlu lagi datang ke dinas, cukup ajukan secara Online.



Grafik 3.7. SIPADU-KKP
(Sistem Informasi Pengajuan Terpadu KKN, PKL, Magang dan Penelitian)



Sumber Data: Dindikbud Kab. Demak, 2025

Pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak pada tahun 2025 yang menyentuh angka 92,83 tidak terlepas dari dukungan alokasi anggaran dan pelaksanaan program yang terukur. Untuk mencapai sasaran strategis berupa "Meningkatnya kinerja pelayanan publik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak", capaian realisasi IKM berhasil melampaui target yang ditetapkan sebesar 92,83 dengan persentase capaian kinerja sebesar 103,14% seperti pada tabel berikut:

Tabel 3.20.
Alokasi Anggaran dan Dukungan Program kinerja IKM Dindikbud Tahun 2025

N O	SASARAN	INDIKATOR	SATU AN	KINERJA			NO	PROGRAM	KEUANGAN		
				TARGET	REALISASI	(%)			PAGU	REALISASI	%
1	Meningkatkan pelayanan publik Dindikbud	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	90,00	92,83	103,14	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			



N O	SASARAN	INDIKATOR	SATU AN	KINERJA			NO	PROGRAM	KEUANGAN		
				TARGET	REALISASI	(%)			PAGU	REALISASI	%
		CAPAIAN			103,14		JUMLAH				
TINGKAT EFISIENSI :											
TINGKAT EFEKTIFITAS :											

Sumber Data: Dindikbud Kab. Demak, 2025

Keberhasilan IKM ini didorong oleh eksekusi komprehensif pada berbagai program kunci yang bersentuhan langsung dengan operasional pemerintah dan layanan warga. Dukungan anggaran terbesar dialokasikan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang bertindak sebagai tulang punggung administrasi birokrasi. Pembinaan Koordinator Wilayah Bidang Dikbud, UPTD Museum, Satuan Pendidikan dan Komite Sekolah serta Masyarakat secara sinergis menciptakan ekosistem pelayanan terpadu.

Dari sisi dukungan manajerial dan keuangan, capaian tersebut ditopang oleh komitmen fiskal dengan total pagu anggaran sebesar Rp. 519.466.234.331,34 yang didistribusikan ke dalam 13 program strategis. Hingga akhir periode pelaporan, total realisasi keuangan tercatat mencapai Rp. 489.884.431.083,20 atau terserap sebesar 94,31% dari total pagu. Serapan ini mengindikasikan tata kelola keuangan yang sangat akuntabel, di mana proses birokrasi mampu mencatatkan tingkat efisiensi anggaran sebesar 6,27%, dan sekaligus merepresentasikan tingkat efektivitas kinerja yang mencapai 106,65%,



e) Analisis Efisiensi dan efektifitas capaian IKM tahun 2025.

1. Analisis Efektivitas

- a. Pencapaian Target IKM: Realisasi IKM tahun 2025 mencapai angka 92,83, yang melampaui target yang ditetapkan sebesar 90,00. Capaian ini menghasilkan persentase keberhasilan sasaran sebesar 103,14%.
- b. Akselerasi Target Renstra: Kinerja tahun 2025 menunjukkan lompatan strategis karena capaian 89,11 telah berhasil melampaui target akhir Renstra tahun 2026 (sebesar 88,00) satu tahun lebih awal, dengan rasio capaian terhadap target akhir mencapai 101,26%.
- c. Tingkat Efektivitas Kinerja Anggaran: Dari sisi manajemen, tingkat efektivitas kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak secara keseluruhan tercatat menembus angka 106,65%.

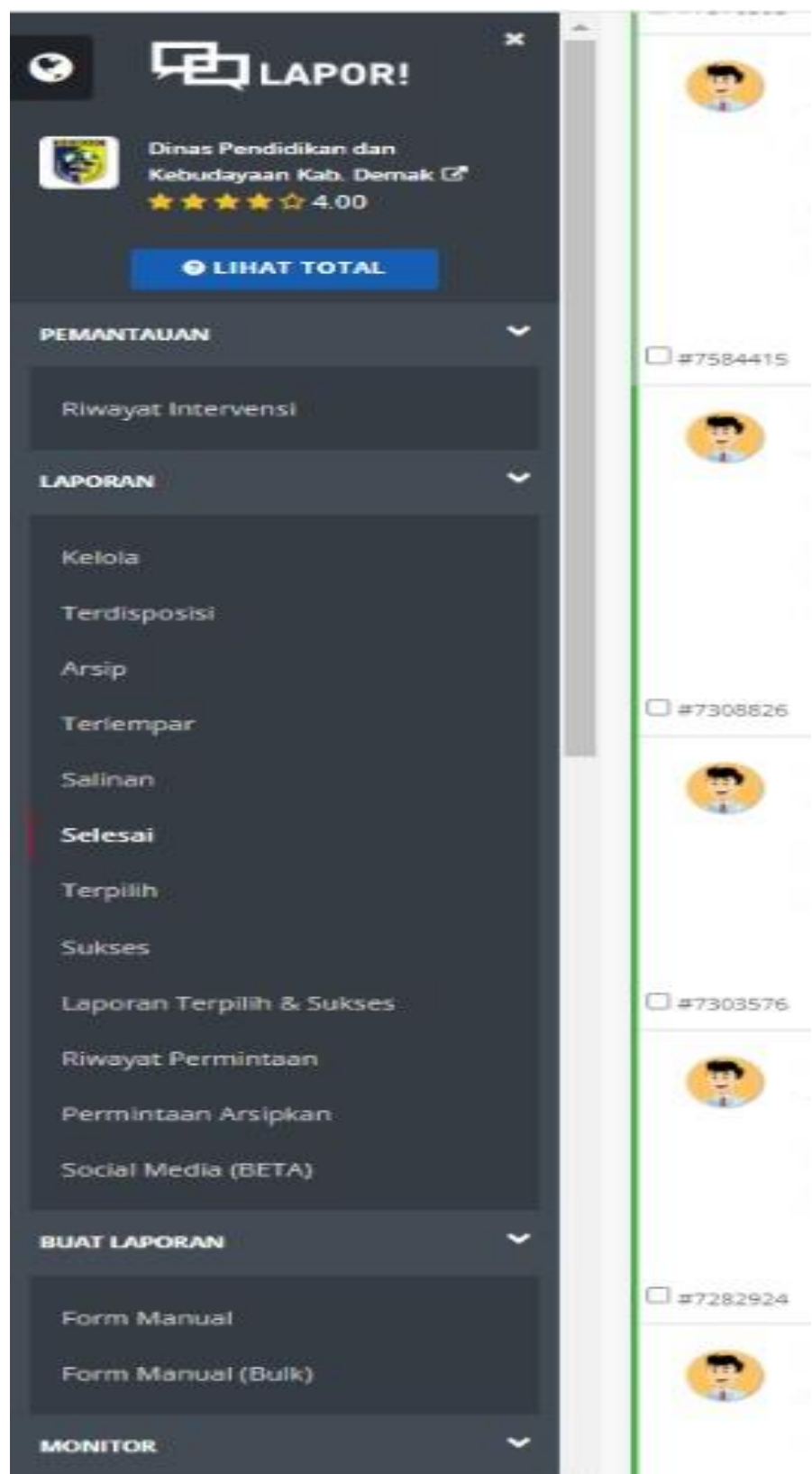
2. Analisis Efisiensi

- a. Serapan Anggaran: Dari total pagu anggaran sebesar Program ini dialokasikan dengan anggaran sebesar Rp. 621.518.117.356,00 dan realisasi sebesar Rp. 589.868.120.421,00 dengan realisasi fisik 94,91%.
- b. Tingkat Efisiensi Anggaran: Pelaksanaan pelayanan publik mampu mencatatkan tingkat efisiensi anggaran sebesar 6,27%.
- c. Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Daring meningkatkan pelayanan yang cepat dan akurat yang dapat dilihat secara real time.
- d. Responsivitas Pengaduan (SP4N-LAPOR!): Komitmen layanan pengaduan 24 jam secara Omnichannel (aplikasi, web, SMS, WhatsApp, media sosial) serta strategi proaktif "Jemput Bola" keliling desa sangat efektif menjangkau masyarakat hingga kelompok marginal.
- e. Budaya kerja yang kompetitif mendorong lahirnya terobosan inovasi berdampak langsung yang memangkas birokrasi dan mempermudah akses pengguna layanan.
- f. Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Mandiri 2025.

b. **Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti.**

1. **Ringkasan Eksekutif**

Berdasarkan data Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N), seluruh keluhan masyarakat terkait layanan pendidikan dan kebudayaan telah berhasil diverifikasi, ditindaklanjuti, dan dinyatakan selesai. Capaian ini mencerminkan komitmen dinas dalam menjaga mutu pendidikan yang transparan, responsif, dan akuntabel.



2. Persentase Capaian Kinerja

Berikut adalah visualisasi data capaian kinerja penanganan keluhan masyarakat pada Bidang Pendidikan:

Tabel 3.21.

Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian IKM dan PKM Tahun 2025 dan Tahun sebelumnya.

No.	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Realisasi Tahun 2024 (%)	TAHUN 2025			Kriteria Penilaian	Target Akhir RPJMD (2026)	Capaian s.d. 2025 terhadap RPJMD (2026)
				Target (%)	Realisasi (%)	Capaian %			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B	URUSAN PENDIDIKAN								
	Meningkatnya kinerja pelayanan publik	2 Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00
		Rata-Rata Capaian Sasaran	96,79	95,00	96,24	101,38	Sangat Tinggi	94,69	101,74

Sumber : Span Lapor Dindikbud 2025 Kabupaten Demak

Catatan: Seluruh aduan (100 laporan) yang masuk telah selesai ditindaklanjuti tanpa ada tunggakan aduan (0% pending).

Berdasarkan data diatas dapat dilihat Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti pada tahun 2025 terealisasi 100%, sama 2024 dari target 100% terealisasi 100% dengan capaian 100%% masih sama dibandingkan dengan tahun 2023 dari target 100% terealisasi 100% dengan capaian 100% dengan kriteria Penilaian Sangat Tinggi, sama dengan tahun 2022.

3. Tabel Daftar Kategori Aduan Terbanyak

Dari total 100% keluhan yang diterima dan diselesaikan, berikut adalah rincian 5 kategori bidang pengaduan dengan volume laporan tertinggi dari masyarakat:

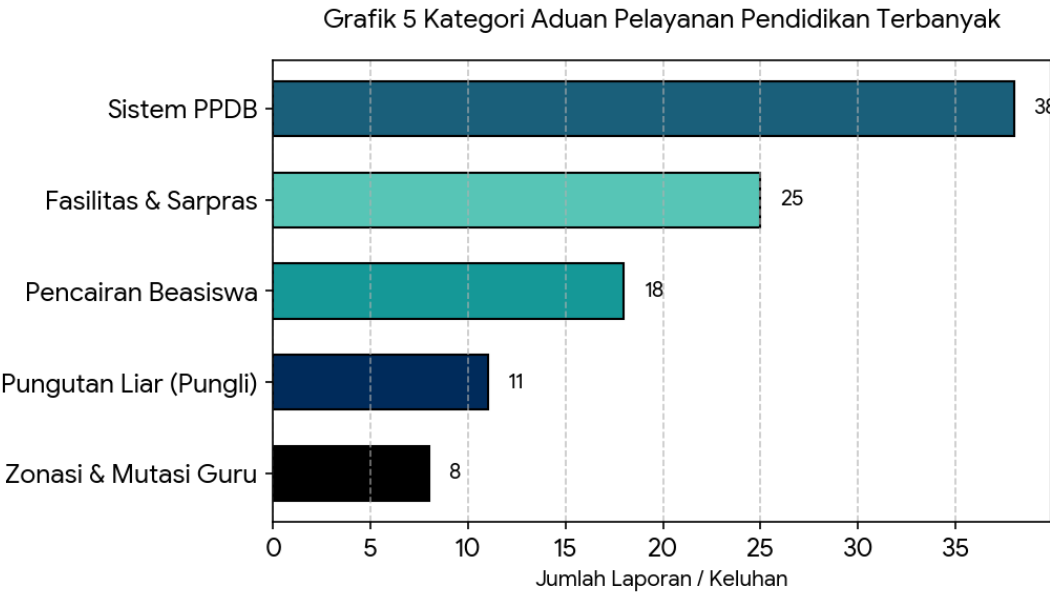
No	Kategori Keluhan / Aduan Pelayanan Pendidikan	Jumlah Laporan	Persentase dari Total	Status Tindak Lanjut
1	Kendala Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB)	38	38%	Selesai 100%
2	Kerusakan Fasilitas & Sarpras Sekolah (Gedung/Ruang Kelas)	25	25%	Selesai 100%



No	Kategori Keluhan / Aduan Pelayanan Pendidikan	Jumlah Laporan	Persentase dari Total	Status Tindak Lanjut
3	Keterlambatan Pencairan Beasiswa & Bantuan Pendidikan	18	18%	Selesai 100%
4	Pungutan Liar (Pungli) di Lingkungan Satuan Pendidikan	11	11%	Selesai 100%
5	Masalah Zonasi & Distribusi Guru/Tenaga Pendidik.	8	8%	Selesai 100%

4. Grafik Kategori Aduan Terbanyak

Visualisasi distribusi tren keluhan masyarakat di bidang pendidikan berdasarkan data di atas:



5. Kesimpulan dan Rekomendasi
- Evaluasi SPMB:** Keluhan terkait **Sistem PPDB** menjadi yang tertinggi (38%). Direkomendasikan untuk melakukan evaluasi kapasitas server pendaftaran serta sosialisasi petunjuk teknis jalur zonasi dan afirmasi secara lebih masif sebelum tahun ajaran baru dimulai.
 - Perbaikan Sarpras:** Keluhan **Kerusakan Fasilitas Sekolah** (25%) memerlukan perhatian cepat melalui pembuatan skala prioritas penganggaran dana alokasi khusus (DAK) fisik rehabilitasi ruang kelas dan Penambahan Ruang Kelas Baru.
 - Pengawasan Ketat:** Penanganan tuntas terhadap kasus **Pungli** (11%) harus dipertahankan dengan memperkuat fungsi pengawasan dari Tim Saber Pungli internal dinas di tiap satuan pendidikan.



Untuk mengukur pencapaian Sasaran Meningkatnya kinerja pelayanan publik Dindikbud, telah ditetapkan 1 Indikator Kinerja sasaran, dengan 1 Program dan 5 Kegiatan yaitu :

5) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA;

Untuk mengukur pencapaian Sasaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota, telah ditetapkan 1 Indikator Program yaitu :

a) Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti.

Program ini dialokasikan dengan anggaran sebesar **Rp. 621.518.117.356,00** dan realisasi sebesar **Rp. 589.868.120.421,00** dengan realisasi fisik **94,91%** meliputi 6 (enam) kegiatan :

- 1) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- 2) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- 3) Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 4) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;

TUJUAN 2 : “Meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur”.

Untuk mengukur pencapaian Tujuan 1, telah ditetapkan 1 Indikator Tujuan yaitu:

Indikator Tujuan :

1. Nilai SAKIP Dindikbud;

Sasaran 2 : “Meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur”.

Untuk mengukur pencapaian Sasaran 2, telah ditetapkan 1 Indikator Sasaran yaitu:

1. Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target;

c. Nilai SAKIP Dindikbud

Meningkatnya akuntabilitas kinerja aparatur ini di tandai dengan meningkatannya Nilai AKIP. Jika dilihat dari Akuntabilitas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak mulai di Tahun 2025 mendapatkan nilai 81,80 (BB) meningkat dibandingkan Tahun 2024 mendapatkan nilai 80,60 (B) meningkat dibandingkan dengan tahun 2023 mendapatkan nilai 80,60 (B) dari target 83,29 (BB) dengan capaian 96,77% menurun

dibandingkan dengan tahun 2022 mendapatkan nilai 82,89 (BB) dari target 83,09 (BB) dengan capaian 99,76% belum sesuai dengan target yang di rencanakan, dilihat dari Nilai AKIP dari tahun ke tahun mengalami kenaikan sejak mulai dari tahun 2016 sampai dengan 2022 dan menurun di Tahun 2023.

Tabel 3.22.

Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Nilai SAKIP dan Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target Tahun 2025 dan Tahun sebelumnya.

No.	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Realisasi Tahun 2024 (%)	TAHUN 2025			Kriteria Penilaian	Target Akhir RPJMD (2026)	Capaian s.d. 2025 terhadap RPJMD (2026)
				Target (%)	Realisasi (%)	Capaian %			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B	URUSAN PENDIDIKAN								
1	Meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur	1 Nilai SAKIP Dindikbud	80,60	100,00	81,80	81,80	Baik	83,89	97,51

Sumber : Bagian organisasi Kab. Demak

d. Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target;

1. Ikhtisar Capaian Kinerja

Pada tahun 2025, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan 4 Sasaran Strategis dengan total 9 Indikator Kinerja Utama (IKU Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak pada Tahun 2025, Pencapaian sasaran strategis dalam Penetapan Kinerja Tahun 2025 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak dengan rincian sebanyak 5 Indikator Kinerja Tercapai (55,56%), 3 Indikator Kinerja Belum Tercapai (44,44%), Berdasarkan evaluasi akhir tahun, akumulasi capaian kinerja adalah sebagai berikut:

- Target Tercapai : 5 Indikator
- Belum Tercapai : 4 Indikator

2. Tabel Matriks Capaian Kinerja Tahun 2025

Tabel 3.23. Matriks Capaian Kinerja Capaian IKU Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025

No.	Tujuan /Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024 (%)	TAHUN 2025			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s.d. 2025 terhadap Renstra (2026)	Kriteria Penilaian
				Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A	URUSAN SEMUA OPD								
1	Meningkatkan pelayanan publik Dindikbud	1 Indeks Kepuasan Masyarakat	93,57	90,00	92,83	103,14	89,37	103,87	Sangat Tinggi
1.1	Meningkatnya kinerja pelayanan publik	2 Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi
2	Meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur	1 Nilai SAKIP Dindikbud	80,60	81,80	81,80	100,00	83,89	97,51	Sangat Tinggi
2.1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja aparatur	2 Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target	71,43	83,69	80,00	95,59	100,00	80,00	Sangat Tinggi
B	URUSAN PENDIDIKAN								
3	Meningkatkan partisipasi pendidikan pada jenjang PAUD, Pendidikan dasar, dan pendidikan non formal.	1 Harapan Lama Sekolah;	13,36	14,00	13,37	95,50	14,17	94,35	Sangat Tinggi
		2 Rata-rata lama sekolah	8,28	8,40	8,29	98,69	8,11	102,22	Sangat Tinggi
3.1	Meningkatnya layanan pendidikan jenjang PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan Non Formal	1 Persentase Sekolah yang Terakreditasi minimal B	77,91	83,50	84,14	100,77	61,71	136,35	Sangat Tinggi



No.	Tujuan /Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024 (%)	TAHUN 2025			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s.d. 2025 terhadap Renstra (2026)	Kriteria Penilaian
				Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
C	URUSAN KEBUDAYAAN								
4	Meningkatkan pelestarian Warisan Budaya	1 Persentase Peningkatan pelestarian warisan budaya	4,48	5,47	5,47	100	6,47	84,54	Sangat Tinggi
4.1	Meningkatnya pelestarian Warisan Budaya	2 Persentase Peningkatan pelestarian warisan budaya	55,56	80,00	80,00	100	100	80,00	Sangat Tinggi

3. Perhitungan Persentase Indikator Mencapai Target

Untuk menghitung persentase indikator yang berhasil memenuhi atau melampaui target 100 :

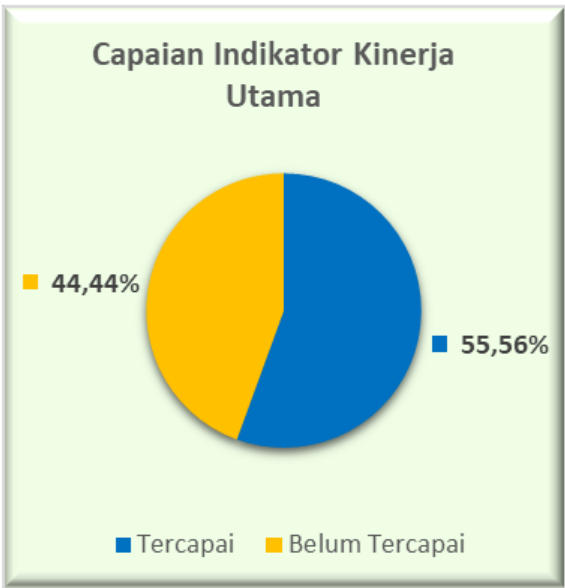
$$\text{Persentase} = \left(\frac{\text{Jumlah Indikator Memenuhi Target}}{\text{Total Jumlah Indikator Kinerja}} \right) \times 100\%$$

$$\text{Persentase} = \frac{5}{9} \times 100 = 55,56$$

Tabel 3.24. Rekapitulasi Capaian IKU Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025

Urutan	Rentang Capaian	Kategori Capaian	Jumlah IKU	Persetase
1	Lebih >= 100%	Tercapai	5	55,56
2	Kurang dari 100	Belum Tercapai	4	44,44

Secara grafis dapat dilihat dibawah ini :



Gambar 3.2.
 Persentase Pencapaian IKU Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025

4. Analisis Penyebab dan Faktor Keberhasilan

1) NILAI SAKIP PERANGKAT DAERAH

Definisi: Nilai yang menunjukkan tingkat akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi penggunaan anggaran terhadap capaian kinerja instansi berdasarkan evaluasi Kementerian PANRB.

A. Faktor Keberhasilan (Capaian Meningkat)

- **Penyelarasan Pohon Kinerja (*Cascading*):** Keberhasilan menjabarkan visi-misi Kepala Daerah hingga ke tugas pokok fungsi (tupoksi) eselon IV dan staf secara logis dan terukur.
- **Penerapan *Performance-Based Budgeting*:** Setiap rupiah anggaran yang tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) fokus membiayai program prioritas pendukung IKU, bukan sekadar kegiatan rutin belanja.
- **Komitmen Budaya Akuntabilitas:** Kedisiplinan jajaran pimpinan dalam melakukan monitoring berkala (triwulanan) terhadap kendala realisasi fisik dan keuangan, didukung digitalisasi data melalui aplikasi e-SAKIP.

B. Analisis Penyebab Kendala (Target Belum Tercapai)

- **Indikator Kinerja Kurang *SMART*:** Perumusan Indikator Kinerja Utama (IKU) di masa lalu masih bersifat *output* (misal: "Jumlah sekolah yang dibina") bukan *outcome* (misal: "Persentase sekolah bermutu").
- **Dokumentasi Evaluasi Belum Konsisten:** Hasil pemantauan program kerja tidak terdokumentasi dalam bentuk rekomendasi formal, sehingga gagal menunjukkan bukti tindak lanjut perbaikan saat dievaluasi Inspektorat.
- **Inefisiensi Anggaran:** Masih ditemukan kegiatan yang kurang berdampak langsung pada pencapaian sasaran strategis instansi (potensi pemborosan anggaran).

2) RATA-RATA LAMA SEKOLAH (RLS)

Definisi: Jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal.

A. Faktor Keberhasilan (Capaian Meningkat)

- **Program Pendidikan Kesetaraan:** Keberhasilan penyerapan lulusan Kejar Paket A, B, dan C bagi penduduk usia dewasa yang dahulu putus sekolah.



- **Edukasi Pembelajaran Sepanjang Hayat:** Kesadaran masyarakat usia produktif/tua untuk melanjutkan pendidikan tinggi kelas karyawan atau vokasi.
- **Migrasi Penduduk Berpendidikan Tinggi:** Masuknya pekerja atau penduduk baru usia (≥ 25) tahun yang memiliki latar belakang pendidikan diploma, sarjana, atau pascasarjana ke wilayah tersebut.

B. Analisis Penyebab Kendala (Target Belum Tercapai)

- **Dampak Akumulasi Masa Lalu:** Angka RLS sulit bergerak naik secara instan karena didominasi oleh populasi lansia (≥ 25) tahun yang pada masa mudanya tidak menamatkan SD atau SMP.
- **Faktor Ekonomi Makro:** Tingginya tekanan ekonomi memaksa usia remaja akhir memilih langsung bekerja kasar (menjadi pencari nafkah utama) daripada menyelesaikan kuliah.
- **Pernikahan Dini:** Masih terjadinya pernikahan usia anak di masa lalu yang memicu tingginya angka putus sekolah pada jenjang SMA/SMK.

3) HARAPAN LAMA SEKOLAH (HLS)

Definisi: Lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu (7 tahun ke atas) di masa mendatang.

A. Faktor Keberhasilan (Capaian Meningkat)

- **Efektivitas Program Indonesia Pintar (PIP):** Penyaluran bansos pendidikan PIP dan KIP Kuliah berhasil menahan anak dari keluarga miskin agar tidak putus sekolah.
- **Perluasan Akses & Zonasi:** Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan Ruang Kelas Baru (RKB) memperpendek jarak geografis rumah siswa ke sekolah.
- **Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD):** Masifnya gerakan satu desa satu PAUD memicu anak untuk memulai start pendidikan formal lebih awal (meningkatkan angka partisipasi sekolah).

B. Analisis Penyebab Kendala (Target Belum Tercapai)

- **Tingginya Angka Transisi Putus Sekolah:** Terjadi kendala daya tampung (bottleneck) kelulusan, di mana jumlah SMA/SMK negeri tidak mampu menampung seluruh lulusan



SMP, sehingga anak dari keluarga tidak mampu memilih putus sekolah.

- **Kondisi Geografis & Transportasi:** Di wilayah pelosok/perdesaan, minimnya transportasi publik yang aman dan murah menuju sekolah jenjang menengah membuat anak enggan melanjutkan sekolah.
- **Pekerja Anak:** Pada wilayah berbasis pertanian, perkebunan, atau pesisir, masih kuat budaya anak usia sekolah (7-18 tahun) ikut membantu orang tua bekerja pada musim panen/melaut, yang berujung pada absensi tinggi dan putus sekolah.

4) AKREDITASI SEKOLAH (PAUD, SD, SMP)

Definisi: Persentase satuan pendidikan yang berhasil memperoleh atau mempertahankan peringkat akreditasi bermutu (Minimal B atau Unggul) dari Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah (BAN-PDM).

A. Faktor Keberhasilan (Capaian Meningkat)

- **Digitalisasi Penjaminan Mutu:** Penggunaan aplikasi Sispena (Sistem Penilaian Akreditasi) secara optimal memudahkan sekolah mengunggah Bukti Dukung Kinerja tanpa kendala berkas fisik.
- **Pendampingan Intensif Pengawas:** Optimalisasi peran Pengawas Sekolah dalam memberikan simulasi instrumen IASP (Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan) kepada sekolah sasaran sebelum visitasi asesor.
- **Pemanfaatan Rapor Pendidikan:** Sekolah berhasil menggunakan basis data Rapor Pendidikan untuk melakukan Perencanaan Berbasis Data (PBD), sehingga perbaikan mutu fokus pada indikator yang lemah.

B. Analisis Penyebab Kendala (Target Belum Tercapai)

- **Ketidaksesuaian Linieritas & Mutu Guru:** Banyak sekolah kekurangan guru berstatus linier atau bersertifikat pendidik, yang berdampak buruk pada penilaian Komponen Mutu Guru.
- **Ketimpangan Sarana Prasarana (Sarpras):** Sekolah di wilayah pelosok atau pinggiran sering kali gagal meraih akreditasi A karena keterbatasan laboratorium, perpustakaan, digitalisasi kelas, dan akses sanitasi layak.
- **Kelemahan Manajemen Kepala Sekolah:** Kurangnya pemahaman Kepala Sekolah mengenai manajemen tata kelola



sekolah dan dokumentasi kurikulum operasional satuan pendidikan (KOSP) secara sistematis.

5. Formulasi Rekomendasi untuk LKjIP 2025

Dinas Pendidikan dapat menuangkan langkah strategis berikut dalam bab penutup:

1. **Akselerasi SAKIP:** Melakukan *coaching clinic* berkala bersama Inspektorat Daerah untuk mematangkan kualitas penyusunan Laporan Kinerja dan pemenuhan dokumen bukti (*evidence*).
2. HLS: Optimalisasi program Garda Ampuh (Gerakan Kembali ke Sekolah) untuk menyisir anak putus sekolah usia 7-18 tahun.
3. RLS: Memperbanyak kuota beasiswa daerah untuk jenjang Perguruan Tinggi dan memfasilitasi kelompok belajar Paket C gratis di desa-desa dengan tingkat pendidikan rendah.
4. **Akselerasi Akreditasi:** Mengalokasikan dana stimulan DAK (Dana Alokasi Khusus) fisik penuntasan sarpras bagi sekolah-sekolah berstatus akreditasi C atau yang habis masa berlakunya.

Untuk mengukur pencapaian Meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur, telah ditetapkan 1 Indikator Kinerja, 1 Program dan 2 Kegiatan yaitu :

6) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA;

Untuk mengukur pencapaian Sasaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota, telah ditetapkan 1 Indikator Program yaitu :

b) Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan;

Program ini dialokasikan dengan anggaran sebesar **Rp. 4.078.492.515,00** dan realisasi sebesar **Rp. 3.802.342.069,00** dengan realisasi fisik **93,23%** meliputi 2 (satu) kegiatan :

- a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;



❖ URUSAN PENDIDIKAN

MISI 2 : “Meningkatkan sumber daya manusia, sumbar daya alam dan lingkungan hidup yang berkualitas dan berdaya saing”.

TUJUAN 3 : “Meningkatkan partisipasi pendidikan pada jenjang PAUD, Pendidikan dasar, dan pedidikan non formal”.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa urusan pendidikan merupakan urusan wajib pelayanan dasar yang ditujukan untuk pelayanan publik guna memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Dalam konteks pembangunan, pendidikan mempunyai peran strategis sebagai investasi pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). Sejalan dengan itu, fokus prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Demak Tahun 2024 diarahkan untuk Peningkatan Indek pembangunan manusia (IPM) melalui peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui 3 (tiga) pilar yaitu: 1) Pemerataan dan Perluasaan Akses; 2) Peningkatan Mutu, Relevansi, dan Daya Saing; 3) Penguatan Tata Kelola, Akuntabilitas, dan Citra Publik

Untuk mengukur pencapaian Tujuan 3, telah ditetapkan 2 Indikator Tujuan yaitu:

Indikator Tujuan :

- 1) Meningkatnya Angka Rata-rata Lama Sekolah (ARLS);
- 2) Meningkatnya Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS);

Sesuai dengan RPJMD Tahun 2012-2026 pada Misi 2. Meningkatkan sumber daya manusia, sumbar daya alam dan lingkungan hidup yang berkualitas dan berdaya saing, maka Pembangunan diprioritaskan pada sasaran peningkatan kualitas sumberdaya manusia dengan indikator Rata-rata lama sekolah dan harapan Lama Sekolah, 3) Persentase Sekolah yang Terakreditasi minimal B terdapat peningkatan. Secara lengkap dapat terlihat data dibawah :

Tabel 3.25.

Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian AHLS dan ARLS Tahun 2025 dan Tahun sebelumnya.

No.	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Realisasi Tahun 2024 (%)	TAHUN 2025			Kriteria Penilaian	Target Akhir RPJMD (2026)	Capaian s.d. 2025 terhadap RPJMD (2026)
				Target (%)	Realisasi (%)	Capaian %			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B	URUSAN PENDIDIKAN								
1	Meningkatkan partisipasi pendidikan pada jenjang PAUD, Pendidikan dasar,	1 Angka Harapan Lama Sekolah (AHRLS)	13,36	14,00	13,37	95,50	Tinggi	14,17	94,35



No.	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Realisasi Tahun 2024 (%)	TAHUN 2025			Kriteria Penilaian	Target Akhir RPJMD (2026)	Capaian s.d. 2025 terhadap RPJMD (2026)
				Target (%)	Realisasi (%)	Capaian %			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	dan pendidikan non formal.	2 Angka Rata-rata Lama Sekolah (ARLS)	8,28	8,40	8,29	98,69	Tinggi	8,11	102,22
		Rata-Rata Capaian Sasaran	10,82	11,20	10,83	97,10	Tinggi	11,14	98,29

Sumber : BPS Kabupaten Demak

Berdasarkan data di atas pada Tahun 2024 dapat dilihat Angka Harapan Lama Sekolah dari target 13,83 tahun terealisasi 13,36 tahun dengan capaian 96,60% meningkat daripada Tahun 2023 dapat dilihat Angka Harapan Lama Sekolah (AHRLS) dari target 13,66 tahun terealisasi sebesar 13,34 tahun dengan capaian sebesar 97,66% meningkat dibandingkan tahun 2022 dari target 13,49 tahun terealisasi sebesar 13,33 tahun dengan capaian sebesar 98,81% meningkat dibandingkan dengan tahun 2021 yang terealisasi sebesar 13,32 tahun.

Sedangkan untuk Angka Rata-rata Lama Sekolah (ARLS) Tahun 2024 dari target 8,30 tahun terealisasi sebesar 8,28 tahun dengan capaian 99,76 % Tahun 2023 dari target perubahan 8,10 tahun terealisasi 8,27 tahun dengan capaian sebesar 102,40% meningkat dibandingkan dengan tahun 2022 dari target 7,91 tahun terealisasi sebesar 8,10 tahun dengan capaian sebesar 102,40% meningkat dibandingkan dengan tahun 2021 yang terealisasi sebesar 7,86 tahun.

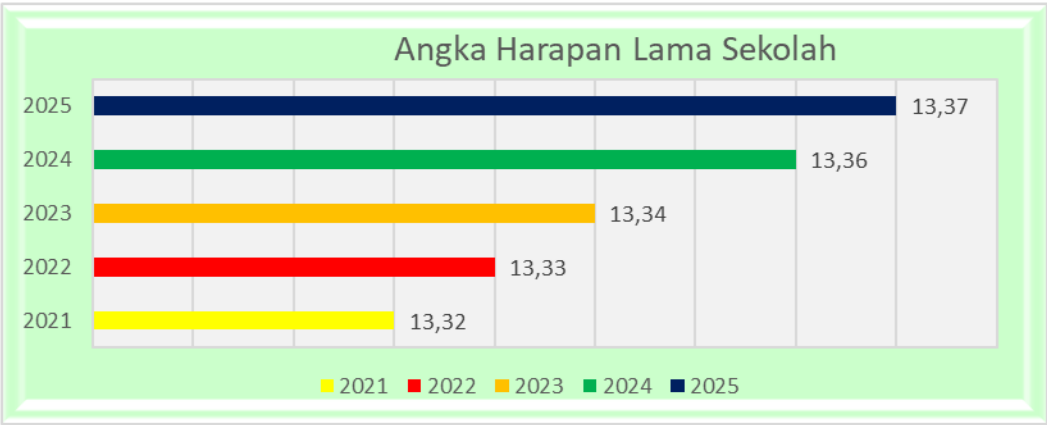
a. Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS)

Peningkatan Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS) didefinisikan sebagai Harapan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Berdasarkan Angka Harapan Lama sekolah penduduk di Kabupaten Demak, selama 2016-2023 terjadi peningkatan kualitas pendidikan yaitu dari 12,44 tahun di tahun 2016 menjadi 13,36 di tahun 2024. Peningkatan harapan lama sekolah di Kabupaten Demak ini dapat dimaknai bahwa penduduk Kabupaten Demak semakin menyadari pentingnya pendidikan dalam rangka

peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Pada tahun 2023, kinerjanya menunjukkan peningkatan meskipun hanya 0,01 selengkapnya bisa dilihat dalam grafik berikut ini :

Gambar 3.3. Grafik Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS)



Tahun	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Harapan Lama Sekolah (HLS)	13,31	13,32	13,33	13,34	13,36	13,37

Permasalahan masih belum tercapainya angka harapan lama sekolah adalah:

1. Masih banyaknya masyarakat yang berpendapat bahwa pendidikan masih hanya sebatas baca tulis dan hitung sehingga, sekolah sampai dengan Jenjang SD, SMP atau SMA/Sederajat sudah cukup;
2. Belum Optimalnya akses layanan perguruan tinggi yang berada di Kabupaten Demak;

Adapun Solusi untuk meningkatkan angka harapan lama sekolah yang di tempuh adalah :

6. Pemberian bantuan biaya pendidikan untuk mahasiswa;
7. Memberikan Hibah Bantuan Operasional Akademi Negeri Demak;

b. Angka rata-rata lama sekolah (ARLS)

Peningkatan rata-rata lama sekolah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan ini dapat dilihat pada Tahun 2024 terealisasi 8,28 tahun meningkat dibandingkan dari Tahun 2023 terealisasi 8,27 tahun meningkat dari tahun 2022 yang terealisasi 8,10 meningkat dari 2021 yang terealisasi 7,86, tahun 2020 yang terealisasi 7,71, tahun 2019 yang terealisasi sebesar 7,55 dan tahun 2018 dengan terealisasi sebesar 7,48. Hal ini menunjukkan tingkat kesadaran orang tua untuk menyekolahkan anak mengalami peningkatan dari waktu ke waktu.

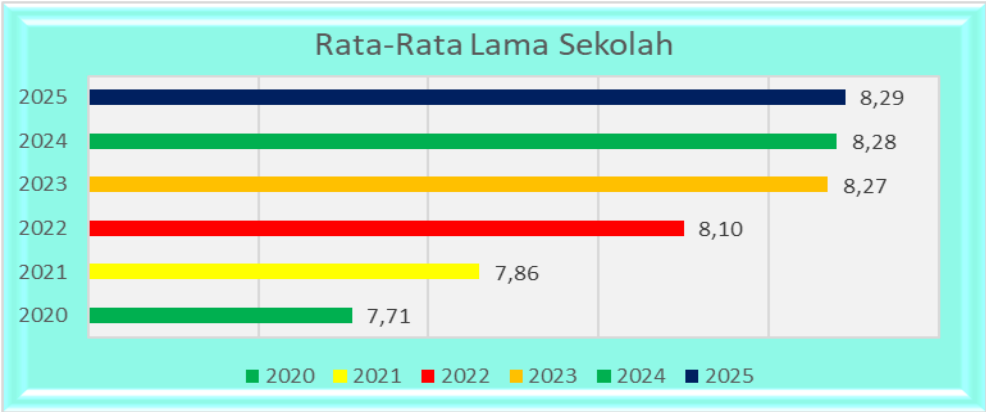
Perluasan akses pendidikan menjadi kunci untuk pemenuhan hak warga negara dalam bidang pendidikan, seperti juga indikator pendidikan lain yang penting seperti angka melek huruf. Hal ini karena berbagai hambatan baik teknis

maupun non teknis, menjadikan pemenuhan hak atas pendidikan yang sudah dijamin oleh konstitusi bisa jadi tidak terpenuhi. Sasaran ini menegaskan bahwa pemerintah akan mengembangkan kebijakan, program dan kegiatan untuk memastikan pemenuhan hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan tanpa diskriminasi. Pemda Kabupaten Demak telah menetapkan indikator peningkatan rata-rata lama sekolah sebagai penanda perluasan akses pendidikan. Rata-rata lama sekolah ini menjelaskan rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Indikator ini merupakan indikator makro yang hasil pengukurannya merupakan hasil dari pengukuran BPS Kabupaten Demak. Dapat dilihat bahwa Angka Rata-rata Lama Sekolah (ARLS) pada tahun 2023 dari target 8,10 tahun terealisasi sebesar 8,27 tahun dengan capaian 102,10% meningkat dibandingkan dengan tahun 2022 dari target 7,91 tahun terealisasi sebesar 8,10 tahun dengan capaian sebesar 102,40% meningkat dibandingkan dengan tahun 2021 yang terealisasi sebesar 7,86 tahun. Ini menjelaskan bahwa saat ini rata rata pendidikan Kabupaten Demak Masih di Jenjang Pendidikan Dasar,, Lamanya bersekolah merupakan ukuran akumulasi investasi pendidikan individu. Banyak faktor yang jadi penyebab dari ketidaktercapaiannya RLS 12 tahun, antara lain persepsi masyarakat tentang pendidikan yang dianggap belum menjanjikan, serta mahalnya biaya pendidikan menjadi kendala selanjutnya. Intervensi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak dalam mendukung capaian Rata-rata Lama Sekolah antara lain penyelenggaraan ujian paket A setara SD, penyelenggaraan ujian paket B setara SMP dan penyelenggaraan ujian paket C setara SMA/MA/SMK.

Berdasarkan rata-rata lama sekolah penduduk di Kabupaten Demak, selama 2016-2022 terjadi peningkatan kualitas pendidikan yaitu dari 7,46 di tahun 2016 menjadi 8,10 di tahun 2022. Peningkatan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Demak ini dapat dimaknai bahwa penduduk Kabupaten Demak semakin sadar akan pentingnya pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Pada Tahun 2023, kinerjanya menunjukkan peningkatan dengan menjadi 8,10. Selengkapnya bisa dilihat dalam grafik berikut ini:

Gambar 3.4. Grafik Rata-rata lama sekolah





Tahun	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	7,71	7,86	8,10	8,27	8,28	8,29

Sumber : BPS Kab. Demak

Permasalahan masih belum tercapainya angka rata-rata lama sekolah adalah :

1. Banyaknya Murid yang masuk kategori miskin atau tidak mampu secara ekonomi. Kemiskinan menjadi salah satu persoalan penting, yang dalam kaitan dengan pendidikan, akan membatasi akses Murid terhadap pendidikan.
2. Banyaknya Penduduk yang sudah berusia lebih dari 50 tahun keatas yang tidak bersekolah.

Solusi untuk meningkatkan angka rata-rata lama sekolah yang di tempuh adalah :

1. Untuk menjawab persoalan kapasitas ekonomi yang terbatas, skema bantuan pendidikan menjadi salah satu jawabannya. Pengembangan bantuan pendidikan berupa Kartu Cerdas, beasiswa rawan putus sekolah/kembali ke sekolah, Pemberian Jaminan Pendidikan bagi Siswa Miskin, (BASIMDA) Bantuan Siswa Miskin Daerah untuk pelajar dari keluarga tidak mampu, Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) adalah beberapa solusi yang sudah dilakukan dan perlu terus dikembangkan ke depan.
2. Bantuan Ayo Siswa Kembali (AYO SEKOLAH) bagi penduduk yang berusia sekolah tetapi tidak bersekolah dengan beasiswa ini Murid dapat bersekolah di Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Kesetaraan atau sekolah yang sesuai dengan usia dan pilihannya.

Selama Tahun 2025, pelaksanaan Urusan Wajib Pendidikan menghasilkan kinerja sesuai dengan target dan sasaran sebagai berikut :

Sasaran 3.1. : “Meningkatnya layanan pendidikan jenjang PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan Non Formal”.

Untuk mengukur pencapaian Sasaran 3, telah ditetapkan 1 Indikator sasaran yaitu:

Indikator Sasaran : Persentase Sekolah yang Terakreditasi minimal B;

a. Persentase Sekolah yang Terakreditasi minimal B

Sesuai dengan RPJMD Tahun 2012-2026 pada Misi 2. Meningkatkan sumber daya manusia, sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkualitas dan berdaya saing, maka diprioritaskan dengan ada mutu pendidikan yang baik maka ditetapkan indikator Persentase Sekolah yang Terakreditasi minimal B,

Indikator ini dipilih untuk mengetahui Penjaminan Mutu Pendidikan Sesuai Standar Nasional. Akreditasi dengan predikat minimal B (Baik) merupakan bukti objektif bahwa sebuah sekolah telah memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan (SNP). Alasan ini krusial untuk memastikan bahwa proses belajar-mengajar, sarana prasarana, dan kompetensi guru berada pada level yang layak dan diakui secara legal oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah (BAN-PDM).

Definisi Operasional Persentase Sekolah yang Terakreditasi minimal B adalah Persentase jumlah sekolah jenjang TK/RA, jenjang SD/MI dan jenjang SMP/ MTs yang terakreditasi minimal B dibanding dengan jumlah total sekolah jenjang TK/RA, jenjang SD/MI dan jenjang SMP/ MTs, Persentase sekolah terakreditasi minimal B (peringkat A dan B) mengukur proporsi satuan pendidikan yang memenuhi standar pelayanan minimal (nilai 71-85 untuk B, > 85 untuk A). Indikator ini mencakup semua jenjang (SD-SMA/SMK) untuk menilai mutu pendidikan, sarana, dan prasarana di Kabupaten Demak. Berikut adalah komponen utama terkait persentase tersebut:

- **Komponen Data Utama:** Jumlah sekolah berakreditasi A dan B dibandingkan dengan total keseluruhan satuan pendidikan.
- **Komponen Penilaian (Akreditasi Bermakna):** Berdasarkan panduan, penilaian mencakup empat komponen utama:
 - 1) Iklim Lingkungan Belajar.
 - 2) Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Pengelolaan Satuan Pendidikan.



- 3) Kinerja Pendidik dalam Proses Pembelajaran.
 - 4) Hasil Pembelajaran Lulusan/Peserta Didik.
- **Kategori Nilai:**
 - **Peringkat A (Unggul):** Nilai 91 - 100.
 - **Peringkat B (Baik):** Nilai 81 - 90 (beberapa acuan 71-85).
 - **Tujuan:** Mengukur pemenuhan standar nasional pendidikan, efektivitas kurikulum, dan kualitas SDM.

Rumus untuk menghitung persentase sekolah yang terakreditasi minimal B adalah membagi jumlah sekolah dengan akreditasi A dan B dengan total sekolah yang telah diakreditasi, kemudian dikalikan 100%.

Rumus Persentase Sekolah yang Terakreditasi minimal B:

$$\text{Persentase} = \left(\frac{\text{Jumlah Sekolah (Terakreditasi A + B)}}{\text{Total Sekolah}} \right) \times 100$$

Keterangan:

- **Jumlah Sekolah (Akreditasi A + B):** Sekolah yang memiliki sertifikat akreditasi A atau B untuk jenjang TK/RA, jenjang SD/MI dan jenjang SMP/ MTs.
- **Total Sekolah :** Seluruh sekolah (TK/RA, SD/MI dan SMP/MTs).
- **Minimal B:** Berarti sekolah dengan nilai B dan di atasnya (A) dihitung dalam persentase ini, yang telah dievaluasi oleh BAN (Badan Akreditasi Nasional).

Perhitungan Persentase Sekolah yang Terakreditasi minimal B :

Jumlah TK/RA yang terakreditasi A dan B Sebanyak 431 Sekolah /Madrasah
Total TK/RA sebanyak 631 sekolah

Jumlah SD/MI yang terakreditasi A dan B Sebanyak 616 Sekolah /Madrasah
Total SD/MI sebanyak 630 sekolah

Jumlah SMP/MTs yang terakreditasi A dan B Sebanyak 200 Sekolah
/Madrasah

Total SMP/MTs sebanyak 221 sekolah

Jumlah Sekolah terakreditasi A dan B sebanyak 1.247 Sekolah/Madrasah
dan Total Sekolah sebanyak 1.482 sekolah/madrasah yang memiliki nilai c
atau belum terakreditasi.

$$\begin{aligned} \text{Persentase} &= \left(\frac{\text{Jumlah Sekolah (Terakreditasi A + B)}}{\text{Total Sekolah}} \right) \times 100 \\ &= \left(\frac{431+616+200}{631+630+221} \right) \times 100 \end{aligned}$$

= $\left(\frac{1.247}{1.482}\right) \times 100 = 84,14\%$

Jadi, berdasarkan data tersebut, **Persentase Sekolah yang Terakreditasi minimal B** adalah sekitar **84,14** (dalam skala 0-100). ini menggambarkan tingkat capaian mutu pendidikan di Kabupaten Demak Tahun ini dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan.

Hasil pengukuran capaian kinerja Sasaran “Meningkatnya layanan pendidikan jenjang PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan Non Formal” dengan Indikator Persentase Sekolah yang Terakreditasi minimal B mencapai 100,77 persen dan termasuk predikat “Sangat Tinggi” sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.26.

Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Persentase Sekolah yang Terakreditasi minimal B Tahun 2025 dan Tahun sebelumnya.

No.	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Realisasi Tahun 2024 (%)	TAHUN 2025			Kriteria Penilaian	Target Akhir RPJMD (2026)	Capaian s.d. 2025 terhadap RPJMD (2026)
				Target (%)	Realisasi (%)	Capaian %			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B	URUSAN PENDIDIKAN								
1	Meningkatnya layanan pendidikan jenjang PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan Non Formal	1 Persentase Sekolah yang Terakreditasi minimal B	77,91	83,50	84,14	100,77	Sangat Tinggi	61,71	136,35
		Rata-Rata Capaian Sasaran	77,91	83,50	84,14	100,77	Sangat Tinggi	61,71	136,35

Sumber : Profil Pendidikan Kab. Demak

Berdasarkan data di atas pada Tahun 2025 dari target 83,50 terealisasi 84,14 dengan capaian 100,77% meningkat dibandingkan dari 2024 dari 82,31 tercapai 77,91 menurun dibandingkan dari Tahun 2023 dapat dilihat Persentase Sekolah yang Terakreditasi minimal B dari target perubahan 80,03% terealisasi sebesar 82,31% dengan capaian sebesar 102,85% meningkat dibandingkan dengan tahun 2022 dari target 59,71% terealisasi sebesar 80,03% dengan capaian sebesar 134,03% meningkat dibandingkan dengan tahun 2021 yang terealisasi sebesar 59,21%.

Adapun capaian ini diperoleh berdasarkan **definisi operasional** Pesentase jumlah sekolah jenjang TK/RA, jenjang SD/MI dan jenjang SMP/ MTs yang terakreditasi minimal B dibanding dengan jumlah total sekolah jenjang

TK/RA, jenjang SD/MI dan jenjang SMP/ MTs. Secara lebih rinci realisasi akreditasi sekolah di Kabupaten Demak dapat dilihat di Tabel dibawah ini :

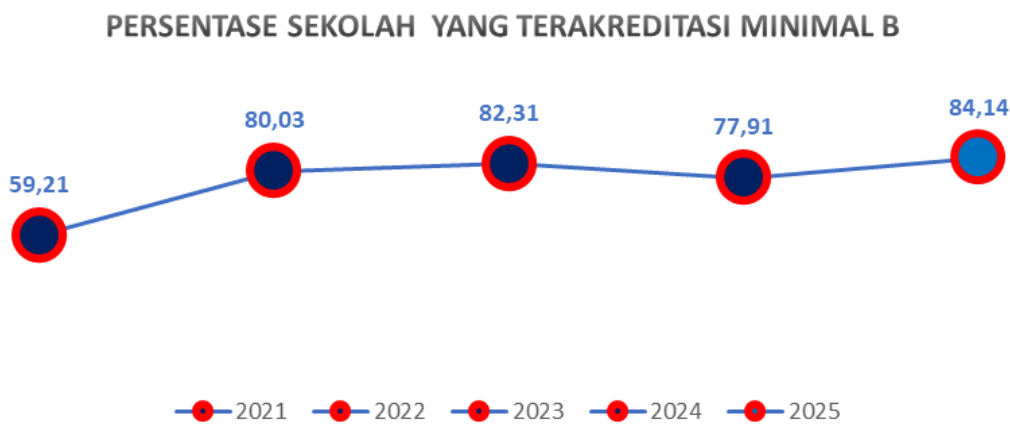
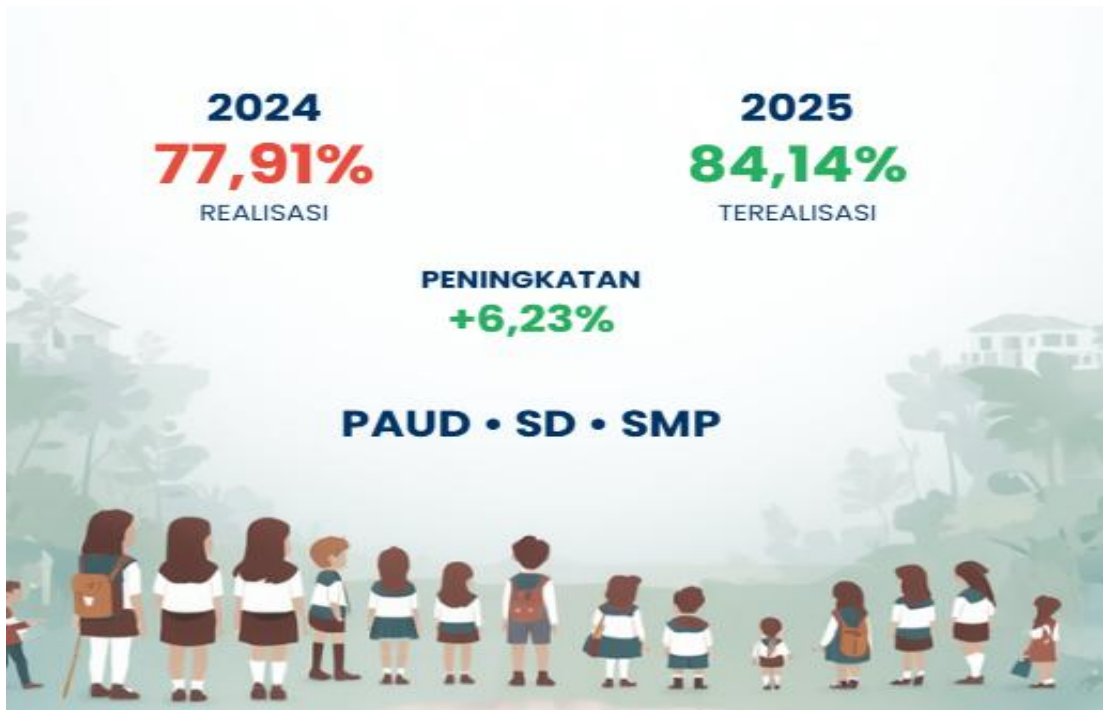
Tabel 3.27. Hasil Akreditasi Sekolah Minimal B Tahun 2025

NO.	JENJANG PENDIDIKAN	NILAI AKREDITASI					Persentase	
		TOTAL	A	B	C	Belum	Nilai Minimal B	Nilai C /Belum
#	KAB. DEMAK	1.482	424	823	117	118	84,14	15,86
1	TK	470	44	338	78	10	81,28	18,72
2	RA	161	2	47	17	95	30,43	69,57
3	SD	488	240	245	2	1	99,39	0,61
4	MI	142	51	80	5	6	92,25	7,75
5	SMP	87	39	37	6	5	87,36	12,64
6	MTs	134	48	76	9	1	92,54	7,46
	JUMLAH	1.482	424	823	117	118	84,14	15,86
	%	100	28,61	55,53	7,89	7,96		

Sumber : Profil Pendidikan Kabupaten Demak

Berdasarkan data diatas dapat di lihat Persentase Sekolah yang Terakreditasi minimal B pada tahun 2025 adalah sebesar 84,14 meningkat dibandingkan dengan tahun 2024 adalah sebesar 77,91% menurun dibandingkan tahun 2023 tercapai 82,30% meningkat dibandingkan tahun 2022 sebesar 80,03%, dengan capain tertinggi di Jenjang SD 97,96%, MTs 92,54%, MI 92,14%, SMP 79,55%, TK 69,20% dan terendah RA 56,52%.

Perkembangan Persentase Sekolah yang Terakreditasi minimal B Kabupaten Demak Tahun 2021 – 2025 dapat dilihat di grafik dibawah ini :



Gambar 3.5. Grafik Persentase Sekolah yang Terakreditasi minimal B



Tahun	2021	2022	2023	2024	2025
Persentase Sekolah yang Terakreditasi minimal B	59,21	80,03	82,31	77,91	84,14

Sumber : Profil Pendidikan Kab. Demak



Komponen Pembentuk Persentase Sekolah yang Terakreditasi minimal B di Kabupaten Demak sesuai definisi operasional Adalah Akreditasi Sekolah TK/RA, SD/MI dan SMP/MTs, berikut hasil Akreditasi Sekolah Akreditasi Perjenjang dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

❖ Akreditasi Jenjang TK/RA

NO.	JENJANG PENDIDIKAN	NILAI AKREDITASI					Persentase	
		TOTAL	A	B	C	Belum	Nilai Minimal B	Nilai C /Belum
	KAB. DEMAK	631	46	385	95	105	68,30	31,70
1	TK	470	44	338	78	10	81,28	18,72
2	RA	161	2	47	17	95	30,43	69,57
	Jumlah	631	46	385	95	105	68,30	31,70
	%	100	7,29	61,01	15,06	16,64		

Berdasarkan data diatas dapat dilihat untuk TK/RA dengan jumlah 631 sekolah yang terakreditasi minimal B sebanyak 431 sekolah atau 68,30%.

❖ Akreditasi Jenjang SD/MI

NO.	JENJANG PENDIDIKAN	NILAI AKREDITASI					Persentase	
		TOTAL	A	B	C	Belum	Nilai Minimal B	Nilai C /Belum
	KAB. DEMAK	630	290	326	7	7	97,78	2,22
1	SD	488	240	245	2	1	99,39	0,61
2	MI	142	50	81	5	6	92,25	7,75
	Jumlah	630	290	326	7	7	97,78	2,22
	%	100	46,03	51,75	1,11	1,11		

Berdasarkan data diatas dapat dilihat untuk SD/MI dengan jumlah 630 sekolah yang terakreditasi minimal B sebanyak 616 sekolah atau 97,78%.

❖ Akreditasi Jenjang SMP/MTs

NO.	JENJANG PENDIDIKAN	NILAI AKREDITASI					Persentase	
		TOTAL	A	B	C	Belum	Nilai Minimal B	Nilai C /Belum
	KAB. DEMAK	221	87	113	15	6	90,50	9,50
1	SMP	87	39	37	6	5	87,36	12,64
2	MTs	134	48	76	9	1	92,54	7,46
	Jumlah	221	87	113	15	6	90,50	9,50
	%	100	39,37	51,13	6,79	2,71		

Berdasarkan data diatas dapat dilihat untuk SMP/MTs dengan jumlah 221 sekolah yang terakreditasi minimal B sebanyak 200 sekolah atau 90,50%.

Berdasarkan data diatas dan hasil pemetaan mandiri dan asesmen prasyarat, kami menyadari bahwa TK/RA masih memiliki beberapa kendala dalam pemenuhan 8 Standar Nasional PAUD. Kelemahan utama terletak pada:

- Pendidik dan Tenaga Kependidikan: Masih kurangnya sertifikasi diklat PAUD dan kesesuaian ijazah pendidik dengan standar.
- Sarana dan Prasarana: Kelengkapan Alat Permainan Edukatif (APE) luar dan dalam ruangan belum memadai dan belum terdokumentasi dengan baik.
- Pengelolaan dan Kurikulum: Penyusunan dokumen Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang belum sepenuhnya kontekstual dan dokumen evaluasi pembelajaran yang belum rutin.

Kami berkomitmen meningkatkan mutu melalui peningkatan kompetensi guru, melengkapi dokumen kurikulum, dan memperbaiki sarana prasarana dalam kurun waktu lima tahun ke depan untuk mencapai hasil akreditasi yang lebih baik.

- 1) Faktor-faktor yang mendukung peningkatan Persentase Sekolah yang Terakreditasi minimal B.
Faktor-faktor pendukung capaian peningkatan Persentase Sekolah yang Terakreditasi minimal B adalah sebagai berikut:

- a) Faktor Pendukung melalui Akreditasi TK/RA, Faktor pendukung utama agar TK mendapatkan akreditasi minimal B (baik) adalah pemenuhan 8 Standar Nasional PAUD (SNP) secara maksimal, terutama pada komponen Standar Proses, pendidik, dan sarana-prasarana. Pengelolaan administrasi yang sistematis, budaya mutu yang konsisten, dan relevansi kurikulum menjadi kunci keberhasilan penilaian. Berikut adalah faktor-faktor pendukung spesifik untuk mencapai akreditasi B :

- **Peningkatan Kualitas Pendidik (PTK):** Tenaga pendidik memiliki kualifikasi akademik yang sesuai (minimal D4/S1) dan bersertifikat kompetensi pendidik.
- **Optimalisasi Standar Proses:** Pembelajaran dilakukan secara kreatif, berpusat pada anak, dan terdokumentasi dengan baik (RPP/RPPM/RPPH).
- **Sarana dan Prasarana Memadai:** Ketersediaan alat permainan edukatif (APE), ruang kelas aman, dan sanitasi yang memenuhi standar kebersihan.

- **Administrasi dan Manajemen:** Pengelolaan sekolah yang terdokumentasi rapi, transparan, dan memiliki kurikulum operasional yang jelas.
 - **Relevansi dan Mutu:** Kurikulum yang diterapkan relevan dengan kebutuhan anak dan adanya budaya mutu (peningkatan berkelanjutan) di lingkungan sekolah
- b) Faktor Pendukung melalui Akreditasi SD/MI, Faktor pendukung utama agar SD/MI mendapatkan akreditasi minimal B (nilai 71-85) adalah pemenuhan dokumen dan implementasi 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP) secara konsisten. Fokus utama meliputi kualitas proses pembelajaran, kompetensi guru, serta sarana prasarana yang layak untuk mendukung aktivitas pendidikan. Berikut faktor pendukung utamanya:
- **Pendidik dan Tenaga Kependidikan:** Guru berkualifikasi akademik minimal S1/D4 dan memiliki kompetensi yang sesuai (sertifikasi).
 - **Proses Pembelajaran:** Pelaksanaan kurikulum yang terstruktur, perencanaan pembelajaran (RPP) yang terdokumentasi, dan penggunaan metode pembelajaran yang aktif.
 - **Sarana dan Prasarana:** Kelengkapan dan perawatan ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, serta fasilitas sanitasi yang memenuhi standar.
 - **Standar Pengelolaan & Pembiayaan:** Adanya Rencana Kerja Sekolah (RKS/RKAS), transparansi penggunaan anggaran, dan manajemen sekolah yang efektif.
 - **Kompetensi Lulusan:** Capaian nilai akademik maupun non-akademik siswa yang baik dan terdokumentasi dengan baik
- c) Faktor Pendukung melalui Akreditasi SMP/MTs, Faktor pendukung utama agar SMP/MTs mendapatkan nilai akreditasi minimal B (baik) adalah pemenuhan dokumen serta implementasi komponen standar pendidikan, mencakup kurikulum (silabus/RPP), kualitas pendidik, sarana prasarana, manajemen pengelolaan, dan evaluasi pembelajaran. Persiapan dokumen yang lengkap dan terdokumentasi dengan baik menjadi kunci, Faktor Pendukung Utama Akreditasi SMP/MTs (Nilai B):
- **Dokumen Kurikulum & Pembelajaran:** Kurikulum sekolah, silabus, serta bukti pelaksanaan pembelajaran dan evaluasi siswa yang lengkap.

- **Kompetensi Pendidik & Tenaga Kependidikan:** Daftar tenaga pendidik, kualifikasi, serta sertifikat pendukung yang menunjukkan kualitas staf.
- **Sarana & Prasarana:** Kelengkapan fasilitas fisik sekolah yang mendukung proses belajar mengajar.
- **Manajemen & Tata Kelola:** Laporan keuangan yang transparan dan dokumen legalitas sekolah.
- **Budaya Mutu & Akuntabilitas:** Adanya upaya berkelanjutan untuk meningkatkan mutu (menuju standar 81-90 atau 71-85 tergantung instrumen)

Melalui akreditasi, sekolah menunjukkan aktivitas pendidikan yang sesuai dengan standar nasional.

2) Faktor-faktor penyebab kegagalan pencapaian target Persentase Sekolah yang Terakreditasi minimal B.

Beberapa hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target Persentase Sekolah yang Terakreditasi minimal B diantaranya:

a) Hambatan Capaian Akreditasi TK/RA, Hambatan utama dalam mencapai akreditasi TK minimal B meliputi ketidaksiapan dokumen 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP), sarana prasarana yang belum memadai, serta kurangnya kualifikasi pendidik (sertifikat PAUD/ijazah). Pengelolaan administrasi yang tidak konsisten dan kurangnya inovasi dalam proses pembelajaran juga sering menghambat penilaian. Berikut adalah rincian hambatan berdasarkan 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP):

- **Standar Sarana dan Prasarana (Hambatan Terbesar):** Kurangnya ruang kelas yang memadai, tempat bermain aman, alat permainan edukatif (APE) indoor/outdoor, dan fasilitas sanitasi.
- **Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan:** Pendidik belum berkualifikasi S1 PAUD/Pendidikan, kurangnya pendidik bersertifikat diklat berjenjang, dan rasio guru-murid yang tidak seimbang.
- **Standar Pengelolaan dan Dokumen (Kurikulum):** Ketidakmampuan menyusun Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan (KOSP) secara mandiri, dokumen administratif (RPPH, RPPM, RPP) tidak lengkap, dan kurangnya evaluasi program.

- **Standar Proses dan Penilaian:** Pembelajaran belum berpusat pada anak (masih konvensional), penilaian perkembangan anak tidak terdokumentasi dengan baik, dan kurangnya keterlibatan orang tua.
- **Standar Pembiayaan:** Laporan keuangan sekolah tidak transparan atau tidak terdokumentasi dengan baik.

Langkah Mengatasi:

Memastikan izin operasional aktif, melengkapi dokumen fisik/digital 8 standar, meningkatkan kompetensi guru, dan memperbarui APE secara berkala.

b) Hambatan Capaian Akreditasi SD/MI, Hambatan utama akreditasi SD/MI meliputi ketidaksiapan dokumen fisik (tidak sistematis/tidak lengkap), sarana prasarana kurang memadai, dan rendahnya mutu serta kualifikasi guru. Kendala lainnya mencakup manajemen sekolah yang lemah, keterbatasan waktu, kurangnya dukungan tim, serta lemahnya akses internet untuk sistem akreditasi daring (SISPEÑA), Berikut adalah rincian hambatan akreditasi SD/MI:

- **Dokumen dan Bukti Fisik:** Dokumen tidak lengkap, tidak tertata sistematis, atau bukti fisik tidak ditemukan.
- **Sarana dan Prasarana:** Fasilitas sekolah yang kurang memadai menghambat pemenuhan standar penilaian.
- **SDM dan Tenaga Pendidik:** Rendahnya kualifikasi guru, ketidaksesuaian latar belakang pendidikan dengan mata pelajaran (mismatch), serta kurangnya kerja sama tim dalam persiapan.
- **Manajemen dan Teknis:** Lemahnya fungsi manajemen sekolah, waktu persiapan yang terbatas, dan masalah teknis seperti lemahnya internet untuk SISPEÑA (Sistem Penilaian Akreditasi Sekolah/Madrasah).

Peningkatan kualitas dokumen, peningkatan kapasitas pendidik, dan pemenuhan sarana fisik menjadi kunci utama untuk mengatasi hambatan tersebut.

c) Hambatan Capaian Akreditasi SMP/MTs, Hambatan utama akreditasi SMP/MTs meliputi ketidaksiapan dokumen bukti fisik yang tidak sistematis/tidak lengkap, kurangnya dukungan dan kerja sama guru/tenaga kependidikan, serta terbatasnya sarana prasarana penunjang. Selain itu, kendala teknis seperti lemahnya akses internet untuk aplikasi SISPENA, manajemen persiapan yang buruk, dan kurangnya pemahaman terhadap standar nasional pendidikan sering menghambat proses, Berikut adalah rincian hambatan akreditasi SMP/MTs:

- **Administrasi dan Dokumen:** Dokumen bukti fisik tidak tersip dengan baik, tidak lengkap, atau tidak ditemukan (missing files).
- **Sarana dan Prasarana:** Fasilitas sekolah kurang memadai, seperti minimnya alat cetak, ruang kelas yang tidak standar, atau akses internet yang lambat untuk pengunggahan data ke SISPENA.
- **Sumber Daya Manusia (SDM):** Kurangnya keterlibatan aktif guru dalam persiapan, mutasi guru/tenaga kependidikan yang tinggi, serta rendahnya kompetensi pendidik.
- **Manajemen Sekolah:** Kurang sistematis dalam persiapan, waktu yang terbatas, dan ketidaksesuaian antara perencanaan dan realisasi di lapangan.
- **Kualitas Pendidikan:** Lemahnya implementasi kurikulum, rendahnya inovasi pembelajaran (masih konvensional), dan bahan ajar yang usang.

Pengelolaan yang baik, pemahaman terhadap 8 standar nasional pendidikan, dan kerja sama tim sangat penting untuk mengatasi hambatan tersebut

3) Rekomendasi perbaikan capaian Persentase Sekolah yang Terakreditasi minimal B Tahun 2025

Rekomendasi utama untuk meningkatkan persentase sekolah terakreditasi minimal B tahun 2025 adalah memperkuat pemenuhan 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP), mendampingi pengisian dokumen di aplikasi SISPENA-PDM, serta meningkatkan kompetensi guru dan sarana prasarana. Perbaikan harus berfokus pada budaya mutu dan evaluasi mandiri adalah:

a) **Peningkatan Kompetensi dan Kinerja Guru (Aspek Tenaga Kependidikan)**

- **Fasilitasi Sertifikasi:** Meningkatkan upaya agar guru di tingkat PAUD dan SMP mendapatkan sertifikasi pendidik, karena capaiannya seringkali masih di bawah target.
- **Peningkatan Kualifikasi:** Mendorong guru untuk memenuhi kualifikasi minimal S1.
- **Pelatihan Mandiri:** Mendorong guru memanfaatkan Platform Merdeka Mengajar untuk meningkatkan kompetensi, sejalan dengan Permendikdasmen Nomor 13 Tahun 2025.

b) **Optimalisasi Proses Akreditasi (SISPENA-PDM)**

- **Pendampingan Intensif:** Sekolah harus segera melakukan pengunggahan Dokumen Utama (DU) dan Deskripsi Kinerja Asesi (DKA) melalui aplikasi SISPENA-PDM sebelum tenggat waktu.
- **Evaluasi Pra-Akreditasi:** Sekolah perlu melakukan simulasi atau pra-asesmen untuk mengetahui kesiapan dokumen, mengingat nilai akreditasi dapat turun.

c) **Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana**

- **Pemetaan Sarana:** Pemerintah Daerah perlu melakukan pemetaan sarana prasarana sekolah, terutama untuk sekolah-sekolah yang masih di bawah standar.
- **Perbaikan Fasilitas:** Memprioritaskan perbaikan sarana dasar (ruang kelas, perpustakaan, toilet) yang memengaruhi nilai akreditasi.

d) **Penguatan Manajemen dan Budaya Mutu**

- **Kepemimpinan Sekolah:** Memperkuat kapasitas kepala sekolah dalam pengelolaan sekolah yang efektif.
- **Budaya Mutu:** Membangun budaya mutu di sekolah, bukan sekadar melengkapi dokumen saat akreditasi akan dilaksanakan.

4) Program/Kegiatan yang mendukung keberhasilan capaian Persentase Sekolah yang Terakreditasi minimal B Tahun 2025.

Program yang mendukung keberhasilan akreditasi sekolah minimal B meliputi peningkatan sarana prasarana sesuai standar, peningkatan kompetensi guru, dan pengelolaan Dana BOS yang akuntabel. Selain itu, pendampingan akreditasi oleh Dinas Pendidikan, pengembangan sekolah melalui program unggulan, dan penguatan 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP) sangat penting untuk mencapai target tersebut, Berikut adalah beberapa program dan inisiatif utama yang mendukung keberhasilan akreditasi minimal B.

- a) **Peningkatan Sarana dan Prasarana (Sarpras):** Memenuhi 8 komponen SNP, khususnya perbaikan sarana fisik sekolah agar memenuhi kriteria standar akreditasi.
- Pembangunan Ruang Kelas Baru di SD Negeri Tugu 2 Kecamatan Sayung



Dokumentasi Foto Sebelum Pembangunan Ruang Kelas Baru di SD Negeri Tugu 2 Kecamatan Sayung



Dokumentasi Foto Sesudah Pembangunan Ruang Kelas Baru di SD Negeri Tugu 2 Kecamatan Sayung

- Pembangunan Ruang Kelas di SDN Purwosari 2 Sayung Kecamatan Sayung





Dokumentasi Foto Sebelum di Rehabilitasi Ruang Kelas



Dokumentasi Foto Sesudah di Rehabilitasi Ruang Kelas



- Pembangunan Ruang Kelas Baru di SD Negeri Guntur 3 Kecamatan Guntur



Dokumentasi Foto Sebelum Pembangunan Ruang Kelas Baru



Dokumentasi Foto Sesudah Pembangunan Ruang Kelas Baru

Daftar Pembangunan Ruang Kelas Baru dan Rehabilitasi Ruang Kelas Tahun 2025

NO.	Uraian Pekerjaan	Lokasi	Kecamatan
1	Ruang Kelas Baru	MI Nurul Huda Desa Sidokumpul	Kec. Guntur
2	Ruang Kelas Baru	SD Negeri Guntur 3	Kec. Guntur
3	Ruang Kelas Baru	SD Negeri Tugu 2	Kec. Sayung
4	Ruang Kelas Baru	SD Negeri Karangsari 4	Kec. Karangtengah
5	Ruang Kelas Baru	SMPS Sultan Fatah	Kec. Demak
6	Ruang Kelas Baru	MI ROUDLOTUL HIKMAH	Kec. Karangtengah
7	Ruang Kelas Baru	SD Negeri Daleman	Kec. Sayung
8	Ruang Kelas Baru	SD Negeri Sriwulan	Kec. Sayung
9	Ruang Kelas Baru	SMPS ISLAM TANWIRUL HIJA	Kec. Sayung
10	Rehabilitasi ruang kelas	SD Negeri Mlaten 1	Kec. Mijen
11	Rehabilitasi ruang kelas	SD Negeri Purworejo 1	Kec. Bonang

NO.	Uraian Pekerjaan	Lokasi	Kecamatan
12	Rehabilitasi ruang kelas	SD Negeri Daleman	Kec. Sayung
13	Rehabilitasi ruang kelas	SD Negeri Karang Sari 3	Kec. Karangtengah
14	Rehabilitasi ruang kelas	SD Negeri Tugu 2	Kec. Sayung
15	Rehabilitasi ruang kelas	SD Negeri Pundenarum 1	Kec. Karangawen
16	Rehabilitasi ruang kelas	SD Negeri Pilangsari	Kec. Sayung
17	Rehabilitasi ruang kelas	SD Negeri Surodadi 1	Kec. Sayung
18	Rehabilitasi ruang kelas	SD Negeri Sayung 4	Kec. Sayung
19	Rehabilitasi ruang kelas	SD Negeri Sayung 3	Kec. Sayung
20	Rehabilitasi ruang kelas	SD Negeri Rejosari 1	Kec. Karangtengah
21	Rehabilitasi ruang kelas	SD Negeri Sidogemah 1	Kec. Sayung
22	Rehabilitasi ruang kelas	SD Negeri Bintoro 2	Kec. Demak
23	Rehabilitasi ruang kelas	SD Negeri Kuripan 3	Kec. Karangawen
24	Rehabilitasi ruang kelas	SD Negeri Purwosari 2	Kec. Sayung
25	Rehabilitasi ruang kelas	MTs Taqwiyyatul Waton	Kec. Mranggen
26	Rehabilitasi ruang kelas	SMP Negeri 3 Satu Atap Sayung	Kec. Sayung
27	Rehabilitasi ruang kelas	SMP Negeri 2 Wedung	Kec. Wedung
28	Rehabilitasi ruang kelas	SMP Negeri 1 Bonang	Kec. Bonang
29	Rehabilitasi ruang kelas	SD Negeri Kendalasem	Kec. Wedung
30	Rehabilitasi ruang kelas	SD Negeri Kedungmutih 1	Kec. Wedung
31	Rehabilitasi ruang kelas	SD Negeri Kedungori	Kec. Dempet
32	Rehabilitasi ruang kelas	SD Negeri Kedungmutih 1	Kec. Wedung

Sumber : Bidang Sarpra Dindikbud 2025, Data olah

- b) **Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Guru:** Program pengembangan guru melalui pelatihan, workshop, dan sertifikasi untuk meningkatkan kualitas pengajaran;
- Peningkatan kompetensi dan kualifikasi guru di Kabupaten Demak tahun 2025 difokuskan pada penguatan mutu pendidikan melalui pemilihan guru berprestasi, pelatihan berkelanjutan, serta pengembangan 4 kompetensi dasar (pedagogik, profesional, sosial, kepribadian). Langkah ini sejalan dengan pelantikan bupati baru (periode 2025-2030) untuk meningkatkan profesionalisme.

Dindikbud Demak – Sebagai upaya pemerataan kuantitas dan kualitas Pendidikan serta peningkatan kompetensi tenaga kependidikan di Demak. Sebanyak 40 guru Paud mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Tingkat Lanjut. Diklat yang di gelar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak ini berlangsung selama sepekan, mulai tanggal 8 hingga 13 September 2025, di Hotel Amatis



Dokumentasi Foto Sumber Bidang GTK Dindikbud

- c) **Optimalisasi Dana BOS:** Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) secara transparan dan akuntabel untuk mendukung kebutuhan operasional sekolah, termasuk persiapan akreditasi.
- d) **Pendampingan Akreditasi (Voluntary & Compulsory):** Program pendampingan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk satuan PAUD, PNF, SD, dan SMP dalam mempersiapkan dokumen dan komponen akreditasi.
- e) **Program Sekolah Unggulan/Inovasi:** Pengembangan sekolah berlandaskan inovasi dan kreativitas pengelolaan untuk meningkatkan mutu.
- f) **Penerapan Kurikulum dan Pembelajaran Berkualitas:** Peningkatan kualitas proses pembelajaran dan hasil belajar (akademis) untuk memenuhi SNP.
- g) **Peningkatan Manajemen Sekolah:** Penguatan tata kelola sekolah, termasuk *student agency* (suara, pilihan, kepemilikan) untuk menciptakan lingkungan sekolah yang positif.

Program-program ini bertujuan memastikan seluruh komponen sekolah memenuhi standar yang ditetapkan BAN-PDM (Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah).

- 5) Efisiensi dan efektifitas capaian kinerja capaian Persentase Sekolah yang Terakreditasi minimal B Tahun 2025
 - a) Analisis Efisiensi Persentase Sekolah yang Terakreditasi minimal B.



Indikator kinerja Persentase Sekolah yang Terakreditasi minimal B dicapai melalui dukungan pelaksanaan program sebagaimana pada tabel berikut ini :

Tabel 3. 1

Dukungan Program dan Anggaran

indikator kinerja Persentase Sekolah yang Terakreditasi minimal B

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN %
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	203.569.730.060	198.637.364.063	97,58
2	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	160.000.000	77.665.000	48,54
3	PROGRAM PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	1.526.018.904	1.201.945.875	78,76
	JUMLAH	205.255.748.964	199.916.974.938	97,40

Sumber : Dindikbud Kab. Demak Kab. Demak, 2025, Data diolah

Dari tabel di atas indikator Persentase Sekolah yang Terakreditasi minimal B didukung oleh 3 (tiga) program dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 205.255.748,- dari pagu anggaran Rp. 199.916.974.938,- dengan capaian realisasi anggaran 97,40%.

Analisis keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian kinerja dan solusi perbaikan yang dapat dilakukan dapat diperlihatkan pada tabel berikut :

- 1) Program Pengelolaan Pendidikan yang diampu oleh Dindikbud.
Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses dan partisipasi masyarakat dalam berbagai jenjang pendidikan formal maupun nonformal. Dengan indikator seperti tingkat partisipasi di PAUD, pendidikan dasar, menengah pertama, dan pendidikan kesetaraan, program ini mendukung upaya peningkatan Persentase Sekolah yang Terakreditasi minimal B melalui, pemenuhan 8 standar nasional pendidikan meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan berbasis Standar Nasional Pendidikan, sangat krusial dalam menunjang akreditasi. Pengelolaan yang baik meningkatkan mutu internal, memfasilitasi pemenuhan bukti fisik komponen akreditasi (standar isi, proses, sarpras, guru, keuangan), serta memastikan efektivitas sekolah, yang berujung pada peningkatan nilai akreditasi, dengan indikator Persentase Sekolah yang Terakreditasi minimal B dengan capaian kinerja **100,77%**.
- 2) Program Pengembangan Kurikulum yang diampu oleh Dindikbud. Pengembangan Kurikulum di lakukan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP) untuk mewujudkan pendidikan nasional, Standar yang diacu dalam pengembangan kurikulum adalah standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses, dan Standar Penilaian. Program ini Program ini Fokus pada mengintegrasikan muatan lokal ke dalam kurikulum pendidikan formal, dengan indikator persentase sekolah yang menerapkan muatan lokal daerah. Hal ini mendukung relevansi pendidikan dengan kebutuhan lokal, yang berkontribusi pada pengembangan kompetensi siswa dan peningkatan Indeks Pendidikan. Program ini memiliki indikator Persentase sekolah yang menerapkan muatan lokal daerah dengan capaian kinerja **100%**.



- 3) Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang diampu oleh Dindikbud. Program ini fokus pada peningkatan kualitas tenaga pendidik melalui sertifikasi dan pelatihan. Dengan indikator persentase tenaga pendidik yang tersertifikasi, program ini berkontribusi pada perbaikan kualitas proses pembelajaran, yang menjadi salah satu faktor penentu dalam peningkatan Indeks Pendidikan. Program ini memiliki indikator persentase tenaga pendidik yang tersertifikasi dengan capaian kinerja 71,36%.



Analisis keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian kinerja dan solusi perbaikan yang dapat dilakukan dapat diperlihatkan pada tabel berikut :

Tabel 3. 2

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi yang dilakukan pada indikator penunjang

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Analisis Keberhasilan /Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)
1	Meningkatnya layanan pendidikan jenjang PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan Non Formal	Persentase Sekolah yang Terakreditasi minimal B	Persentase	83,50	84,14	100,77	Keberhasilan : 1) Manajemen: Pembentukan tim kerja yang solid & pembagian tugas jelas; 2) Dokumen : Dokumen lengkap, nyata, sah, dan terorganisir di SISPENA; 3) Pendidikan : Guru berkualitas, linier, dan aktif berinovasi; 4) Sarana : Sarana memadai dan terawat sesuai standar. 5) Kultur Mutu : Budaya mutu, akuntabilitas, dan keterlibatan seluruh warga sekolah. Kegagalan : 1) Kurang sosialisasi, tidak ada tim khusus, perencanaan tidak sistematis. 2) Dokumen tidak lengkap, tidak sah, atau tidak di-upload. 3) Mutu guru rendah, tidak linier, kurang aktif. 4) Sarana prasarana minim atau rusak. 5) Akreditasi dianggap beban, budaya cypypaste.	Solusi & Strategi Tindakan 1) Membuat timeline kerja, menunjuk koordinator per komponen, dan rapat koordinasi rutin.; 2) Melakukan review dokumen berkala, digitalisasi arsip, dan cek kelengkapan dokumen sesuai IASP; 3) Mengadakan pelatihan/workshop, mendorong studi lanjut, dan peer coaching; 4) Membuat skala prioritas perbaikan, pemeliharaan rutin, dan peningkatan sarana secara bertahap; 5) Membangun komitmen bersama, internalisasi pentingnya mutu, dan evaluasi diri rutin.

Sumber : Dindikbud Kab. Demak, 2025, Data diolah

Adapun Program yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. 3

Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Realisasi (%)	Menunjang/Tidak Menunjang
1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)
1.	Meningkatnya layanan pendidikan jenjang PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan Non Formal	Persentase Sekolah yang Terakreditasi minimal B	100,77	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase Sekolah yang Terakreditasi minimal B	84,14	Menunjang : 1) Standar Pengelolaan Pendidikan: Meliputi penyusunan perencanaan kegiatan (visi-misi), implementasi, dan pengawasan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Realisasi (%)	Menunjang/Tidak Menunjang
1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)
				• Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar • Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama • Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase Sekolah SD/MI yang Terakreditasi minimal B Persentase Sekolah SMP/MTs yang Terakreditasi minimal B Persentase Sekolah TK/RA yang Terakreditasi minimal B	68,30 97,78 90,50	berbasis transparansi dan akuntabilitas. 2) Penguatan Dokumen Bukti Fisik: Menyiapkan seluruh dokumen (dokumen kurikulum, laporan keuangan, dokumen sarpras) yang disyaratkan dalam instrumen akreditasi. 3) Optimalisasi Sarana dan Prasarana: Mengelola fasilitas sekolah agar mendukung proses pembelajaran yang kondusif dan berkualitas. 4) Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI): Membangun budaya mutu berkelanjutan melalui pemetaan mutu, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi rutin. 5) Keterlibatan Pemangku Kepentingan: Melibatkan guru, komite sekolah, dan staf dalam tim akreditasi untuk memastikan kesiapan seluruh komponen sekolah.
				Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase tenaga pendidik yang tersertifikasi	71,36	Menunjang : Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM): Meningkatkan kualifikasi dan kompetensi guru, tenaga kependidikan, serta pemimpin sekolah;
				Program Pengembangan Kurikulum	Persentase sekolah yang menerapkan muatan lokal daerah	100%	Menunjang : Mendukung relevansi pendidikan dengan kebutuhan lokal, yang berkontribusi pada pengembangan kompetensi siswa;

Sumber : Dindikbud Kab. Demak, 2025, Data diolah

Adapun tingkat efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya atas Indikator Persentase Sekolah yang Terakreditasi minimal B dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3. 4
Tingkat Efektifitas dan efisiensi Indikator Persentase Sekolah yang Terakreditasi minimal B

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KINERJA			NO	PROGRAM	KEUANGAN			
				Target	Realisasi	(%)			Pagu	Realisasi	%	
1	Meningkatnya layanan pendidikan jenjang PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan Non Formal	Persentase Sekolah yang Terakreditasi minimal B	Persentase	83,50	84,14	100,77	1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	203.569.730.060	198.637.364.063	97,58	
							2	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	160.000.000	77.665.000	48,54	
							3	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	1.526.018.904	1.201.945.875	78,76	
		CAPAIAN					100,77		JUMLAH	205.255.748.964	199.916.974.938	97,40
TINGKAT <u>EFISIENSI</u> : -3,37												
TINGKAT <u>EFEKTIFITAS</u> : 103,46 %												

Sumber : Dindikbud Kab. Demak, 2025

Berdasarkan tabel di atas Sasaran Meningkatnya layanan pendidikan jenjang PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan Non Formal dengan indikator Persentase Sekolah yang Terakreditasi minimal B memiliki tingkat efisiensi sebesar -3,37 yang didapat dari selisih capaian kinerja dengan capaian realisasi anggaran (97,40-100,77) dan tingkat efektivitas sebesar 103,46 % yang didapat dari capaian kinerja dibagi capaian realisasi anggaran dikali 100, (100,77/97,40x100) hasilnya 103,457 dibulatkan menjadi 103,46 yang berarti **Sangat Efektif**.

Adapun untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Bidang Pendidikan dan Untuk mengukur pencapaian Urusan Pendidikan telah ditetapkan 3 Program Pengelolaan Pendidikan, dan 7 Kegiatan yang terdiri dari :

- 1. Program Pengelolaan Pendidikan yang terdiri dari 4 Kegiatan :
 - a. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar;
 - b. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
 - c. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - d. Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan;
- 2. Program Pengembangan Kurikulum yang terdiri dari 2 Kegiatan :
 - a. Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar;
 - b. Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
- 3. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan yang terdiri dari 1 Kegiatan :
 - a. Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan;

❖ **CAPAIAN PROGRAM PENDIDIKAN**

a. PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Untuk mengukur pencapaian Sasaran Program Pengelolaan Pendidikan, telah ditetapkan 4 Indikator Program yaitu :

- a) Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD;
- b) Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar;
- c) Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama;
- d) Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan;

Berikut capaian Program Pengelolaan Pendidikan dapat dilihat ditabel berikut ini :

Tabel 3.28. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Program Pengelolaan Pendidikan Tahun 2025 dan Tahun sebelumnya

No.	Program /Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Realisasi Tahun 2024 (%)	TAHUN 2025			Kriteria Penilaian	Target Akhir RPJMD (2026)	Capaian s.d. 2025 terhadap RPJMD (2026)
				Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								
1	Meningkatnya layanan pendidikan jenjang PAUD, pendidikan dasar, dan	1 Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	86,41	100,00	80,19	80,19	Baik	100,00	80,19
		2 Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	99,67	100,00	99,98	99,98	Tinggi	100,00	99,98

No.	Program /Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Realisasi Tahun 2024 (%)	TAHUN 2025			Kriteria Penilaian	Target Akhir RPJMD (2026)	Capaian s.d. 2025 terhadap RPJMD (2026)
				Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	pendidikan Non Formal	3 Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	99,2	100,00	98,24	98,24	Tinggi	100,00	98,24
		4 Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	16,78	100,00	18,77	18,77	Kurang	82,40	22,78
		Rata-Rata Capaian Sasaran	51,60	100,00	49,48	74,30	Baik	95,60	75,30

Sumber : Rapor Pendidikan Kab. Demak

Berdasarkan data diatas dari 4 Indikator Kinerja Program hanya ada 1 Indikator Program yang tercapai yaitu Persentase sekolah yang menerapkan muatan lokal daerah dari target 100% terealisasi 100% dengan Capaian 100%, sedangkan Indikator yang lain meskipun belum tercapai tetapi tercatat capaiannya tinggi dan kurang.

Untuk mencapai sasaran Program Pengelolaan Pendidikan ditetapkan 7 Kegiatan dengan sasaran Kegiatan, adapun secara rinci kegiatan tersebut sebagai berikut :

a) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Pendidikan Anak Usia Dini, telah ditetapkan 1 Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan yaitu Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Adapun kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dijenjang Taman Kanak-kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA) dan bentuk lain yang sederajat serta jenjang pendidikan non formal berbentuk Kelompok Bermain (KB), Tempat Penitipan Anak (TPA), Satuan Paud Sejenis (SPS) dan yang sederajat. Program ini akan dilakukan melalui pemberdayaan lembaga pendidikan baik dari aspek sarana prasarana maupun pengembangan kurikulum. Kegiatan ini dialokasikan dengan anggaran sebesar **Rp. 40.423.346.140,00** dan realisasi sebesar **Rp. 39.731.764.684,00** dengan realisasi fisik **98,29%** meliputi 15 (lima belas) Sub. Kegiatan yaitu antara lain :

- 1) Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD;
- 2) Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD;
- 3) Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD;
- 4) Pengadaan Mebel PAUD;



- 5) Penyediaan Biaya Personil Murid PAUD;
- 6) Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD;
- 7) Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD;
- 8) Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD;
- 9) Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD;
- 10) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD;
- 11) Pengelolaan Dana BOP PAUD;
- 12) Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD;
- 13) Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan;
- 14) Pembangunan Ruang Kelas Baru;
- 15) Pengadaan Perlengkapan Murid;

Adapun waktu yang kami jadwalkan adalah selama 12 bulan dan pelaksanaan realisasinya waktu yang kami butuhkan adalah selama 12 bulan.

Indikator Kinerja Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini

Salah satu indikator keberhasilan penyelenggaraan program PAUD terutama untuk usia 5-6 tahun dapat diukur dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD. Pada Tahun 2023 APK PAUD 83,25% mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020 sebesar 107,00%, masih belum tercapainya sesuai target tahun 2021 hal ini disebabkan karena masih kurangnya kesadaran orang tua untuk menyekolahkan anaknya di usia pra sekolah dasar dan akibat adanya pandemic covid-19. Pada Tahun 2023 ini pendidikan PAUD diarahkan pada pendidikan PAUD holistik integrative yang mengintegrasikan segala aspek dan nilai-nilai dalam pendidikan seperti nilai moral, etis, religius, psikologis, filosofis, dan sosial dalam kesatuan yang dilakukan secara menyeluruh antara jiwa dan badan serta aspek material dan aspek spiritual untuk memenuhi kebutuhan esensial anak. Disebut PAUD holistik integratif karena pelayanan yang diberikan dalam PAUD holistik integratif tidak hanya dalam satu bidang pendidikan saja, akan tetapi pelayanan yang mencakup kebutuhan yang berkaitan dengan kesehatan dan gizi, pola pengasuhan dan perlindungan untuk anak. Satuan PAUD yang melaksanakan pendidikan PAUD Holistik Integratif meningkat pesat pada Tahun 2023 sudah ada 1.122 menurun dibandingkan dengan tahun 2022 sebanyak 1.141 satuan Paud meningkat di bandingkan pada tahun 2021 yang sebanyak 1.134 satuan PAUD,

penurunan jumlah Pendidikan satuan paud ini disebabkan sekolah paud tutup karena sudah tidak operasional (sudah tutup).

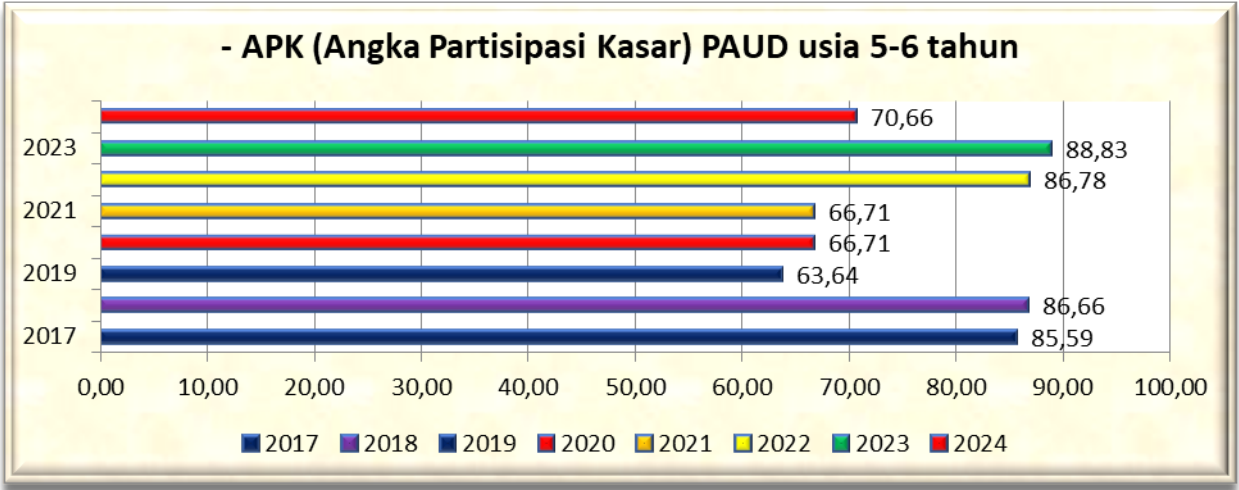
1. Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Adapun APK PAUD yang di maksud disini adalah untuk Jenjang PAUD Formal dengan definisi operasional sebagai berikut : Jumlah siswa pada satuan PAUD dibagi jumlah penduduk kelompok usia 5-6 Tahun di kali 100%. Perkembangan Capaian APK PAUD dapat dilihat pada tabel seperti dibawah ini :

Tabel 3.29. Capaian APK (Angka Partisipasi Kasar) PAUD usia 5-6 tahun

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023 (%)	TAHUN 2024			Target Akhir RPJMD (2026)	Capaian s.d. 2024 terhadap RPJMD (2026)
			Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	APK (Angka Partisipasi Kasar) PAUD usia 5-6 tahun	86,78	66,91	70,66	105,60	Sangat Tinggi	100,00

Gambar 3.6. Grafik APK PAUD usia 5-6 tahun



Tahun	2020	2021	2022	2023	2024	2025
APK PAUD usia 5-6 tahun	66,71	66,71	86,78	88,83	70,66	

Sumber : Profil Pendidikan Kab. Demak



Permasalahan masih belum tercapainya pendidikan anak usia anak dini adalah:

- 1) Masih tingginya biaya personal Murid untuk bersekolah di pendidikan anak usia dini dan masih sedikitnya TK Negeri di Kabupaten Demak, akan membatasi akses Murid terhadap pendidikan anak usia dini yang berkualitas.
- 2) Masih kurangnya kesadaran orang tua, masyarakat belum memandang penting pendidikan anak usia dini bagi anak-anak.
- 3) Belum optimalnya pendataan Daftar Anak Usia 5-6 Tahun yang Tidak Bersekolah.

Adapun solusi untuk meningkatkan APK PAUD yang di tempuh adalah :

- 1) Untuk menjawab persoalan tingginya biaya pendidikan anak usia dini, yaitu Pengadaan bantuan biaya personil Murid dari keluarga tidak mampu agar mendapat layanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan dengan **Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD)** menjadi salah satu jawabannya yang sudah teralokasi sejak tahun 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 dan 2024. 6 TK Negeri di Kabupaten Demak untuk menambah akses dan kualitas pendidikan di jenjang PAUD. Dengan meningkatkan sosialisasi dan pengetahuan kepada masyarakat tentang pentingnya pendidikan anak usia dini; dan Pemberian biaya pendidikan kepada Murid dari keluarga tidak mampu sampai lulus dengan **Program Ayo Sekolah**;
- 2) Untuk menjawab masih kurangnya kesadaran orang tua dengan Sosialisasi peningkatan kesadaran masyarakat tentang manfaat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Menerbitkan kebijakan untuk mendorong peningkatan partisipasi sekolah;
- 3) Untuk menjawab Daftar Anak Usia 5-6 Tahun yang Tidak Bersekolah yaitu dengan Pendataan anak usia dini untuk keperluan identifikasi kebutuhan daya tampung layanan untuk anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dan Pemutakhiran Dapodik minimal 2 (dua) kali dalam setahun untuk menjamin kesesuaian data dengan kondisi satuan Pendidikan;

2. Angka Partisipasi Sekolah usia 5-6 tahun

Angka Partisipasi Sekolah Jumlah anak dengan rentang usia tertentu yang sedang belajar di satuan pendidikan dibagi dengan jumlah anak dengan rentang usia tersebut pada daerah yang bersangkutan, Angka Partisipasi Sekolah (5-6) adalah Jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun yang sedang belajar di satuan pendidikan dibagi dengan jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun pada Kab/Kota yang bersangkutan.

Apa saja yang dinilai dari Angka Partisipasi Sekolah (5-6)?

Jumlah anak usia dini 5-6 tahun yang berpartisipasi di layanan pendidikan adalah 100%. Kinerja pemerintah daerah dalam mendorong akses anak usia dini 5-6 tahun yang berpartisipasi di layanan pendidikan.

Rendah artinya : Proporsi Murid usia 5-6 tahun terhadap penduduk kelompok usia 5-6 tahun di suatu wilayah kurang.

Skor capaian Angka Partisipasi Sekolah (5-6) Anda tahun ini **70,66**. Namun, perbandingan skor dengan tahun lalu tidak bisa dihitung karena Satdik di Kabupaten Demak tidak mengikuti AN tahun 2022.

Sumber data: *Rapor Pendidikan Kabupaten Demak Tahun 2024*



b) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan, telah ditetapkan 2 Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan yaitu 1) Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥ 15 tahun, dan 2) Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.

Program Pendidikan Non Formal memberi pelayanan pendidikan kepada warga masyarakat yang belum sekolah, tidak pernah sekolah atau buta aksara, putus sekolah, dan masyarakat yang kebutuhan pendidikannya tidak dapat terpenuhi melalui jalur pendidikan formal serta pendidikan *life skill*.

Program ini dialokasikan dengan anggaran sebesar **Rp. 11.425.437.840,00** dan realisasi sebesar **Rp. 10.096.035.929,00** dengan realisasi fisik **88,36%** Meliputi 14 (empat belas) Sub. kegiatan :

- 1) Pembangunan Gedung /Ruang Kelas /Ruang Guru Nonformal /Kesetaraan;
- 2) Penyediaan Biaya Personil Murid Nonformal/Kesetaraan;
- 3) Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan;
- 4) Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan;
- 5) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan;
- 6) Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan;
- 7) Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan;
- 8) Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan;
- 9) Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan;
- 10) Pengadaan Perlengkapan Murid;
- 11) Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah;
- 12) Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Murid;
- 13) Pengadaan Mebel Sekolah;
- 14) Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah;

Adapun waktu yang kami jadwalkan adalah selama 12 bulan dan pelaksanaan realisasinya waktu yang kami butuhkan adalah selama 12 bulan.



Indikator Kinerja Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal /Kesetaraan

Penyediaan layanan pendidikan non formal dan pendidikan masyarakat yang berkelanjutan, setara, bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat oleh Perangkat Daerah. Salah satu indikator keberhasilan penyelenggaraan Pendidikan NonFormal adalah penyelenggaraan AKM yang di laksanakan PKBM dan SKB yang bermutu dan berkualitas dengan menyelenggarakan Pendidikan Kesetaraan Paket A, B dan C.

Pada tahun terdapat sebanyak 24 PKBM menurun dari tahun 2023 sebanyak 28 Satuan Pendidikan PKBM menurun dibandingkan tahun 2022 yang sebanyak 29 Satuan Pendidikan PKBM karena ada 1 PKBM yang TUTUP karena sudah tidak ada proses kegiatan belajar mengajar atau sudah tidak beroperasi dan 1 SKB Negeri di Kabupaten Demak, ada sebanyak 13 PKBM yang terakreditasi dengan nilai B, sedangkan 11 PKBM belum terakreditasi atau diperbarui akreditasi berikut hasil Akreditasi Jenjang PKBM, dan SKB Negeri yang terakreditasi dengan Nilai A :

Tabel 3.30. Akreditasi Jenjang Pendidikan NonFormal (PNF)

NO.	JENJANG PENDIDIKAN	NILAI AKREDITASI					Persentase	
		TOTAL	A	B	C	Belum	Nilai Minimal B	Nilai C /Belum
	KAB. DEMAK	25	1	13	0	11	56,00	44,00
1	PKBM	24	0	13	0	11	54,17	45,83
2	SKB	1	1	0	0	0	100,00	0,00
	Jumlah	25	1	13	0	11	56,00	44,00
	%	100	4,00	52,00	0,00	44,00		

Sumber : Profil Pendidikan

Berdasarkan tabel diatas Indikator Jumlah kelembagaan PKBM yang terakreditasi ada 13 Lembaga Tahun 2024 menurun dibandingkan dengan tahun 2023 sebanyak 14, dan tahun 2022 sebanyak 14 satuan Pendidikan tetapi meningkat di bandingkan di tahun Tahun 2021 sebanyak 14 lembaga dan tahun 2020 sebanyak 7 lembaga, tahun 2019 sebanyak 5 Lembaga dan 2018 yang hanya 2 Lembaga hal ini karena belum terpasang target Akreditasi yang baik di jenjang PKBM dan SKB terakreditasi A sebanyak 1.

Adapun hasil pengukuran pencapaian sarannya sebagai berikut :

Tabel 3.31. Capaian Pengelolaan Pendidikan Nonformal /Kesetaraan

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023 (%)	TAHUN 2024			Target Akhir Renstra RPJMD (2026)	Capaian s.d. 2022 terhadap Renstra (2026)
			Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	99,21	99,71	99,50	99,79	Tinggi	100,00
2	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.	97,51	96,16	97,15	101,03	Sangat Tinggi	100,00

1. Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.

Berdasarkan Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun di Kabupaten Demak, selama 2017-2024 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Selengkapnya bisa dilihat dalam grafik berikut ini :

Gambar 3.7. Grafik % Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun



Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun	97,39	98,21	99,21	99,50	99,14

Sumber : BPS Kab. Demak

2. Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun

Berdasarkan Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun di Kabupaten Demak, selama 2017-2023 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Selengkapnya bisa dilihat dalam grafik berikut ini :

Gambar 3.8. Grafik % Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun



Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun	96,58	96,61	97,51	97,15	96,53

Sumber : BPS Kab. Demak

Permasalahan masih belum tercapainya Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun adalah :

1. Masyarakat Kabupaten Demak pada umumnya masih terbiasa dengan budaya mendengar dan bertutur. Budaya mendengar dan bertutur dialami oleh hampir semua masyarakat Demak. Baik di kota maupun desa. Keadaan ini semakin diperparah oleh datangnya budaya pandang-dengar yang merebak ke segala penjuru. Budaya ini memanjakan masyarakat. Sehingga budaya literasi, yang membutuhkan “energi” lebih, yang belum dialami secara mendalam, terabaikan begitu saja. Kenyataan ini (sepertinya) memenuhi prinsip, kalau ada yang mudah dan enak buat apa memilih yang sulit dan tak enak.
2. Masih belum optimalnya kemampuan minat baca masyarakat Demak. Perlu ada gerakan gemar membaca dari lingkup keluarga, RT, RW, desa/kelurahan, kecamatan, dan seterusnya.

Solusi untuk meningkatkan gerakan gemar membaca dari lingkup keluarga, RT, RW, desa/kelurahan, kecamatan, dan seterusnya, dengan mingkatkan Taman Baca Masyarakat (TBM) sesuai standar yang di laksanakan adalah:

Untuk menjawab persoalan lembaga yang belum sesuai standar, yaitu dengan fasilitasi Taman Baca Masyarakat di PKBM dan SKB yang dapat dialokasikan dari Anggaran **Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan** (BOP Pendidikan Kesetaraan) menjadi salah satu jawabannya yang dilaksanakan di tahun 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 dan 2024, Bantuan Sarana dan Prasarana TBM, Serta dengan memberikan sosialisasi dan pembinaan Pengelolaan Taman Baca Masyarakat (TBM) yang baik sesuai dengan standar BNSP Kemdikbud.



Untuk mengukur pencapaian Sasaran Jenjang Pendidikan Dasar, telah ditetapkan 6 Indikator Kinerja Kegiatan dengan 2 Kegiatan.

c) Kegiatan Pengelolaan Sekolah Dasar (SD)

Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar, Kegiatan ini diarahkan pada peningkatan pemerataan dan perluasan layanan sekolah dasar yang bermutu dan terjangkau, serta pendidikan untuk berkebutuhan khusus atau inklusi. Hal ini diharapkan akan meningkatkan partisipasi anak-anak yang belum pernah mendapatkan layanan pendidikan serta mempertahankan kinerja pendidikan yang telah tercapai terutama tercermin dari menurunnya angka putus sekolah dan angka mengulang kelas. Selain itu kegiatan ini juga memberikan perhatian penyediaan sarana dan prasarana pendidikan serta pengembangan kurikulum yang efektif.

Selain dari tersebut diatas, kegiatan ini diarahkan untuk menuju tercapainya program pendidikan dasar 9 tahun, yang ditempuh melalui 19 (Sembilan belas) Sub. Kegiatan dengan anggaran sebesar **Rp. 132.068.930.066,00** dan terealisasi sebesar **Rp. 130.314.294.598,00** realisasi fisik 98,67%, yang terdiri dari Sub. Kegiatan sebagai berikut :

- 1) Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
- 2) Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
- 3) Pembangunan Perpustakaan Sekolah
- 4) Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
- 5) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
- 6) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah
- 7) Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
- 8) Pengadaan Mebel Sekolah
- 9) Penyediaan Biaya Personil Murid Sekolah Dasar
- 10) Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
- 11) Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
- 12) Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
- 13) Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
- 14) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
- 15) Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
- 16) Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
- 17) Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar

- 18)Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
- 19)Pengadaan Perlengkapan Murid
- 20)Pembangunan Ruang Kelas Baru
- 21)Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
- 22)Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Murid
- 23)Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah;

Indikator Kinerja Kegiatan Pengelolaan Sekolah Dasar

Indikator keberhasilan penyelenggaraan Kegiatan Sekolah Dasar terutama untuk usia 7-12 tahun untuk Jenjang SD/MI/Sederajat dapat diukur dengan Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partispasi Murni (APM) dan Persentase SD/MI berakreditasi minimal B. Dari Tahun ke Tahun APK, APM dan Akreditasi Sekolah Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar di Kabupaten Demak mengalami kenaikan.

Perkembangan Capaian Pendidikan Sekolah Dasar dapat dilihat pada tabel dibawah :

Tabel 3.32.

Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Sasaran Kegiatan Pengelolaan Sekolah Dasar

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023 (%)	TAHUN 2024			Target Akhir Renstra (2024)	Capaian s.d. 2024 terhadap Renstra (2026)
			Target	Realisasi	Capaian		
			(%)	(%)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat.	91,08	95,53	91,08	95,34	Tinggi	95,93
2	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	74,69	108,49	99,44	91,66	Tinggi	108,89
3	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	0,00	98,33	97,14	98,79	Tinggi	100,00
	Rata-Rata Capaian Sasaran	55,26	100,78	95,89	95,27	Tinggi	101,61

Sumber : Profil Pendidikan Kab. Demak

Sedangkan untuk mencapai target sasaran program jenjang sekolah dasar telah ditetapkan alokasi anggaran yang dilaksanakan melalui Kegiatan dan Sub. Kegiatan yang sesuai dengan sasaran di atas, yaitu Kegiatan Pengelolaan Sekolah Dasar dengan jumlah 21 Sub. Kegiatan.

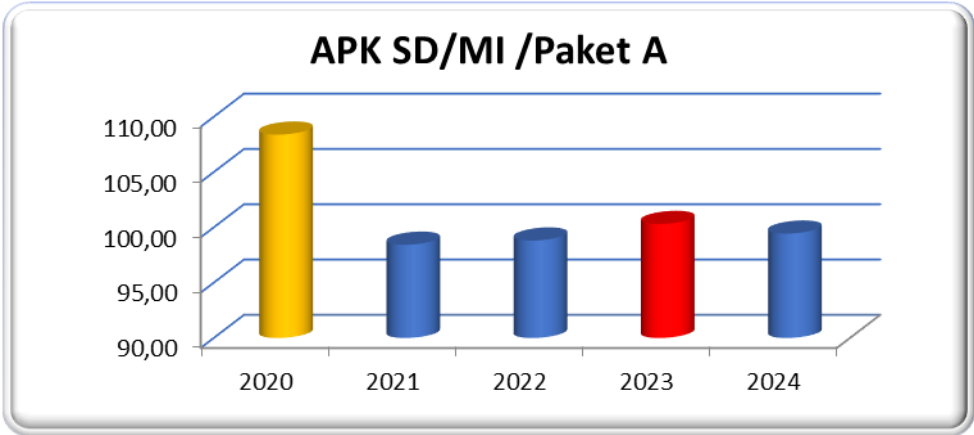
1. APK SD/ MI /Paket A

Indikator Angka Partisipasi Kasar pada SD/MI/Paket A dari tahun ke tahun mengalami peningkatan tetapi pada Tahun 2023 dari target 108,29% terealisasi sebesar 100,31% dengan capaian 92,63% meningkat tahun 2022 dari target 108,09% terealisasi sebesar 98,81% dengan capain sebesar



91,41% mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021 dari target 108,00 % terealisasi 98,43 % Menurun di bandingkan dari tahun 2020 dari target 106,50% terealisasi 108,07% menurun di bandingkan dengan Tahun 2019 sebesar 112,54 % dan tahun 2018 terealisasi 112,51%. Selanjutnya gambaran APK SD/MI/Paket A dapat di lihat di gambar berikut :

Gambar 3.9. Grafik APK SD/MI/Paket A



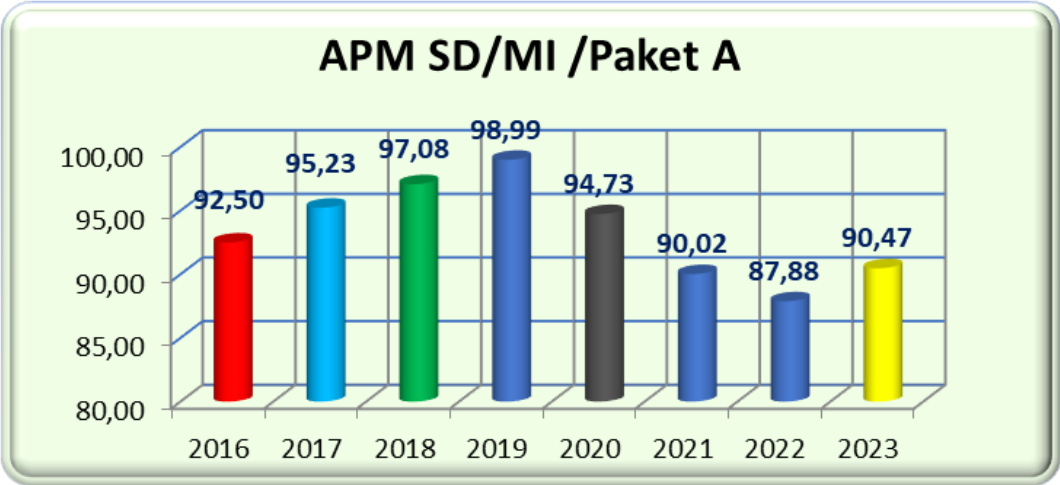
Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
APK SD/ MI /Paket A	108,39	98,43	98,81	100,31	99,44

Sumber : *Profil Pendidikan Kab. Demak*

2. APM SD/MI/Paket A

Peningkatan Indikator Angka Partisipasi Murni pada SD/MI/Paket A pada Tahun 2023 dari 95,33% terealisasi 90,47% dengan capaian 94,90% meningkat dibandingkan tahun 2022 dari target 95,13% terealisasi 87,88% dengan capaian 92,38% menurun dibandingkan dari 2021 dari target 84,00% terealisasi sebesar 90,02% dengan capaian 118,38 % lebih tinggi tahun 2018 dari target 82,00% terealisasi 97,08% dan mendapat capaian 118,38%. Berikut Gambaran capain APM SD/MI/Paket A :

Gambar 3.10. Grafik APM SD/MI /Paket A



Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
APM SD/ MI /Paket A	94,73	90,02	87,88	90,47	

Sumber : *Profil Pendidikan Kab. Demak*

APM Kabupaten Demak Tahun 2023 cukup realistis. Realisasi APM SD/MI sama dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang di tetapkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah yaitu APM SD/MI sebesar 85,42%. Namun sudah memenuhi Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang “*Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara*” yang menetapkan APM SD/MI/Paket A sekurang-kurangnya 95,00% pada akhir tahun 2008.

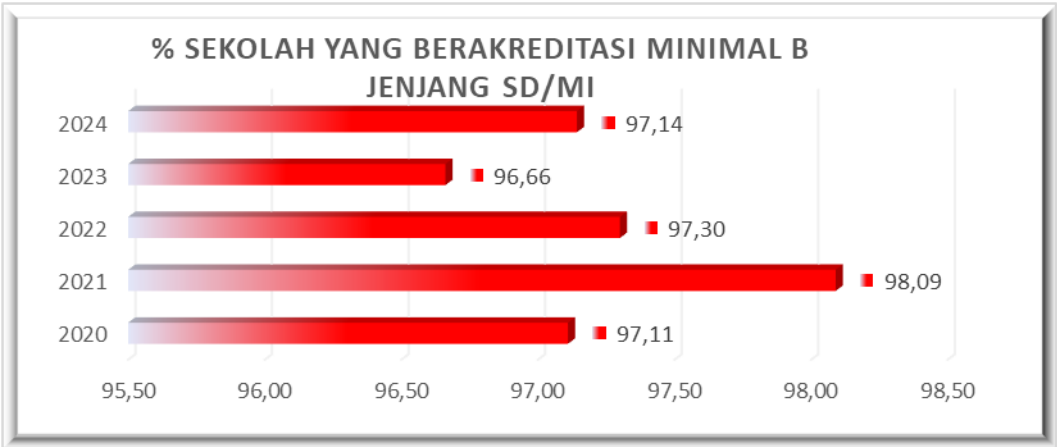
Adapun permasalahan masih belum optimalnya APM disebabkan antara lain 9,53% masukan siswa baru kelas 1 SD/MI kurang dari 7 tahun serta anak usia 12 tahun sudah memasuki SMP/MTs.

Solusi untuk mengatasi hal tersebut dengan regulasi pembatasan usia masuk sekolah saat Seleksi Penerimaan Murid Baru dengan prioritas usia masuk sekolah di utamakan sehingga Murid yang belum memasuki usia 7 Tahun dapat terlebih dahulu menyelesaikan pendidikan di jenjang sebelumnya, serta sosialisasi betapa pentingnya masuk sekolah sesuai dengan usia sekolah kepada masyarakat, karena akan mempengaruhi dampak psikologis pada anak.

3. Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.

Indikator Persentase SD/MI berakreditasi minimal B adalah untuk mengetahui sekolah sebagai kualitas mutu di sekolah, karena akreditasi sekolah sebagai salah satu indikator mutu sekolah, berikut capaian indikator sekolah pada Tahun 2023 dari Target 97,50% terealisasi sebesar 96,66% dengan capaian 99,14% menurun dibandingkan dengan tahun 2022 dari Target 96,67% terealisasi sebesar 97,30% dengan capaian 100,65%, untuk realisasi menurun dibandingkan dengan tahun 2021 dari Target 90,00% terealisasi sebesar 98,09%, penurunan realisasi di Tahun 2023, akreditasi sekolah meningkat disetiap tahunnya dari sejak tahun 2016 – 2023 berikut gambaran akreditasi sekolah :

Gambar 3.11. Grafik Persentase SD/MI berakreditasi minimal B



Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
% Sekolah yang Berakreditasi minimal B Jenjang SD/MI	97,11	98,09	97,30	96,66	97,14

Sumber : Profil Pendidikan Kabupaten Demak

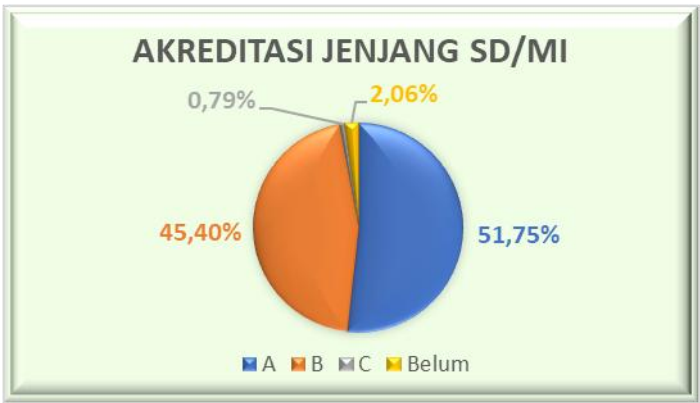
Berdasarkan data diatas secara realisasi Akreditasi sekolah Tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022 hal ini disebabkan penambahan sekolah dan madrasah baru yang belum terakreditasi, gambaran secara terperinci dapat dilihat di bawah ini :

Tabel 3.33. Akreditasi Sekolah Jenjang SD/MI Tahun 2024

NO.	JENJANG PENDIDIKAN	NILAI AKREDITASI					Persentase	
		TOTAL	A	B	C	Belum	Nilai Minimal B	Nilai C /Belum
	KAB. DEMAK	630	326	286	5	13	97,14	2,86
1	SD	488	258	225	2	3	98,98	1,02
2	MI	142	68	61	3	10	90,85	9,15
	Jumlah	630	326	286	5	13	97,14	2,86
	%	100	51,75	45,40	0,79	2,06		

Sumber : Profil Pendidikan Kabupaten Demak

Selanjutnya gambaran Akreditasi Jenjang SD/MI dapat di lihat di gambar berikut :



Gambar 3.12. Grafik Akreditasi Jenjang SD/MI

d) Kegiatan Pengelolaan Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Kegiatan ini diarahkan pada peningkatan pemerataan dan perluasan layanan sekolah menengah pertama yang bermutu dan terjangkau, serta pendidikan untuk berkebutuhan khusus atau inklusi. Hal ini diharapkan akan meningkatkan partisipasi anak-anak yang belum pernah mendapatkan layanan pendidikan serta mempertahankan kinerja pendidikan yang telah tercapai terutama tercermin dari menurunnya angka putus sekolah dan angka mengulang kelas. Selain itu kegiatan ini juga memberikan perhatian penyediaan sarana dan prasarana pendidikan serta pengembangan kurikulum yang efektif.

Selain dari tersebut diatas, kegiatan ini diarahkan untuk menuju tercapainya program pendidikan dasar 9 tahun, yang ditempuh melalui 16 (enam belas) Sub. Kegiatan dengan anggaran sebesar **Rp. 57.450.476.900,00** dan terealisasi sebesar **Rp. 55.882.477.229,00** realisasi fisik **97,27%**, yang terdiri dari 24 Sub. Kegiatan sebagai berikut :

- 1) Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
- 2) Pembangunan Perpustakaan Sekolah
- 3) Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
- 4) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
- 5) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah
- 6) Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
- 7) Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium
- 8) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula
- 9) Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah
- 10) Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
- 11) Pengadaan Mebel Sekolah
- 12) Penyediaan Biaya Personil Murid Sekolah Menengah Pertama
- 13) Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
- 14) Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
- 15) Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
- 16) Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
- 17) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
- 18) Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
- 19) Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama

- 20)Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
- 21)Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Murid
- 22)Pembangunan Ruang Kelas Baru
- 23)Pengadaan Perlengkapan Murid
- 24)Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU.

Indikator Kinerja Kegiatan Pengelolaan Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Indikator keberhasilan penyelenggaraan Kegiatan Sekolah Dasar terutama untuk usia 13-15 tahun untuk Jenjang SD/MI/Sederajat dapat diukur dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partispasi Murni (APM), dan Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B. Dari Tahun ke Tahun APK, APM dan Akreditasi Sekolah Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Demak mengalami kenaikan. Perkembangan Capaian Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dapat dilihat pada tabel dibawah :

Tabel 3.34.

Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Sasaran Kegiatan Pengelolaan Sekolah Menengah Pertama

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023 (%)	TAHUN 2024			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s.d. 2024 terhadap Renstra (2026)
			Target	Realisasi	Capaian		
			(%)	(%)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat.	76,19	97,01	74,69	76,99	Baik	97,11
2	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.	103,22	103,18	104,28	101,07	Sangat Tinggi	108,58
3	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	87,39	98,33	86,88	88,35	Tinggi	100,00
	Rata-Rata Capaian Sasaran	88,93	99,51	88,62	88,80	Tinggi	101,90

Sumber : Profil Pendidikan Kab. Demak

Sedangkan untuk mencapai target sasaran program jenjang Sekolah Menengah Pertama telah ditetapkan alokasi anggaran yang dilaksanakan melalui Kegiatan dan Sub. Kegiatan yang sesuai dengan sasaran di atas, yaitu Kegiatan Pengelolaan Sekolah Menengah Pertama dengan jumlah 24 Sub. Kegiatan.

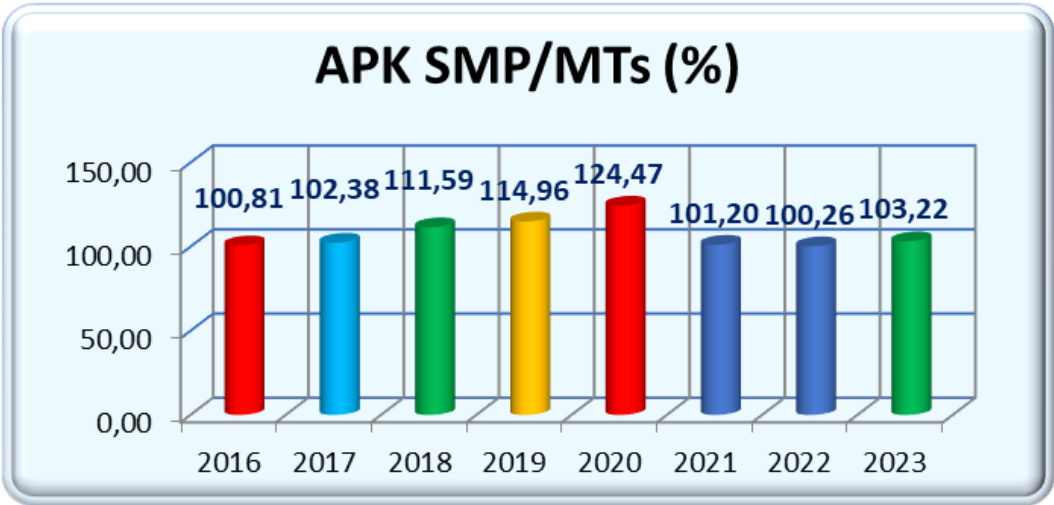
1. APK SMP/ MTs/Paket B

Indikator Angka Partisipasi Kasar pada SMP/MTs/Paket B dari tahun ke tahun mengalami peningkatan pada Tahun 2023 dari target 102,98%



teralisasi 103,22% dengan capaian 100,23% meningkat dibandingkan tahun 2022 dari target 102,78% terealisasi 100,26% dengan capaian 97,55% menurun dibandingkan dengan tahun 2021 dari target 99,00% terealisasi 101,20%, menurun di bandingkan pada tahun 2020 target 96,00% terealisasi 114,96% dari tahun 2016 sampai dengan 2021 APK Jenjang SMP/MTs/Paket B naik dan turun. Selanjutnya gambaran APK SMP/MTs/Paket B dapat di lihat di gambar berikut :

Gambar 3.13. Grafik APK SMP/MTs/Paket B



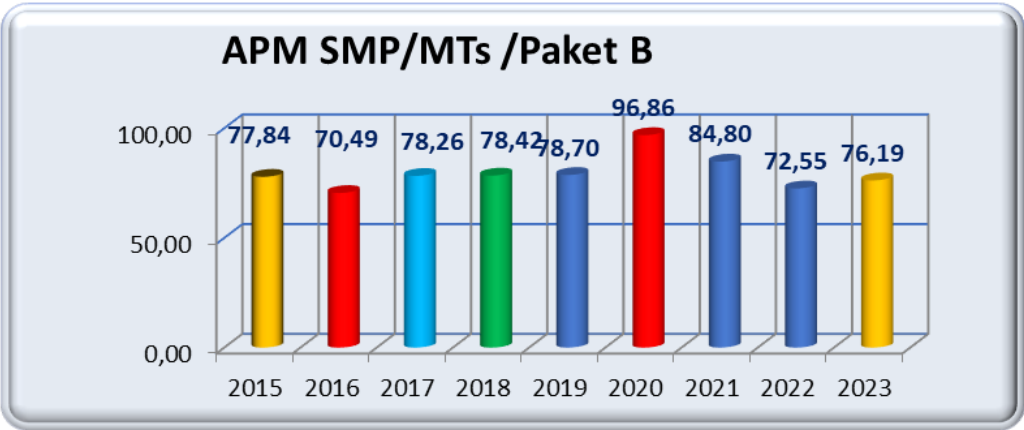
Tahun	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
APK SMP/ MTs /Paket B	102,38	109,41	114,96	124,47	101,20	100,26	103,22	

Sumber : Profil Pendidikan Kab. Demak

2. APM SMP/MTs/Paket B

Peningkatan Indikator Angka Partisipasi Murni pada SMP/MTs/Paket B pada Tahun 2023 dari targer 96,96% terealisasi 76,19% dengan capaian sebesar 78,58% meningkat dibandikan tahun 2022 dari target 96,91% terealisasi 72,55% tercapai 74,86%, menurun dibandingkan tahun 2021 terealisasi 84,80% dari target 84,00% dengan capaian 100,95% menurun di bandingkan dari tahun 2020 terealisasi 95,39% dengan capaian 126,70% dan tahun 2019 terealisasi 78,70% dengan capaian 95,97% dan tahun 2018 dari target 81,00 terealisasi 78,42% mendapat capaian 96.34% dan masih rendah dibandingkan capaian tahun 2016 sebesar 103.71%. Berikut Gambaran capain APM SMP/MTs/Paket B, Berikut grafik APM SMP/MTs/Paket B selama 5 tahun terakhir dari tahun 2016 -2022 :

Gambar 3.14. Grafik APM SMP/MTs /Paket B



Tahun	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
APM SMP/ MTs /Paket B	78,26	78,42	78,70	96,86	84,80	72,55	76,19	

Sumber : *Profil Pendidikan Kab. Demak*

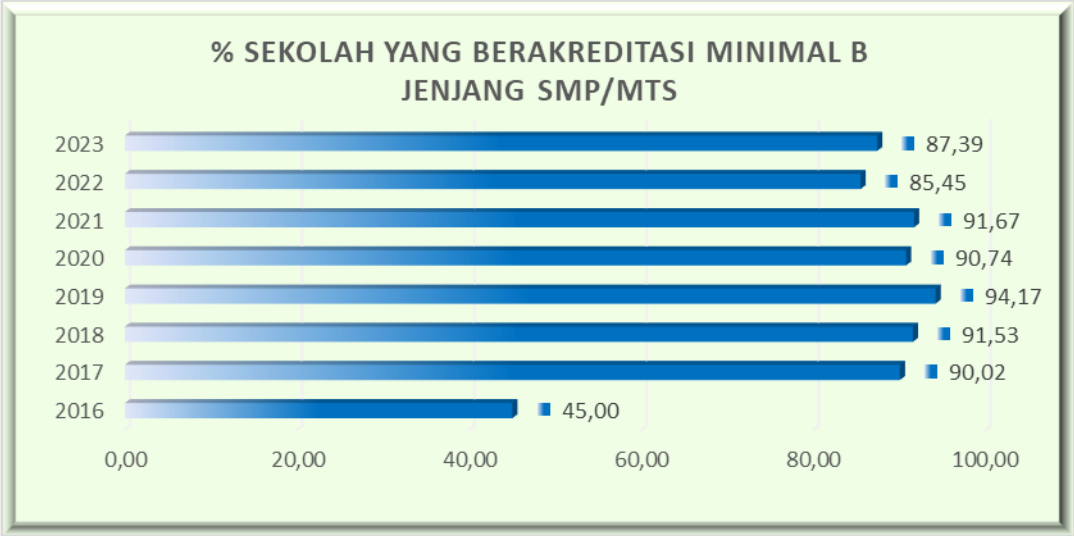
Adapun permasalahan masih belum optimalnya APM SMP/MTs/Paket B disebabkan antara lain 23,81 % masukan siswa baru kelas 7 SMP/MTs kurang dari 13 tahun serta anak usia 15 tahun sudah memasuki SMA/MA/SMK.

Solusi untuk mengatasi hal tersebut dengan Seleksi Penerimaan Murid Baru secara online yang mengacu dari permendikbud tentang PPDB di Jenjang Sekolah Menengah Pertama serta sosialisasi betapa pentingnya masuk sekolah sesuai dengan usia sekolah kepada masyarakat, karena akan mempengaruhi dampak psikologis pada anak.

3. Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B

Indikator % Sekolah yang Berakreditasi minimal B Jenjang SMP/MTs karena akreditasi sekolah sebagai salah satu indikator mutu sekolah, berikut capaian indikator sekolah pada Tahun 2023 dari target 97,50% terealisasi sebesar 87,39% dengan capaian 89,63% meningkat dibandingkan dengan tahun 2022 dari target 96,67% terealisasi sebesar 85,45% dengan capaian 88,40% menurun dibandingkan dengan tahun 2021 dari Target 95,00% terealisasi 98,13% meningkat dari tahun 2020 yang terealisasi sebesar 90,74% meningkat disetiap tahunnya dari sejak tahun 2016–2023 berikut gambaran akreditasi sekolah :

Gambar 3.15. Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B



Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
% Sekolah yang Berakreditasi minimal B Jenjang SMP/MTs	90,74	91,67	85,45	87,39	86,88

Sumber : Profil Pendidikan Kab. Demak

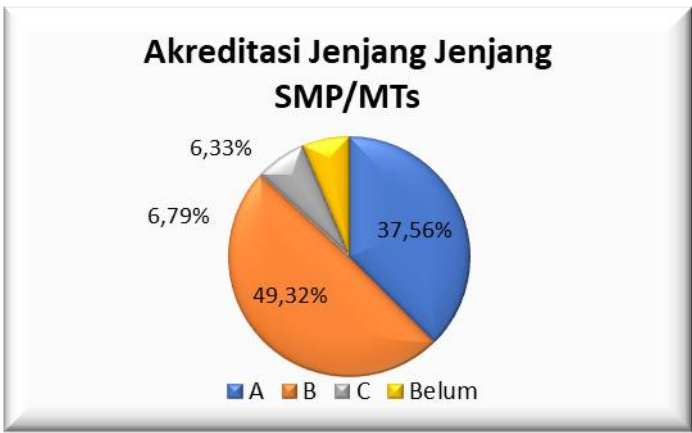
Berdasarkan data diatas secara realisasi Akreditasi sekolah Tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022 hal ini disebabkan penambahan sekolah dan madrasah baru yang belum terakreditasi, gambaran secara terperinci dapat dilihat di bawah ini :

Tabel 3.35. Akreditasi Sekolah Jenjang SMP/MTs Tahun 2024

NO.	JENJANG PENDIDIKAN	NILAI AKREDITASI					Persentase	
		TOTAL	A	B	C	Belum	Nilai Minimal B	Nilai C /Belum
	KAB. DEMAK	221	83	109	15	14	86,88	13,12
1	SMP	87	36	36	6	9	82,76	17,24
2	MTs	134	47	73	9	5	89,55	10,45
	Jumlah	221	83	109	15	14	86,88	13,12
	%	100	37,56	49,32	6,79	6,33		

Sumber : Profil Pendidikan Kabupaten Demak

Selanjutnya gambaran Akreditasi Jenjang SMP/MTs dapat di lihat di gambar berikut :



Gambar 3.16. Grafik Akreditasi Jenjang SMP/MTs



Untuk mengukur pencapaian Sasaran Mutu Pendidikan dan Tenaga Pendidikan, telah ditetapkan 1 Indikator Kinerja dan 1 Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan dengan 1 Kegiatan;

b. PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM

Untuk mengukur pencapaian Sasaran Program Pengembangan Kurikulum, telah ditetapkan 1 Indikator Program yaitu :

- a) Persentase sekolah yang menerapkan muatan lokal daerah (Dengan Satuan:%)

Berikut capaian Program Pengelolaan Pendidikan dapat dilihat ditabel berikut ini :

N o.	Program /Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Realisasi Tahun 2024 (%)	TAHUN 2025			Kriteria Penilaian	Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s.d. 2022 terhadap Renstra (2026)
				Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM								
1	Meningkatnya sekolah yang menerapkan muatan lokal daerah.	1 Persentase sekolah yang menerapkan muatan lokal daerah	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00
		Rata-Rata Capaian Sasaran	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00

Sumber : dindikbud olah 2025

Dari capaian diatas dapat menunjukkan semua sekolah di Kabupaten Demak sudah menggunakan Kurikulum Lokal Daerah.

c. PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Untuk mengukur pencapaian Sasaran Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan, telah ditetapkan 1 Indikator Program yaitu :

- b) Persentase guru TK, SD, SMP yang bersertifikat pendidik;

Berikut capaian Program Pengelolaan Pendidikan dapat dilihat ditabel berikut ini :

Tabel 3.36. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Tahun 2025 dan Tahun sebelumnya

N o.	Program /Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Realisasi Tahun 2024 (%)	TAHUN 2025			Kriteria Penilaian	Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s.d. 2025 terhadap Renstra (2026)
				Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN								



N o.	Program /Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Realisasi Tahun 2024 (%)	TAHUN 2025			Kriteria Penilaian	Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s.d. 2025 terhadap Renstra (2026)
				Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya tenaga pendidik yang tersertifikasi	1 Persentase tenaga pendidik yang tersertifikasi	63,02	51,12	71,36	139,59	Sangat Tinggi	51,62	138,24
		Rata-Rata Capaian Sasaran	63,02	51,12	71,36	139,59	Sangat Tinggi	51,62	138,24

Sumber : dindikbud olah 2025

a) Kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan;

Kegiatan ini diarahkan pada mengembangkan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dalam rangka peningkatan potensi diri, pengetahuan dan keterampilan.

Kegiatan ini dialokasikan dengan anggaran sebesar **Rp. 858.958.568,00** dan realisasi sebesar **Rp. 832.039.200,00** dengan realisasi fisik **96,87%** meliputi 2 (dua) Sub. Kegiatan :

1. Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan; dan
2. Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan;

Adapun waktu yang kami jadwalkan adalah selama 12 bulan dan pelaksanaan realisasinya waktu yang kami butuhkan adalah selama 12 bulan.

Adapun jumlah persentase kualitas dan rasio guru dipengaruhi oleh 4 (empat) faktor, yakni: (i) usia pensiun pegawai; (ii) perpindahan pegawai; dan (iii) kematian pegawai (iv) Kuota sertifikasi Guru dari kemdikbud.

Indikator Kinerja Persentase guru TK, SD, SMP yang bersertifikat pendidik

Jumlah guru TK, SD, SMP yang bersertifikat pendidik dibagi jumlah total guru TK, SD, SMP dikali 100%.

Sertifikat pendidik adalah sebuah sertifikat yang ditandatangani oleh perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi sebagai bukti formal pengakuan profesionalitas guru yang diberikan kepada guru sebagai

tenaga profesional, guru tersertifikasi di Kabupaten Demak perjenjang dapat di lihat di tabel berikut ini :

Tabel 3.37. Guru Kualifikasi Sertifikasi Tahun 2024

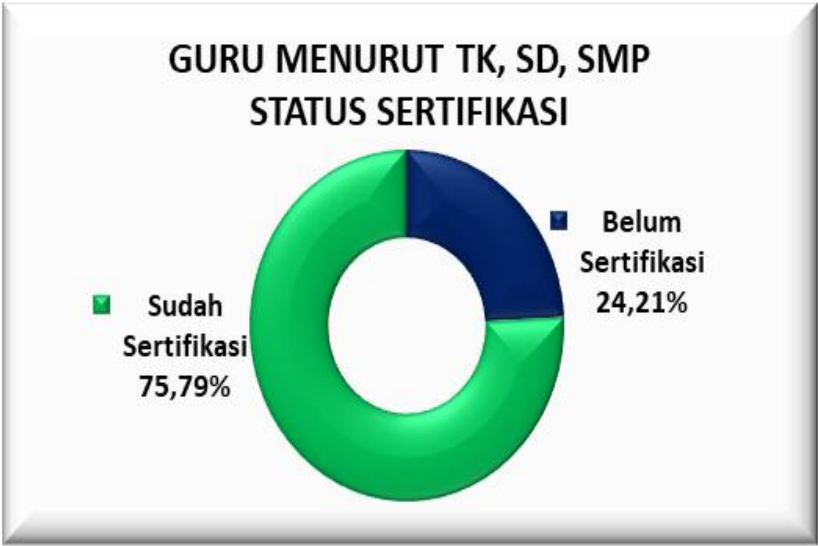
NO.	JENJANG PENDIDIKAN	GURU STATUS SERTIFIKASI			Persentase	
		TOTAL	Belum Sertifikasi	Sudah Sertifikasi	Belum Sertifikasi	Sudah Sertifikasi
	KAB. DEMAK	7.640	1.850	5.790	24,21	75,79
1	TK	1.470	579	891	39,39	60,61
2	SD	4.649	830	3.819	17,85	82,15
3	SMP	1.521	441	1.080	28,99	71,01
	Jumlah	7.640	1.850	5.790	24,21	75,79
	%	100	24,21	75,79		

Sumber : *Profil Pendidikan Kab. Demak*

Berdasarkan data diatas Persentase guru TK, SD, SMP yang bersertifikat pendidik pada tahun 2024 sebanyak 75,79% meningkat dibandingkan tahun 2023 sebanyak 56,85% dan yang belum sertifikasi sebanyak 43,15%, meningkat dibandingkan dengan tahun 2022 sebanyak 49,28% dan yang belum sebanyak 50,72%, masih banyaknya Guru yang belum dapat mengikuti sertifikasi di sebabkan kebijakan pemerintah, guru yang dapat mengikuti sertifikasi adalah Guru Tetap, untuk sekolah Negeri adalah PNS, sedangkan di Sekolah Swasta GTY.



Selanjutnya gambaran Persentase guru TK, SD, SMP yang bersertifikat pendidik dapat di lihat di gambar berikut :



Gambar 3.17. Grafik Persentase guru TK, SD, SMP yang bersertifikat pendidik



Analisis Capaian IKU dan Solusi Bidang Pendidikan Faktor Kegagalan dan Keberhasilan Capaian

Tidak tercapainya target indikator-indikator kinerja sebagaimana yang diharapkan tersebut disebabkan oleh adanya :

1. Pendidikan bermutu itu mahal perlu biaya yang tinggi. Kalimat ini sering muncul untuk menjustifikasi mahal biaya yang harus dikeluarkan masyarakat untuk mengenyam bangku pendidikan. Mahalnya biaya pendidikan dari Taman Kanak-Kanak (TK) hingga Perguruan Tinggi (PT) membuat masyarakat miskin tidak memiliki pilihan lain kecuali tidak bersekolah. Orang miskin tidak boleh sekolah;
2. Belum tercapainya APM SD/MI dan SMP/MTs hal ini disebabkan masih adanya Siswa baru Kelas 1 SD/MI kurang dari 7 tahun serta anak usia 12 tahun sudah memasuki SMP/MTS, dan anak usia kurang dari 13 tahun sudah masuk jenjang SMP/MTs serta anak usia 15 sudah memasuki jenjang sekolah menengah.
3. Masih banyaknya usia sekolah jenjang SMP/MTs yang melanjutkan keluar daerah Hal ini dapat ditinjau geografis Kabupaten Demak berada di daerah *cross-boundary* yang diapit Kabupaten Kudus dan Kota Semarang, yang dianggap pendidikannya lebih maju dari pada Kabupaten Demak, Adanya siswa membantu pekerjaan orang tua, mengikuti orang tua pindah keluar daerah, serta transportasi pendidikan ke jenjang SMP/MTs yang relatif masih tinggi bagi sebagian orang tua kurang mampu;
4. Masih adanya guru yang belum berkualifikasi minimal S1/D.IV, terutama di Jenjang TK dan SD sebagian belum berijazah Sarjana.

Sementara itu faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan indikator kinerja adalah :

1. Meningkatnya perhatian terhadap keberadaan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Direktorat Jendral PAUD dan DIKMAS. Adanya Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) dan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di jenjang PAUD terutama Jenjang TK;
2. Meningkatnya perhatian terhadap keberadaan Satuan Pendidikan NonFormal (PNF) dari Direktorat Jendral PAUD DAN DIKMAS. Adanya Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (BOP Pendidikan Kesetaraan) dan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mengikuti program paket A, B dan C bagi siswa yang tidak melanjutkan di



pendidikan formal, siswa yang putus sekolah atau karena berusia melebihi usia sekolah;

3. Adanya Wajib Belajar pendidikan dua belas tahun (12 tahun) yang mewajibkan semua penduduk usia sekolah untuk menempuh pendidikan dasar, dikmen yang didukung adanya dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah), Bantuan Siswa Miskin Daerah (BASIMDA) bagi Siswa Miskin, Beasiswa Ayo Sekolah kembali dan beasiswa transisi untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.
4. Adanya program sertifikasi guru yang mensyaratkan pendidikan minimal S1/D.IV bagi guru untuk dapat mengikuti program tersebut.

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja, upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan pendidikan anak usia dini baik kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran;
2. Penambahan ruang kelas sekolah dan rehab bagi ruang kelas sekolah yang rusak sedang /berat;
3. Penambahan ruang bermain yang ramah anak untuk meningkatkan angka partisipasi pendidikan anak usia dini;
4. Pengadaan buku, alat tulis siswa, alat praktek;
5. Pembentukan forum masyarakat peduli pendidikan;
6. Pembinaan bakat, minat dan kreatifitas siswa;
7. Mengoptimalkan program wajib belajar 12 tahun;
8. Meningkatkan kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan dengan melaksanakan PPPK berdasarkan kebutuhan sekolah;
9. Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan gedung yang representative;
10. Sosialisasi dan publikasi minat dan budaya baca pada masyarakat;
11. Peningkatan budaya Literasi untuk meningkatkan minat baca masyarakat;
12. Peningkatan sarana dan prasana perpustakaan untuk meningkatkan kunjungan Murid ke perpustakaan.



❖ URUSAN KEBUDAYAAN

MISI 3 : “Mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal, membuka lapangan kerja, mengurangi kemiskinan dan pengangguran”.

TUJUAN 4 : “Meningkatkan pelestarian Warisan Budaya”

Untuk mengukur pencapaian Tujuan 4, telah ditetapkan 1 Sasaran Strategis dan 1 Indikator Kinerja. Adapun hasil pengukuran pencapaian sasaranannya sebagai berikut :

Indikator Tujuan :

1. Persentase Peningkatan pelestarian warisan budaya;

Sasaran 4 : Meningkatnya pelestarian Warisan Budaya;

Untuk mengukur pencapaian Sasaran 4, telah ditetapkan 1 Sasaran Strategis dan 1 Indikator Kinerja. Adapun hasil pengukuran pencapaian sasaranannya sebagai berikut :

Indikator Sasaran :

1. Persentase Peningkatan pelestarian warisan budaya;

Untuk mengukur pencapaian Sasaran 4 bidang Kebudayaan, telah ditetapkan 1 Indikator Kinerja, dan 3 Program :

d. PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN

Program ini terdiri 1 kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota dialokasikan dengan anggaran sebesar **Rp. 1.160.000.000,00** dan realisasi sebesar Rp. **1.143.683.900,00** dengan realisasi fisik **98,59%** dan meliputi 2 Kegiatan :

- 1) Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota; yang terdiri 2 Sub. Kegiatan yaitu :
 - a) Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan;
 - b) Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan;
- 2) Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota, yang terdiri dari 1 Sub. Kegiatan yaitu :
 - a) Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya;

Adapun waktu yang kami jadwalkan adalah selama 12 bulan dan pelaksanaan realisasinya waktu yang kami butuhkan adalah selama 12 bulan.

Indikator Kinerja Utama

Selama tahun 2024, sasaran strategis urusan wajib kebudayaan adalah terwujudnya pelestarian dan pengembangan warisan budaya lokal dengan indikator sasaran adalah jumlah seni budaya dan tradisi yang dilestarikan.

e. PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA

Program ini dialokasikan dengan anggaran sebesar **Rp. 200.000.000 ,00** dan realisasi sebesar Rp. **198.117.195,00** dengan realisasi fisik **99,06%** dan meliputi 2 (dua) kegiatan :

- 1) Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota; yang terdiri dari 1 sub. Kegiatan yaitu :
 - a) Penetapan Cagar Budaya
- 2) Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota; yang terdiri dari 2 sub. Kegiatan yaitu :
 - a) Pelindungan Cagar Budaya;
 - b) Pemanfaatan Cagar Budaya;

b. PROGRAM PENGELOLAAN MUSEUM KABUPATEN/KOTA

Program ini dialokasikan dengan anggaran sebesar **Rp. 865.000.000 ,00** dan realisasi sebesar Rp. **644.031.527,00** dengan realisasi fisik **74,45%** dan 1 kegiatan Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota yang meliputi 4 (empat) Sub. Kegiatan :

- a) Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi secara Terpadu
- b) Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman
- c) Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum
- d) Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum;

a. Indikator Kinerja Utama

Selama tahun 2024, sasaran strategis urusan wajib kebudayaan adalah terwujudnya pelestarian dan pengembangan warisan budaya lokal dengan indikator sasaran adalah Meningkatnya fasilitasi pengembangan kualitas sarana prasarana budaya dan kesenian tradisional dan kontemporer, Meningkatnya Fasilitasi Pengelolaan, Pengembangan, dan Pengenalan Warisan Budaya Daerah.

Indikator Keberhasilan Kegiatan Bidang Kebudayaan dapat di lihat dari capaian indikator IKU sebagai berikut :

Tabel 3.38.

Persentase Peningkatan Pelestarian Warisan Budaya

No.	Indikator Kinerja	Realisasi	TAHUN 2024			Target Akhir RPJMD (2023)	Capaian s.d. 2023 terhadap RPJMD (2026)
		Tahun 2023	Target	Realisasi	Capaian		
		(%)	(%)	(%)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase Peningkatan pelestarian warisan budaya	3,48	4,48	4,48	100,00	Sangat Tinggi	6,47

5. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak sebagai Organisasi Perangkat Daerah dituntut untuk terus meningkatkan kinerja terutama kinerja Meningkatkan Mutu Pendidikan dalam Meningkatkan Mutu Pelayanan Pendidikan setiap tahunnya. Peningkatan Mutu Pelayanan Pendidikan akan sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan Pendidikan di Kabupaten Demak. Sehingga sangat diperlukan analisis untuk pemenuhan dan penggunaan sumber daya. Pemenuhan dan penggunaan sumber daya tentu sangat berkaitan erat dengan Sumber Dana (Anggaran). Dalam setiap pelaksanaan kegiatan penunjang kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak melakukan beberapa analisis dan efisiensi dalam pemenuhan dan penggunaan sumber daya maupun sumber dana. Untuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya manusia, Secara Umum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak langsung memberi tanggungjawab kinerja kepada Bidang /bagian yang berhubungan dengan target kinerjanya dan setiap pegawai melaksanakan kinerja sesuai tupoksi masing-masing.dimana setiap Pegawai di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak membuat Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) di awal Tahun dan Membuat Laporan Kinerja. Sedangkan untuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber dana (Anggaran), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak melaksanakan setiap kinerja dengan menyesuaikan kebutuhan kegiatan dan alokasi anggaran dengan prinsip efektif dan efesien. Prinsip efektif terlihat dari pencapaian target kinerja (*output* dan *outcome*) yang hampir tercapai keseluruhan. Prinsip efesien terlihat dari adanya penghematan anggaran atas setiap kinerja yang dilakukan tanpa mengurangi output atau outcome yang dihasilkan.



Penggunaan Sumber Dana tidak terlepas dari pemenuhan sumber dana. Dinas Pendidikan Kabupaten Demak terus berinovasi untuk dalam rangka pemenuhan penggunaan sumber dana secara efisien dan efektif.



Tabel 3.39.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Berdasarkan hasil analisis efisiensi diperoleh hasil bahwa sasaran dengan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya terbesar adalah sasaran Meningkatkan pelayanan publik.

No.	Tujuan /Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (2025) (%)	Tingkat Efiseinesi (%)
1	2	3	4	5	6
A	URUSAN SEMUA OPD				
1	Meningkatkan pelayanan publik Dindikbud	1 Indeks Kepuasan Masyarakat	102,76	94,90	7,86
1.1	Meningkatnya kinerja pelayanan publik	2 Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	100,00	94,90	5,10
2	Meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur	1 Nilai SAKIP Dindikbud	81,80	94,90	-13,10
2.1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja aparatur	2 Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target	95,59	94,90	0,69
B	URUSAN PENDIDIKAN				0
3	Meningkatkan partisipasi pendidikan pada jenjang PAUD, Pendidikan dasar, dan pendidikan non formal.	1 Harapan Lama Sekolah;	95,50	97,40	-1,90
		2 Rata-rata lama sekolah	98,69	97,40	1,29
3.1	Meningkatnya layanan pendidikan jenjang PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan Non Formal	1 Persentase Sekolah yang Terakreditasi minimal B	100,77	97,40	3,37
C	URUSAN KEBUDAYAAN				
4	Meningkatkan pelestarian Warisan Budaya	1 Persentase Peningkatan pelestarian warisan budaya	100,00	98,12	1,88
4.1	Meningkatnya pelestarian Warisan Budaya	2 Persentase Peningkatan pelestarian warisan budaya	100,00	97,99	2,01



7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab. Demak Tahun 2024 adalah Meningkatkan kualitas Pendidikan dan kesehatan sesuai standar serta perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan, Kabupaten Demak yang lebih Sejahtera dan Berbudaya. Prioritas Daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak adalah :

Peningkatan Kualitas Pendidikan, yang difokuskan pada:

- 1) Peningkatan Kapasitas Tenaga Kependidikan;
- 2) Ajang/lomba kreativitas guru dan siswa;
- 3) Beasiswa miskin;

Adapun Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada Urusan Wajib pendidikan pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Pendidikan, program ini diarahkan pada Kegiatan :
 - a) Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), kegiatan ini diarahkan untuk memberikan kesempatan yang sama kepada semua anak usia dini (0-6 Tahun) umumnya dan khususnya anak usia dini (5-6 Tahun) untuk tumbuh dan berkembang optimal sesuai dengan potensi dan tahap perkembangan usianya;
 - b) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar (SD), kegiatan ini diarahkan pada peningkatan pemerataan dan perluasan layanan pendidikan sekolah dasar yang bermutu dan terjangkau, serta pendidikan untuk berkebutuhan khusus atau inklusi yang meliputi SD/Sederajat untuk mewujudkan wajib belajar pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun;
 - c) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), kegiatan ini diarahkan pada peningkatan pemerataan dan perluasan layanan pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang bermutu dan terjangkau, serta pendidikan untuk berkebutuhan khusus atau inklusi yang meliputi SMP/Sederajat untuk mewujudkan wajib belajar pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun;
 - d) Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (PNF), Kegiatan ini diarahkan pada pelayanan pendidikan kepada warga masyarakat yang belum sekolah, tidak pernah sekolah atau buta aksara, putus sekolah, dan masyarakat yang kebutuhan pendidikannya tidak dapat terpenuhi melalui jalur pendidikan formal serta pendidikan life skill;

2. Program Pengembangan Kurikulum, program ini diarahkan pada kegiatan:
 - a) Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar; dan
 - b) Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
3. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan, program ini diarahkan pada kegiatan a) Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan;

Dalam mewujudkan kinerja organisasi yang sesuai dengan target sasaran, maka diperlukan strategi penanganan dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang muncul, serta perumusan strategi dalam sebuah program dan kegiatan dalam rangka menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Tahun 2025 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memiliki 2 (dua) urusan yaitu : Urusan Pendidikan dan Kebudayaan.

a. URUSAN SETIAP PERANGKAT

Pagu anggaran untuk setiap urusan perangkat daerah untuk mendukung kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam DIPA tahun 2025 yang digunakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis urusan pendidikan dan kebudayaan sebagaimana ditetapkan dalam penetapan **Rp 625.596.609.871,00** dari pagu anggaran tersebut untuk mencapai target yang ditetapkan terserap sebesar **Rp. 593.670.462.490,00** sehingga persentase daya serap anggaran Tahun 2025 adalah sebesar **94,90%**, sebanyak 1 Program yang capaian Program dan Kegiatan Urusan Pendidikan di Tahun 2025, Program ini memiliki 2 indikator kinerja sebagai berikut : 1) Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Dindikbud yang ditindaklanjuti dengan target 100% terealisasi 100% atau mencapai 100%; dan 2) Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan dengan target 100% terealisasi 100% atau mencapai 100% :

1) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA ;

Program ini diarahkan untuk menciptakan kelancaran operasional perkantoran bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak juga bantuan untuk UPTD Dinas Dikbud dan Koordinator Wilayah Dindikbud Kecamatan se-Kabupaten Demak, serta GTT/PTT TK/SD/SMP Negeri dan Swasta se-Kabupaten Demak melalui 8 (delapan) kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar 542.239.193.237,00. dari pagu anggaran tersebut untuk

mencapai target yang ditetapkan terserap sebesar Rp. 497.511.683.155,00 sehingga persentase daya serap anggaran Tahun 2025 adalah sebesar 91,75% meliputi 8 kegiatan dan 29 Sub. Kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terdiri Sub. Kegiatan :
 - a) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD; dan
 - b) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terdiri Sub. Kegiatan :
 - a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN; dan
 - c) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah terdiri Sub. Kegiatan :
 - a) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD; dan
 - b) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD;
4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah terdiri Sub. Kegiatan :
 - a) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi; dan
 - b) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan;
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah terdiri dari Sub. Kegiatan :
 - a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - c) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - d) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - e) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
 - f) Fasilitas Kunjungan Tamu;
 - g) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; dan
 - h) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD;
6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdiri dari Sub. Kegiatan :

- a) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - b) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya; dan
 - c) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari Sub. Kegiatan :
- a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - c) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari Sub. Kegiatan :
- a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - b) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - c) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - d) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
 - e) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya; dan
 - f) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;

Adapun waktu yang kami jadwalkan adalah selama 12 bulan dan pelaksanaan realisasinya waktu yang kami butuhkan adalah selama 12 bulan.



b. URUSAN PENDIDIKAN

Pagu anggaran untuk setiap urusan perangkat daerah untuk mendukung kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam DIPA tahun 2025 yang digunakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis urusan pendidikan dan kebudayaan sebagaimana ditetapkan dalam penetapan **Rp 205.255.748.964** dari pagu anggaran tersebut untuk mencapai target yang ditetapkan terserap sebesar **Rp. 199.916.974.938,00** sehingga persentase daya serap anggaran tahun 2025 adalah 97,40% menurun dibandingkan dengan 2024 adalah sebesar **97,73%**, pada tahun 2023 sebanyak 3 Program lebih banyak daripada tahun 2022 sebanyak 2 program, Adapun capaian Program dan Kegiatan Urusan Pendidikan di Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1) PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Alokasi anggaran Rp 203.569.730.060,00 dengan realisasi pelaksanaan program sebesar Rp. 198.637.364.063,00 atau mencapai 97,58%. Program ini memiliki 4 indikator kinerja sebagai berikut : 1) Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dengan target 100% terealisasi 99,53% 2) Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD dengan target 100% terealisasi 82,86%; 3) Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama dengan target 100% terealisasi 95,71%; 4) Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan dengan target 100% terealisasi 14,32%.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2025

- APS 5-6 (PAUD) : 82,86
- APS 7-12 (SD) : 99,99
- APS 13-15 (SMP) : 95,71
- APS 7-18 (Kesetaraan) : 14,32

Dari data di atas dapat diketahui bahwa target yang ditetapkan pada tahun 2025 untuk jenjang PAUD dan PNF/Kesetaraan belum tercapai, hal ini disebabkan karena 1) kesadaran orang tua dalam menyekolahkan anak belum optimal; 2) masih terdapat anak tidak sekolah (ATS); 3) Murid Kesetaraan yang memasuki usia kerja akan putus sekolah jika mendapatkan pekerjaan; dan 4) kondisi ekonomi orang tua yang kurang mampu.

Strategi yang digunakan guna mengurangi hambatan dimasa mendatang adalah : 1) melanjutkan Program Pemberian Beasiswa Miskin kepada siswa

dari keluarga dengan ekonomi kurang mampu. Beasiswa ini diberikan untuk mencegah siswa putus sekolah (BASIMDA) dan Beasiswa mengajak anak usia sekolah yang tidak sekolah untuk bersekolah Kembali (Beasiswa Ayo Sekolah Kembali); 2) mengoptimalkan kerjsa sama dengan desa dalam melakukan pendataan anak tidak sekolah; 3) mengoptimalkan peran pendidikan kesetaraan dalam melayani pendidikan anak usia dini yang tidak sekolah/yang tidak mau sekolah, di sekolah formal; 4) bekerja sama dengan Kantor Kemenag Kabupaten Demak untuk mengoptimalkan layanan Pendidikan muadalah bagi pondok pesantren yang tidak memiliki sekolah formal/ tidak membolehkan santrinya tidak bersekolah formal dan 5) meningkatkan kualitas sarana dan prasarana Pendidikan di berbagai jenjang mulai dari PAUD, SD, SMP maupun Pendidikan non kesetaraan;

Manfaat Penyelenggaraan Program Pengelolaan Pendidikan yaitu dapat meningkatkan Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) yang berpengaruh pada peningkatan Indeks Pendidikan setiap tahunnya yang merupakan pembentuk dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses, mutu dan kualitas pendidikan dan pelayanan bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak juga bantuan untuk Koordinator Wilayah Dinas Dikbud Kecamatan se-Kabupaten Demak, serta Bantuan Sosial di Jenjang PAUD (TK/KB/TPA/SPS) dan SD/SMP Negeri dan Swasta se-Kabupaten Demak meliputi 4 kegiatan sebagai berikut :

- a) **Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**, Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan sekolah Dasar sehingga seluruh penduduk kabupaten demak dapat menyelesaikan pendidikan Dasar, Alokasi anggaran Rp 116.318.399.880,00 dengan realisasi anggaran pelaksanaan kegiatan sebesar Rp 114.447.574.250,00 atau mencapai 98,39%%. Kegiatan ini memiliki indikator kinerja Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat dengan realisasi 98,46% dari target 95,73% sehingga capaiannya sebesar 102,85%. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan : 1) siswa penerima beasiswa pindah sekolah di luar kabupaten; 2) masih terdapat anak usia sekolah yang tidak sekolah (ATS); 3) Keterlambatan proses pengadaan barang dan jasa; dan 4) pendataan anak tidak sekolah (ATS) belum optimal. Upaya mengatasi permasalahan tersebut di atas dilakukan : 1) mengoptimalkan koordinasi dengan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Demak dan 2) mengoptimalkan pelaksanaan pemberian beasiswa miskin dengan

melakukan verifikasi lebih awal sehingga apabila ada yang tidak terealisasi dapat dialihkan melalui pergeseran/ perubahan APBD; 3) mengoptimalkan pendataan ATS melalui aplikasi SINTAS dengan melibatkan dinas/ instansi terkait, desa, dan pendidik/ tenaga Pendidikan; 4) memilah anak tidak sekolah berdasarkan penyebab dan 5) mengoptimalkan pemberian beasiswa ayo sekolah Kembali bagi Anak Tidak Sekolah yang disebabkan karena ekonomi dan 5) bekerja sama dengan dinas/ instansi terkait untuk penanganan ATS dengan penyebab selain ekonomi. Adapun untuk mendukung kegiatan yang terdiri 21 (dua puluh satu) Sub. Kegiatan terdiri dari :

1. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
 2. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
 3. Pengadaan Mebel Sekolah
 4. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
 5. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
 6. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
 7. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
 8. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
 9. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
 10. Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
 11. Pembangunan Ruang Kelas Baru
 12. Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik
 13. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
 14. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar; dan
 15. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik; dan
- b) **Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama,** Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan sekolah menengah pertama sehingga seluruh penduduk kabupaten demak dapat menyelesaikan pendidikan Dasar, Alokasi anggaran Rp. 44.044.762.300,- dengan realisasi pelaksanaan kegiatan sebesar Rp 44.305.758.416,- atau mencapai 98,62%. Kegiatan ini memiliki indikator kinerja Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat dengan realisasi 90,09% dari target 83,71% sehingga capaiannya sebesar 107,62%.

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan : 1) terlambatnya proses pengadaan barang/jasa pekerjaan fisik; 2) siswa penerima beasiswa pindah sekolah di luar kabupaten; 3) masih terdapat anak usia sekolah yang tidak sekolah (ATS) dan 4) pendataan anak tidak sekolah (ATS) belum optimal.

Upaya mengatasi permasalahan tersebut di atas dilakukan : 1) mengoptimalkan koordinasi dengan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Demak dan 2) mengoptimalkan pelaksanaan pemberian beasiswa miskin dengan melakukan verifikasi lebih awal sehingga apabila ada yang tidak terealisasi dapat dialihkan melalui pergeseran/ perubahan APBD; 3) mengoptimalkan pendataan ATS melalui aplikasi SINTAS dengan melibatkan dinas/ instansi terkait, desa, dan pendidik/ tenaga Pendidikan; 4) memilah anak tidak sekolah berdasarkan penyebab dan 5) mengoptimalkan pemberian beasiswa ayo sekolah Kembali bagi Anak Tidak Sekolah yang disebabkan karena ekonomi dan 5) bekerja sama dengan dinas/ instansi terkait untuk penanganan ATS dengan penyebab selain ekonomi. Adapun untuk mendukung kegiatan ini yang terdiri 15 (lima belas) Sub. Kegiatan terdiri dari :

1. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
2. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
3. Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
4. Pengadaan Mebel Sekolah
5. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama
6. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
7. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
8. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
9. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
10. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
11. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
12. Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
13. Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik
14. Pembangunan Ruang Kelas Baru; dan
15. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik;

c) **Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**, Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dijenjang Taman Kanak-kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA) dan bentuk lain yang sederajat serta jenjang pendidikan non formal berbentuk Kelompok Bermain (KB), Tempat Penitipan Anak (TPA), Satuan Paud Sejenis (SPS) dan yang sederajat. Program ini akan dilakukan melalui pemberdayaan lembaga pendidikan baik dari aspek sarana prasarana maupun pengembangan kurikulum, Alokasi anggaran Rp. 32.660.814.000,- dengan realisasi pelaksanaan kegiatan sebesar Rp. 32.214.427.878,- atau mencapai 96,20%. Kegiatan ini memiliki indikator kinerja Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD Formal (TK/RA/sederajat) dengan realisasi 79,15% dari target 86,00% sehingga capaiannya sebesar 92,03%. Adapun untuk mendukung kegiatan ini terdapat 14 (empat belas) Sub. Kegiatan terdiri dari :

1. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
2. Pengadaan Mebel PAUD
3. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD
4. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD
5. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD
6. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
7. Pengelolaan Dana BOP PAUD
8. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD
9. Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
10. Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
11. Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
12. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD; dan
13. Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD

d) **Kegiatan Program Pendidikan Non Formal (PNF)**, Kegiatan ini untuk meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dijenjang PKBM, SKB dan LKP dan bentuk lain yang sederajat serta jenjang pendidikan non formal berbentuk Taman Baca Masyarakat dan yang sederajat. Kegiatan ini akan dilakukan melalui pemberdayaan lembaga pendidikan baik dari aspek sarana prasarana maupun pengembangan kurikulum, Alokasi anggaran Rp 10.731.143.886,00 dengan realisasi pelaksanaan kegiatan sebesar Rp. 9.503.959.465,00 atau mencapai 88,56%. Kegiatan ini memiliki indikator kinerja Angka Partisipasi Murni (APM) Kesetaraan 7-18 Tahun

dengan realisasi 65,01% dari target 64,00% sehingga capaiannya sebesar 101,58%.

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan adalah 1) masih terdapat anak usia sekolah yang tidak sekolah (ATS) dengan berbagai penyebab diantaranya ekonomi, bullying, sosial budaya; 2) Murid kesetaraan yang berusia kerja akan putus sekolah ketika mendapatkan pekerjaan; dan 3) pendataan anak tidak sekolah (ATS) belum optimal.

Upaya mengatasi permasalahan di atas adalah 1) mengoptimalkan pendataan ATS melalui aplikasi SINTAS dengan melibatkan dinas/ instansi terkait, desa, dan pendidik/ tenaga Pendidikan; 2) memilah anak tidak sekolah berdasarkan penyebab dan 3) mengoptimalkan pemberian beasiswa ayo sekolah Kembali bagi Anak Tidak Sekolah yang disebabkan karena ekonomi dan 4) bekerja sama dengan dinas/ instansi terkait untuk penanganan ATS dengan penyebab selain ekonomi. Adapun untuk mendukung kegiatan ini terdapat sebanyak 13 (dua belas) Sub. Kegiatan terdiri dari :

1. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan
2. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
3. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan
4. Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan
5. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan
6. Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
7. Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
8. Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi
9. Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
10. Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik
11. Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
12. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal; dan
13. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan.

2) PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM

Program ini bertujuan untuk peningkatan dan layanan penetapan Kurikulum muatan lokal di semua Jenjang Pendidikan di Satuan Pendidikan dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak dialokasikan dengan anggaran sebesar Rp. 160.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp.

160.000.000,00 dengan realisasi fisik 48,54% meliputi 1 (satu) kegiatan :

- a) Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal, kegiatan ini untuk dilaksanakan pada tahun 2023 dengan indikator kinerja Persentase sekolah yang menerapkan muatan lokal daerah jenjang pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal, Alokasi anggaran Rp. 160.000.000 dengan realisasi 77.665.000,- atau mencapai 48,54% dengan indikator Jumlah kegiatan yang terkait Evaluasi dan Penetapan Muatan Lokal Pendidikan Dasar dengan realisasi 2 kegiatan dari target sebesar 2 kegiatan sehingga capaian persentase sekolah yang menerapkan muatan lokal daerah mencapai 100 %. Untuk mendukung kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) Sub. Kegiatan :

1. Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal; dan
2. Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;

Adapun waktu yang kami jadwalkan adalah selama 12 bulan dan pelaksanaan realisasinya waktu yang kami butuhkan adalah selama 12 bulan.

3) PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN.

Alokasi anggaran Rp. 1.526.018.904,- dengan realisasi pelaksanaan program sebesar Rp 1.201.945.875,- atau mencapai 78,76%. Program ini memiliki indikator kinerja Persentase tenaga pendidik yang tersertifikasi dengan realisasi 71,36%. dari target 50,76%, dengan capaian sebesar 139,59%.

Program sertifikasi pendidik mencapai keberhasilan sangat tinggi (139,59%), melampaui target yang ditetapkan. Realisasi 71,36% berbanding target 50,76% menunjukkan efektivitas program, percepatan kuota, atau tingginya partisipasi pendidik. Analisa ini menunjukkan manajemen kinerja yang progresif dan kualitas SDM yang meningkat pesat.

Analisa Keberhasilan:

- **Pencapaian Signifikan (Kinerja Sangat Tinggi):** Capaian 139,59% (jauh di atas 100%) menandakan melampaui target (overachieving) secara substansial.
- **Faktor Keberhasilan:** karena adanya percepatan kuota sertifikasi dari pusat, peningkatan kualitas pendidik dalam mengikuti ujian, atau pendampingan yang intensif, serta peningkatan kualitas dapodik guru yang valid dan baik.
- **Dampak Positif:** Peningkatan persentase ini secara langsung berkontribusi pada peningkatan kualitas pengajaran dan profesionalisme tenaga pendidik, yang diharapkan berbanding lurus dengan kualitas hasil belajar siswa.
- **Rekomendasi:** Mempertahankan momentum dengan fokus pada kualitas sertifikasi yang dihasilkan, bukan hanya kuantitas, serta memastikan pendidik tersertifikasi memberikan dampak positif nyata di kelas

Program ini bertujuan untuk peningkatan dan layanan Guru dan Tenaga Kependidikan di semua Jenjang Pendidikan di Satuan Pendidikan dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak meliputi 1 (satu) kegiatan :

- a) **Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan,** Alokasi anggaran Rp. 1.526.018.904 dengan realisasi pelaksanaan program sebesar Rp. 1.201.945.875,- atau mencapai 78,76%. Kegiatan ini memiliki indikator kinerja Rasio Guru Siswa dengan realisasi **89,85%** dari target 88,97% sehingga capaiannya sebesar 101,22%. Kegiatan ini dilakukan melalui 2 sub kegiatan yaitu :
1. Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan;
 2. Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan;

Pada kegiatan ini terjadi efisiensi anggaran yakni pada pekerjaan ujian bagi calon kepala sekolah, berupa tidak dilaksanakannya ujian wawancara dan hanya dilaksanakan ujian tulis yang dinilai cukup mewakili.

Adapun waktu yang kami jadwalkan adalah selama 12 bulan dan pelaksanaan realisasinya waktu yang kami butuhkan adalah selama 12 bulan.

c. Analisis Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Pendidikan

Urusan Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak dilaksanakan melalui 1 (satu) program. Analisis tingkat kesesuaian antara kinerja program dan kegiatan dihitung dengan “rata – rata tingkat ketercapaian indikator program dibagi rata – rata tingkat ketercapaian indikator kegiatan dikali 100”. Hasil penghitungan tingkat kesesuaian antara kinerja program dan kegiatan pada Urusan Pendidikan perangkat daerah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.40.

Analisis Tingkat Kesesuaian Kegiatan dengan Target Kinerja Program Urusan Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak

No	Nama Program	Jumlah Indikator Kinerja Program	Rata-Rata Tingkat Ketercapaian Indikator Program (%)	Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan	Rata-Rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kegiatan (%)	Tingkat Kesesuaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)	Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja Program dan Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7 [(4 : 6)*100]	8
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2	100	8	100	100,00	Sangat Tinggi
2.	Program Pengelolaan Pendidikan	4	74,30	4	99,99	74,31	Sangat Tinggi
3	Program Pengembangan Kurikulum	1	100	1	100	100,00	Sangat Tinggi
4.	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	1	139,59	1	100	139,59	Sangat Tinggi

Sumber Data: DINDIKBUD Kabupaten Demak, 2025

- Keterangan:
- Kategori Tingkat Kesesuaian adalah sebagai berikut:
- 1) Sangat Tinggi : ≥ 91%
 - 2) Tinggi : 76 – 90,99%
 - 3) Sedang : 66 – 75,99%
 - 4) Rendah : 51 - 65,99%
 - 5) Sangat rendah : ≤ 50,99

Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dengan 2 (dua) indikator kinerja program dengan rata – rata tingkat ketercapaiannya sebesar 100%. Kinerja program ini didukung oleh 8 (delapan) kegiatan dengan 8 (delapan) indikator kegiatan. Rata-rata tingkat ketercapaian seluruh indikator kegiatan sebesar 100%. Dari rata-rata tingkat ketercapaian kinerja program dan kegiatan tersebut, maka dapat

diketahui tingkat kesesuaian antara kinerja program dan kegiatan sebesar 100%, dan termasuk dalam kategori tingkat kesesuaian **sangat tinggi**.

Kinerja **Program Pengelolaan Pendidikan** dengan 4 (empat) indikator kinerja program dengan tingkat ketercapaiannya sebesar 74,30 %. Kinerja program ini didukung oleh 4 (empat) kegiatan dengan 4 (empat) indikator kegiatan. Rata-rata tingkat ketercapaian seluruh indikator kegiatan sebesar 99,99%. Dari rata-rata tingkat ketercapaian kinerja program dan kegiatan tersebut, maka dapat diketahui tingkat kesesuaian antara kinerja program dan kegiatan sebesar 84,69%, dan termasuk dalam kategori tingkat kesesuaian **sedang**.

Kinerja **Program Pengembangan Kurikulum** dengan 1 (satu) indikator kinerja program dengan Tingkat ketercapaian sebesar 100 %. Kinerja program ini didukung 1 (satu) kegiatan dengan 1 (satu) kegiatan. Rata-rata tingkat ketercapaian seluruh indikator kegiatan sebesar 100%. Dari rata-rata tingkat ketercapaian kinerja program dan kegiatan tersebut, maka dapat diketahui tingkat kesesuaian antara kinerja program dan kegiatan sebesar 100%, dan termasuk dalam kategori tingkat kesesuaian **sangat tinggi**.

Kinerja **Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan** dengan 1 (satu) indikator kinerja program dengan tingkat ketercapaiannya sebesar 139,59%. Kinerja program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan dengan 1 (satu) indikator kegiatan. Rata-rata tingkat ketercapaian seluruh indikator kegiatan sebesar 100%. Dari rata-rata tingkat ketercapaian kinerja program dan kegiatan tersebut, maka dapat diketahui tingkat kesesuaian antara kinerja program dan kegiatan sebesar 100%, dan termasuk dalam kategori tingkat kesesuaian **sangat tinggi**.

d. URUSAN KEBUDAYAAN

Pembangunan bidang kebudayaan merupakan bagian dari upaya pencapaian target sasaran peningkatan kualitas dan kapasitas SDM. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan mengamanatkan bahwa pemajuan kebudayaan diarahkan untuk meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya peradaban dunia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan.

Pembangunan pada urusan wajib kebudayaan diarahkan pada pembentukan karakteristik masyarakat yang berbudi luhur melalui (1) pengembangan dan pelestarian potensi budaya lokal yang adi luhung. (2) mencegah masuknya budaya lain yang negatif atau yang tidak sesuai dengan budaya lokal. dan (3) memberi ruang gerak untuk berkreasi dan berinovasi dalam pengembangan kesenian lokal.

Arah kebijakan program dan kegiatan pada bidang Kebudayaan Kabupaten Demak dalam mendukung urusan wajib kebudayaan pada Tahun 2024 dengan menitik beratkan pada pengembangan seni dan budaya. Dari capaian IKK Tahun 2024 diperoleh gambaran sebagai berikut :

1) PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN

Program ini diarahkan untuk mewujudkan pelestarian budaya lokal melalui pelestarian seni tradisional/budaya daerah serta pendataan dan pengawasan peninggalan sejarah museum purbakala, dialokasikan dengan anggaran sebesar **Rp. 1.259.730.000,00** dan realisasi sebesar **Rp. 1.236.051.116,00** dengan realisasi fisik **98,12%**, dan Program ini terdiri dari 2 Kegiatan dan 2 Sub. Kegiatan sebagai berikut :

- a) Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan Alokasi anggaran Rp. 311.980.000,- dengan realisasi pelaksanaan kegiatan sebesar Rp. 303.516.491,- atau mencapai 97,29%%. Kegiatan ini memiliki indikator kinerja Jumlah WBTB yang ditetapkan dengan realisasi 2 obyek dari target 2 obyek sehingga capaiannya sebesar 100%. Untuk mendukung kegiatan ini terdiri 2 Sub. Kegiatan :
 - 1) Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan; dan
 - 2) Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan;
- b) Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota; Alokasi anggaran Rp. 947.750.000,- dengan

realisasi pelaksanaan program sebesar Rp. 932.534.625,- atau mencapai 98,39%. Kegiatan ini memiliki indikator kinerja Jumlah Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota yang dilestarikan dengan realisasi 4 obyek dari target 4 obyek sehingga capaiannya sebesar 100%. Adapun untuk mendukung kegiatan ini terdiri dari 1 Sub. Kegiatan yaitu :

- 1) Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya;

2) PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA

Program ini diarahkan untuk melestarikan dan meningkatkan kualitas budaya daerah agar tidak punah dengan mengadakan sosialisasi dan saresehan budaya, serta untuk meningkatkan event-event seni budaya dalam rangka pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah yang yang dialokasikan dengan anggaran sebesar Rp. 181.380.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 177.733.868,00 dengan realisasi fisik 97,99% yang terdiri dari :

a) Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota;

Alokasi anggaran Rp. 92.130.000,00 dengan realisasi pelaksanaan kegiatan sebesar Rp. 90.869.100,- atau mencapai 98,63%. Kegiatan ini memiliki indikator kinerja Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan Peringkat Kab/ Kota dengan realisasi 2 obyek dari target 2 obyek sehingga capaiannya sebesar 100%. Kegiatan ini terdiri dari 1 Sub. Kegiatan :

1. Penetapan Cagar Budaya

b) Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota; Alokasi

anggaran Rp. 89.250.000,00 dengan realisasi pelaksanaan program sebesar Rp. 86.864.768,00 atau mencapai 97,33%. Kegiatan ini memiliki indikator kinerja Jumlah Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/ Kota yang dikelola dengan realisasi 1 obyek dari target 1 obyek sehingga capaiannya sebesar 100%. Kegiatan ini dilakukan melalui 1 Sub. Kegiatan yaitu :

1. Pelindungan Cagar Budaya

3) PROGRAM PENGELOLAAN MUSEUM KABUPATEN/KOTA

Program ini diarahkan untuk melestarikan dan meningkatkan kualitas layanan museum yang dialokasikan dengan anggaran sebesar Rp. 662.960.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 506.035.970,00 dengan realisasi fisik 76,33% yang terdiri dari 1 Kegiatan dan 4 Sub. Kegiatan :

a) Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota, Alokasi anggaran Rp. 662.960.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 506.035.970,00 dengan realisasi fisik 76,33%. Kegiatan ini memiliki indikator kinerja Jumlah Museum yang dikelola dengan realisasi 4 kegiatan dari target 4 kegiatan sehingga capaiannya sebesar 100% untuk mendukung kegiatan ini terdapat 4 (tiga) Sub. Kegiatan sebagai berikut :

- 1. Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi secara Terpadu
- 2. Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman
- 3. Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum
- 4. Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum;

e. Analisis Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan

Urusan Kebudayaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak dilaksanakan melalui 3 (tiga) program. Analisis tingkat kesesuaian antara kinerja program dan kegiatan dihitung dengan “rata – rata tingkat ketercapaian indikator program dibagi rata – rata tingkat ketercapaian indikator kegiatan dikali 100”. Hasil penghitungan tingkat kesesuaian antara kinerja program dan kegiatan pada Urusan kebudayaan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.41.

Analisis Tingkat Kesesuaian Kegiatan dengan Target Kinerja Program Urusan Kebudayaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak

No	Nama Program	Jumlah Indikator Kinerja Program	Rata-Rata Tingkat Ketercapaian Indikator Program (%)	Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan	Rata-Rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kegiatan (%)	Tingkat Kesesuaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)	Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja Program dan Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7 [(4 : 6)*100]	8
1.	Program Pengembangan Kebudayaan	1	100	2	100	100	Sangat Tinggi
2.	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	1	100	2	100	100	Sangat Tinggi
2.	Program Pegelolaan Museum Kabupaten/ Kota	1	100	1	100	100	Sangat Tinggi



Keterangan:

Kategori Tingkat Kesesuaian adalah sebagai berikut:

- 1) Sangat Tinggi : $\geq 91\%$
- 2) Tinggi : 76 – 90,99%
- 3) Sedang : 66 – 75,99%
- 4) Rendah : 51 - 65,99%
- 5) Sangat rendah : $\leq 50,99$

Kinerja **Program Pengembangan Kebudayaan** dengan 1 (satu) indikator kinerja program dengan tingkat ketercapaiannya sebesar 100%. Kinerja program ini didukung oleh 2 (dua) kegiatan dengan 2 (dua) indikator kegiatan. Rata-rata tingkat ketercapaian seluruh indikator kegiatan sebesar 100%. Dari rata-rata tingkat ketercapaian kinerja program dan kegiatan tersebut, maka dapat diketahui tingkat kesesuaian antara kinerja program dan kegiatan sebesar 100%, dan termasuk dalam kategori tingkat kesesuaian **sangat tinggi**.

Kinerja **Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya** dengan 1 (satu) indikator kinerja program dengan tingkat ketercapaiannya sebesar 100%. Kinerja program ini didukung oleh 2 (dua) kegiatan dengan 2 (dua) indikator kegiatan. Rata-rata tingkat ketercapaian seluruh indikator kegiatan sebesar 100%. Dari rata-rata tingkat ketercapaian kinerja program dan kegiatan tersebut, maka dapat diketahui tingkat kesesuaian antara kinerja program dan kegiatan sebesar 100%, dan termasuk dalam kategori tingkat kesesuaian **sangat tinggi**.

Kinerja **Program Pengelolaan Museum Kabupaten/ Kota** dengan 1 (satu) indikator kinerja program dengan tingkat ketercapaiannya sebesar 100%. Kinerja program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan dengan 1 (satu) indikator kegiatan. Rata-rata tingkat ketercapaian seluruh indikator kegiatan sebesar 100%. Dari rata-rata tingkat ketercapaian kinerja program dan kegiatan tersebut, maka dapat diketahui tingkat kesesuaian antara kinerja program dan kegiatan sebesar 100%, dan termasuk dalam kategori tingkat kesesuaian **sangat tinggi**.

B. REALISASI ANGGARAN (AKUNTABILITAS KEUANGAN)

Kebijakan Umum Keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2025 diatur melalui Perda Nomor 16 Tahun 2024, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Perbup Nomor 60 Tahun 2024 dan beberapa perubahan di tahun 2025 (termasuk Perbup No. 13/2025 dan Perbup No. 16/2025) untuk teknis pelaksanaan, termasuk tunjangan hari raya dan penyesuaian belanja lainnya.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah juga dilengkapi dengan Laporan Akuntabilitas Keuangan.

1. Target Pendapatan

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak, pada tahun anggaran 2025 mendapatkan alokasi anggaran Murni dalam penetapan dokumen pelaksanaan anggaran Tahun 2025 sebesar Rp. 812.673.780.088,00 dan dalam rangka evaluasi, efisiensi anggaran berjalan serta pengambilan kebijakan terhadap rencana strategis tahun 2025, ditambah dengan perubahan usulan Aspirasi, dalam pertengahan anggaran Tahun 2025 terdapat perubahan anggaran menjadi sebesar Rp. 832.956.428.835,00 berkurang Rp. 20.282.648.747,00 (bertambah 2,50%) yang dapat dilihat seperti tabel dibawah ini :

Tabel 3.42.

Target Pendapat Anggaran Murni dan Perubahan Tahun 2025

No.	Nama Program / Kegiatan	JUMLAH		BERTAMBAH/BERKURANG	
		Anggaran Murni	Anggaran Perubahan	Rupiah	Prosentase
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
▶	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	812.673.780.088	832.956.428.835	20.282.648.747	2,50
	▶ URUSAN SETIAP OPD	605.884.369.964	625.596.609.871	19.712.239.907	3,25
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	605.884.369.964	625.596.609.871	19.712.239.907	3,25
	▶ URUSAN PENDIDIKAN	204.661.410.124	205.255.748.964	594.338.840	0,29
2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	203.516.410.124	203.569.730.060	53.319.936	0,03
3	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	160.000.000	160.000.000	0	0,00
4	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	985.000.000	1.526.018.904	541.018.904	54,93
	▶ URUSAN KEBUDAYAAN	2.128.000.000	2.104.070.000	-23.930.000	-1,12

No.	Nama Program / Kegiatan	JUMLAH		BERTAMBAH/BERKURANG	
		Anggaran Murni	Anggaran Perubahan	Rupiah	Prosentase
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
5	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	1.310.000.000	1.259.730.000	-50.270.000	-3,84
6	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	200.000.000	181.380.000	-18.620.000	-9,31
7	PROGRAM PENGELOLAAN MUSEUM KABUPATEN/KOTA	618.000.000	662.960.000	44.960.000	7,28
	-				
	JUMLAH TOTAL	812.673.780.088	832.956.428.835	20.282.648.747	2,50

Sumber : DPPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak, pada tahun anggaran 2025, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak Mendapatkan Anggaran sebesar **Rp. 832.956.428.835,00**.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak, mempunyai 2 Urusan Wajib yang di laksanakan yaitu : 01. Urusan Pendidikan dan 02. Urusan Kebudayaan. Secara garis besar dalam pelaksanaan program dan kegiatan terlaksana dengan baik, berikut adalah Realisasi keuangan untuk pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub. Kegiatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak Tahun 2025.

Rincian target dan realisasi anggaran belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.43.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Per Program Tahun 2025

No.	Nama Program / Kegiatan	LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)			
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Sisa Anggaran	Prosentase
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
▶	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	832.956.428.835	795.507.258.382	37.449.170.453	95,50
	▶ URUSAN SETIAP OPD	625.596.609.871	593.670.462.490	31.926.147.381	94,90
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	625.596.609.871	593.670.462.490	31.926.147.381	94,90
	-				
	▶ URUSAN PENDIDIKAN	205.255.748.964	199.916.974.938	5.338.774.026	97,40
2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	203.569.730.060	198.637.364.063	4.932.365.997	97,58
3	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	160.000.000	77.665.000	82.335.000	48,54

No.	Nama Program / Kegiatan	LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)			
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Sisa Anggaran	Prosentase
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
4	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	1.526.018.904	1.201.945.875	324.073.029	78,76
	-				
	► URUSAN KEBUDAYAAN	2.104.070.000	1.919.820.954	184.249.046	91,24
5	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	1.259.730.000	1.236.051.116	23.678.884	98,12
6	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	181.380.000	177.733.868	3.646.132	97,99
7	PROGRAM PENGELOLAAN MUSEUM KABUPATEN/KOTA	662.960.000	506.035.970	156.924.030	76,33
	-				
	JUMLAH TOTAL	832.956.428.835	795.507.258.382	37.449.170.453	95,50

Dari jumlah Anggaran sebesar **Rp. 832.956.428.835,00**, dialokasikan Belanja Urusan Setiap OPD Rp. 625.596.609.871,00 sebanyak **(75,11%)**, Urusan Pendidikan sebanyak Rp. 205.255.748.964,00 **(24,64%)** dan untuk Urusan Kebudayaan RP. 2.104.070.000,00 **(0,25%)**.

Apabila di lihat realisasi dari anggaran yang ada di Realisasikan sebesar **Rp. 832.956.428.835,00** dari Anggaran yang tersedia Rp. **795.507.258.382,00** untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak dapat terealisasi sebesar **95,50%)**.

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa realisasi anggaran keseluruhan sudah dapat dicapai dengan **“Sangat Tinggi”** yakni 95,50% menurun di bandingkan dengan tahun 2024 sejumlah 97,94% meningkat 4,22% dibandingkan dengan penyerapan anggaran tahun 2023 sebesar 93,62% dan pada tahun 2022 yang sebesar 93,53% mengalami peningkatan sebesar 0,09%.

2. Pelaksanaan APBD Tahun 2025

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak, mempunyai 2 Urusan Wajib yang di laksanakan yaitu : 01. Urusan Pendidikan dan 02. Urusan Kebudayaan, berikut pelaksaasn APBD berdasarkan setiap urusan dapat dilihat sebagai berikut :

a. URUSAN SETIAP OPD

Pada Tahun Anggaran 2025 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak Urusan Setiap Perangkat Daerah mendapatkan Anggaran sebesar Rp. 625.596.609.871,00 Rincian target dan realisasi anggaran belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.44.

Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Program dan Kegiatan
Urusan setiap OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Demak Per 31 Desember 2025

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	Kinerja			Anggaran		
		Output (Kegiatan)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	► URUSAN SETIAP OPD					625.596.609.871	593.670.462.490	94,90
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Dindikbud yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan:%)	100	100	100	621.518.117.356	589.868.120.421	94,91
		Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan (Dengan Satuan:%)	100	100	100	4.078.492.515	3.802.342.069	93,23
	Rata - Rata Ketercapaian Indikator Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		8	8	100			
	Rata - Rata Ketercapaian Indikator Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		305	305	100			
A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja (Dengan satuan:Dokumen)	7	7	100	44.325.500	41.996.050	94,74
1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1	100	25.000.000	23.421.250	93,69
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	4	100	19.325.500	18.574.800	96,12
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	100	621.473.791.856	589.826.124.371	94,91
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	5.236	5.236	100	619.213.485.297	588.025.876.401	94,96
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	1	100	2.172.556.559	1.719.108.470	79,13

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	Kinerja			Anggaran		
		Output (Kegiatan)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	100	87.750.000	81.139.500	92,47
C	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3	3	100	59.799.000	52.125.725	87,17
1	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	2	100	53.099.000	46.420.725	87,42
2	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	2	100	6.700.000	5.705.000	85,15
D	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	administrasi Kepegawaian Perangkat yang terpenuhi (Dengan Satuan:%)	100	100	100	348.700.000	341.685.205	97,99
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100	100	100	273.700.000	270.231.500	98,73
2	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah sosialisasi peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan (Dengan Satuan:Orang)	600	600	100	75.000.000	71.453.705	95,27
E	Administrasi Umum Perangkat Daerah	administrasi Umum Perangkat yang terpenuhi (Dengan Satuan:%)	100	100	100	1.624.159.221	1.549.106.296	95,38
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	100	54.216.200	53290500	98,29
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1	100	194.296.700	192.801.600	
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	1	100	73.633.700	69.752.500	94,73
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	2	100	76.609.000	72.754.825	94,97
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	1	100	5.400.000	5.400.000	100,00
6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	1	100	8.000.000	7.787.500	97,34
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6	6	100	411.913.621	398.151.521	96,66
8	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip Dinamis yang tertata (Dengan Satuan:arsip)	1	1	100	24.850.000	9.695.000	
9	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2	2	100	775.240.000	739.472.850	95,39
F	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD penunjang urusan pemerintah yang diadakan (Dengan Satuan:paket)	1	1	100	765.274.846	756.882.344	98,90
1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1	1	100	350.000.000	346.400.000	98,97
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1	1	100	219.213.846	218.193.844	99,53



NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	Kinerja			Anggaran		
		Output (Kegiatan)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2	2	100	100.000.000	98.549.000	98,55
4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	1	100	96.061.000	93.739.500	97,58
G	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan yang tersedia (Dengan Satuan:%)	100	100	100	909.026.000	734.775.270	80,83
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	1	100	5.000.000	5.000.000	100,00
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	1	100	824.026.000	652.795.270	79,22
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor (Jasa Kebersihan) (Dengan Satuan : layanan)	1	1	100	80.000.000	76.980.000	96,23
H	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara (Dengan Satuan:paket)	1	1	100	371.533.448	367.767.229	98,99
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	1	100	41.000.000	40.675.650	99,21
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	59	59	100	61.600.000	60.599.255	98,38
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50	50	100	14.930.000	14.894.324	99,76
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	2	100	209.033.448	207.084.000	99,07
5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	100	10.370.000	10.135.000	97,73
6	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	3	100	34.600.000	34.379.000	99,36

Sumber : RKPD Dindikbud Kab. Demak 2025

Untuk mengetahui efektifitas anggaran terhadap capaian Sasaran Urusan Pendidikan, dapat diketahui dari capaian kinerja sasaran dan anggaran yang digunakan pada Tahun 2025 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.45.

Efektifitas Anggaran terhadap Capaian

Sasaran Urusan Setiap OPD

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak Tahun 2025

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	Kinerja			Anggaran		
		Output (Kegiatan)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	► URUSAN SETIAP OPD					625.596.609.871	593.670.462.490	94,90
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Dindikbud yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan:%)	100	100	100	621.518.117.356	589.868.120.421	94,91
		Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan (Dengan Satuan:%)	100	100	100	4.078.492.515	3.802.342.069	93,23
Rata - Rata Ketercapaian Indikator Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota			8	8	100			
Rata - Rata Ketercapaian Indikator Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota			305	305	100			



b. URUSAN PENDIDIKAN

Pada Tahun Anggaran 2025 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak Bidang Pendidikan mendapatkan Anggaran sebesar Rp. 185.547.502.300. Rincian target dan realisasi anggaran belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.46.

Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Program dan Kegiatan
Bidang Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Demak Per 31 Desember 2025

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	Kinerja			Anggaran		
		Output (Kegiatan)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	► URUSAN PENDIDIKAN		83,71	81,89	97,82	205.255.748.964	199.916.974.938	97,40
I	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (Dengan Satuan:%)	100	99,98	99,980	116.318.399.880	114.447.574.250	98,39
		Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama (Dengan Satuan:%)	100	98,24	98,240	44.305.758.416	43.695.294.182	98,62
		Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (Dengan Satuan:%)	100	80,19	80,190	32.214.427.878	30.990.536.166	96,20
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (Dengan Satuan:%)	100	18,77	18,770	10.731.143.886	9.503.959.465	88,56
	Rata - Rata Ketercapaian Indikator Program Pengelolaan Pendidikan		100	74,295	74,30			
	Rata - Rata Ketercapaian Indikator Kegiatan pada Program Pengelolaan Pendidikan		68,56	68,55	99,99			
A	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat (Dengan Satuan:%)	95,73	95,73	100	116.318.399.880	114.447.574.250	98,39
1	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	0	0	0	0	0	0,00
2	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	3	3	100	0	0	0,00
3	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	6	6	100	0	0	0,00
4	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	8	8	100	0	0	0,00
5	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	37	37	100	1.700.000.000	1.686.536.000	99,21
6	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/ Guru, Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	0	0	0	0	0	0,00
7	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	0	0	0	0	0	0,00



NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	Kinerja			Anggaran		
		Output (Kegiatan)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4	4	100	150.000.000	148.866.000	99,24
9	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0	0	0	0	0	0,00
10	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0	0	0	0	0	0,00
11	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	0	0	0	0	0	0,00
12	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0	0	0	0	0	0,00
13	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	5	5	100	800.000.000	783.447.200	97,93
14	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	0	0	0	0	0	0,00
15	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	0	0	0	0	0	0,00
16	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	0	0	0	0	0	0,00
17	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Penyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	0	0	0	0	0	0,00
18	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	0	0	0	0	0	0,00
19	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	770	770	100	476.050.000	457.726.550	96,15
20	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	955	955	100	8.235.721.760	8.165.987.401	99,15
21	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	202	202	100	648.000.000	529.286.486	81,68
22	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	296	296	100	350.000.000	347.055.550	99,16
23	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	489	489	100	92.923.961.600	92.403.783.489	99,44
24	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	490	490	100	300.000.000	288.798.600	96,27
25	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	0	0	0	0	0	0,00

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	Kinerja			Anggaran		
		Output (Kegiatan)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0	0	0	0	0	0,00
27	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	4	4	100	135.940.000	32.555.000	23,95
28	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1400	1400	100	0	0	0,00
29	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	8	8	100	2.525.000.000	2.489.425.000	98,59
30	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0	0	0	0	0	0,00
31	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	490	490	100	350.930.000	344.384.750	98,13
32	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	9	9	100	5.421.671.000	5.316.687.700	98,06
33	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar yang Disediakan	2550	2550	100	1.325.000.000	1.312.659.075	99,07
34	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Disediakan	38	38	100	976.125.520	140.375.449	14,38
B	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat (Dengan Satuan:%)	97,06	97,01	99,95	44.305.758.416	43.695.294.182	98,622156
1	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	0	0	0,00	0	0	0,00
2	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	0	0	0,00	0	0	0,00
3	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	0	0	0,00	0	0	0,00
4	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	0	0	0,00	0	0	0,00
5	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	0	0	0,00	0	0	0,00
6	Pembangunan Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun	0	0	0,00	0	0	0,00
7	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	12	12	100,00	650.000.000	646.423.000	99,45
8	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0	0	0,00	0	0	0,00
9	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	50	50	100,00	1.013.281.500	1.007.538.000	99,43
10	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Jumlah Ruang Guru Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0	0	0,00	0	0	0,00
11	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0	0	0,00	0	0	0,00
12	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Tela Direhabilitasi Sedang/Berat	0	0	0,00	0	0	0,00



NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	Kinerja			Anggaran		
		Output (Kegiatan)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0	0	0,00	0	0	0,00
14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	0	0	0,00	0	0	0,00
15	Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat	0	0	0,00	0	0	0,00
16	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0	0	0,00	200.000.000	198.647.000	99,32
17	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	3	3	100,00	890.000.000	871.970.490	97,97
18	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia	0	0	0,00	0	0	0,00
19	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1500	1500	100,00	1.196.745.000	1.118.294.000	93,44
20	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	0	0	0,00	0	0	0,00
21	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	0	0	0,00	0	0	0,00
22	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	0	0	0,00	0	0	0,00
23	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	3000	3000	100,00	400.000.000	381.403.000	95,35
24	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	319	319	100,00	2.315.775.696	2.135.910.089	92,23
25	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	657	657	100,00	911.000.000	904.419.549	99,28
26	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	86	86	100,00	287.050.000	272.285.000	94,86
27	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	86	86	100,00	35.423.601.220	35.259.819.154	99,54
28	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	86	86	100,00	72.950.000	53.104.800	72,80
29	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU	Jumlah Ruang TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0	0	0,00	0	0	0,00
30	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah	Jumlah Ruang Kepala Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0	0	0,00	0	0	0,00
31	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	86	86	100,00	9.630.000	7.262.000	75,41

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	Kinerja			Anggaran		
		Output (Kegiatan)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	86	86	100,00	307.725.000	245.550.600	79,80
33	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	2	2	100,00	300.000.000	297.330.000	99,11
34	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	0	0	0,00	0	0	0,00
35	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0	0	0,00	0	0	0,00
36	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang tersedia	3	3	100,00	328.000.000	295.337.500	90,04
C	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD Formal (TK/RA/ sederajat) (Dengan Satuan:%)	86,00	86,00	100	32.214.427.878	30.990.536.166	96,20
1	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun	0	0	0	0	0	0,00
2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	79	79	100	2.077.937.000	2.055.618.500	98,93
3	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0	0	0	0	0	0,00
4	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0	0	0	0	0	0,00
5	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	15	15	100	150.000.000	16.110.002	10,74
6	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Jumlah Peserta Didik yang menerima biaya personil (BASIMDA PAUD) (Dengan Satuan:siswa)	0	0	0	0	0	0,00
7	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	2742	2742	100	350.000.000	339.300.000	96,94
8	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	0	0	0	0	0	0,00
9	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah kegiatan Pendampingan	0	0	0	0	0	0,00
10	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Jumlah PAUD yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	0	0	0	0	0	0,00
11	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	20	20	100	156.903.378	149.839.476	95,50
12	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	2157	2157	100	2.772.737.500	2.769.417.788	99,88
13	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	961	961	100	745.520.000	653.440.550	87,65
14	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	995	995	100	23.896.658.000	23.883.372.000	99,94
15	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	300	300	100	109.250.000	88.872.425	81,35



NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	Kinerja			Anggaran		
		Output (Kegiatan)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1	1	100	146.500.000	132.482.750	90,43
17	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	0	0	0	0	0	0,00
18	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	0	0	0	0	0	0,00
19	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	626	626	100	84.000.000	82.880.000	98,67
20	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Direhabilitasi Sedang/Berat	13	13	100	445.000.000	439.786.900	98,83
21	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Disediakan	23	23	100	1.234.922.000	335.000.000	27,13
22	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Proses Belajar PAUD yang Diselenggarakan	300	300	100	45.000.000	44.415.775	98,70
D	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Angka Partisipasi Murni (APM) Kesetaraan 7-18 Tahun (Dengan Satuan:%)	64	64	100	10.731.143.886	9.503.959.465	88,56
1	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Non Formal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	0	0	0	0	0	0,00
2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	0	0	0	0	0	0,00
3	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Direhabilitasi Sedang/Berat	0	0	0	0	0	0,00
4	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/ Kesetaraan yang Direhabilitasi Sedang/Berat	0	0	0	0	0	0,00
5	Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Mebel Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Tersedia	0	0	0	0	0	0,00
6	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Perlengkapan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Tersedia	0	0	0	0	0	0,00
7	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1003	1003	100	1.244.050.000	441.017.950	35,45
8	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Non Formal/ Kesetaraan yang Tersedia	0	0	0	0	0	0,00
9	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	0	0	0	0	0	0,00
10	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	0	0	0	0	0	0,00



NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	Kinerja			Anggaran		
		Output (Kegiatan)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	12	12	100	129.788.886	71.766.684	55,29
12	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	75	75	100	1.484.349.000	1.344.247.945	90,56
13	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	25	25	100	6.289.090.000	6.278.802.500	99,84
14	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan	26	26	100	21.239.000	13.370.175	62,95
15	Penyelenggaraan Ujian bagi Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Penyelenggaraan Ujian bagi Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan	0	0	0	0	0	0,00
16	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	2	2	100	172.030.000	70.220.500	40,82
17	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1	1	100	90.540.000	43.649.310	48,21
18	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah layanan pendampingan yang diberikan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1	1	100	92.600.000	77.363.000	83,55
19	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	0	0	0	0	0	0,00
20	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2	2	100	0	0	0,00
21	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0	0	0	0	0	0,00
22	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	5750	5750	100	317.457.000	279.942.400	88,18
23	Pembangunan Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	0	0	0	0	0	0,00
24	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	0	0	0	0	0	0,00
25	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	1	1	100	75.000.000	74.533.500	99,38
26	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0	0	0	0	0	0,00
27	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal	Jumlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal	5	5	100	700.000.000	697.040.500	99,58
28	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan yang Disediakan	0	0	0	115.000.000	112.005.001	97,40

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	Kinerja			Anggaran		
		Output (Kegiatan)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase sekolah yang menerapkan muatan lokal daerah	100	100	100	160.000.000	77.665.000	48,54
	Rata - Rata Ketercapaian Indikator Program Pengembangan Kurikulum		100	100	100			
	Rata - Rata Ketercapaian Indikator Kegiatan pada Program Pengembangan Kurikulum		1	1	100			
A	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah kegiatan yang terkait Evaluasi dan Penetapan Muatan Lokal Pendidikan Dasar (Dengan Satuan:kegiatan)	0	0	0	0	0	0
1	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	0	0	0	0	0	0
2	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	0	0	0	0	0	0
	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya	0	0	0	0	0	0
3	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	0	0	0	0	0	0
B	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah kegiatan yang terkait Evaluasi dan Penetapan Muatan Lokal PAUD dan PNF (Dengan Satuan:Kegiatan)	2	2	100	160.000.000	77.665.000	48,54
1	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang Tersusun	0	0	0	0	0	0,00
2	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang Tersusun	2	2	100	80.000.000	19.492.500	24,37
3	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	2	2	100	80.000.000	58.172.500	72,72
III	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase tenaga pendidik yang tersertifikasi (Dengan Satuan:%)	51,12	71,36	139,59	1.526.018.904	1.201.945.875	78,763498
	Rata - Rata Ketercapaian Indikator Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan		51,12	71,36	139,59			0
	Rata - Rata Ketercapaian Indikator Kegiatan pada Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan		88,97	87,97	98,88			0
A	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Rasio Guru Siswa (Dengan Satuan: kegiatan)	88,97	87,97	98,88	1.526.018.904	1.201.945.875	78,76
1	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	3	3	100,00	1.516.868.904	1.193.380.875	78,67



NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	Kinerja			Anggaran		
		Output (Kegiatan)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		(Dengan Satuan: dokumen)						
2	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Dengan Satuan: laporan)	2	2	100,00	9.150.000	8.565.000	93,61

Untuk mengetahui efektifitas anggaran terhadap capaian Sasaran Urusan Pendidikan, dapat diketahui dari capaian kinerja sasaran dan anggaran yang digunakan pada Tahun 2025 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.47.

Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran Program Bidang Pendidikan
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Demak Tahun 2025

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	Kinerja			Anggaran		
		Output (Kegiatan)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	► URUSAN PENDIDIKAN		83,71	81,89	97,82	205.255.748.964	199.916.974.938	97,40
I	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (Dengan Satuan:%)	100	99,98	99,980	116.318.399.880	114.447.574.250	98,39
		Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama (Dengan Satuan:%)	100	98,24	98,240	44.305.758.416	43.695.294.182	98,62
		Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (Dengan Satuan:%)	100	80,19	80,190	32.214.427.878	30.990.536.166	96,20
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (Dengan Satuan:%)	100	18,77	18,770	10.731.143.886	9.503.959.465	88,56
	Rata - Rata Ketercapaian Indikator Program Pengelolaan Pendidikan		100	74,295	74,30			
	Rata - Rata Ketercapaian Indikator Kegiatan pada Program Pengelolaan Pendidikan		68,56	68,55	99,99			
II	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase sekolah yang menerapkan muatan lokal daerah	100	100	100	160.000.000	77.665.000	48,54
	Rata - Rata Ketercapaian Indikator Program Pengembangan Kurikulum		100	100	100			



NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	Kinerja			Anggaran		
		Output (Kegiatan)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Rata - Rata Ketercapaian Indikator Kegiatan pada Program Pengembangan Kurikulum		1	1	100			
III	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase tenaga pendidik yang tersertifikasi (Dengan Satuan:%)	51,12	71,36	139,59	1.526.018.904	1.201.945.875	78,763498
	Rata - Rata Ketercapaian Indikator Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan		51,12	71,36	139,59			0
	Rata - Rata Ketercapaian Indikator Kegiatan pada Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan		88,97	87,97	98,88			0

Secara umum efektifitas anggaran terhadap capaian Urusan Pendidikan Kabupaten Demak, dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan efektif terhadap capaian kinerja misi organisasi.

c. URUSAN KEBUDAYAAN

Pada Tahun Anggaran 2024 Bidang Kebudayaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak Mendapatkan Anggaran sebesar Rp. 12.225.000.000,00. Sedangkan Rekapitulasi alokasi dan realisasi Bidang Kebudayaan tampak dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.48.

Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Program dan Kegiatan
Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Demak Per 31 Desember 2025

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	Kinerja			Anggaran		
		Output (Kegiatan)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	► URUSAN KEBUDAYAAN		66,67	66,67	100	2.104.070.000	1.919.820.954	91,24
I.	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Peningkatan penyelenggaraan event kebudayaan (Dengan Satuan:%)	80	80	100	1.259.730.000	1.236.051.116	98,12
	Rata - Rata Ketercapaian Indikator Program Pengembangan Kebudayaan		80	80	100			0,00
	Rata - Rata Ketercapaian Indikator Kegiatan pada Program Pengembangan Kebudayaan		2,5	2,5	100			0,00
A.	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah WBTB yang ditetapkan (Dengan Satuan:kegiatan)	1	1	100	311.980.000	303.516.491	97,29
1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	4	4	100	139.490.000	133.647.100	95,81
2	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	60	60	100	172.490.000	169.869.391	98,48
B.	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Event Kesenian (Dengan Satuan:Event)	4	4	100	947.750.000	932.534.625	98,39
1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	4	4	100	947.750.000	932.534.625	98,39
II.	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya di luar museum yang dilestarikan (Dengan Satuan:%)	60	60	100	181.380.000	177.733.868	97,99
	Rata - Rata Ketercapaian Indikator Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya		60	60	100			0,00
	Rata - Rata Ketercapaian Indikator Kegiatan pada Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya		1,5	1,5	100			0,00
A.	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan Peringkat Kab/ Kota (Dengan Satuan:Objek)	2	2	100	92.130.000	90.869.100	98,63
1	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan (Dengan Satuan: objek)	2	2	100	92.130.000	90.869.100	98,63



NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	Kinerja			Anggaran		
		Output (Kegiatan)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B.	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Cagar Budaya Peringkat Kabupaten / Kota yang dikelola (Dengan Satuan:objek)	1	1	100	89.250.000	86.864.768	97,33
1	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	1	1	100	89.250.000	86.864.768	97,33
2	Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	0	0	0	0	0	0,00
III.	PROGRAM PENGELOLAAN MUSEUM KABUPATEN/KOTA	Persentase Peningkatan Kunjungan Museum (Dengan Satuan:%)	60,00	60,00	100	662.960.000	506.035.970	76,33
	Rata - Rata Ketercapaian Indikator Program Pengelolaan Museum Kabupaten/ Kota		60,00	60,00	100			0,00
	Rata - Rata Ketercapaian Indikator Kegiatan pada Program Pengelolaan Museum Kabupaten/ Kota		1	1	100			0,00
A.	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Jumlah Museum yang dikelola (Dengan Satuan: unit)	1	1	100	662.960.000	506.035.970	76,33
1	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	4	4	100	191.466.000	66.489.470	34,73
2	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	40	40	100	24.120.000	23.087.000	95,72
3	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	4	4	100	376.534.000	353.873.500	93,98
4	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	3	3	100	70.840.000	62.586.000	88,35

Untuk mengetahui efektifitas anggaran terhadap capaian Sasaran Urusan Kebudayaan, dapat diketahui dari capaian kinerja sasaran dan anggaran yang digunakan pada Tahun 2025 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.49.
Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran Program
Urusan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Demak Tahun 2025

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	Kinerja			Anggaran		
		Output (Kegiatan)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	► URUSAN KEBUDAYAAN		66,67	66,67	100	2.104.070.000	1.919.820.954	91,24
I.	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Peningkatan penyelenggaraan event kebudayaan (Dengan Satuan:%)	80	80	100	1.259.730.000	1.236.051.116	98,12
	Rata - Rata Ketercapaian Indikator Program Pengembangan Kebudayaan		80	80	100			0,00
	Rata - Rata Ketercapaian Indikator Kegiatan pada Program Pengembangan Kebudayaan		2,5	2,5	100			0,00

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	Kinerja			Anggaran		
		Output (Kegiatan)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II.	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya di luar museum yang dilestarikan (Dengan Satuan:%)	60	60	100	181.380.000	177.733.868	97,99
	Rata - Rata Ketercapaian Indikator Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya		60	60	100			0,00
	Rata - Rata Ketercapaian Indikator Kegiatan pada Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya		1,5	1,5	100			0,00
III.	PROGRAM PENGELOLAAN MUSEUM KABUPATEN/KOTA	Persentase Peningkatan Kunjungan Museum (Dengan Satuan:%)	60,00	60,00	100	662.960.000	506.035.970	76,33
	Rata - Rata Ketercapaian Indikator Program Pengelolaan Museum Kabupaten/ Kota		60,00	60,00	100			0,00
	Rata - Rata Ketercapaian Indikator Kegiatan pada Program Pengelolaan Museum Kabupaten/ Kota		1	1	100			0,00

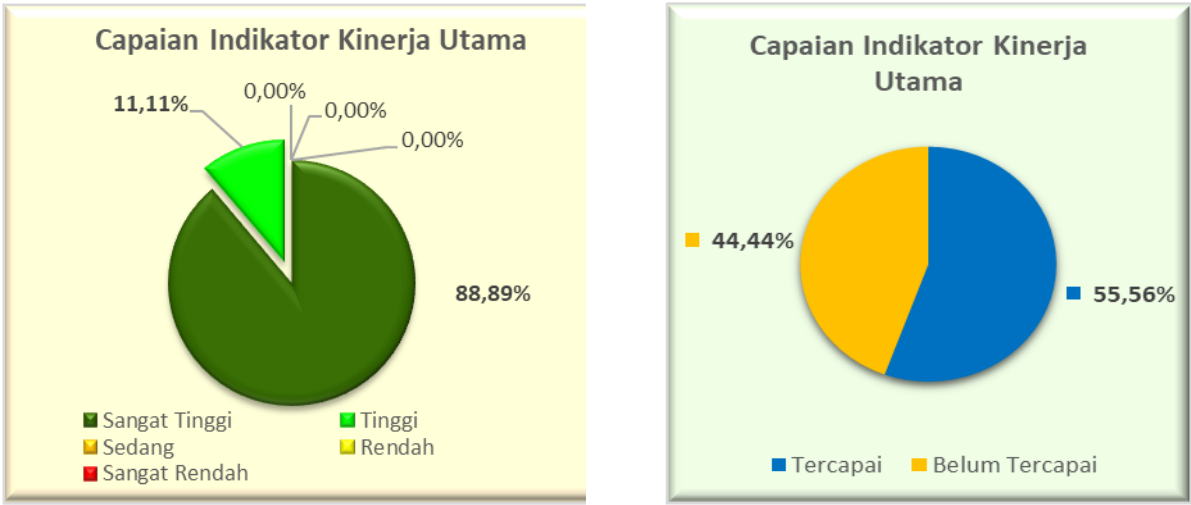
Secara umum efektifitas anggaran terhadap capaian Urusan Kebudayaan Kabupaten Demak, dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan efektif terhadap capaian kinerja misi organisasi.

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Berdasarkan pengukuran kinerja outcome, rata-rata capaian Indikator Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak Tahun 2025 adalah sebesar 97,61% meningkat dibandingkan dengan tahun lalu sebesar 95,29%. Dari 9 Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak pada Tahun 2025, Pencapaian sasaran strategis dalam Penetapan Kinerja Tahun 2025 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak dengan rincian sebanyak 8 Indikator Kinerja (88,89%) capaian kinerjanya sangat tinggi, 1 Indikator Kinerja (11,11%) capaian kinerjanya tinggi, Indikator Kinerja sedang, Indikator Kinerja baik, dan tidak ada indikator kinerjanya kurang, Berikut tabel rekapitulasi tingkat pencapaian Indikator Kinerja selama Tahun 2025 :

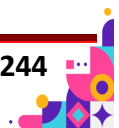
Urutan	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Jumlah IKU	Persentase
I	Lebih >= 91%	Sangat Tinggi	8	88,89
II	75% sampai < 90%	Tinggi	1	11,11
III	66% sampai 75%	Sedang	0	0,00
IV	51% sampai 65	Rendah	0	0,00
V	Kurang 50%	Sangat Rendah	0	0,00

Gambar 3.1. Grafik Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025



Berdasarkan pengukuran kinerja keuangan, rata-rata capaian kinerja keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak Tahun 2025 adalah sebesar 95,50% menurun dibandingkan dengan tahun 2024 yang tercapai sebesar 97,84% meningkat dibandingkan tahun lalu 95,29%. dari sebanyak 7 program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, pada tahun ini capaian kinerja keuangannya sangat tinggi sebanyak 4 Program (66,67%), program capaian kinerja keuangannya tinggi tercapai sebanyak 2 Program (33,33%),

sedangkan capaian kinerja kategori capaian sangat rendah 1 Program (14,29%) dan rendah tidak ada, capaian kinerja belum terlaksana secara maksimal di sebabkan oleh DAK Bidang Pendidikan dan Bidang Kebudayaan karena tidak bisa dilaksanakan karena perubahan juknis sudah tidak relevan dilaksanakan. Persentase Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak Tahun 2025.

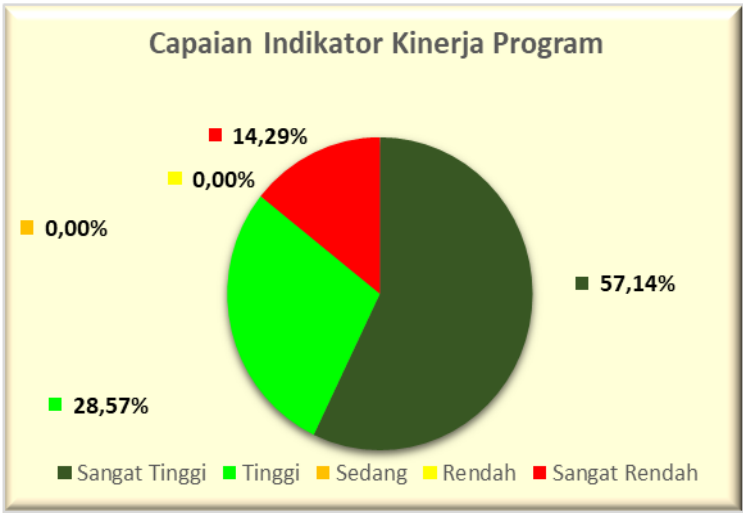


Berikut tabel rekapitulasi tingkat pencapaian kinerja keuangan pada duabelas program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak selama Tahun 2025.

Urutan	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Jumlah Program	Persentase
I	Lebih >= 91%	Sangat Tinggi	4	57,14
II	75% sampai < 90%	Tinggi	2	28,57
III	66% sampai 75%	Sedang	0	0,00
IV	51% sampai 65	Rendah	0	0,00
V	Kurang 50%	Sangat Rendah	1	14,29
		JUMLAH	7	100,00

Berdasarkan pada hasil perhitungan pengukuran pencapaian sasaran (PPS) yang telah di lakukan di atas dengan membandingkan antara rencana pencapaian target dengan realisasi yang ada berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan, dapat diketahui bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada Tahun Anggaran 2025 **dikategorikan SANGAT TINGGI**.

Gambar 3.2. Grafik Capaian Kinerja dan Keuangan Tahun 2025



Meskipun telah banyak kinerja dihasilkan selama Tahun 2025, namun masih banyak permasalahan dalam bidang pendidikan, dan Kebudayaan yang perlu segera diselesaikan, seperti pengimplementasian kurikulum Merdeka, Sekolah Penggerak, Guru Penggerak, Platform Merdeka Mengajar, Akreditasi sekolah, peningkatan akses jenjang pendidikan anak usia dini sampai jenjang pendidikan sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama, peningkatan mutu pendidikan, peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan, pengelolaan ujian sekolah (US/USBN) Jenjang SD/MI Sederajat, Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) Jenjang SD/MI Sederajat dan SMP/MTs Sederajat, Pendataan Kebudayaan, Pengelolaan

Warisan Budaya, Pengelolaan Warisan Budaya tak Benda, pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, penyebaran guru yang belum merata.

Melihat permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut beberapa program atau kebijakan yang dijalankan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak antara lain program rehabilitasi ruang kelas rusak berat, bantuan siswa miskin, beasiswa kepada siswa berbakat dan berprestasi, Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) untuk Jenjang PAUD, Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (BOP Pendidikan Kesetaraan) untuk Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan SKB (Sanggar Kegiatan Belajar), Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk semua jenjang Pendidikan Dasar, program pendidikan universal, pemberian tunjangan kepada pendidik dan tenaga kependidikan, serta peningkatan kompetensi dan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan, optimalisasi pendataan di Bidang Kebudayaan, Peningkatan Pengelolaan Warisan Budaya dan Peningkatan Pengelolaan Warisan Budaya Tak Benda.







BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak Tahun 2025 merupakan perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, kebijakan, program, dan kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kepada semua elemen masyarakat yang menjadi pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam pelaksanaan pembangunan pendidikan selama 1 (satu) tahun di Kabupaten Demak.

A. TINJAUAN UMUM CAPAIAN KINERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN DEMAK

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak Tahun 2025 merupakan capaian kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Demak selama 1 (satu) tahun dari bulan Januari hingga Desember 2025. Penyusunan laporan ini didasarkan atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Peraturan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Secara umum dapat disimpulkan bahwa Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak telah dapat merealisasikan program dan kegiatan Tahun 2025. Hal ini didukung fakta bahwa kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025 telah berhasil merealisasikan program dan kegiatan yang merupakan penjabaran dari tiga pilar kebijakan Pendidikan Nasional, yaitu: 1) Pemerataan dan Perluasan Akses; 2) Peningkatan Mutu, Relevansi, dan Daya Saing; 3) Penguatan Tata Kelola, Akuntabilitas, dan Citra Publik.

Sehubungan dengan kebijakan pokok perluasan dan pemerataan pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menitik beratkan program-program dalam rangka penyediaan dan pemerataan sarana pendidikan dan tenaga pendidik, serta penyempurnaan manajemen pendidikan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perbaikan mutu pendidikan.

Berdasarkan pengukuran kinerja outcome, rata-rata capaian Indikator Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak Tahun 2025 adalah sebesar 97,61% meningkat dibandingkan dengan tahun lalu sebesar 95,29%. Dari

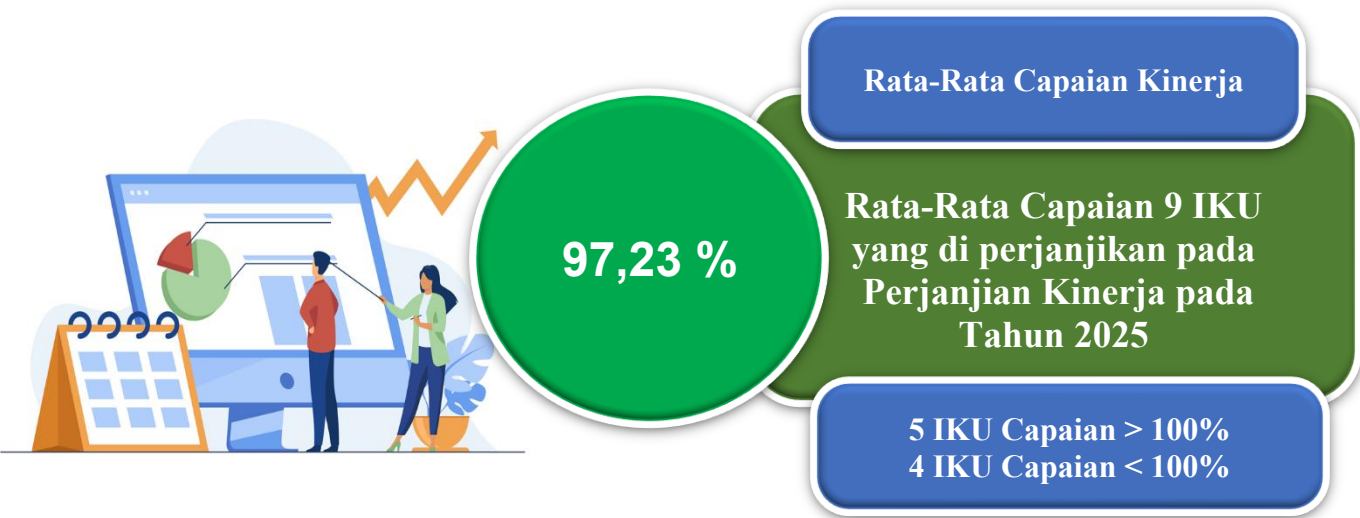


9 Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak pada Tahun 2025, Pencapaian sasaran strategis dalam Penetapan Kinerja Tahun 2025 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak dengan rincian sebanyak 8 Indikator Kinerja (88,89%) capaian kinerjanya sangat tinggi, 1 Indikator Kinerja (11,11%) capaian kinerjanya tinggi, Indikator Kinerja sedang, Indikator Kinerja baik, dan tidak ada indikator kinerjanya kurang, Berikut tabel rekapitulasi tingkat pencapaian Indikator Kinerja selama Tahun 2025:

Urutan	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Jumlah IKU	Persetase
I	Lebih >= 91%	Sangat Tinggi	8	88,89
II	75% sampai < 90%	Tinggi	1	11,11
III	66% sampai 75%	Sedang	0	0,00
IV	51% sampai 65	Rendah	0	0,00
V	Kurang 50%	Sangat Rendah	0	0,00

Berdasarkan pengukuran kinerja keuangan, rata-rata capaian kinerja keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak Tahun 2025 adalah sebesar 95,50% menurun dibandingkan dengan tahun 2024 yang tercapai sebesar 97,84% meningkat dibandingkan tahun lalu 95,29%. dari sebanyak 7 program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, pada tahun ini capaian kinerja keuangannya sangat tinggi sebanyak 4 Program (66,67%), program capaian kinerja keuangannya tinggi tercapai sebanyak 2 Program (33,33%), sedangkan capaian kinerja kategori capaian sangat rendah 1 Program (14,29%) dan rendah tidak ada, capaian kinerja belum terlaksana secara maksimal di sebabkan oleh DAK Bidang Pendidikan dan Bidang Kebudayaan karena tidak bisa dilaksanakan karena perubahan juknis sudah tidak relevan dilaksanakan. Persentase Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak Tahun 2025.

Capaian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak yang dicapai Tahun 2025, dalam mewujudkan Tujuan Strategis (TS) dan Sasaran Strategis (SS) dapat digambarkan sebagai berikut :



Kinerja Anggaran 2025



Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Penyerapan Anggaran
832.956.428.835	795.507.258.382	95,50%

Efesiensi dari Capaian Indikator
 $95,50 / 97,23 = 98,22 \%$

TS.1 *Meningkatnya kinerja pelayanan publik*

Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	90,00	92,83	103,14
Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	%	100	100	100

TS.2 Meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur

Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Nilai SAKIP Dindikbud	Angka	83,69	81,80	97,74
Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target	%	83,69	80,00	95,59

TS.3 Meningkatnya Kualitas Pendidikan

Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Pendidikan	Indeks	0,667	0,648	97,15

SS.1 Meningkatkan partisipasi pendidikan pada jenjang PAUD, Pendidikan dasar, dan pendidikan non formal

Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Angka Harapan Lama Sekolah (AHRLS)	Tahun	14,00	13,37	95,50
Angka Rata-rata Lama Sekolah (ARLS)	Tahun	8,40	8,29	98,69
Persentase Sekolah yang Terakreditasi minimal B	%	83,50	84,14	100,77

TS.4 Meningkatkan pelestarian Warisan Budaya

Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Peningkatan pelestarian warisan budaya	Persentase	5,47	5,47	100
Persentase pelestarian warisan budaya	%	80,00	80,00	100



B. STRATEGI UNTUK PENINGKATAN KINERJA DI MASA MENDATANG

Guna meningkatkan kinerja dan menghadapi tantangan dan perubahan dimasa yang akan datang dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan kebudayaan, langkah-langkah yang akan dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Demak ke depan berfokus pada reformasi birokrasi melalui Zona Integritas (ZI) untuk pelayanan anti-korupsi dan efisien, peningkatan kompetensi guru/tenaga kependidikan, modernisasi sarana prasarana, serta penguatan teknologi informasi dan partisipasi masyarakat. Berikut adalah rincian strategi untuk peningkatan kinerja masa mendatang antara lain :

1. Peningkatan kinerja pelayanan publik melalui **Pengembangan Zona Integritas (ZI)**: Membangun budaya kerja anti-korupsi, bersih, dan melayani di seluruh lingkungan Dindikbud Demak untuk meningkatkan kepercayaan publik
2. Peningkatan akuntabilitas kinerja, melalui **Pemanfaatan Teknologi Informasi**: Digitalisasi tata kelola komunikasi dan administrasi pendidikan agar pelayanan lebih efisien, cepat, dan transparan.
3. Peningkatan layanan pendidikan berkualitas, melalui **Modernisasi Sarana dan Prasarana**: Membangun dan memperbaiki fasilitas sekolah agar memadai untuk menunjang proses pembelajaran yang kondusif.
4. Peningkatan kualitas hasil belajar; **Optimalisasi Program Pendidikan**: Melanjutkan program pendidikan gratis dan bantuan bagi siswa dari keluarga tidak mampu agar akses pendidikan merata;
5. Peningkatan profesionalisme Pendidik dan Tenaga Kependidikan melalui **Peningkatan Kompetensi Pendidik**: Mengadakan pelatihan intensif bagi guru, tenaga kependidikan, serta operator Dapodik agar manajemen pendidikan lebih efektif dan berkualitas.
6. **Peningkatan Partisipasi Masyarakat**: Memperkuat kolaborasi dengan masyarakat dan pemangku kepentingan untuk mendukung program-program pendidikan dan kebudayaan.
7. Peningkatan Pengelolaan Warisan Budaya, melalui melalui **empat pilar utama**: *perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan* berdasarkan UU No. 5 Tahun 2017. Fokus utamanya meliputi pendataan, konservasi fisik, integrasi nilai budaya ke dalam kurikulum pendidikan formal, serta kolaborasi melalui festival budaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan generasi muda.
8. Peningkatan Pengelolaan Warisan Budaya Tak Benda, **melalui integrasi ke dalam kurikulum** (pendidikan formal/nonformal), dokumentasi/penelitian tradisi lisan, dan perlindungan hukum. Upaya ini mencakup perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan untuk memastikan keberlanjutan budaya serta memperkuat identitas kultural generasi muda.

1. Pemanfaatan Laporan Kinerja

Laporan Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025 bukan sekadar dokumen pemenuhan kewajiban administratif, melainkan instrumen strategis untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi hasil (*result-oriented government*).

Data dan analisis yang disajikan dalam laporan ini dimanfaatkan untuk beberapa kepentingan utama, antara lain:

a. Dasar Pengambilan Keputusan dan Kebijakan

Hasil capaian indikator kinerja utama (IKU), seperti **Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)**, **Rata-rata Lama Sekolah (RLS)** dan **Indeks Kebudayaan**, digunakan oleh pimpinan sebagai basis data untuk menentukan arah kebijakan pendidikan di tahun mendatang. Laporan ini memberikan gambaran riil mengenai program mana yang memberikan dampak signifikan dan mana yang memerlukan reorientasi.

b. Perbaikan Perencanaan dan Penganggaran (*Feedback Loop*)

Analisis efisiensi anggaran terhadap capaian output menjadi referensi dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun berikutnya. Pemanfaatan ini bertujuan untuk:

- Mengalokasikan sumber daya pada program prioritas yang belum mencapai target.
- Menghindari inefisiensi pada kegiatan yang memiliki korelasi rendah terhadap tujuan strategis dinas.

c. Instrumen Penguatan Akuntabilitas Publik

Laporan ini berfungsi sebagai media transparansi bagi masyarakat dan pemangku kepentingan terkait (seperti Dewan Pendidikan atau DPRD) mengenai sejauh mana anggaran pendidikan telah dikonversi menjadi layanan nyata, seperti peningkatan mutu guru, bantuan sarana prasarana sekolah, hingga pelestarian cagar budaya.

d. Evaluasi dan Pemberian Reward/Punishment

Secara internal, LKJIP 2025 digunakan untuk mengevaluasi kinerja unit kerja di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Hasil evaluasi ini menjadi dasar bagi pimpinan untuk:

- Memberikan apresiasi atas pencapaian target yang melampaui standar.
- Melakukan pembinaan (*coaching*) dan perbaikan manajerial pada unit yang kinerjanya masih di bawah target.

e. Bahan Integrasi Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPJ/LPPD)

Data capaian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan komponen krusial dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

(AKIP) tingkat kabupaten. Hal ini mengingat sektor pendidikan memiliki bobot besar dalam penilaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) daerah. LKjIP ini akan digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) atau RKPD tahun berikutnya.

Ringkasan Pemanfaatan Berdasarkan Pemangku Kepentingan

Pemangku Kepentingan	Pemanfaatan Utama
Internal Dinas	Perbaikan manajemen internal dan efektivitas kerja.
Kepala Daerah	Penilaian kontribusi sektor pendidikan terhadap visi-misi daerah.
DPRD	Fungsi pengawasan dan penentuan kebijakan anggaran.
Masyarakat	Akses informasi mengenai kualitas layanan pendidikan dan kebudayaan.

2. Timeline Rencana Tindak Lanjut Perbaikan /Peningkatan Kinerja Tahun 2026.

Rencana ini bertujuan untuk menutup celah (gap) antara target yang ditetapkan dengan realisasi yang dicapai pada tahun berjalan.

Fase 1: Evaluasi & Diagnosis (April - Mei)

- **Minggu 1-2 April:** Bedah Hasil Evaluasi AKIP. Mengidentifikasi indikator kinerja yang tidak tercapai (merah) dan menganalisis akar masalahnya (kurangnya anggaran, regulasi yang berubah, atau kendala teknis di lapangan).
- **Minggu 3-4 April:** Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) internal antar bidang (Sekretariat, Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan, Bidang Pendidikan Dasar, PAUD dan PNF, serta Kebudayaan) untuk menyelaraskan persepsi perbaikan.
- **Mei:** Penyusunan dokumen matriks RTL yang memuat: Masalah, Solusi, Penanggung Jawab, dan Target Waktu.

Fase 2: Implementasi Perbaikan Strategis (Juni - September)

- **Juni: Sinkronisasi Anggaran.** Penyesuaian sisa anggaran atau usulan pergeseran anggaran pada Perubahan APBD untuk mendukung indikator kinerja yang masih rendah.
- **Juli - Agustus: Aksi Perbaikan Layanan.**
 - *Sektor Pendidikan:* Percepatan distribusi sarana prasarana sekolah atau pelatihan peningkatan kompetensi guru.
 - *Sektor Kebudayaan:* Optimalisasi program pelestarian warisan budaya atau peningkatan kunjungan museum/situs.



- September:** Penguatan Sistem Informasi Kinerja. Digitalisasi data capaian agar monitoring dapat dilakukan secara *real-time* (e-Performance).

Fase 3: Monitoring & Pengendalian (Oktober - November)

- Oktober:** Monitoring Tengah Tahun (Monev Triwulan III). Memastikan seluruh poin dalam matriks RTL telah berjalan sesuai jadwal.
- November:** Pra-Evaluasi Kinerja. Simulasi penilaian mandiri (*self-assessment*) sebelum memasuki masa penyusunan LKjIP tahun berikutnya.

Fase 4: Finalisasi & Pelaporan (Desember - Januari)

- Desember:** Pengumpulan bukti dukung (*evidence*) kinerja yang telah diperbaiki.
- Januari:** Penyusunan draf LKjIP tahun baru dengan mencantumkan keberhasilan tindak lanjut yang telah dilakukan sebagai poin plus akuntabilitas.

Tabel Matriks Rencana Tindak Lanjut

No	Area Perbaikan	Tindak Lanjut	Output	Batas Waktu
1	Capaian IKU masih rendah	Re-verifikasi data siswa putus sekolah & program kembali ke sekolah.	Dokumen Sebaran Data Siswa	01 Juni 2026
2	Kualitas LKjIP Kurang Tajam	Workshop penyusunan pohon kinerja (Cascading) bagi eselon III & IV.	Pohon Kinerja Selaras	01 Mei 2026
3	Serapan Anggaran Terhambat	Percepatan proses pengadaan barang/jasa melalui e-katalog.	Laporan Realisasi Keuangan	01 Agustus 2026
4	Pelestarian Budaya Rendah	Kolaborasi dengan komunitas lokal untuk event kebudayaan rutin.	Kalender Event Budaya	01 September 2026

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak semoga dapat menjadi bahan pertimbangan /evaluasi untuk kegiatan /kinerja yang akan datang, supaya menjadi lebih baik dan semakin maju pendidikan di Kabupaten Demak. Terimakasih.

Demak, 05 Mei 2026
 Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 Kabupaten Demak



Naris Wahyudi Ridwan, AP, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 197606061995011001





LAMPIRAN 1 - Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja Tahun 2025



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Sultan Trenggono Nomor 89 Demak Kode Pos 59516
Telp. (0291) 685242 Fax. (0291) 685364
Laman : <http://dindikbud.demakkab.go.id> – Pos-el : dindikbud@demakkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Haris Wahyudi Ridwan, AP, M.Si.
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Demak
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : dr. Hj. Eisti'anah, S.E.
Jabatan : Bupati Demak
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, 15 Januari 2025

Pihak Kedua,

dr. Hj. Eisti'anah, S.E.

Pihak Pertama,

Haris Wahyudi Ridwan, AP, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP 197606061995011001



LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN DEMAK

No.	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan pelayanan publik Dindikbud	Indeks Kepuasan Masyarakat	90
1.1.	Meningkatnya kinerja pelayanan publik	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	100
2.	Meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur	Nilai AKIP Nilai SAKIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak	83,69
2.1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja aparatur	Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target	100
3.	Meningkatkan partisipasi pendidikan pada jenjang PAUD, Pendidikan dasar, dan pendidikan non formal.	Harapan Lama Sekolah	14
		Rata-rata lama sekolah	8,4
3.1.	Meningkatnya layanan pendidikan jenjang PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan Non Formal	Persentase Sekolah yang Terakreditasi minimal B	83,50
4.	Meningkatkan pelestarian Warisan Budaya	Persentase peningkatan pelestarian warisan budaya	5,47
4.1.	Meningkatnya pelestarian Warisan Budaya	Persentase Peningkatan pelestarian warisan budaya	80,00

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 605.884.369.964,00	APBD, APBD Provinsi
2.	Program Pengelolaan Pendidikan	Rp. 203.516.410.124,00	APBD, APBN
3.	Program Pengembangan Kurikulum	Rp. 160.000.000,00	APBD
4.	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rp. 985.000.000,00	APBD



5.	Program Pengembangan Kebudayaan	Rp. 1.310.000.000,00	APBD
6.	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Rp. 200.000.000,00	APBD
7.	Program Pengelolaan Permuseuman	Rp. 618.000.000,00	APBD, APBN

Demak, 15 Januari 2025



Bupati Demak,



Mdr Hj. Eisti'annah, S.E.



Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Kabupaten Demak,



Haris Wahyudi Ridwan, AP, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP 197606061995011001



Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Sultan Trenggono Nomor 89, Demak, Jawa Tengah 59516,
Telepon (0291) 685242, Faksimile (0291) 685364,
Laman dindikbud.demakkab.go.id, Pos-el dindikbud@demakkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Haris Wahyudi Ridwan, AP, M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Demak

Selanjutnya disebut pihak *Pertama*

Nama : dr. Hj. Eisti'annah, S.E.
Jabatan : Bupati Demak

Selanjutnya disebut pihak *Kedua*

Pihak pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak Pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, 13 Oktober 2025

Pihak Pertama,

Haris Wahyudi Ridwan, AP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 197606061995011001

Pihak Kedua,



dr. Hj. Eisti'annah, S.E.



LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN DEMAK

No.	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan pelayanan publik Dindikbud	Indeks Kepuasan Masyarakat	94,47
1.1.	Meningkatnya kinerja pelayanan publik	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	100
2	Meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur	Nilai SAKIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak	83,69
2.1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja aparatur	Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target	100
3	Meningkatkan partisipasi pendidikan pada jenjang PAUD, Pendidikan dasar, dan pendidikan non formal.	Harapan Lama Sekolah	14
		Rata-rata lama sekolah	8,34
3.1.	Meningkatnya layanan pendidikan jenjang PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan Non Formal	Persentase Sekolah yang Terakreditasi minimal B	83,5
4	Meningkatkan pelestarian Warisan Budaya	Persentase peningkatan pelestarian warisan budaya	5,47
4.1.	Meningkatnya pelestarian Warisan Budaya	Persentase Peningkatan pelestarian warisan budaya	80,00



	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 625.596.609.871	Sumber Anggaran dari APBDP Kab, APBDP Provinsi
2.	Program Pengelolaan Pendidikan	Rp. 203.139.730.060	Sumber Anggaran dari APBDP Kab. dan APBN
3.	Program Pengembangan Kurikulum	Rp. 160.000.000	Sumber Anggaran dari APBDP
4.	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Rp. 1.526.018.904	Sumber Anggaran dari APBDP Kab.
5.	Program Pengembangan Kebudayaan	Rp. 1.259.730.000	Sumber Anggaran dari APBDP Kab.
6.	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Rp. 181.380.000	Sumber Anggaran dari APBDP Kab.
7.	Program Pengelolaan Permuseuman	Rp. 662.960.000	Sumber Anggaran dari APBDP Kab. dan APBN

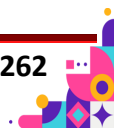
Demak, 13 Oktober 2025

Pihak Pertama,

Pihak Kedua,

 dr. H. Eistilah, S.E.


 Haris Wahyudi Ridwan, AP, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP 197606061995011001



LAMPIRAN 2 – Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2025

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Program dan Kegiatan
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Tahun Anggaran 2025

NO	Program/ Kegiatan	LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)		Persentase
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	
1	2	3	4	5
	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN DEMAK	832.956.428.835	795.507.258.382	95,50%
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	830.852.358.835	793.587.437.428	95,51%
A	► URUSAN SETIAP OPD	625.596.609.871	593.670.462.490	94,90%
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	625.596.609.871	593.670.462.490	94,90%
a)	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	44.325.500	41.996.050	94,74%
	1 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	25.000.000	23.421.250	93,69%
	2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	19.325.500	18.574.800	96,12%
b)	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	621.473.791.856	589.826.124.371	94,91%
	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	619.213.485.297	588.025.876.401	94,96%
	2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.172.556.559	1.719.108.470	79,13%
	3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	87.750.000	81.139.500	92,47%
c)	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	59.799.000	52.125.725	87,17%
	1 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	53.099.000	46.420.725	87,42%
	2 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6.700.000	5.705.000	85,15%
d)	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	348.700.000	341.685.205	97,99%
	1 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	273.700.000	270.231.500	98,73%
	2 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	75.000.000	71.453.705	95,27%
e)	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.624.159.221	1.549.106.296	95,38%
	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	54.216.200	53.290.500	98,29%
	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	194.296.700	192.801.600	99,23%
	3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	73.633.700	69.752.500	94,73%
	4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	76.609.000	72.754.825	94,97%
	5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.400.000	5.400.000	100,00%



NO	Program/ Kegiatan	LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)		Persentase
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	
1	2	3	4	5
	6 Fasilitas Kunjungan Tamu	8.000.000	7.787.500	97,34%
	7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	411.913.621	398.151.521	96,66%
	8 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	24.850.000	9.695.000	39,01%
	9 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	775.240.000	739.472.850	95,39%
f)	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	765.274.846	756.882.344	98,90%
	1 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	350.000.000	346.400.000	98,97%
	2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	219.213.846	218.193.844	99,53%
	3 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.000.000	98.549.000	98,55%
	4 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	96.061.000	93.739.500	97,58%
g)	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	909.026.000	734.775.270	80,83%
	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	5.000.000	100,00%
	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	824.026.000	652.795.270	79,22%
	3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	80.000.000	76.980.000	96,23%
h)	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	371.533.448	367.767.229	98,99%
	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	41.000.000	40.675.650	99,21%
	2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	61.600.000	60.599.255	98,38%
	3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.930.000	14.894.324	99,76%
	4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	209.033.448	207.084.000	99,07%
	5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.370.000	10.135.000	97,73%
	6 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	34.600.000	34.379.000	99,36%
B	► URUSAN PENDIDIKAN	205.255.748.964	199.916.974.938	97,40%
I	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	203.569.730.060	198.637.364.063	97,58%
a)	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	116.318.399.880	114.447.574.250	98,39%
	1 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.700.000.000	1.686.536.000	99,21%
	2 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	150.000.000	148.866.000	99,24%

NO	Program/ Kegiatan	LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)		Persentase
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	
1	2	3	4	5
	3 Pengadaan Mebel Sekolah	800.000.000	783.447.200	97,93%
	4 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	476.050.000	457.726.550	96,15%
	5 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	8.235.721.760	8.165.987.401	99,15%
	6 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	648.000.000	529.286.486	81,68%
	7 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	350.000.000	347.055.550	99,16%
	8 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	92.923.961.600	92.403.783.489	99,44%
	9 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	300.000.000	288.798.600	96,27%
	10 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	135.940.000	32.555.000	23,95%
	11 Pembangunan Ruang Kelas Baru	2.525.000.000	2.489.425.000	98,59%
	12 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	350.930.000	344.384.750	98,13%
	13 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	5.421.671.000	5.316.687.700	98,06%
	14 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	1.325.000.000	1.312.659.075	99,07%
	15 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	976.125.520	140.375.449	14,38%
b)	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	44.305.758.416	43.695.294.182	98,62%
	1 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	650.000.000	646.423.000	99,45%
	2 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1.013.281.500	1.007.538.000	99,43%
	3 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	200.000.000	198.647.000	99,32%
	4 Pengadaan Mebel Sekolah	890.000.000	871.970.490	97,97%
	5 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	1.196.745.000	1.118.294.000	93,44%
	6 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	400.000.000	381.403.000	95,35%

NO	Program/ Kegiatan	LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)		Persentase
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	
1	2	3	4	5
7	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	2.315.775.696	2.135.910.089	92,23%
8	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	911.000.000	904.419.549	99,28%
9	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	287.050.000	272.285.000	94,86%
10	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	35.423.601.220	35.259.819.154	99,54%
11	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	72.950.000	53.104.800	72,80%
12	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	9.630.000	7.262.000	75,41%
13	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	307.725.000	245.550.600	79,80%
14	Pembangunan Ruang Kelas Baru	300.000.000	297.330.000	99,11%
15	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	328.000.000	295.337.500	90,04%
c)	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	32.214.427.878	30.990.536.166	96,20%
1	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	2.077.937.000	2.055.618.500	98,93%
2	Pengadaan Mebel PAUD	150.000.000	16.110.002	10,74%
3	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	350.000.000	339.300.000	96,94%
4	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	156.903.378	149.839.476	95,50%
5	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	2.772.737.500	2.769.417.788	99,88%
6	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	745.520.000	653.440.550	87,65%
7	Pengelolaan Dana BOP PAUD	23.896.658.000	23.883.372.000	99,94%
8	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	109.250.000	88.872.425	81,35%
9	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	146.500.000	132.482.750	90,43%
10	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	84.000.000	82.880.000	98,67%
11	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	445.000.000	439.786.900	98,83%

NO	Program/ Kegiatan	LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)		Persentase
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	
1	2	3	4	5
	12 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	1.234.922.000	335.000.000	27,13%
	13 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	45.000.000	44.415.775	98,70%
d)	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	10.731.143.886	9.503.959.465	88,56%
	1 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	1.244.050.000	441.017.950	35,45%
	2 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	129.788.886	71.766.684	55,29%
	3 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	1.484.349.000	1.344.247.945	90,56%
	4 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	6.289.090.000	6.278.802.500	99,84%
	5 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	21.239.000	13.370.175	62,95%
	6 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	172.030.000	70.220.500	40,82%
	7 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	90.540.000	43.649.310	48,21%
	8 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	92.600.000	77.363.000	83,55%
	9 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	-	-	0,00%
	10 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	317.457.000	279.942.400	88,18%
	11 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	75.000.000	74.533.500	99,38%
	12 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal	700.000.000	697.040.500	99,58%
	13 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan	115.000.000	112.005.001	97,40%
II	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	160.000.000	77.665.000	48,54%
b)	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	160.000.000	77.665.000	48,54%
	1 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	80.000.000	19.492.500	24,37%
	2 Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	80.000.000	58.172.500	72,72%
III	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	1.526.018.904	1.201.945.875	78,76%
a)	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.526.018.904	1.201.945.875	78,76%



NO	Program/ Kegiatan	LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)		Persentase
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	
1	2	3	4	5
	1 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.516.868.904	1.193.380.875	78,67%
	2 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	9.150.000	8.565.000	93,61%
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
C	► URUSAN KEBUDAYAAN	2.104.070.000	1.919.820.954	91,24%
				-
I	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	1.259.730.000	1.236.051.116	98,12%
a)	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	311.980.000	303.516.491	97,29%
	1 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	139.490.000	133.647.100	95,81%
	2 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	172.490.000	169.869.391	98,48%
b)	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	947.750.000	932.534.625	98,39%
	1 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	947.750.000	932.534.625	98,39%
II	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	181.380.000	177.733.868	97,99%
a)	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	92.130.000	90.869.100	98,63%
	1 Penetapan Cagar Budaya	92.130.000	90.869.100	98,63%
b)	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	89.250.000	86.864.768	97,33%
	1 Pelindungan Cagar Budaya	89.250.000	86.864.768	97,33%
III	PROGRAM PENGELOLAAN MUSEUM KABUPATEN/KOTA	662.960.000	506.035.970	76,33%
a)	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	662.960.000	506.035.970	76,33%
	1 Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi secara Terpadu	191.466.000	66.489.470	34,73%
	2 Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	24.120.000	23.087.000	95,72%
	3 Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	376.534.000	353.873.500	93,98%
	4 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	70.840.000	62.586.000	88,35%
	JUMLAH	832.956.428.835	795.507.258.382	95,50%



LAMPIRAN 3 – Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) 2025

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TERHADAP TARGET RKPD TAHUN 2025 DAN TARGET AKHIR RPJMD
TAHUN 2023 – 2026

No.	Tujuan /Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024 (%)	TAHUN 2025			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s.d. 2025 terhadap Renstra (2026)	Kriteria Penilaian
				Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A	URUSAN SEMUA OPD								
1	Meningkatkan pelayanan publik Dindikbud	1 Indeks Kepuasan Masyarakat	93,57	90,00	92,83	102,76	89,37	103,49	Sangat Tinggi
1.1	Meningkatnya kinerja pelayanan publik	2 Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi
2	Meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur	1 Nilai SAKIP Dindikbud	80,60	100,00	81,80	81,80	83,89	97,51	Tinggi
2.1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja aparatur	2 Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target	71,43	83,69	80,00	95,59	100,00	80,00	Sangat Tinggi
B	URUSAN PENDIDIKAN								
3	Meningkatkan partisipasi pendidikan pada jenjang PAUD, Pendidikan dasar, dan pendidikan non formal.	1 Harapan Lama Sekolah;	13,36	14,00	13,37	95,50	14,17	94,35	Sangat Tinggi
		2 Rata-rata lama sekolah	8,28	8,40	8,29	98,69	8,11	102,22	Sangat Tinggi
3.1	Meningkatnya layanan pendidikan jenjang PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan Non Formal	1 Persentase Sekolah yang Terakreditasi minimal B	77,91	83,50	84,14	100,77	61,71	136,35	Sangat Tinggi
C	URUSAN KEBUDAYAAN								
4	Meningkatkan pelestarian Warisan Budaya	1 Persentase Peningkatan pelestarian warisan budaya	4,48	5,47	5,47	100	6,47	84,54	Sangat Tinggi
4.1	Meningkatnya pelestarian Warisan Budaya	2 Persentase Peningkatan pelestarian warisan budaya	55,56	80,00	80,00	100	100	80,00	Sangat Tinggi

LAMPIRAN 4 – Hasil Pengukuran Kinerja Urusan Pendidikan Terhadap Target Akhir RENSTRA Tahun 2023- 2026

CAPAIAN KINERJA URUSAN PENDIDIKAN TERHADAP TARGET RKPD TAHUN 2025 DAN TARGET AKHIR RPJMD TAHUN 2023- 2026

No.	Indikator Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	TARGET, REALISASI & CAPAIAN					Target Akhir RENSTRA (2026)	Capaian s.d. 2025 terhadap RENSTRA (2026)
			Realisasi		2025				
			2023	2024	Target	Realisasi	Capaian %		
1	2	6	7		8	9	10	11	12
	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN DEMAK								
A	Indeks Pendidikan	Angka	0,646	0,647	0,658	0,648	98,48	0,664	97,59
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	88,26	93,57	90,00	92,83	102,76	89,37	103,49
2	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Nilai SAKIP Dindikbud	Nilai	80,60	80,60	100,00	81,80	81,80	83,89	97,51
4	Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target	%	78,26	71,43	83,69	80,00	95,59	100,00	80,00
5	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,34	13,36	14,00	13,37	95,50	14,17	94,35
6	Rata-rata lama sekolah (RLS)	Tahun	8,27	8,28	8,40	8,29	98,69	8,11	102,22
7	Persentase Sekolah yang Terakreditasi minimal B	%	82,31	77,91	83,50	84,14	100,77	61,71	136,35
8	Persentase Peningkatan pelestarian warisan budaya	%	3,48	4,48	5,47	5,47	100,00	6,47	84,54
9	Persentase Peningkatan pelestarian warisan budaya	%	40,00	55,56	80,00	80,00	100,00	100,00	80,00
A	URUSAN PENDIDIKAN								
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	79,04	86,41	100,00	80,19	80,19	100,00	80,19
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	99,21	99,67	100,00	99,98	99,98	100,00	99,98
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	98,29	99,2	100,00	98,24	98,24	100,00	98,24
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	11,59	16,78	100,00	18,77	18,77	82,40	22,78
5	Persentase sekolah yang menerapkan muatan lokal daerah	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	Persentase tenaga pendidik yang tersertifikasi	%	54,50	63,02	51,12	71,36	139,59	51,62	138,24



No.	Indikator Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	TARGET, REALISASI & CAPAIAN					Target Akhir RENSTRA (2026)	Capaian s.d. 2025 terhadap RENSTRA (2026)
			Realisasi		2025				
			2023	2024	Target	Realisasi	Capaian %		
1	2	6	7		8	9	10	11	12
7	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat.	%	90,47	91,08	95,73	98,46	102,85	95,93	102,64
8	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat.	%	76,19	74,69	97,01	77,19	79,57	97,11	79,49
9	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00
10	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	%	96,66	97,14	82,71	97,78	118,22	100,00	97,78
11	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	%	87,39	86,88	83,71	90,09	107,62	100,00	90,09
12	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	%	100,31	99,44	108,69	101,72	93,59	108,89	93,42
13	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.	%	103,22	104,28	103,38	104,87	101,44	108,58	96,58
14	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	%	88,83	70,66	66,96	0,00	0,00	67,01	0,00
15	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
16	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	%	99,50	96,53	99,73	97,10	97,36	99,74	97,35
17	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.	%	97,15	99,14	96,20	99,27	103,19	100,00	99,27
18	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)	%	81,25	82,59	80,57	84,71	105,14	80,79	104,85
19	Persentase guru TK, SD, SMP yang bersertifikat pendidik.	%	56,85	75,79	51,12	86,75	169,71	51,62	168,06
B	URUSAN KEBUDAYAAN								
20	Persentase Peningkatan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya di luar museum yang dilestarikan	%	3,48	4,48	5,47	5,47	100,00	6,47	84,54
21	Persentase peningkatan kunjungan museum	%	40,00	60,00	70,00	70,00	100,00	100,00	70,00
22	Prosentase Peningkatan penyelenggaraan event kebudayaan	%	40,00	55,56	80,00	80,00	100,00	100,00	80,00



LAMPIRAN 5 – Prestasi dan Penghargaan

PRESTASI DAN PENGHARGAAN

NO	NAMA PRESTASI	TANGGAL/ TAHUN DITERIMA	DISERAHKAN OLEH	DITERIMAKAN KEPADA	KETERANGAN	TINGKAT	
						NASIONAL	PROVINSI
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Peserta Didik Program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) atas peningkatan Kompetensi yang signifikan dan menjadi contoh aspiratif sebagai Praktik Baik Hasil Program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK)	15 Desember 2025	Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus Kemendikdasmen	Thaariq Fajar Fahreza	Peserta Program PKK dengan Kondisi Anak Berkebutuhan Khusus	V	
2	Juara 3 Lomba Tutor Kesetaraan Pembuatan Media Pembelajaran Digital Menggunakan Aplikasi	13 Juli 2025	Ketua Panitia Jambore Kesetaraan Provinsi Jawa Tengah	Siti Nur Afifah			V
3	Peserta Apresiasi Bunda PAUD Tingkat Nasional Tahun 2025	13 November 2025	Dirjen PAUD Dikdasmen Kemendikdasmen	dr. Hj. Eistianah,S.E.		V	
4	Peringkat IV Apresiasi Bunda PAUD Provinsi Jawa Tengah	17 Desember 2025	Bunda PAUD Provinsi Jawa Tengah	dr. Hj. Eistianah,S.E.			V
5	Peringkat II Bunda PAUD Kabupaten/Kota Kategori Perluasan Akses	17 Desember 2025	Bunda PAUD Provinsi Jawa Tengah	dr. Hj. Eistianah,S.E.			V
6	Peringkat II Bunda PAUD Kabupaten/Kota Kategori Peningkatan Mutu	17 Desember 2025	Bunda PAUD Provinsi Jawa Tengah	dr. Hj. Eistianah,S.E.			V
7	Bunda PAUD Kabupaten/Kota Kategori Peduli	17 Desember 2025	Bunda PAUD Provinsi Jawa Tengah	dr. Hj. Eistianah,S.E.			V
8	Bunda PAUD Kecamatan Kategori Peduli	17 Desember 2025	Bunda PAUD Provinsi Jawa Tengah	Bunda PAUD Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak (SRI WIJI, S.ST., S.Keb., Bdn., M.Kes)			V



NO	NAMA PRESTASI	TANGGAL/ TAHUN DITERIMA	DISERAHKAN OLEH	DITERIMAKAN KEPADA	KETERANGAN	TINGKAT	
						NASIONAL	PROVINSI
1	2	3	4	5	6	7	8
9	Bunda PAUD Desa/Kelurahan Kategori Peduli	17 Desember 2025	Bunda PAUD Provinsi Jawa Tengah	Bunda PAUD Desa Gajah, Kec. Gajah, Kab. Demak (Hj. AHADIAH SHOFIANA, S.H.)			V
10	Terbaik 1 Kategori Pelopor Komunitas pada Apresiasi GTK Tahun 2025	17 Nopember 2025	BBGTK Provinsi Jawa Tengah	Eko Sudinuryanto, S.Pd., M.Pd, SMP Negeri 2 Demak	Maju ke tingkat nasional		BBGTK Provinsi Jawa Tengah
11	Terbaik 2 Kategori Transformatif Tenaga Perpustakaan(TPS) Apresiasi GTK Tahun 2025	17 November 2025	BBGTK Provinsi Jawa Tengah	Sri Mulyati,S.I.Pust- Pustakawan SD Negeri Merak 2,Kecamatan Dempet,Kabupa ten Demak			BBGTK Provinsi Jawa Tengah
12	Juara 2 Olimpiade Sains Nasional Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial Jenjang Sekolah Dasar	27 September 2025	Balai Pengembangan Talenta Indonesia Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	Firman Athar Rasyadan (SDS IT Kota Wali)		Balai Pengembang an Talenta Indonesia Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	
13	Sekolah Adiwiyata Nasional 2025	24 November 2025	Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	SDN Krajanbogo		Kementerian Lingkungan Hidup/Kepal a Badan Pengendalian Lingkungan Hidup dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	
14	Sekolah Adiwiyata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025	02 Juli 2025	Gubernur Jawa Tengah	SDN Kedungwaru Kidul 1			Gubernur Jawa Tengah
15	Juara Harapan 1 Kategori Puti Lomba Komedi Tunggal (Ndagel Ijen) Festival Tunas Bahasa Ibu	16 Oktober 2025	Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah	Tasya Indana Zahrotuzzulfa (SD Negeri Kedondong 1 Gajah)			Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah
16	Juara 2 Cabang Pengetahuan PAI dan BTQ Kategori Putri Lomba Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Seni Islami (MAPSI) Jenjang SD	20 Oktober 2025	Kelompok Kerja Guru Pendidikan Agama Islam SD Provinsi Jawa Tengah	Ana Zulfa Aulia (SD Negeri Rejosari 1)			Kelompok Kerja Guru Pendidikan Agama Islam SD Provinsi Jawa Tengah



NO	NAMA PRESTASI	TANGGAL/ TAHUN DITERIMA	DISERAHKAN OLEH	DITERIMAKAN KEPADA	KETERANGAN	TINGKAT	
						NASIONAL	PROVINSI
1	2	3	4	5	6	7	8
17	Juara Harapan 2 Cabang Seni Khat Alquran Kategori Putri Lomba Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Seni Islami (MAPSI) Jenjang SD	20 Oktober 2025	Kelompok Kerja Guru Pendidikan Agama Islam SD Provinsi Jawa Tengah	Putri Aishah Amilati (SD Negeri Tempuran 1)			Kelompok Kerja Guru Pendidikan Agama Islam SD Provinsi Jawa Tengah
18	Juara 3 Pencak Silat Putra Olimpiade Olahraga Siswa Nasional Jenjang SD	22 Juli 2025	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	Asaki Sigap Permana (SD Negeri Rejosari 1)			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah

Sumber : Dindikbud 2025



LAMPIRAN 6 – Pelaksanaan APBD Tahun 2025

Pelaksanaan APBD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025

NO. REKENING	Urusan/PROGRAM / KEGIATAN / SUB.KEGIATAN	INDIKATOR (OUTPUT/OUTCOME)	TARGET 2025		PAGU 2025			Target Kinerja Triwulan (APBD)				Realisasi Kinerja (APBD)				REALISASI ANGGARAN s.d. TW IV (Rp)	CAPAIAN (%)	
			RKPD P	APBD	RKPD P	APBD	APBD P	I	II	III	IV	I	II	III	IV		KINERJA	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/5*100	19=17/8*100
1.01	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB. DEMAK	Indeks Pendidikan	0,667	0,667	826.697.275.835	812.673.780.088	832.956.428.835	0,646	0,646	0,646	0,67	0,646	0,646	0,646	0,648	795.507.258.382	97,15	95,50
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS)	14,00	14,00	824.593.205.835	810.545.780.088	830.852.358.835	13,36	13,36	13,36	14,00	13,37	13,36	13,36	13,37	793.587.437.428	95,50	95,51
		Angka Rata-rata Lama Sekolah (ARLS)	8,40	8,40				8,27	8,27	8,27	8,40	8,29	8,28	8,28	8,29		98,69	0,00
1.01.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN		100	100,00	619.788.395.871	605.884.369.964	625.596.609.871	100	100	100	100	100	100	100	100	593.670.462.490	100,00	94,90
1.01.	► URUSAN SETIAP OPD		100	100,00	619.788.395.871	605.884.369.964	625.596.609.871	100	100	100	100	100	100	100	100	593.670.462.490	100,00	94,90
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Dindikbud yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan:%)	100	100	615.888.964.356	602.780.694.771	621.518.117.356	100	100	100	100	100	100	100	100	589.868.120.421	100,00	94,91
		Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan (Dengan Satuan:%)	100	100	3.899.431.515	3.103.675.193	4.078.492.515	100	100	100	100	100	100	100	100	3.802.342.069	100,00	93,23
1.01.01.2.01.	1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja daerah (Dengan Satuan : Laporan)	7	7	44.325.500	45.065.500	44.325.500	1	1	1	4	0	0	2	5	41.996.050	100,00	94,74
1.01.01.2.01.0001	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	0	0	N/A	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0,00	0,00
1.01.01.2.01.0002	2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1	25.000.000	25.000.000	25.000.000	0	0	0	1	0	0	1	0	23.421.250	100,00	93,69
1.01.01.2.01.0004	3 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0	0	0	N/A	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0,00	0,00
1.01.01.2.01.0006	4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	4	19.325.500	20.065.500	19.325.500	1	1	1	1	0	0	1	3	18.574.800	100,00	96,12

NO. REKENING	Urusan/PROGRAM / KEGIATAN / SUB.KEGIATAN	INDIKATOR (OUTPUT/OUTCOME)	TARGET 2025		PAGU 2025			Target Kinerja Triwulan (APBD)				Realisasi Kinerja (APBD)				REALISASI ANGGARAN s.d. TW IV (Rp)	CAPAIAN (%)	
			RKPD P	APBD	RKPD P	APBD	APBD P	I	II	III	IV	I	II	III	IV		KINERJA	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/5*100	19=17/8*100
1.01.01.2.02	2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	615.844.638.856	602.735.629.271	621.473.791.856	0	0	0	1	0	0	0	1	589.826.124.371	100,00	94,91
1.01.01.2.02.0001	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	5.236	5.236	613.584.332.297	599.234.130.288	619.213.485.297	5236	5236	5236	5236	5236	5236	5236	5236	588.025.876.401	100,00	94,96
1.01.01.2.02.0002	2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	1	2.172.556.559	3.436.498.983	2.172.556.559	0	0	0	1	0	0	0	1	1.719.108.470	100,00	79,13
1.01.01.2.02.0003	3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0	0	0	N/A	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0,00	0,00
1.01.01.2.02.0005	4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	87.750.000	65.000.000	87.750.000	0	0	0	1	0	0	0	1	81.139.500	100,00	92,47
1.01.01.2.03	3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3	3	59.799.000	40.000.000	59.799.000	0	0	1	3	0	0	1	3	52.125.725	100,00	87,17
1.01.01.2.03.0005	1 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	2	53.099.000	30.000.000	53.099.000	0	0	1	1	0	0	1	1	46.420.725	100,00	87,42
1.01.01.2.03.0006	2 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	2	6.700.000	10.000.000	6.700.000	0	0	0	2	0	0	0	2	5.705.000	100,00	85,15
1.01.01.2.05	4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi (Dengan Satuan: %)	100	100	348.700.000	400.000.000	348.700.000	200	0	500	0	0	0	600	100	341.685.205	100,00	97,99
1.01.01.2.05.0001	1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah sarana dan prasarana yang disiplin (Dengan Satuan:Orang)	0	0	N/A	N/A	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0,00	-
1.01.01.2.05.0002	2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang disediakan (Dengan Satuan:Unit)	0	0	0	N/A	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0,00	0,00
1.01.01.2.05.0009	3 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100	100	273.700.000	325.000.000	273.700.000	100	0	0	0	0	0	100	0	270.231.500	100,00	98,73
1.01.01.2.05.0010	4 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah sosialisasi peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan (Dengan Satuan:Orang)	600	600	75.000.000	75.000.000	75.000.000	100	0	500	0	0	0	500	100	71.453.705	100,00	95,27
1.01.01.2.06	5 Administrasi Umum Perangkat Daerah	administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi (Dengan Satuan:%)	100	100	1.624.159.221	1.631.999.193	1.624.159.221	0	0	13	2	0	0	7	8	1.549.106.296	100,00	95,38



NO. REKENING	Urusan/PROGRAM / KEGIATAN / SUB.KEGIATAN	INDIKATOR (OUTPUT/OUTCOME)	TARGET 2025		PAGU 2025			Target Kinerja Triwulan (APBD)				Realisasi Kinerja (APBD)				REALISASI ANGGARAN s.d. TW IV (Rp)	CAPAIAN (%)	
			RKPD P	APBD	RKPD P	APBD	APBD P	I	II	III	IV	I	II	III	IV		KINERJA	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/5*100	19=17/8*100
1.01.01.2.06.0001	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	54.216.200	54.216.200	54.216.200	0	0	1	0	0	0	1	0	53.290.500	100,00	98,29
1.01.01.2.06.0002	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1	194.296.700	171.576.700	194.296.700	0	0	1	0	0	0	1	0	192.801.600	100,00	99,23
1.01.01.2.06.0003	3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	1	73.633.700	73.633.700	73.633.700	0	0	1	0	0	0	0	1	69.752.500	100,00	94,73
1.01.01.2.06.0004	4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0	0	N/A	N/A	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0,00	-
1.01.01.2.06.0005	5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	2	76.609.000	76.609.000	76.609.000	0	0	2	0	0	0	0	2	72.754.825	100,00	94,97
1.01.01.2.06.0006	6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1	1	5.400.000	5.400.000	5.400.000	0	0	1	0	0	0	1	0	5.400.000	100,00	100,00
1.01.01.2.06.0008	7 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	1	8.000.000	18.000.000	8.000.000	0	0	1	0	0	0	1	0	7.787.500	100,00	97,34
1.01.01.2.06.0009	8 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6	6	411.913.621	407.563.593	411.913.621	0	0	5	1	0	0	2	4	398.151.521	100,00	96,66
1.01.01.2.06.0010	9 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip Dinamis yang tertata (Dengan Satuan:arsip)	1	1	24.850.000	N/A	24.850.000	0	0	0	0	0	0	0	0	9.695.000	0,00	39,01
1.01.01.2.06.0011	10 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2	2	775.240.000	825.000.000	775.240.000	0	0	1	1	0	0	1	1	739.472.850	100,00	95,39
1.01.01.2.07	6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan (Dengan Satuan:paket)	1	1	661.213.846	-	765.274.846	0	0	0	5	0	0	0	5	756.882.344	100,00	98,90
1.01.01.2.07.0001	1 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0	0	0	N/A	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0,00	0,00
1.01.01.2.07.0002	2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	1	350.000.000	N/A	350.000.000	0	0	0	1	0	0	0	1	346.400.000	100,00	98,97
1.01.01.2.07.0005	3 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	0	0	N/A	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0,00	0,00

NO. REKENING	URUSAN/PROGRAM / KEGIATAN / SUB.KEGIATAN	INDIKATOR (OUTPUT/OUTCOME)	TARGET 2025		PAGU 2025			Target Kinerja Triwulan (APBD)				Realisasi Kinerja (APBD)				REALISASI ANGGARAN s.d. TW IV (Rp)	CAPAIAN (%)	
			RKPD P	APBD	RKPD P	APBD	APBD P	I	II	III	IV	I	II	III	IV		KINERJA	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/5*100	19=17/8*100
1.01.01.2.07.0006	4 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	0	152.713.846	N/A	219.213.846	0	0	0	1	0	0	0	1	218.193.844	100,00	99,53
1.01.01.2.07.0007	5 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	0	N/A	N/A	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0,00	-
1.01.01.2.07.0008	6 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	0	N/A	N/A	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0,00	-
1.01.01.2.07.0009	7 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2	2	100.000.000	N/A	100.000.000	0	0	0	2	0	0	0	2	98.549.000	100,00	98,55
1.01.01.2.07.0010	8 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	0	58.500.000	N/A	96.061.000	0	0	0	1	0	0	0	1	93.739.500	100,00	97,58
1.01.01.2.07.0011	9 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	0	0	N/A	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0,00	0,00
1.01.01.2.08	8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan yang tersedia (Dengan Satuan:%)	100	100	922.626.000	909.026.000	909.026.000	0	0	3	0	0	0	3	0	734.775.270	100,00	80,83
1.01.01.2.08.0001	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	1	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0	1	0	0	0	1	0	5.000.000	100,00	100,00
1.01.01.2.08.0002	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	1	824.026.000	824.026.000	824.026.000	0	0	1	0	0	0	1	0	652.795.270	100,00	79,22
1.01.01.2.08.0004	3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor (Jasa Kebersihan) (Dengan Satuan : layanan)	1	1	93.600.000	80.000.000	80.000.000	0	0	1	0	0	0	1	0	76.980.000	100,00	96,23
1.01.01.2.09	9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya BMD penunjang urusan pemerintahan daerah (Dengan Satuan:bulan)	1	1	282.933.448	122.650.000	371.533.448	0	0	0	1	0	0	1	0	367.767.229	100,00	98,99
1.01.01.2.09.0001	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	1	41.000.000	34.000.000	41.000.000	0	0	1	0	0	0	1	0	40.675.650	100,00	99,21

NO. REKENING	URUSAN/PROGRAM / KEGIATAN / SUB.KEGIATAN	INDIKATOR (OUTPUT/OUTCOME)	TARGET 2025		PAGU 2025			Target Kinerja Triwulan (APBD)				Realisasi Kinerja (APBD)				REALISASI ANGGARAN s.d. TW IV (Rp)	CAPAIAN (%)		
			RKPD P	APBD	RKPD P	APBD	APBD P	I	II	III	IV	I	II	III	IV		KINERJA	ANGGARAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/5*100	19=17/8*100	
1.01.01.2.09.0002	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	59	59	48.000.000	41.000.000	61.600.000	14	15	50	0	0	0	50	29	60.599.255	100,00	98,38
1.01.01.2.09.0005	3	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0	0	0	N/A	-	0	0	0	0	0	0	1	0	-	0,00	0,00
1.01.01.2.09.0006	4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50	50	14.930.000	37.650.000	14.930.000	0	0	40	10	0	0	40	10	14.894.324	100,00	99,76
1.01.01.2.09.0009	5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	2	134.033.448	N/A	209.033.448	0	0	0	2	0	0	0	2	207.084.000	100,00	99,07
1.01.01.2.09.0010	6	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	0	10.370.000	N/A	10.370.000	0	0	6	0	0	0	3	3	10.135.000	100,00	97,73
1.01.01.2.09.0011	7	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	3	34.600.000	10.000.000	34.600.000	0	0	0	3	0	0	0	3	34.379.000	100,00	99,36
																		0,00	
.1.01	URUSAN PENDIDIKAN	Angka Harapan Lama Sekolah (AHLs)	14,00	14,00	204.804.809.964	204.661.410.124	205.255.748.964	13,36	13,36	13,36	14,00	13,37	13,36	13,36	13,37	199.916.974.938	95,50	97,40	
		Angka Rata-rata Lama Sekolah (ARLS)	8,40	8,40				8,27	8,27	8,27	8,40	8,29	8,28	8,28	8,29		98,69	0,00	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 15 Tahun	100	100	203.118.791.060	203.516.410.124	203.569.730.060	98,90	98,90	100	100	98,90	98,90	99,06	99,46	198.637.364.063	99,46	97,58	
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (Dengan Satuan:%)	100	100	115.688.399.880	115.635.398.824	116.318.399.880	99,67	99,67	100	100	99,67	99,67	99,68	99,98	114.447.574.250	99,98	98,39	
		Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama (Dengan Satuan:%)	100	100	44.305.758.416	44.044.762.300	44.305.758.416	99,20	99,20	99,20	100	99,20	99,20	99,20	98,24	43.695.294.182	98,24	98,62	
		Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (Dengan Satuan:%)	100	100	32.214.427.878	32.660.814.000	32.214.427.878	86,41	86,41	86,41	100	86,41	86,41	86,41	80,19	30.990.536.166	80,19	96,20	



NO. REKENING	URUSAN/PROGRAM / KEGIATAN / SUB.KEGIATAN		INDIKATOR (OUTPUT/OUTCOME)	TARGET 2025		PAGU 2025			Target Kinerja Triwulan (APBD)				Realisasi Kinerja (APBD)				REALISASI ANGGARAN s.d. TW IV (Rp)	CAPAIAN (%)	
				RKPD P	APBD	RKPD P	APBD	APBD P	I	II	III	IV	I	II	III	IV		KINERJA	ANGGARAN
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/5*100	19=17/8*100
			Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (Dengan Satuan:%)	100	100	10.910.204.886	11.175.435.000	10.731.143.886	16,78	16,78	16,78	100	16,78	16,78	16,78	18,77	9.503.959.465	18,77	88,56
1.01.02.2.01	1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat (Dengan Satuan:%)	95,73	95,73	115.688.399.880	115.635.398.824	116.318.399.880	93,63	94,33	95,03	95,73	94,73	98,45	95,73	98,46	114.447.574.250	102,85	98,39
1.01.02.2.01.0002	1	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	0	0	N/A	N/A	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0,00	-
1.01.02.2.01.0003	2	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	3	3	0	N/A	-	0	0	3	0	0	0	0	0	-	0,00	0,00
1.01.02.2.01.0004	3	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	6	6	0	N/A	-	0	0	6	0	0	0	0	0	-	0,00	0,00
1.01.02.2.01.0005	4	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	8	8	0	N/A	-	0	0	8	0	0	0	0	0	-	0,00	0,00
1.01.02.2.01.0006	5	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	37	37	1.500.000.000	450.000.000	1.700.000.000	0	0	30	7	0	0	0	37	1.686.536.000	100,00	99,21
1.01.02.2.01.0007	6	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	0	0	N/A	N/A	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0,00	-
1.01.02.2.01.0008	7	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	0	0	N/A	N/A	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0,00	-
1.01.02.2.01.0009	8	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4	4	150.000.000	N/A	150.000.000	0	0	0	4	0	0	0	4	148.866.000	100,00	99,24
1.01.02.2.01.0010	9	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0	0	0	N/A	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0,00	0,00
1.01.02.2.01.0011	10	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0	0	0	N/A	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0,00	0,00
1.01.02.2.01.0012	11	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	0	0	N/A	N/A	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0,00	-

NO. REKENING	Urusan/PROGRAM / KEGIATAN / SUB.KEGIATAN	INDIKATOR (OUTPUT/OUTCOME)	TARGET 2025		PAGU 2025			Target Kinerja Triwulan (APBD)				Realisasi Kinerja (APBD)				REALISASI ANGGARAN s.d. TW IV (Rp)	CAPAIAN (%)	
			RKPD P	APBD	RKPD P	APBD	APBD P	I	II	III	IV	I	II	III	IV		KINERJA	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/5*100	19=17/8*100
1.01.02.2.01.0013	12 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0	0	N/A	N/A	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0,00	-
1.01.02.2.01.0014	13 Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	5	5	800.000.000	600.000.000	800.000.000	0	0	3	2	0	0	1	4	783.447.200	100,00	97,93
1.01.02.2.01.0017	14 Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	0	0	N/A	N/A	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0,00	-
1.01.02.2.01.0021	15 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	0	0	N/A	N/A	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0,00	-
1.01.02.2.01.0022	16 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	0	0	N/A	N/A	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0,00	-
1.01.02.2.01.0023	17 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	0	0	N/A	N/A	-	0	0	0	0	N/A	N/A	0	0	-	0,00	-
1.01.02.2.01.0024	18 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	0	0	N/A	N/A	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0,00	-
1.01.02.2.01.0025	19 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	770	770	476.050.000	510.000.000	476.050.000	0	0	500	220	0	0	100	620	457.726.550	100,00	96,15
1.01.02.2.01.0026	20 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	955	955	7.805.721.760	10.020.578.824	8.235.721.760	0	0	955	0	0	0	573	382	8.165.987.401	100,00	99,15
1.01.02.2.01.0027	21 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	202	202	648.000.000	1.350.000.000	648.000.000	0	0	100	102	0	0	60	142	529.286.486	100,00	81,68
1.01.02.2.01.0028	22 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	296	296	350.000.000	350.000.000	350.000.000	0	0	100	196	0	0	60	236	347.055.550	100,00	99,16
1.01.02.2.01.0029	23 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	489	489	92.923.961.600	93.396.438.000	92.923.961.600	0	0	0	489	0	0	0	489	92.403.783.489	100,00	99,44

NO. REKENING	Urusan/PROGRAM / KEGIATAN / SUB.KEGIATAN	INDIKATOR (OUTPUT/OUTCOME)	TARGET 2025		PAGU 2025			Target Kinerja Triwulan (APBD)				Realisasi Kinerja (APBD)				REALISASI ANGGARAN s.d. TW IV (Rp)	CAPAIAN (%)	
			RKPD P	APBD	RKPD P	APBD	APBD P	I	II	III	IV	I	II	III	IV		KINERJA	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/5*100	19=17/8*100
1.01.02.2.01.0030	24 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	490	490	300.000.000	300.000.000	300.000.000	0	0	490	0	0	0	0	490	288.798.600	100,00	96,27
1.01.02.2.01.0031	25 Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	0	0	0	N/A	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0,00	0,00
1.01.02.2.01.0032	26 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0	0	0	N/A	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0,00	0,00
1.01.02.2.01.0038	27 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	4	4	135.940.000	175.000.000	135.940.000	0	0	2	2	0	0	1	3	32.555.000	100,00	23,95
1.01.02.2.01.0046	28 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1.400	1.400	0	N/A	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0,00	0,00
1.01.02.2.01.0047	29 Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	8	8	2.525.000.000	1.000.000.000	2.525.000.000	0	0	4	4	0	0	0	8	2.489.425.000	100,00	98,59
1.01.02.2.01.0048	30 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0	0	0	N/A	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0,00	0,00
1.01.02.2.01.0050	31 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyenggarakan Proses Belajar	490	490	350.930.000	355.000.000	350.930.000	0	0	490	0	0	0	490	0	344.384.750	100,00	98,13
1.01.02.2.01.0051	32 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	9	9	5.421.671.000	4.971.671.000	5.421.671.000	0	0	2	7	0	0	0	9	5.316.687.700	100,00	98,06
1.01.02.2.01.0054	33 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar yang Disediakan	2.550	2.550	1.325.000.000	1.325.000.000	1.325.000.000	0	0	2550	0	0	0	0	2550	1.312.659.075	100,00	99,07
1.01.02.2.01.0055	34 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Disediakan	38	38	976.125.520	831.711.000	976.125.520	0	0	20	18	0	0	2	36	140.375.449	100,00	14,38
1.01.02.2.02	2 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat (Dengan Satuan:%)	97,06	97,01	44.305.758.416	44.044.762.300	44.305.758.416	94,07	95,05	96,03	97,01	76,01	77,18	77,01	77,19	43.695.294.182	79,57	98,62
1.01.02.2.02.0002	1 Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	0	0	N/A	N/A	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0,00	-
1.01.02.2.02.0003	2 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	0	0	0	N/A	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0,00	0,00
1.01.02.2.02.0004	3 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	0	0	0	N/A	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0,00	0,00

NO. REKENING	Urusan/PROGRAM / KEGIATAN / SUB.KEGIATAN	INDIKATOR (OUTPUT/OUTCOME)	TARGET 2025		PAGU 2025			Target Kinerja Triwulan (APBD)				Realisasi Kinerja (APBD)				REALISASI ANGGARAN s.d. TW IV (Rp)	CAPAIAN (%)	
			RKPD P	APBD	RKPD P	APBD	APBD P	I	II	III	IV	I	II	III	IV		KINERJA	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/5*100	19=17/8*100
1.01.02.2.02.0005	4 Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	0	0	0	N/A	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0,00	0,00
1.01.02.2.02.0006	5 Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	0	0	0	N/A	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0,00	0,00
1.01.02.2.02.0011	6 Pembangunan Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun	0	0	0	N/A	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0,00	0,00
1.01.02.2.02.0012	7 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	12	12	650.000.000	400.000.000	650.000.000	0	0	0	12	0	0	0	12	646.423.000	100,00	99,45
1.01.02.2.02.0013	8 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0	0	N/A	N/A	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0,00	-
1.01.02.2.02.0014	9 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	50	50	1.013.281.500	1.228.281.500	1.013.281.500	0	0	0	50	0	0	0	50	1.007.538.000	100,00	99,43
1.01.02.2.02.0015	10 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Jumlah Ruang Guru Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0	0	N/A	N/A	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0,00	-
1.01.02.2.02.0016	11 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0	0	0	N/A	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0,00	0,00
1.01.02.2.02.0017	12 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0	0	0	N/A	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0,00	0,00
1.01.02.2.02.0018	13 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0	0	0	N/A	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0,00	0,00
1.01.02.2.02.0019	14 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	0	0	0	N/A	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0,00	0,00
1.01.02.2.02.0023	15 Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat	0	0	0	N/A	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0,00	0,00
1.01.02.2.02.0024	16 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0	0	200.000.000	N/A	200.000.000	0	0	0	1	0	0	0	1	198.647.000	100,00	99,32
1.01.02.2.02.0025	17 Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	3	3	890.000.000	690.000.000	890.000.000	0	0	0	3	0	0	0	3	871.970.490	100,00	97,97
1.01.02.2.02.0028	18 Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia	0	0	N/A	N/A	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0,00	-

NO. REKENING	Urusan/PROGRAM / KEGIATAN / SUB.KEGIATAN	INDIKATOR (OUTPUT/OUTCOME)	TARGET 2025		PAGU 2025			Target Kinerja Triwulan (APBD)				Realisasi Kinerja (APBD)				REALISASI ANGGARAN s.d. TW IV (Rp)	CAPAIAN (%)	
			RKPD P	APBD	RKPD P	APBD	APBD P	I	II	III	IV	I	II	III	IV		KINERJA	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/5*100	19=17/8*100
1.01.02.2.02.0032	19 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1.500	1.500	1.196.745.000	1.200.000.000	1.196.745.000	0	0	0	1500	0	0	0	1500	1.118.294.000	100,00	93,44
1.01.02.2.02.0035	20 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	0	0	N/A	N/A	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0,00	-
1.01.02.2.02.0036	21 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	0	0	N/A	N/A	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0,00	-
1.01.02.2.02.0037	22 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	0	0	N/A	N/A	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0,00	-
1.01.02.2.02.0038	23 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	3.000	3.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	0	0	0	3000	0	0	0	3000	381.403.000	100,00	95,35
1.01.02.2.02.0039	24 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	319	319	2.315.775.696	3.220.230.800	2.315.775.696	0	0	319	0	0	0	191	0	2.135.910.089	59,87	92,23
1.01.02.2.02.0040	25 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	657	657	911.000.000	911.000.000	911.000.000	0	0	300	357	0	0	100	557	904.419.549	100,00	99,28
1.01.02.2.02.0041	26 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	86	86	287.050.000	300.000.000	287.050.000	0	0	50	36	0	0	30	56	272.285.000	100,00	94,86
1.01.02.2.02.0042	27 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	86	86	35.423.601.220	34.947.250.000	35.423.601.220	0	0	0	86	0	0	0	86	35.259.819.154	100,00	99,54
1.01.02.2.02.0043	28 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	86	86	72.950.000	80.000.000	72.950.000	0	0	50	36	0	0	43	43	53.104.800	100,00	72,80
1.01.02.2.02.0044	29 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU	Jumlah Ruang TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0	0	N/A	N/A	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0,00	-

NO. REKENING	Urusan/PROGRAM / KEGIATAN / SUB.KEGIATAN	INDIKATOR (OUTPUT/OUTCOME)	TARGET 2025		PAGU 2025			Target Kinerja Triwulan (APBD)				Realisasi Kinerja (APBD)				REALISASI ANGGARAN s.d. TW IV (Rp)	CAPAIAN (%)	
			RKPD P	APBD	RKPD P	APBD	APBD P	I	II	III	IV	I	II	III	IV		KINERJA	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/5*100	19=17/8*100
1.01.02.2.02.0045	30 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah	Jumlah Ruang Kepala Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0	0	N/A	N/A	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0,00	-
1.01.02.2.02.0051	31 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	86	86	9.630.000	10.000.000	9.630.000	0	0	0	86	0	0	0	86	7.262.000	100,00	75,41
1.01.02.2.02.0058	32 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	86	86	307.725.000	330.000.000	307.725.000	0	0	86	0	0	0	63	23	245.550.600	100,00	79,80
1.01.02.2.02.0059	33 Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	2	2	300.000.000	100.000.000	300.000.000	0	0	0	2	0	0	0	2	297.330.000	100,00	99,11
1.01.02.2.02.0062	34 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	0	0	0	N/A	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0,00	0,00
1.01.02.2.02.0064	35 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0	0	0	N/A	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0,00	0,00
1.01.02.2.02.0067	36 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang tersedia	3	3	328.000.000	228.000.000	328.000.000	0	0	0	3	0	0	0	3	295.337.500	100,00	90,04
1.01.02.2.03	3 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD Formal (TK/RA/sederajat) (Dengan Satuan:%)	86,00	86,00	32.214.427.878	32.660.814.000	32.214.427.878	89,15	88,10	87,05	86,00	78,01	79,14	79,01	79,15	30.990.536.166	92,03	96,20
1.01.02.2.03.0001	1 Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun	0	0	N/A	N/A	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0,00	-
1.01.02.2.03.0002	2 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	79	79	1.942.937.000	2.581.992.000	2.077.937.000	0	0	0	79	0	0	0	79	2.055.618.500	100,00	98,93
1.01.02.2.03.0003	3 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0	0	N/A	N/A	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0,00	-
1.01.02.2.03.0004	4 Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0	0	N/A	N/A	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0,00	-
1.01.02.2.03.0007	5 Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	15	15	150.000.000	300.000.000	150.000.000	0	0	0	15	0	0	0	15	16.110.002	100,00	10,74
1.01.02.2.03.0010	6 Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Jumlah Peserta Didik yang menerima biaya personil (BASIMDA PAUD) (Dengan Satuan:siswa)	0	0	N/A	N/A	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0,00	-
1.01.02.2.03.0011	7 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	2.742	2.742	350.000.000	350.000.000	350.000.000	0	0	2742	0	0	0	1500	1242	339.300.000	100,00	96,94

NO. REKENING	Urusan/PROGRAM / KEGIATAN / SUB.KEGIATAN	INDIKATOR (OUTPUT/OUTCOME)	TARGET 2025		PAGU 2025			Target Kinerja Triwulan (APBD)				Realisasi Kinerja (APBD)				REALISASI ANGGARAN s.d. TW IV (Rp)	CAPAIAN (%)	
			RKPD P	APBD	RKPD P	APBD	APBD P	I	II	III	IV	I	II	III	IV		KINERJA	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/5*100	19=17/8*100
1.01.02.2.03.0012	8 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	0	0	N/A	N/A	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0,00	-
1.01.02.2.03.0013	9 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah kegiatan Pendampingan	0	0	N/A	N/A	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0,00	-
1.01.02.2.03.0014	10 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Jumlah PAUD yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	0	0	N/A	N/A	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0,00	-
1.01.02.2.03.0015	11 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	20	20	156.903.378	163.728.000	156.903.378	0	0	20	0	0	0	10	10	149.839.476	100,00	95,50
1.01.02.2.03.0016	12 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	2.157	2.157	2.757.737.500	2.769.600.000	2.772.737.500	0	0	0	2157	0	0	0	2157	2.769.417.788	100,00	99,88
1.01.02.2.03.0017	13 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	961	961	745.520.000	750.000.000	745.520.000	0	0	961	0	0	0	576	385	653.440.550	100,00	87,65
1.01.02.2.03.0018	14 Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	995	995	23.896.658.000	23.896.572.000	23.896.658.000	0	0	0	995	0	0	0	995	23.883.372.000	100,00	99,94
1.01.02.2.03.0019	15 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	300	300	109.250.000	110.000.000	109.250.000	0	0	300	0	0	0	30	270	88.872.425	100,00	81,35
1.01.02.2.03.0025	16 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1	1	146.500.000	180.000.000	146.500.000	0	0	0	1	0	0	0	1	132.482.750	100,00	90,43
1.01.02.2.03.0028	17 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	0	0	0	N/A	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0,00	0,00
1.01.02.2.03.0030	18 Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	0	0	0	N/A	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0,00	0,00
1.01.02.2.03.0041	19 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	626	626	84.000.000	84.000.000	84.000.000	0	0	0	626	0	0	0	626	82.880.000	100,00	98,67
1.01.02.2.03.0045	20 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Direhabilitasi Sedang/Berat	13	13	445.000.000	245.000.000	445.000.000	0	0	0	13	0	0	0	13	439.786.900	100,00	98,83
1.01.02.2.03.0046	21 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Disediakan	23	23	1.384.922.000	1.184.922.000	1.234.922.000	0	0	0	23	0	0	0	23	335.000.000	100,00	27,13

NO. REKENING	URUSAN/PROGRAM / KEGIATAN / SUB.KEGIATAN	INDIKATOR (OUTPUT/OUTCOME)	TARGET 2025		PAGU 2025			Target Kinerja Triwulan (APBD)				Realisasi Kinerja (APBD)				REALISASI ANGGARAN s.d. TW IV (Rp)	CAPAIAN (%)	
			RKPD P	APBD	RKPD P	APBD	APBD P	I	II	III	IV	I	II	III	IV		KINERJA	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/5*100	19=17/8*100
1.01.02.2.03.0047	22 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Proses Belajar PAUD yang Diselenggarakan	300	300	45.000.000	45.000.000	45.000.000	0	0	300	0	0	0	0	300	44.415.775	100,00	98,70
1.01.02.2.04	4 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Angka Partisipasi Murni (APM Kesetaraan 7-18 Tahun (Dengan Satuan:%))	64,00	64,00	10.910.204.886	11.175.435.000	10.731.143.886	62,53	63,02	63,51	64,00	61,98	62,99	64,00	65,01	9.503.959.465	101,58	88,56
1.01.02.2.04.0001	1 Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Non Formal/ Kesetaraan yang Telah Dibangun	0	0	N/A	N/A	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0,00	-
1.01.02.2.04.0002	2 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/ Kesetaraan yang Telah Dibangun	0	0	N/A	N/A	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0,00	-
1.01.02.2.04.0003	3 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan yang Direhabilitasi Sedang/Berat	0	0	N/A	N/A	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0,00	-
1.01.02.2.04.0004	4 Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/ Kesetaraan yang Direhabilitasi Sedang/Berat	0	0	N/A	N/A	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0,00	-
1.01.02.2.04.0007	5 Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Mebel Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan yang Tersedia	0	0	N/A	N/A	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0,00	-
1.01.02.2.04.0009	6 Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Perlengkapan Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan yang Tersedia	0	0	N/A	N/A	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0,00	-
1.01.02.2.04.0010	7 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Non Formal/ Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1.003	1.003	1.244.050.000	1.251.250.000	1.244.050.000	0	0	0	1003	0	0	0	1003	441.017.950	100,00	35,45
1.01.02.2.04.0011	8 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Non Formal/ Kesetaraan yang Tersedia	0	0	N/A	N/A	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0,00	-
1.01.02.2.04.0012	9 Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	0	0	N/A	N/A	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0,00	-
1.01.02.2.04.0013	10 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Satuan Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	0	0	N/A	N/A	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0,00	-

NO. REKENING	Urusan/PROGRAM / KEGIATAN / SUB.KEGIATAN	INDIKATOR (OUTPUT/OUTCOME)	TARGET 2025		PAGU 2025			Target Kinerja Triwulan (APBD)				Realisasi Kinerja (APBD)				REALISASI ANGGARAN s.d. TW IV (Rp)	CAPAIAN (%)	
			RKPD P	APBD	RKPD P	APBD	APBD P	I	II	III	IV	I	II	III	IV		KINERJA	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/5*100	19=17/8*100
1.01.02.2.04.0014	11 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	12	12	129.788.886	110.496.000	129.788.886	0	0	12	0	0	0	4	8	71.766.684	100,00	55,29
1.01.02.2.04.0016	12 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	75	75	1.596.310.000	1.754.610.000	1.484.349.000	0	0	75	0	0	0	30	45	1.344.247.945	100,00	90,56
1.01.02.2.04.0017	13 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	25	25	6.289.090.000	6.289.090.000	6.289.090.000	0	0	0	25	0	0	0	25	6.278.802.500	100,00	99,84
1.01.02.2.04.0018	14 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan	26	26	21.239.000	24.989.000	21.239.000	0	0	26	0	0	0	8	18	13.370.175	100,00	62,95
1.01.02.2.04.0022	15 Penyelenggaraan Ujian bagi Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Penyelenggaraan Ujian bagi Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan	0	0	N/A	N/A	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0,00	-
1.01.02.2.04.0027	16 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	2	2	172.030.000	200.000.000	172.030.000	0	0	2	0	0	0	2	0	70.220.500	100,00	40,82
1.01.02.2.04.0028	17 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1	1	90.540.000	100.000.000	90.540.000	0	0	0	1	0	0	0	1	43.649.310	100,00	48,21
1.01.02.2.04.0031	18 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah layanan pendampingan yang diberikan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1	1	92.600.000	100.000.000	92.600.000	0	0	0	1	0	0	0	1	77.363.000	100,00	83,55
1.01.02.2.04.0036	19 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	0	0	0	N/A	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0,00	0,00
1.01.02.2.04.0041	20 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2	2	0	70.000.000	-	0	0	0	2	0	0	0	2	-	100,00	0,00
1.01.02.2.04.0043	21 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0	0	0	N/A	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0,00	0,00
1.01.02.2.04.0046	22 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	5.750	5.750	384.557.000	500.000.000	317.457.000	0	0	0	5750	0	0	0	5750	279.942.400	100,00	88,18

NO. REKENING	Urusan/PROGRAM / KEGIATAN / SUB.KEGIATAN		TARGET 2025		PAGU 2025			Target Kinerja Triwulan (APBD)				Realisasi Kinerja (APBD)				REALISASI ANGGARAN s.d. TW IV (Rp)	CAPAIAN (%)	
			RKPD P	APBD	RKPD P	APBD	APBD P	I	II	III	IV	I	II	III	IV		KINERJA	ANGGARAN
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/5*100	19=17/8*100
1.01.02.2.04.0047	23	Pembangunan Ruang Laboratorium	0	0	0	N/A	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0,00	0,00
1.01.02.2.04.0048	24	Pengadaan Mebel Sekolah	0	0	0	N/A	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0,00	0,00
1.01.02.2.04.0049	25	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1	1	75.000.000	75.000.000	75.000.000	0	0	0	1	0	0	0	1	74.533.500	100,00	99,38
1.01.02.2.04.0050	26	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	0	0	N/A	N/A	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0,00	-
1.01.02.2.04.0052	27	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal	5	5	700.000.000	700.000.000	700.000.000	0	0	0	5	0	0	0	5	697.040.500	100,00	99,58
1.01.02.2.04.0055	28	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan	0	0	115.000.000	N/A	115.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	112.005.001	0,00	97,40
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM		100	100	160.000.000	160.000.000	160.000.000	0	0	0	100	0	0	0	100	77.665.000	100,00	48,54
1.01.03.2.01	1	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	0	0	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	#DIV/0!	0,00
1.01.03.2.01.0001	1	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	0	0	N/A	N/A	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0,00	-
1.01.03.2.01.0002	2	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	0	0	0	N/A	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0,00	0,00
1.01.03.2.01.0004	3	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	0	0	0	N/A	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0,00	0,00
1.01.03.2.01.0007	4	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	0	0	0	N/A	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0,00	0,00
1.01.03.2.02	2	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	2	2	160.000.000	160.000.000	160.000.000	0	0	0	2	0	0	0	2	77.665.000	100,00	48,54

NO. REKENING	Urusan/PROGRAM / KEGIATAN / SUB.KEGIATAN	INDIKATOR (OUTPUT/OUTCOME)	TARGET 2025		PAGU 2025			Target Kinerja Triwulan (APBD)				Realisasi Kinerja (APBD)				REALISASI ANGGARAN s.d. TW IV (Rp)	CAPAIAN (%)	
			RKPD P	APBD	RKPD P	APBD	APBD P	I	II	III	IV	I	II	III	IV		KINERJA	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/5*100	19=17/8*100
1.01.03.2.02.0001	1	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	0	0	N/A	N/A	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0,00	-
1.01.03.2.02.0002	2	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	2	2	80.000.000	80.000.000	80.000.000	0	0	0	2	0	0	0	2	19.492.500	100,00	24,37
1.01.03.2.02.0006	3	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	2	2	80.000.000	80.000.000	80.000.000	0	0	0	2	0	0	0	2	58.172.500	100,00	72,72
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		51,12	51,12	1.526.018.904	985.000.000	1.526.018.904	50,76	50,88	51,00	51,12	50,76	50,88	51,00	71,36	1.201.945.875	99,77	78,76
1.01.04.2.01	1	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal /Kesetaraan	88,97	88,97	1.526.018.904	985.000.000	1.526.018.904	86,39	87,25	88,11	88,97					1.201.945.875	0,00	78,76
1.01.04.2.01.0001	1	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	3	3	1.516.868.904	970.000.000	1.516.868.904	1	1	1	0	0	0	0	3	1.193.380.875	100,00	78,67
1.01.04.2.01.0002	2	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2	2	9.150.000	15.000.000	9.150.000	1	1	1	-1	0	0	0	2	8.565.000	100,00	93,61
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN		80,00	80,00	2.104.070.000	2.128.000.000	2.104.070.000				80,00				80,00	1.919.820.954	100,00	91,24
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN		80,00	80,00	1.259.730.000	1.310.000.000	1.259.730.000				80,00				80,00	1.236.051.116	100,00	98,12
2.22.02.2.01	1	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1	1	311.980.000	350.000.000	311.980.000	0	0	0	1	0	0	43	1	303.516.491	100,00	97,29

NO. REKENING	Urusan/PROGRAM / KEGIATAN / SUB.KEGIATAN	INDIKATOR (OUTPUT/OUTCOME)	TARGET 2025		PAGU 2025			Target Kinerja Triwulan (APBD)				Realisasi Kinerja (APBD)				REALISASI ANGGARAN s.d. TW IV (Rp)	CAPAIAN (%)		
			RKPD P	APBD	RKPD P	APBD	APBD P	I	II	III	IV	I	II	III	IV		KINERJA	ANGGARAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/5*100	19=17/8*100	
2.22.02.2.01.0001	1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	4	4	139.490.000	150.000.000	139.490.000	0	0	4	0	0	0	1	3	133.647.100	100,00	95,81
2.22.02.2.01.0002	2	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	60	60	172.490.000	200.000.000	172.490.000	0	0	60	0	0	0	42	18	169.869.391	100,00	98,48
2.22.02.2.02	2	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Event Kesenian (Dengan Satuan:Event)	4	4	947.750.000	960.000.000	947.750.000	0	0	4	0	0	0	2	2	932.534.625	100,00	98,39
2.22.02.2.02.0001	1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	4	4	947.750.000	960.000.000	947.750.000	0	0	4	0	0	0	2	2	932.534.625	100,00	98,39
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA		Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya di luar museum yang dilestarikan (Dengan Satuan:%)	80,00	80,00	181.380.000	200.000.000	181.380.000	0	0	1	80	0	0	0	80	177.733.868	100,00	97,99
2.22.05.2.01	1	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan Peringkat Kab/ Kota (Dengan Satuan:kegiatan)	1	1	92.130.000	100.000.000	92.130.000	0	0	1	0	0	0	0	1	90.869.100	100,00	98,63
2.22.05.2.01.0002	1	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	2	2	92.130.000	100.000.000	92.130.000	0	0	2	0	0	0	0	2	90.869.100	100,00	98,63
2.22.05.2.02	2	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Terkelolanya Cagar Budaya Peringkat Kabupaten /Kota (Dengan Satuan:kegiatan)	1	1	89.250.000	100.000.000	89.250.000	0	0	0	1	0	0	0	1	86.864.768	100,00	97,33
2.22.05.2.02.0001	1	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	1	1	89.250.000	100.000.000	89.250.000	0	0	1	0	0	0	0	1	86.864.768	100,00	97,33
2.22.05.2.02.0003	2	Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	0	0	0	N/A	-	0	0	2	0	0	0	0	0	-	0,00	0,00
2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN		Persentase Peningkatan Kunjungan Museum (Dengan Satuan:%)	80,00	80,00	662.960.000	618.000.000	662.960.000	0	0	0	80	0	0	0	80	506.035.970	100,00	76,33
2.22.06.2.01	1	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan dalam rangka Pengelolaan Museum Kabupaten /Kota (Dengan Satuan:kegiatan)	1	1	662.960.000	618.000.000	662.960.000	0	0	0	1	0	0	1	1	506.035.970	100,00	76,33
2.22.06.2.01.0001	1	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	4	4	191.466.000	191.466.000	191.466.000	0	0	4	0	0	0	0	4	66.489.470	100,00	34,73

NO. REKENING	Urusan/PROGRAM / KEGIATAN / SUB.KEGIATAN	INDIKATOR (OUTPUT/OUTCOME)	TARGET 2025		PAGU 2025			Target Kinerja Triwulan (APBD)				Realisasi Kinerja (APBD)				REALISASI ANGGARAN s.d. TW IV (Rp)	CAPAIAN (%)	
			RKPD P	APBD	RKPD P	APBD	APBD P	I	II	III	IV	I	II	III	IV		KINERJA	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/5*100	19=17/8*100
2.22.06.2.01.0002	2 Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	40	40	24.120.000	24.160.000	24.120.000	0	0	40	0	0	0	0	40	23.087.000	100,00	95,72
2.22.06.2.01.0003	3 Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	4	4	376.534.000	376.534.000	376.534.000	0	0	4	0	0	0	1	3	353.873.500	100,00	93,98
2.22.06.2.01.0004	4 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	3	3	70.840.000	25.840.000	70.840.000	0	0	3	0	0	0	0	3	62.586.000	100,00	88,35
	JUMLAH		194	194	826.697.275.835	812.673.780.088	832.956.428.835	113	113	113	194	113	160	113	193	795.507.258.382	108,62	95,50

LAMPIRAN 7 – Rencana Aksi Tahun 2025

Rencana Aksi Kinerja Sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025



LAMPIRAN 8 – Pohon Kinerja
Pohon Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak



LAMPIRAN 9 – Matrik LHE SAKIP
Matriks Tindak Lanjut Evaluasi LHE SAKIP



LAMPIRAN 10 – Cagar Budaya Di Kabupaten Demak

JUMLAH CAGAR BUDAYA YANG TERDATA DAN DILESTARIKAN
DI KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2025

No	Nama Cagar Budaya	Alamat	Jenis Cagar Budaya	Nomor Register	Surat Keputusan/ Bupati
1	Bangunan Kantor Dinas Pariwisata dan Museum Glagah Wangi	Jl. Sultan Fatah No. 53 Kelurahan Bintoro Kecamatan Demak	Bangunan	-	Ditetapkan sebagai Bangunan Cagar Budaya berdasarkan SK Bupati Demak No. 438/443 Tahun 2022
2	Situs Dudukan	Dukuh Krajan RT 03 RW 03 Desa Blerong Kecamatan Guntur	Situs	-	Ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya berdasarkan SK Bupati Demak No. 438/443 Tahun 2022
3	Bangunan Rumah Pelayanan Sosial (Bangunan Eks Kawedanan Demak)	Jl. Semboja RT 07 RW 06 Kelurahan Bintoro Kecamatan Demak	Bangunan	-	Ditetapkan sebagai Bangunan Cagar Budaya berdasarkan SK Bupati Demak No. 438/129 Tahun 2023
4	Makam Wali Depok	Dukuh Wedean Kidul RT 09 RW 01 Desa Kramat Kecamatan Dempet	Struktur	-	Ditetapkan sebagai Struktur Cagar Budaya berdasarkan SK Bupati Demak No. 438/317 Tahun 2023
5	Makam Ki Ageng Sholeh (R. Djoko Mojo)	Jl. Lingkar Demak Dukuh Blambangan Rt 03 Rw 06 Desa Kendaldoyong Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak	Struktur	-	Ditetapkan sebagai Bangunan Cagar Budaya berdasarkan SK Bupati Demak No. 438/717 Tahun 2024
6	Bangunan SD Negeri Bintoro 1 Kecamatan Demak	Jl. Pemuda No. 34 Petengan Selatan Kelurahan Bintoro Kecamatan Demak Kabupaten Demak	Bangunan	-	Ditetapkan sebagai Bangunan Cagar Budaya berdasarkan SK Bupati Demak No. 438/717 Tahun 2024

Sumber Data : Bidang Kebudayaan Dindikbud Kab. Demak

DAFTAR CAGAR BUDAYA KEBUDAYAAN
TERDAFTAR DI KEMENTERIAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2025

No	Kode	Nama Cagar Budaya	Kategori	Alamat
1	KB000335	Masjid Agung Demak	Bangunan	Demak
2	KB000387	Kompleks Makam Astana Gedhong Kenep, Glagah Wangi	Situs	Glagahwangi
3	KB000405	Pendopo Notobraton Kadilangu	Bangunan	Kadilangu

Sumber Data : Pusdatin 2025

KALENDER EVEN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DI KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2025



BerAKHLAK
Berakhlak Poligrafi Akhlakul Komunitas
Rahmatu Laili Rahmatul Kibarorah



Calender Of Event TAHUN 2026

February

17 Megengan & Kirab Budaya

April

7 Syawalan

28 Pisowanan

Mei

5 Pisowanan Balasan

7 Ziarah

15 Pembukaan Pasar Rakyat

22 Guyangan

25 Abon-Abon

26 Ancakan

26 Iring-Iringan Tumpeng Songo

27 Iring-Iringan Prajurit Patangpuluhan & Parade Budaya

Mei - Juni

5 - 8 Pasar Rakyat Grebeg Besar

Agustus

5 - 8 Demak Expo

22 Karnaval Kemerdekaan

29 Resepsi HUT RI

November

22 Pentas Duta Seni TMII



LAMPIRAN 11 – Profil Data Pendidikan Kabupaten Demak

terlampir



DAFTAR ISI

Contents

BAB I		1
PENDAHULUAN		1
A.	LATAR BELAKANG	1
B.	LANDASAN HUKUM	1
C.	MAKSUD DAN TUJUAN	2
D.	TUGAS POKOK DAN FUNGSI	4
1.	Kepala Dinas	9
2.	Sekretariat	10
3.	Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK)	15
4.	Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Nonformal (PNF)	18
5.	Bidang Pembinaan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	26
6.	Bidang Pembinaan Kebudayaan	36
7.	UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas)	45
8.	Satuan Pendidikan	49
9.	Kelompok Jabatan Fungsional	49
10.	Isu Strategis Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	49
11.	Anggaran Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	50
E.	SISTEMATIKA PENULISAN	51
Bab	I Pendahuluan	51
Bab	II Perencanaan Kinerja	51
Bab	III Akuntabilitas Kinerja	51
Bab	IV Penutup	53
BAB II		54
PERENCANAAN KINERJA		54
A.	Ringkasan Ikhtisar Perjanjian Kinerja	54
1.	Visi Kabupaten Demak	55
2.	Misi Kabupaten Demak	56
3.	Tujuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak	57
4.	Sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak	57
5.	Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	58
B.	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	60
1.	Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama	60
2.	Definisi Operasional Indikator Kinerja Utama	62
C.	PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025	67
3.	Perjanjian Kinerja (PK) Murni Tahun 2025	67



4.	Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2025	73
5.	Dukungan Program dan Anggaran Indikator Kinerja Utama	79
BAB III 82		
AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2025		82
A.	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA	84
1.	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025	84
2.	Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun ini dan Tahun yang Lalu	87
3.	Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah	88
4.	Capaian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025	115
❖	URUSAN SETIAP OPD	115
MISI 1 : “Memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, serta kehidupan bermasyarakat yang agamis, kondusif dan berbudaya”.		115
TUJUAN 1 : “Meningkatkan pelayanan publik Dindikbud”.		115
Laporan Inovasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak		123
TUJUAN 2 : “Meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur”.		137
❖	URUSAN PENDIDIKAN	145
MISI 2 : “Meningkatkan sumber daya manusia, sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkualitas dan berdaya saing”.		145
TUJUAN 3 : “Meningkatkan partisipasi pendidikan pada jenjang PAUD, Pendidikan dasar, dan pendidikan non formal”.		145
❖	CAPAIAN PROGRAM PENDIDIKAN	172
❖	URUSAN KEBUDAYAAN	200
MISI 3 : “Mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal, membuka lapangan kerja, mengurangi kemiskinan dan pengangguran”.		200
TUJUAN 4 : “Meningkatkan pelestarian Warisan Budaya”		200
5.	Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional	202
6.	Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	202
7.	Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	205
B.	REALISASI ANGGARAN (AKUNTABILITAS KEUANGAN)	223
1.	Target Pendapatan	223
2.	Pelaksanaan APBD Tahun 2025	226
C.	EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA	243
BAB IV 248		
PENUTUP 248		
A.	TINJAUAN UMUM CAPAIAN KINERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN DEMAK	248
B.	STRATEGI UNTUK PENINGKATAN KINERJA DI MASA MENDATANG	252
LAMPIRAN 1 - Perjanjian Kinerja Tahun 2025		257

Perjanjian Kinerja Tahun 2025	257
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025	260
LAMPIRAN 2 – Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2025	263
LAMPIRAN 3 – Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) 2025	269
LAMPIRAN 4 – Hasil Pengukuran Kinerja Urusan Pendidikan Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2023- 2026 270	
LAMPIRAN 5 – Prestasi dan Penghargaan	272
LAMPIRAN 6 – Pelaksanaan APBD Tahun 2025	275
LAMPIRAN 7 – Rencana Aksi Tahun 2025.....	293
LAMPIRAN 8 – Pohon Kinerja	294
LAMPIRAN 9 – Matrik LHE SAKIP	295
LAMPIRAN 10 – Cagar Budaya Di Kabupaten Demak	296
DAFTAR ISI	299

